



RKPD

(Rencana Kerja
Pemerintah
Daerah)

Provinsi Papua Tahun 2019



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Papua 2018



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Papua yang tematik, integrative, holistic dan spasial, maka disusun rencana kerja pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
11. Rencana Strategis SKPD selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pemerintah Tahunan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyusunan RKPD;
- b. perubahan RKPD; dan
- c. pengendalian dan evaluasi RKPD.

Bagian Kedua
Penyusunan RKPD
Pasal 3

- (1) RKPD Provinsi Papua sebagai penjabaran dari RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, sebagai berikut :
 - a. penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023;
 - b. persiapan penyusunan RKPD;
 - c. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - d. penyusunan rancangan RKPD;
 - e. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
 - f. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - g. penetapan RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019 dalam RPJPD, RPJMD, rencana kerja pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
- (4) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Pasal 4

- (1) RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (3) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD dan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025.
- (4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (5) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarnya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 5

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melaksanakan RKPD.
(2) RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Bagian Ketiga Perubahan RKPD Pasal 6

- (1) RKPD Provinsi Papua dapat diubah dalam hal terjadi :
- perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun ditingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD dan RPJPD;
 - penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD dan RPJPD; dan
 - terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD dan RPJPD.
- (2) Perubahan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menyusun perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019.

Bagian Keempat Pengendalian dan Evaluasi RKPD Pasal 7

- (1) Gubernur melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Papua.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- pengendalian kebijakan;
 - pengendalian pelaksanaan; dan
 - evaluasi hasil.

Pasal 8

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, untuk menjamin bahwa RKPD Provinsi Papua telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan program strategi nasional.

- (2) Berpedoman pada RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 dan program strategi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penyalarsan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah provinsi dengan tema "mengacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah".
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Provinsi Papua.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD Provinsi Papua telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019.

Pasal 10

Evaluasi hasil RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2019.

Pasal 11

Tahapan dan tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Papua.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD.
- (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

**BAB IV
PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Juli 2018

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 25 Juli 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



**ABNER KEHEK, SH., M.Hum
NIP. 19750421 200112 1 006**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 merupakan dokumen wajib yang dipersyaratkan untuk dibuat sebagai dasar pelaksanaan satu tahun rencana pembangunan.

Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada pasal 12 ayat 3 bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, oleh karena RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 merupakan masa transisi, maka perumusannya menjadi mengacu pada RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, dan RKP 2019.

Dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Dan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD 2019 disusun dengan tahapan : (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan Musrenbang; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.

RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 kali ini adalah RKPD yang sangat strategis karena merupakan RKPD tahap pertama untuk masa pembangunan RPJPD di tahap ke-III. Untuk itu Dokumen RKPD tahun 2019 ini menjadi *moment* yang sangat penting sebagai pondasi yang kuat dan mantap untuk melaksanakan pembangunan lima tahun periode mendatang.

Agar dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 ini dijadikan sebagai arahan dan acuan bagi semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RAPBD T.A. 2019 Provinsi Papua. Harapannya dokumen ini dapat bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi Papua di masa mendatang.

Jayapura, 2018

Plt. GUBERNUR PAPUA

TTD

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | vii |
| Daftar Gambar | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | 6 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | 8 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | 10 |
| 1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 2019..... | 10 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | 12 |
| 2.1. Kondisi Umum Daerah..... | 12 |
| 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi | 12 |
| 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... | 12 |
| 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah | 28 |
| 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana | 30 |
| 2.1.1.4. Demografi..... | 31 |
| 2.1.1.5. Ketenagakerjaan | 36 |
| 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... | 38 |
| 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi | 39 |
| 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial..... | 45 |
| 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum | 47 |
| 2.1.3.1. Pendidikan..... | 47 |
| 2.1.3.2. Kesehatan | 54 |
| 2.1.3.3. Sosial Dan Budaya | 62 |
| 2.1.3.4. Pariwisata..... | 63 |
| 2.1.3.5. Pembangunan Gender | 65 |
| 2.1.3.6. Kepemudaan dan Olah Raga | 67 |
| 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah | 71 |
| 2.1.4.1. Infrastruktur Wilayah..... | 76 |
| 2.1.4.1.1. Panjang Jalan Dan Jembatan.... | 76 |
| 2.1.4.1.2. Aksesibilitas daerah..... | 79 |
| 2.1.4.1.3. Sanitasi..... | 80 |
| 2.1.4.1.4. Tata Ruang..... | 81 |
| 2.1.4.2. Investasi | 88 |
| 2.1.4.3. Sumber Daya Manusia | 89 |
| 2.1.4.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Dan Desa..... | 91 |
| 2.1.4.3.2. Rasio Ketergantungan | 92 |

| | |
|---|-----|
| 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD | |
| Sampai Tahun Berjalan | 93 |
| 2.2.1. Urusan Pendidikan | 100 |
| 2.2.1.1. Dinas Pendidikan | 100 |
| 2.2.2. Urusan Kesehatan | 101 |
| 2.2.2.1. Dinas Kesehatan | 101 |
| 2.2.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura | 102 |
| 2.2.2.3. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura | 103 |
| 2.2.2.4. Rumah Sakit Jiwa | 105 |
| 2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum..... | 106 |
| 2.2.3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... | 106 |
| 2.2.4. Urusan Perumahan..... | 108 |
| 2.2.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan..... | 108 |
| 2.2.5. Urusan Perencanaan Pembangunan..... | 109 |
| 2.2.5.1. Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri..... | 109 |
| 2.2.5.2. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan | 110 |
| 2.2.5.3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 111 |
| 2.2.5.4. Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua | 113 |
| 2.2.6. Perhubungan | 114 |
| 2.2.6.1. Dinas Perhubungan | 114 |
| 2.2.7. Urusan Lingkungan Hidup | 115 |
| 2.2.7.1. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup..... | 115 |
| 2.2.8. Urusan Sosial | 116 |
| 2.2.8.1. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil..... | 116 |
| 2.2.9. Urusan Pemberdayaan Perempuan..... | 118 |
| 2.2.9.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 118 |
| 2.2.10. Urusan Tenaga Kerja..... | 119 |
| 2.2.10.1. Dinas Tenaga Kerja | 119 |
| 2.2.11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 121 |
| 2.2.11.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 121 |
| 2.2.12. Urusan Penanaman Modal | 122 |
| 2.2.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 122 |
| 2.2.13. Urusan Kebudayaan | 123 |
| 2.2.13.1. Dinas Kebudayaan | 123 |
| 2.2.14. Urusan Pemuda dan Olahraga | 125 |
| 2.2.14.1. Dinas Olah Raga dan Pemuda | 125 |

| | |
|--|-----|
| 2.2.15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri..... | 126 |
| 2.2.15.1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | 126 |
| 2.2.15.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... | 127 |
| 2.2.15.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 128 |
| 2.2.16. Urusan Pemerintahan Umum | 130 |
| 2.2.16.1. Sekretariat Daerah..... | 130 |
| 2.2.16.2. Biro Tata Pemerintahan | 131 |
| 2.2.16.3. Biro Hukum | 132 |
| 2.2.16.4. Biro Organisasi | 133 |
| 2.2.16.5. Biro Umum..... | 134 |
| 2.2.16.6. Inspektorat..... | 135 |
| 2.2.16.7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah..... | 136 |
| 2.2.16.8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 138 |
| 2.2.16.9. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa | 139 |
| 2.2.16.11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua | 141 |
| 2.2.16.12. Sekretariat Majelis Rakyat Papua..... | 142 |
| 2.2.16.13. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 143 |
| 2.2.16.14. Badan Penelitian dan Pengembangan .. | 144 |
| 2.2.16.15. Biro Otonomi Khusus | 145 |
| 2.2.16.17. Badan Penghubung Daerah | 146 |
| 2.2.17. Urusan Kepegawaian..... | 148 |
| 2.2.17.1. Badan Pendidikan dan Pelatihan..... | 148 |
| 2.2.17.2. Balai Latihan Kerja..... | 149 |
| 2.2.18. Urusan Kearsipan | 150 |
| 2.2.18.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.... | 150 |
| 2.2.19. Urusan Komunikasi dan Informatika | 152 |
| 2.2.19.1. Dinas Komunikasi dan Informatika | 152 |
| 2.2.20. Urusan Pertanian..... | 153 |
| 2.2.20.1. Dinas Ketahanan Pangan | 153 |
| 2.2.20.2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 155 |
| 2.2.20.3. Dinas Perkebunan | 156 |
| 2.2.20.4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 157 |
| 2.2.21. Urusan Kehutanan | 159 |
| 2.2.21.1. Dinas Kehutanan | 159 |
| 2.2.22. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral | 161 |
| 2.2.22.1. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral ... | 161 |
| 2.2.23. Urusan Pariwisata..... | 163 |
| 2.2.23.1. Dinas Pariwisata | 163 |
| 2.2.24. Urusan Kelautan dan Perikanan | 164 |
| 2.2.24.1. Dinas Kelautan dan Perikanan | 164 |
| 2.2.25. Perindustrian dan Perdagangan | 167 |
| 2.2.25.1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 167 |

| | |
|--|-----|
| 2.2.25. Perindustrian dan Perdagangan | 168 |
| 2.2.25.1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 168 |
| 2.3. Otonomi Khusus Provinsi Papua | 169 |
| 2.3.1. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua | 169 |
| 2.3.2. Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2016 dan 2017 | 173 |
| 2.3.2.1. Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi 80 : 20 Persen | 173 |
| 2.3.2.2. Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Urusan Bersama | 182 |
| 2.4. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 184 |
| 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah | 186 |
| 2.5.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah | 186 |
| 2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah | 190 |

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

| | |
|---|------------|
| DAERAH..... | 194 |
| 3.1. Kerangka Ekonomi Daerah | 194 |
| 3.1.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua..... | 195 |
| 3.1.1.1. Pertumbuhan Sektoral Dan Struktur Ekonomi | 195 |
| 3.1.1.2. Kesempatan Kerja | 202 |
| 3.1.1.3. Perkembangan Inflasi dan Tingkat Kemahalan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 | 204 |
| 3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Wilayah Tahun 2018 dan 2019 | 206 |
| 3.1.2.1. Eksternalitas Ekonomi | 206 |
| 3.1.2.2. Perekonomian Domestik..... | 208 |
| 3.1.2.3. Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2019 | 210 |
| 3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2019 | 217 |
| 3.2. Kerangka Keuangan Daerah | 220 |
| 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... | 220 |
| 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... | 228 |
| 3.2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana PAD dan Transfer | 228 |
| 3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus | 235 |
| 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah | 239 |

| | |
|---|----------------|
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ... | 243 |
| 4.1. Tema Pembangunan..... | 243 |
| 4.1.1 Dasar penentuan Tema RKPD Tahun 2019..... | 244 |
| 4.1.2 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua..... | 251 |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... | 266 |
| 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 | 271 |
| 4.3.1. RKPD Tahun 2019 sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019..... | 271 |
| 4.3.2. RKPD Tahun 2019 sebagai Bagian Integral dari RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 | 272 |
| 4.3.3. RKPD Tahun 2019 sebagai Bagian Integral dari RKP Tahun 2019..... | 273 |
| 4.3.Prioritas RKPD Tahun 2019 | 277 |
| 4.4. Arah Pembangunan Wilayah | 282 |
| 4.4.1. Arah Pengembangan Wilayah Adat Mamta/Tabi.... | 284 |
| 4.4.2. Arah Pengembangan Wilayah Adat Saereri..... | 286 |
| 4.4.3. Arah Pengembangan Wilayah Adat Meepago | 287 |
| 4.4.4. Arah Pengembangan Wilayah Adat Lapago | 289 |
| 4.4.5. Arah Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha | 291 |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | 293 |
| 5.1. Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Anggarannya | 294 |
| 5.2. Program Prioritas Beserta Pagu Anggarannya | 296 |
| 5.3. Kegiatan Prioritas Beserta Pagu Anggarannya | 300 |
| BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | 301 |
| 6.1. Indikator Kinerja Utama | 301 |
| 6.2. Indikator Kinerja Kunci | 302 |
| 6.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... | 302 |
| 6.2.2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar..... | 315 |
| 6.2.3. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pilihan | 324 |
| 6.2.4. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan..... | 328 |
| BAB VII P E N U T U P..... | 340 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 2.1. | Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung Di Provinsi Papua | 12 |
| Tabel 2.2. | Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai Di Provinsi Papua | 13 |
| Tabel 2.3. | Kelerengan Provinsi Papua | 14 |
| Tabel 2.4. | Ketinggian Tempat Provinsi Papua..... | 15 |
| Tabel 2.5. | Potensi Mineral Logam dan Non Logam di Provinsi Papua .. | 17 |
| Tabel 2.6. | Luas Hutan Lindung di Provinsi Papua | 27 |
| Tabel 2.7. | Pulau-pulau Kecil pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.. | 29 |
| Tabel 2.8. | Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar di Provinsi Papua..... | 30 |
| Tabel 2.9. | Hasil Identifikasi Bahaya Menurut Pembagian Wilayah Di Provinsi Papua | 31 |
| Tabel 2.10. | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016..... | 33 |
| Tabel 2.11. | Indikator-Indikator Tenaga Kerja Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 | 37 |
| Tabel 2.12. | Ketimpangan Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/ Kota Dan Rata-rata Menurut Kawasan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 | 44 |
| Tabel 2.13. | Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017 | 45 |
| Tabel 2.14. | IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 .. | 46 |
| Tabel 2.15. | Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 | 48 |
| Tabel 2.16. | Jumlah Guru Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016..... | 48 |
| Tabel 2.17. | Jumlah Murid Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016..... | 49 |
| Tabel 2.18. | Angka Partisipasi Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 | 51 |
| Tabel 2.19. | Angka Partisipasi Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2017 | 52 |
| Tabel 2.20. | Perkembangan HIV/AIDS Di Indonesia dan 10 Provinsi Yang Terbanyak Melaporkan HIV/AIDS Sampai Dengan Tahun 2014 | 55 |

| | |
|---|----|
| Tabel 2.21. Kunjungan Neonatus Dan Pelayanan Kesehatan Bayi Di Provinsi Papua DanPerbandingannya Dengan Indonesia Tahun 2010-2014 | 59 |
| Tabel 2.22. Perkembangan Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Di Provinsi Papua Tahun 2014-2016..... | 61 |
| Tabel 2.23. Perkembangan Penduduk Menurut Agama Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016..... | 62 |
| Tabel 2.24. Perkembangan Tempat Beribadah Dirinci Menurut Agama Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016..... | 63 |
| Tabel 2.25. Jumlah Penduduk Papua Menurut Kelompok Generasi Tahun 2016 | 67 |
| Tabel 2.26. Pembangunan Olahraga Di Provinsi Papua Tahun 2013-2015 | 69 |
| Tabel 2.27. Peringkat Provinsi Papua Dalam Pekan Olah Raga Nasional Periode 1973-2016 | 69 |
| Tabel 2.28. Perolehan Medali Kontingen Provinsi Papua Pada PON XIX Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016..... | 70 |
| Tabel 2.29. Produksi Perikanan menurut Sub Sektor Perikanan Provinsi Papua Tahun 2011-2014 | 71 |
| Tabel 2.30. Gambaran Keadaan Pertanian di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 | 72 |
| Tabel 2.31. Kawasan Hutan sesuai Fungsinya di Provinsi Papua..... | 73 |
| Tabel 2.32. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Papua Tahun 2013 – 2016 | 74 |
| Tabel 2.33. Gambaran Keadaan Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Di Provinsi Papua Tahun 2016..... | 74 |
| Tabel 2.34. Panjang Jalan Di Provinsi Papua Menurut Permukaan Dan Kondisi Jalan Tahun 2014 - 2016 | 76 |
| Tabel 2.35. Panjang Jalan Dan Jembatan Trans Papua Tahun 2015 | 78 |
| Tabel 2.36. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang | 79 |
| Tabel 2.37. Kawasan Budidaya..... | 83 |
| Tabel 2.38. Kawasan Lindung | 85 |
| Tabel 2.39. Persentase peningkatan nilai Investasi PMA Provinsi Papua Tahun 2014-2016 | 88 |
| Tabel 2.40. Tingka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun 2016..... | 90 |
| Tabel 2.41. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2013 - 2017 | 91 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.42. Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja ... | 93 |
| Tabel 2.43. Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik Pelaksanaan Program Menurut Urusan Tahun 2016-2017..... | 94 |
| Tabel 2.44. Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik Pelaksanaan Program Menurut OPD Tahun 2016-2017 | 96 |
| Tabel 2.45. Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik Pelaksanaan Program Menurut Program Rutin Tahun 2016-2017 | 98 |
| Tabel 2.46. Capaian Kinerja Program Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2016-2017 | 99 |
| Tabel 2.47. Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2016-2017 | 101 |
| Tabel 2.48. Capaian Kinerja Program Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Tahun 2016-2017..... | 102 |
| Tabel 2.49. Capaian Kinerja Program Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Tahun 2016-2017..... | 103 |
| Tabel 2.50. Capaian Kinerja Program Rumah Sakit Jiwa Tahun 2016-2017 | 104 |
| Tabel 2.51. Capaian Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2017 | 105 |
| Tabel 2.52. Capaian Kinerja Program Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2017 | 107 |
| Tabel 2.53. Capaian Kinerja Program Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016-2017..... | 108 |
| Tabel 2.54. Capaian Kinerja Program Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Tahun 2016-2017 | 109 |
| Tabel 2.55. Capaian Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2017 | 111 |
| Tabel 2.56. Capaian Kinerja Program Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Tahun 2016-2017 | 112 |
| Tabel 2.57. Capaian Kinerja Program Dinas Perhubungan Tahun 2016-2017 | 113 |
| Tabel 2.58. Capaian Kinerja Program Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2016-2017 | 114 |
| Tabel 2.59. Capaian Kinerja Program Dinas Sosial, Kependudukan..... | 116 |
| Tabel 2.60. Capaian Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2017 | 118 |
| Tabel 2.61. Capaian Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2017 | 119 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.62. Capaian Kinerja Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2017 | 120 |
| Tabel 2.63. Capaian Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2017..... | 121 |
| Tabel 2.64. Capaian Kinerja Program Dinas Kebudayaan Tahun 2016-2017 | 123 |
| Tabel 2.65. Capaian Kinerja Program Dinas Olah Raga dan Pemuda Tahun 2016-2017 | 124 |
| Tabel 2.66. Capaian Kinerja Program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2017 | 126 |
| Tabel 2.67. Capaian Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2017..... | 127 |
| Tabel 2.68. Capaian Kinerja Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2017 | 128 |
| Tabel 2.69. Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah Tahun 2016-2017 | 129 |
| Tabel 2.70. Capaian Kinerja Program Biro Tata Pemerintahan Tahun 2016-2017 | 130 |
| Tabel 2.71. Capaian Kinerja Program Biro Hukum Tahun 2016-2017..... | 132 |
| Tabel 2.72. Capaian Kinerja Program Biro Hukum Tahun 2016-2017..... | 133 |
| Tabel 2.73. Capaian Kinerja Program Biro Umum Tahun 2016-201 | 133 |
| Tabel 2.74. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2016-2017 | 135 |
| Tabel 2.75. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2016-2017 | 136 |
| Tabel 2.76. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2017 | 137 |
| Tabel 2.77. Capaian Kinerja Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2016-2017 | 138 |
| Tabel 2.78. Capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2016-2017 | 139 |
| Tabel 2.79. Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2016-2017..... | 140 |
| Tabel 2.80. Capaian Kinerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tahun 2016-2017 | 141 |
| Tabel 2.81. Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016-2017..... | 142 |
| Tabel 2.82. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2017 | 144 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.83. Capaian Kinerja Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2017 | 145 |
| Tabel 2.84. Capaian Kinerja Program Badan Penghubung Daerah Tahun 2016-2017 | 146 |
| Tabel 2.85. Capaian Kinerja Program Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2016-2017..... | 147 |
| Tabel 2.86. Capaian Kinerja Program Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2017 | 148 |
| Tabel 2.87. Capaian Kinerja Program Balai Latihan Kerja Tahun 2016-2017 | 149 |
| Tabel 2.88. Capaian Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2016-2017 | 150 |
| Tabel 2.89. Capaian Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2016-2017 | 151 |
| Tabel 2.90. Capaian Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2017 | 152 |
| Tabel 2.91. Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2017 | 154 |
| Tabel 2.92. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2016-2017..... | 155 |
| Tabel 2.93. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2017 | 157 |
| Tabel 2.94. Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2016-2017..... | 159 |
| Tabel 2.95. Capaian Kinerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2016-2017 | 161 |
| Tabel 2.96. Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2016-2017 | 163 |
| Tabel 2.97. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2017 | 164 |
| Tabel 2.98. Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2017 | 166 |
| Tabel 2.99. Alokasi Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2015 | 171 |
| Tabel. 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Di Provinsi Papua Periode 2013 – 2017 (dalam %) | 195 |
| Tabel. 3.2. Kontribusi Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Periode 2013 – 2017 (dalam %)..... | 196 |
| Tabel. 3.3. Daya Saing Sektoral Berdasarkan Indeks LQ Rata-Rata 2011-2016 | 198 |
| Tabel. 3.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016 (dalam %)..... | 199 |

| | |
|--|-----|
| Tabel. 3.5. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (dalam %) | 199 |
| Tabel. 3.6. Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Tahun 2013 – 2016 | 202 |
| Tabel. 3.7. Target Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2019 | 216 |
| Tabel 3.8. Anggaran Dana dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2016 (dalam Rp.) | 222 |
| Tabel 3.9. Kinerja Pencapaian Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2016 (dalam %) | 224 |
| Tabel. 3.10. Target Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 – 2019 (dalam Rp.) | 226 |
| Tabel 3.11. Anggaran Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua tahun 2013-2016 (dalam Rp.) | 230 |
| Tabel. 3.12. Daya Serap Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2016 (dalam %) | 232 |
| Tabel. 3.13. Target Dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 - 2019 (dalam Rp.) | 233 |
| Tabel. 3.14. Proyeksi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2019 (dalam Rp.) | 236 |
| Tabel. 3.15. Proyeksi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2018 (dalam Rp.) | 238 |
| Tabel. 3.16. Target Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 – 2019 (dalam Rp.) | 240 |
| Tabel. 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 | 268 |
| Tabel 4.2. Prioritas Dan Fokus Pembangunan Tahun 2019 | 280 |
| Tabel 4.3. Keterkaitan Sasaran Dengan Prioritas, dan Target Kinerja Pembangunan Tahun 2019 | 281 |
| Tabel 5.1. Rencana Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 | 294 |
| Tabel 5.2. Rencana Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 Dirinci Menurut Urusan dan Bidang | 295 |
| Tabel 5.3. Rencana Pembiayaan Program-Program Prioritas Tahun 2019 Dirinci Menurut OPD | 297 |
| Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | 301 |
| Tabel 6.2. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Pendidikan Tahun 2019 | 302 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tabel 6.3. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Kesehatan Tahun 2019 | 304 |
| Tabel 6.4. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Tahun 2019 | 307 |
| Tabel 6.5. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun 2019..... | 308 |
| Tabel 6.6. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua Tahun 2019 | 311 |
| Tabel 6.7. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tahun 2019 | 313 |
| Tabel 6.8. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2019.... | 313 |
| Tabel 6.9. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Papua Tahun 2019 | 314 |
| Tabel 6.10. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Tahun 2019..... | 315 |
| Tabel 6.11. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tahun 2019..... | 316 |
| Tabel 6.12. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2019 | 317 |
| Tabel 6.13. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 | 318 |
| Tabel 6.14. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tahun 2019..... | 319 |
| Tabel 6.15. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun 2019..... | 319 |
| Tabel 6.16. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Papua Tahun 2019..... | 320 |
| Tabel 6.17. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Tahun 2019..... | 321 |
| Tabel 6.18. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tahun 2019 | 322 |
| Tabel 6.19. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2019 | 322 |
| Tabel 6.20. | Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2019 | 323 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 6.21. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 | 323 |
| Tabel 6.22. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Provinsi Papua Tahun 2019 | 324 |
| Tabel 6.23. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tahun 2019 | 324 |
| Tabel 6.24. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2019 | 325 |
| Tabel 6.25. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Papua Tahun 2019 | 326 |
| Tabel 6.26. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun 2019 | 326 |
| Tabel 6.27. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua Tahun 2019 | 327 |
| Tabel 6.28. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tahun 2019 | 328 |
| Tabel 6.29. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Tahun 2019... | 329 |
| Tabel 6.30. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Tahun 2019 | 329 |
| Tabel 6.31. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 | 330 |
| Tabel 6.32. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 | 330 |
| Tabel 6.33. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 | 331 |
| Tabel 6.34. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2019..... | 333 |
| Tabel 6.35. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua Tahun 2019..... | 334 |
| Tabel 6.36. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Biro Organisasi Provinsi Papua Tahun 2019 | 335 |
| Tabel 6.37. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Papua Tahun 2019 | 335 |
| Tabel 6.38. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua Tahun 2019..... | 336 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 6.39. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2019 | 336 |
| Tabel 6.40. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Biro Hukum Provinsi Papua Tahun 2019..... | 337 |
| Tabel 6.41. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 | 337 |
| Tabel 6.42. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua Tahun 2019 | 338 |
| Tabel 6.43. Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tahun 2019 | 339 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1. Kerangka Pikir Perumusan Substansi RKPD Provinsi Papua 2019 | 2 |
| Gambar 1.2. Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2019 | 5 |
| Gambar 1.3. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | 9 |
| Gambar 2.1. Stratigrafi Regional Pulau Papua | 16 |
| Gambar 2.2. Peta Angkutan Sungai..... | 22 |
| Gambar 2.3. Peta Angkutan Danau | 23 |
| Gambar 2.4. Peta Intensitas Curah Hujan..... | 24 |
| Gambar 2.5. Persentase Penggunaan Lahan di Provinsi Papua | 25 |
| Gambar 2.6. Peta Kawasan Hutan..... | 26 |
| Gambar 2.7. Peta Kawasan Konservasi..... | 26 |
| Gambar 2.8. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2016 | 32 |
| Gambar 2.9. Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2013–2017..... | 32 |
| Gambar 2.10. Proyeksi Bonus Demografi Di Provinsi Papua..... | 34 |
| Gambar 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex Di Provinsi Papua Tahun 2013 - 2017 | 35 |
| Gambar 2.12. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2017 | 35 |
| Gambar 2.13. Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2017 (jiwa/km ²)..... | 36 |
| Gambar 2.14. Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor Di Provinsi Papua Tahun 2010-2015..... | 38 |
| Gambar 2.15. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2013– 2017 | 39 |
| Gambar 2.16. Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Menurut Harga Konstan 2010 Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 | 41 |
| Gambar 2.17. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I - 2017 | 41 |
| Gambar 2.18. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2011-2016 | 42 |

| | |
|--|----|
| Gambar 2.19. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 | 43 |
| Gambar 2.20. Rasio Sekolah Dan Guru Terhadap Murid Menurut Jenjang Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 | 49 |
| Gambar 2.21. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2010-2016 | 50 |
| Gambar 2.22. Angka Kematian Ibu Dan Faktor-Faktor Penyebabnya Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017..... | 54 |
| Gambar 2.23. Angka Kematian Bayi Di Provinsi Papua Tahun 2013 - 2017 | 55 |
| Gambar 2.24. Angka Prevalensi HIV/AIDS Di Provinsi Papua Tahun 1987 – 2016 (per 100.000 penduduk) | 56 |
| Gambar 2.25. Angka Harapan Hidup Di Provinsi Papua Tahun 2012 – 2016 | 57 |
| Gambar 2.26. Cakupan Persalinan Di Tolong Tenaga Kesehatan Di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2011-2014..... | 58 |
| Gambar 2.27. Jumlah Puskesmas Dan Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016..... | 60 |
| Gambar 2.28. Rasio Dokter Dan Perawat Terhadap Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2014-2016..... | 61 |
| Gambar 2.29. Kunjungan Wisatawan Dan Lama Tinggal Wisatawan Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2014 | 63 |
| Gambar 2.30. Jumlah Hotel Dan Tingkat Okupansi Hotel Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2014 | 64 |
| Gambar 2.31. Kualitas Pendidikan Perempuan Dan Laki-Laki Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015..... | 65 |
| Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Gender Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2015 | 66 |
| Gambar 2.33. Jumlah Kasus KDRT Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015 | 66 |
| Gambar 2.34. Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor Provinsi Papua Tahun 2016 | 75 |
| Gambar 2.35. Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 (dalam Km)..... | 77 |
| Gambar 2.36. Peta Akses Air Minum Layak Dan Sanitasi Layak Di Provinsi Papua Tahun 2016..... | 81 |

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.37. Rencana Pola Ruang Provinsi Papua | 82 |
| Gambar 2.38. Peta Struktur Ruang | 87 |
| Gambar 2.39. Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2013-2017 | 92 |
| Gambar 2.40. Penerimaan Dana Otsus Periode 2013-2016..... | 168 |
| Gambar 2.41. Skema Sumber Dana Dan Pembagian Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2013-2017 | 169 |
| Gambar 3.1. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Periode 2013-2017 (dalam %) | 197 |
| Gambar 3.2. Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR Provinsi Papua Tahun 2012-2016 | 200 |
| Gambar 3.3. Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2011-2016 (Rp. Triliun) | 201 |
| Gambar 3.4. Perbandingan Neraca Perdagangan Luar Negeri Dan Antar Daerah Provinsi Papua Tahun 2011-2016 (Rp. Triliun)..... | 201 |
| Gambar 3.5. Produktifitas Dan Elastisitas Tenaga Kerja Di Provinsi Papua Tahun 2011-2016..... | 203 |
| Gambar 3.6. Tingkat Inflasi Bulanan Kota Jayapura dan Indonesia Periode Januari 2013 - Desember 2016..... | 204 |
| Gambar 3.7. Tingkat Inflasi Tahunan Kota Jayapura dan Indonesia Tahun 2014 – 2016 | 205 |
| Gambar 3.8. Indeks Kemahalan Kontruksi Di Provinsi Papua Tahun 2010 – 2017 | 206 |
| Gambar 3.9. Highlight Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah Percepatan Pembangunan Papua | 214 |
| Gambar 3.10. Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua Rata-Rata Selama Tahun 2013-2016 (dalam %) | 224 |
| Gambar 3.11. Struktur Belanja Daerah Provinsi Papua Rata-Rata Selama Tahun 2013-2016 (dalam %)..... | 231 |
| Gambar 4.1 Fokus Pembangunan Provinsi Papua tahun 2005-2025 | 270 |
| Gambar 4.2. Fokus Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Di Provinsi Papua Tahun 2019..... | 283 |
| Gambar 4.3. Pengembangan Wilayah Adat Mamta/Tabi di Provinsi Papua Tahun 2019 | 284 |
| Gambar 4.4. Pengembangan Wilayah Adat Saireri di Provinsi Papua Tahun 2019 | 286 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 4.5. Pengembangan Wilayah Adat Meepago di Provinsi Papua Tahun 2019 | 288 |
| Gambar 4.6. Pengembangan Wilayah Adat Lapago di Provinsi Papua Tahun 2019 | 289 |
| Gambar 4.7. Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha di Provinsi Papua Tahun 2019 | 291 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan *time horizon*, perencanaan pembangunan daerah tersebut terbagi atas 3 bagian, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk perencanaan dengan jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 tahun.

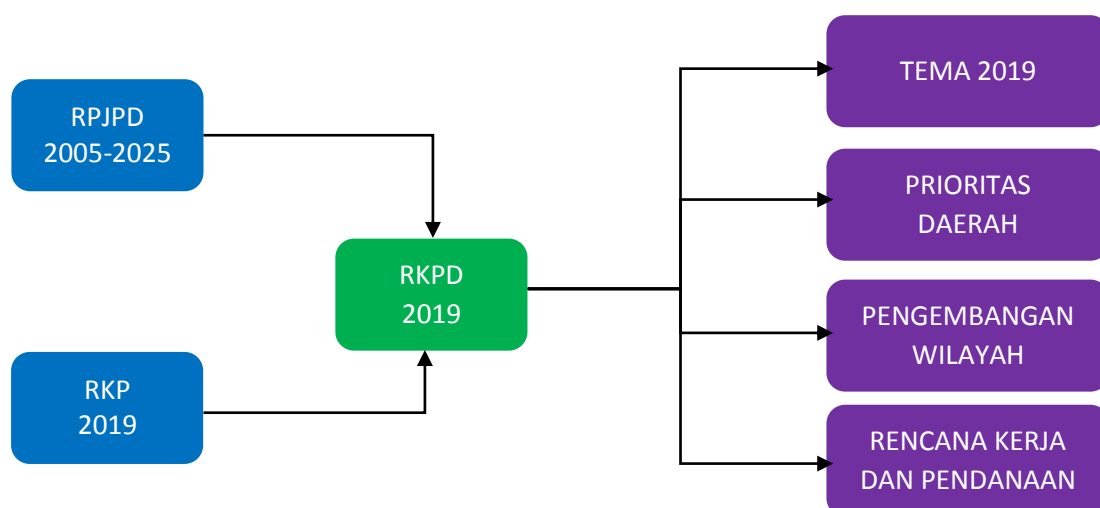
RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RKPD mengoperasionalkan Rencana Strategis lima tahunan menjadi Rencana Kerja tahunan dan merupakan aksi nyata bagaimana Visi dan Misi Kepala Daerah dan indikator kinerja daerah dicapai dari tahun ke tahun. Secara umum, RKPD tersebut merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran. Lebih lanjut, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud

dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan kondisi dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018 telah berakhir, maka sesuai dengan kaidah pelaksanaan dan transisi penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari perencanaan tahun pertama periode pembangunan tahun 2019-2023 mendatang dirumuskan dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, program prioritas nasional dalam RKP 2019, dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian, maka hirarki perumusan substansi dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1.
Kerangka Pikir Perumusan Substansi RKPD Provinsi Papua 2019



Dalam menyusun RKPD Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Sedangkan perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki

tugas untuk itu. Adapun perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Terakhir, untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2019, penyusunan RKPD 2019 juga diperkuat dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan memperhatikan pada beberapa hal yaitu :

1. Pengendalian perencanaan;
2. Perkuatan konsistensi perencanaan dan penganggaran untuk RKP dan RKPD 2019;
3. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
4. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Secara umum ada beberapa masalah internal dan eksternal yang terindikasi akan mempengaruhi kinerja pencapaian RKPD 2019. Untuk permasalahan internal antara lain : (1) belum berjalannya secara optimal perencanaan penganggaran dengan paradigma *money follow program* sebagai perubahan dari paradigma *money follow function*, (2) perencanaan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan konsep *planning by evidence* atau perencanaan berbasis bukti, sehingga isu-isu strategi yang disampaikan bisa jadi kurang berkualitas yaitu belum realistis dan relevan, (3) perencanaan penganggaran program/kegiatan masih mengedepankan pencapaian kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi), sehingga kurang memperhatikan target pencapaian prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan, (4) masih adanya pemahaman bagi rata dalam perencanaan penganggaran diantara berbagai tugas dan fungsi SKPD, (5) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan SKPD dalam merumuskan dan menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan, (6) adanya inefisiensi akibat terjadinya duplikasi kegiatan untuk kapasitas dan tanggung jawab SKPD yang berbeda, dan (7) tindak lanjut dari hasil evaluasi RPKD tahun lalu belum diakomodir sepenuhnya dalam penyusunan perencanaan penganggaran untuk RKPD berikutnya.

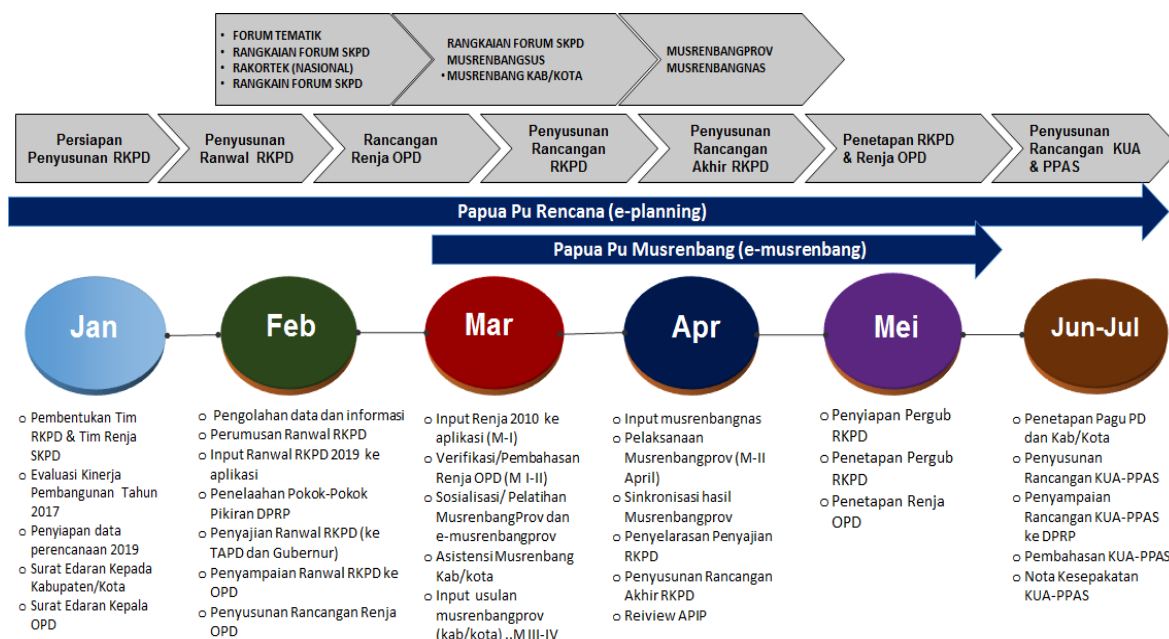
Sementara faktor-faktor eksternal berupa tantangan yang sangat krusial dan perlu segera diatasi agar target pencapaian kinerja pembangunan daerah di tahun 2019 dapat diwujudkan antara lain : (1) pada aspek sosial seperti rendahnya derajat kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat, rata-rata lama sekolah yang belum dapat memenuhi target wajib belajar sembilan tahun, masih tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak, dinamika kemajuan IT (Informasi dan Teknologi) yang sangat pesat yang dapat merusak akhlak dan moral anak bangsa, (2) pada aspek ekonomi misalkan pondasi perekonomian yang masih bertumpu pada satu sektor (pertambangan nonmigas) oleh karena belum optimalnya keberpihakan terhadap pengembangan dan pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti pertanian dan agroindustri, disparitas perekonomian wilayah yang masih tinggi, daya saing perekonomian wilayah yang rendah, upaya mengubah orientasi ekonomi dari *subsistence* menjadi lebih produktif belum terlaksana dengan baik, arus globalisasi ekonomi yang sulit dibendung.

Guna mengatasi berbagai masalah di atas, salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target RKPD 2019 secara maksimal adalah melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis IT (Informasi dan Teknologi) dengan menggunakan aplikasi *e-government* yang terdiri atas *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-musrenbang*. Dengan aplikasi *e-government* tersebut, diharapkan RKPD yang dihasilkan lebih berkualitas sebagai dokumen yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di tahun 2019. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
4. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD 2019 dilaksanakan dalam beberapa tahap, yang dapat dijabarkan dengan singkat sebagai berikut.

Gambar 1.2.
Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2019



a. Persiapan Penyusunan RKPD

- Pembentukan Tim RKPD & Tim Renja SKPD
- Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2017
- Penyiapan data perencanaan 2019
- Surat Edaran Kepada Kabupaten/Kota
- Surat Edaran Kepala SKPD

b. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD

- Pengolahan data dan informasi
- Perumusan Ranwal RKPD 2019
- Input Ranwal RKPD 2019 ke aplikasi
- Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRP
- Penyajian Ranwal RKPD (ke TAPD dan Gubernur)
- Penyampaian Ranwal RKPD ke SKPD
- Penyusunan Rancangan Renja SKPD

c. Penyusunan Rancangan Renja SKPD dan RKPD

- Input Renja 2019 ke aplikasi
- Verifikasi/Pembahasan Renja SKPD
- Sosialisasi Musrenbang Provinsi dan Pelatihan *e-musrenbangprov*
- Asistensi Musrenbang Kabupaten/kota

- Input usulan Musrenbangprov (kabupaten/kota)
- Input Musrenbangnas
- Pelaksanaan Musrenbangprov
- Sinkronisasi hasil Musrenbangprov
- Penyelarasan Penyajian RKPD
- Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

d. Penetapan RKPD dan Renja SKPD

- Penyiapan Pergub RKPD
- Penetapan Pergub RKPD
- Penetapan Renja SKPD

RKPD 2019 kali ini menjadi lebih strategis karena menjadi pintu pertama dari awal pembangunan lima tahunan di periode berikutnya, untuk itu pondasi yang dibangun melalui RKPD 2019 harus lebih mantap yang diwujudkan dengan perumusan prioritas daerah yang komprehensif dan holistik, yang dijabarkan secara integratif dan spasial, serta mengacu kepada berbagai isu strategis dan krusial untuk diatasi di tahun 2019, sehingga program-program prioritas yang ditetapkan menjadi lebih obyektif dan faktual.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
12. Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
13. Inpres Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 Di Provinsi Papua;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
18. Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25/2013 tentang tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
19. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

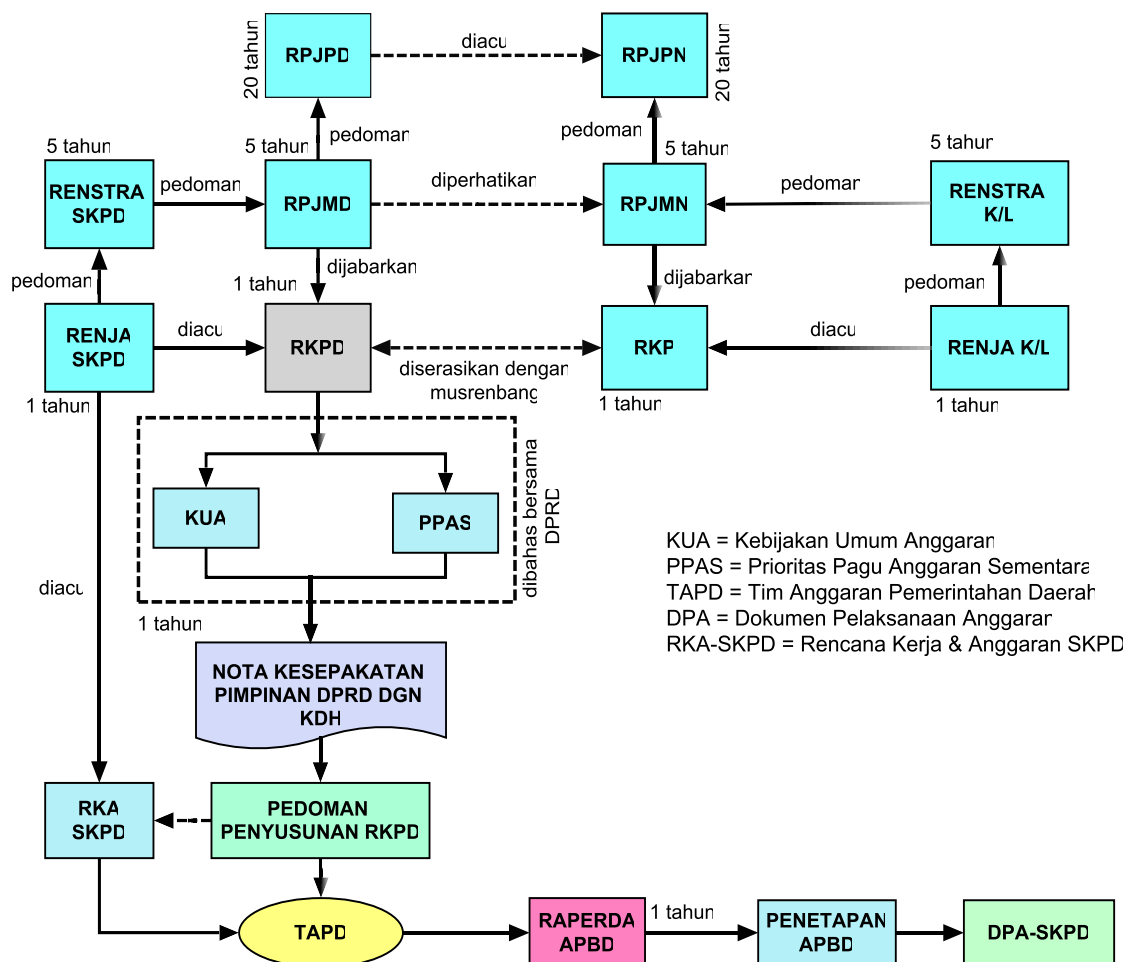
1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 selain disusun dengan mempedomani RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3.
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPd dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada Gambar 1.3 tersebut dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPd dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah: (1) RKPd disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas, (2) RKPd disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. (3) selanjutnya RKPd ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi SKPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPd tahun 2019, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Papua tahun 2019 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2019.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyusunan RKPd Provinsi Papua Tahun 2019 ini harus selaras dengan

dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga terjadi sinergisitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah : (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2019; (2). Menjadi landasan bagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam menyusun kebijakan umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019; (3). Menjadi acuan penyusunan RKPD tahun 2019 bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua; (4). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2019 meliputi :

Bab I Pendahuluan. Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Menjelaskan mengenai kondisi faktual daerah yang dijabarkan menjadi Kondisi Umum Daerah mencakup Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, serta dilengkapi dengan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, Pengelolaan Otonomi Khusus, dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah. Bab ini terdiri atas Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah. Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019.

Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah. Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup. Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2019 yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi merupakan gambaran kondisi yang mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

(a). Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Provinsi Papua 31.587.680 ha. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Samudra Pasifik
- b. Sebelah Selatan : Laut Arafuru
- c. Sebelah Barat : Papua Barat
- d. Sebelah Timur : Papua New Guinea

Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota yang masing-masing terbagi menjadi 470 distrik dan 4.378 kampung. Adapun rincian pembagian wilayah seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung
Di Provinsi Papua

| Wilayah Pembangunan | Kabupaten /Kota | Ibu Kota | Jumlah Distrik | Jumlah Kampung | Keterangan |
|---------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
| Haanim | Merauke | Merauke | 20 | 168 | Dataran Mudah Akses |
| | Asmat | Agats | 19 | 211 | Dataran Sulit Akses |
| | Boven Digoel | Tanah Merah | 20 | 112 | |
| | Mappi | Keppi | 15 | 162 | |
| Laapago | Jayawijaya | Wamena | 37 | 312 | Pegunungan Tengah |
| | Lanny Jaya | Tiom | 10 | 143 | |
| | Mamberamo Tengah | Kobakma | 5 | 59 | |
| | Nduga | Kenyam | 8 | 32 | |
| | Pegunungan Bintang | Oksibil | 34 | 277 | |
| | Puncak | Ilaga | 8 | 80 | |
| | Puncak Jaya | Mulia | 26 | 302 | |
| | Tolikara | Karubaga | 48 | 549 | |
| Yahukimo | Dekai | 51 | 518 | | |

| Wilayah Pembangunan | Kabupaten /Kota | Ibu Kota | Jumlah Distrik | Jumlah Kampung | Keterangan |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Yalimo | Elelim | 5 | 27 | |
| Meepago | Nabire | Nabira | 15 | 85 | Dataran Mudah Akses |
| | Mimika | Timika | 12 | 86 | Dataran Sulit Akses |
| | Deiyai | Waghete | 5 | 67 | Pegunungan Tengah |
| | Dogiyai | Kigamani | 10 | 79 | |
| | Intan Jaya | Sugapa | 6 | 78 | |
| | Paniai | Enarotali | 10 | 70 | |
| Saireri | Biak Numfor | Biak | 19 | 265 | Dataran Mudah Akses |
| | Kepulauan Yapen | Serui | 14 | 145 | |
| | Supiori | Sorendiwari | 5 | 38 | |
| | Waropen | Waren | 10 | 108 | Dataran Sulit Akses |
| Mamta | Jayapura | Sentani | 19 | 144 | Dataran Mudah Akses |
| | Keerom | Arso | 7 | 61 | |
| | Sarmi | Sarmi | 18 | 102 | |
| | Kota Jayapura | Jayapura | 5 | 39 | |
| | Mamberamo Raya | Burmeso | 9 | 59 | Dataran Sulit Akses |
| | | 29 Kab/Kota | | 254 | 2534 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2015 (diolah)

(b). Letak dan Kondisi Geografi

Posisi astronomis Provinsi Papua terletak antara garis koordinat 01⁰⁰' LU - 09¹⁰' LS dan 134⁰⁰' BT - 141⁰⁵' BT. Sedangkan secara geografis Wilayah Provinsi Papua dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dataran yaitu Dataran Mudah Akses, Dataran Sulit Akses dan Dataran Pegunungan. Wilayah Provinsi Papua juga merupakan kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan Australia yang berpotensi sebagai jalur pengembangan perekonomian Asia Pasifik.

Selain berupa daratan, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik. Keadaan ini membuat Papua sangat kaya akan potensi di bidang perikanan laut tangkap. Adapun luas wilayah laut sebesar 12.151,61 Km² dan panjang garis pantai sebesar 5.878,11 Km dan. Rincian luas wilayah laut dan panjang garis pantai di Provinsi Papua adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai Di Provinsi Papua

| No | Kabupaten/ Kota | Satuan | Luas Wilayah Laut | Satuan | Panjang Garis Pantai |
|----|-----------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|
| 1 | Merauke | km ² | 3.179,51 | km | 1.497,01 |
| 2 | Jayapura | km ² | 1,35 | km | 148,33 |
| 3 | Nabire | km ² | 234,97 | km | 641,16 |
| 4 | Kepulauan Yapen | km ² | 40,03 | km | 897,72 |
| 5 | Biak Numfor | km ² | 47,85 | km | 537,17 |

| No | Kabupaten/ Kota | Satuan | Luas Wilayah Laut | Satuan | Panjang Garis Pantai |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 6 | Mimika | km ² | 2.832,30 | km | 464,80 |
| 7 | Mappi | km ² | 582,14 | km | 151,47 |
| 8 | Asmat | km ² | 2.845,91 | km | 275,97 |
| 9 | Sarmi | km ² | 31,85 | km | 302,20 |
| 10 | Waropen | km ² | 666,69 | km | 222,58 |
| 11 | Supiori | km ² | 35,83 | km | 340,80 |
| 12 | Mamberamo Raya | km ² | 1.650,37 | km | 291,45 |
| Provinsi Papua | | km³ | 12.151,61 | km | 5.878,11 |

Sumber: BPS, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2008, Bakorsutanal, dan hasil pengukuran GIS Tahun 2009, Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

(c). Topografi

Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi papua adalah lereng landai (0 – 8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta dan Laapago. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Kelerengan Provinsi Papua

| Lereng % | Kategori | Luas | | Kabupaten |
|----------|---------------|-----------------|------|---|
| | | Km ² | % | |
| 0-8 | Landai | 14.518.478,84 | 45,9 | Merauke, Asmat, Mappi, Mamberamo Raya, Mimika |
| 8-15 | Agak Curam | 3.015.352,51 | 9,5 | Boven Digoel, Merauke, Mappi, Mamberamo Raya, Sarmi |
| 15-40 | Terjal | 406.596,40 | 1,3 | Sarmi, Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Nabire |
| 40> | Sangat Terjal | 13.708.119,14 | 43,3 | Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Yahukimo, Puncak Jaya, Nabire |

Sumber: Hasil analisis GIS RTRW Prov. Papua, 2010

Topografi dipengaruhi oleh faktor morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Sebagian besar morfologi wilayah Provinsi papua berupa daratan (43,4%) dan Daratan terdapat dibagian pesisir selatan, merupakan bagian yang luas, dan pesisir utara yang tersebar pada wilayah Haanim, Mamta, Saireri, Meepago dan Laapago. Gambaran kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Ketinggian Tempat Provinsi Papua

| Ketinggian (m dpal) | Kategori | Luas | | Kabupaten |
|------------------------|---------------|-----------------|------|--|
| | | Km ² | % | |
| < 100 | Sangat rendah | 16.897.806,02 | 53,3 | Merauke, Asmat, Mappi, Boven Diguel, Mamberamo Raya, sarmi, Biak numfor, Kepulauan yapen |
| 100 - 300 | Rendah | 4.346.846,28 | 13,7 | Mamberamo Raya, Jayapura, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang, Mimika, Nabire, Waropen |
| 300 - 500 | Menengah | 2.519.273,54 | 7,9 | Sarmi, Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Nabire, Waropen |
| 500- 1000 | Tinggi | 2.420.926,93 | 7,6 | Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Yahukimo, Tolikara, Nabire, Jayapura |
| 1000 - 3000 | Sangat Tinggi | 4.487.757,08 | 14,2 | Yahukimo, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Intan jaya, Mimika, paniai, Puncak |
| 3000 > | Ekstrim | 1.029.618,93 | 3,2 | Lanny Jaya, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Pegunungan Bintang |

Sumber: Hasil analisis GIS RTRW Prov. Papua, 2009

(d). Geologi

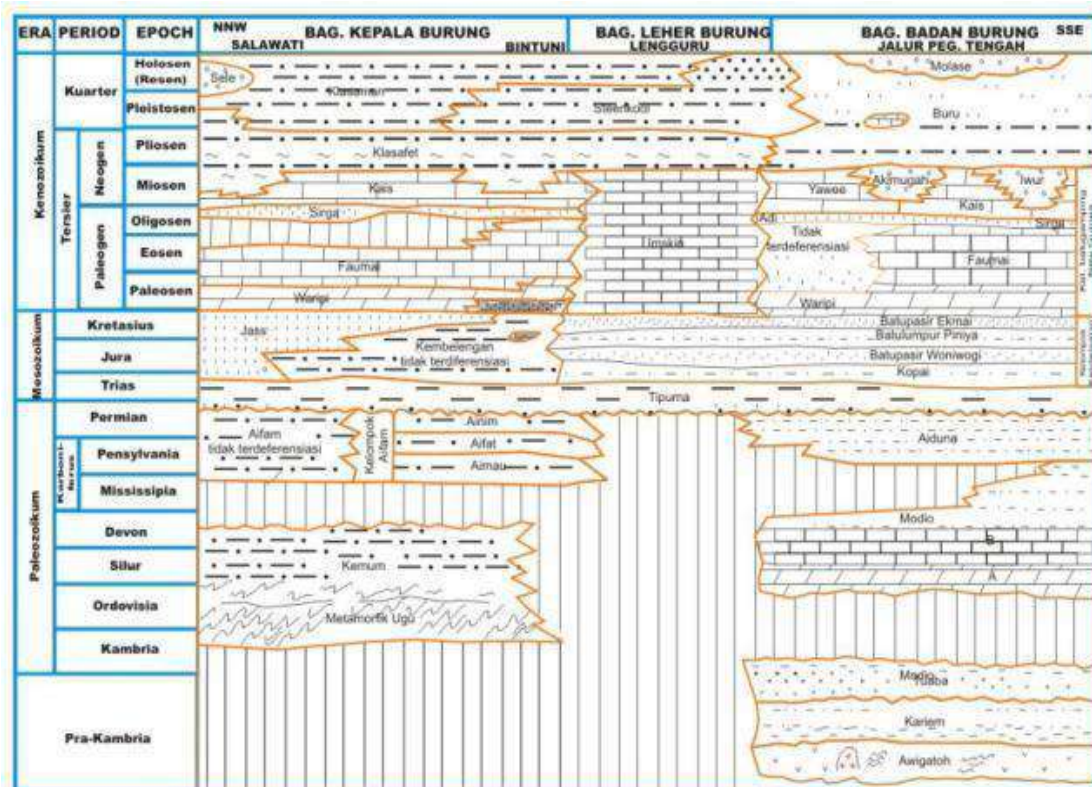
Dalam rencana spasial dan rencana pembangunan, komponen geologi merupakan komponen lingkungan fisik yang dapat bersifat sebagai faktor pendukung (potensi) pengembangan wilayah, berupa sumber daya geologi yang terkandung di dalam tanah, serta berbagai faktor penghambat (kendala) pengembangan wilayah, berupa kebencanaan.

Struktur dan karakteristik geologi Papua, terkondisi dalam 3 bagian, yaitu: **Kondisi Tektonik Regional**, berdasarkan bentuk pula yang menyerupai burung, maka Papua memiliki kondisi geologi yang unik. Hal ini terjadi akibat interaksi dua (2) lempeng, yaitu lempeng benua Australia dan lempeng samudera pasifik. **Kondisi Litotektonik**, kondisi pada bagian badan burung (wilayah Provinsi Papua) dapat dibedakan menjadi empat (4) litotektonik, yaitu : (1). New Guinea Foreland/Foreland Basin (Arafuru Platform) terdiri dari laut arafuru dan daratan pantai selatan Papua (Ha Anim) yang tersusun oleh sebagian besar batuan laut dan batuan sedimen, (2). Central Range Fold and Thrust Belt terdiri dari bentuk luar (morfologi) lipatan dan patahan pegunungan tengah (Lapago dan Meepago) yang tersusun oleh

batuan dari evolusi makhluk hidup yang berlangsung jutaan tahun, (3). Metamorphic (Ruffaer Matemorphic belt) dan Ophiolite Belt terdiri dari batuan sebagai akibat dari perubahan struktur batuan oleh pengaruh luar, seperti panas, dingin, basah, kering (Metamorfik) dengan suhu rendah (<300°C) yang terbatas dijumpai pada bagian sebelah utara (Mamta) dan disebelah selatan telah terdeformasi (Ha Anim), (4). Kompleks Busur Kepulauan Melanesia terdiri dari batuan oceanik yang berasal dari benturan (kolisi) busur kepulauan Melanesia dengan lempeng pasifik yang memiliki cekungan (dataran danau) sabuk patahan-lipatan Mamberamo yang dijumpai pada sebelah utara Papua (Mamta). **Kondisi Stratigrafi Regional**, merupakan tatanan urutan batuan di wilayah Papua yang secara umum didasarkan pada pembagian mandala geologi, yaitu benua, samudera dan transisi.

Sesuai dengan stratigrafi, maka struktur dan karakteristik geologi Papua dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Stratigrafi Regional Pulau Papua



Sumber : Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Pulau Papua terbentuk sejak jutaan tahun sebagai hasil benturan lempeng benua Australia dengan lempeng pasifik. Akibat benturan antara lempeng menimbulkan potensi yang menguntungkan dan merugikan, antara lain potensi menguntungkan seperti terjadinya penerobosan batuan beku dengan komposisi sedang kedalam batuan sedimen di atasnya, sehingga

memungkinkan terbentuknya mineralisasi logam yang beraosiasi dengan perak dan emas. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada lajur pegunungan tengah Papua (Laapago dan Meepago).

Posisi tektonik Papua berada di lingkaran pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral yang besar, sehingga menguntungkan bagi Provinsi Papua dan kemungkinan terdapat endapan logam selain Grasberg dan ertsberg yang telah ditemukan. Akibat tektonik lain juga memungkinkan terbentuk cekungan dengan sedimen-sedimen yang cukup tebal dalam kondisi lingkungan laut, yang cukup banyak kehidupan mikro organik yang terakumulasi menjadi cadangan hidrokarbon. Ada pun potensi mineral dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Potensi Mineral Logam dan Non Logam di Provinsi Papua

| No | Kabupaten/ Kota | Lokasi | Bahan Galian Mineral | Keterangan |
|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--|
| 1 | Kota Jayapura | S. Numbai, Kodam | Emas | Peninjauan Kanwil DPE (Positif) |
| | | S. Yapis, Kel. Imbi | Emas | Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi) |
| | | S. APO | Emas | Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi) |
| | | S. Entrop | Emas | Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi) |
| | | S. Perumnas IV | Emas | Peninjauan Kanwil DPE (Positif) |
| | | S. Borgonjje | Emas | Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi) |
| | | S. Kujabu, Waena | Emas | Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi) |
| | | 2 | Kab. Jayapura | Sentani |
| | Tungsten | | | Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi) |
| | Nikel | | | Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi) |
| | Asbes | | | Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi) |
| S. Kemiri | Emas | | | Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi) |
| Senatani | Emas | | | Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi) |
| S. Deyau, Sentani | Emas | | | Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi) |
| S. Sawe, Sentani | Emas | | | Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi) |
| S. Ayapo, Sentani | Emas | | | Peninjauan Kanwil DPE (Positif) |
| S. Tami | Krom | | | Kadar 3.45-42.52% |
| | | | | (Data Kanwil DPE) |
| Tg-Tanahmerah | Talk | | | Sebagai Lapisan Atau Lensa Dengan Tebal 1 Meter, |

| No | Kabupaten/ Kota | Lokasi | Bahan Galian Mineral | Keterangan |
|----|-----------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | Dijumpai Pada Batas Serpentin Dan Sekis Kristalin |
| | | Waris | Emas | Data Kanwil DPE |
| | | | Tembaga | Cu1284 Ppm |
| | | | Timah Hitam | Pb 3312 Ppm |
| | | Web | Emas | Anomali Geokimia |
| | | | Perak | |
| | | Arso | Krom | Indikasi |
| | | | Batubara | Indikasi |
| | | Depapre | Marmer | Data Kanwil DPE |
| | | Bonggo | Batubara | Indikasi |
| | | | | |
| | | Genyem, | Batubara | Kadar 4470 Kal/Gram, Belerang 5.6%, |
| | | Nimboran | | Abu 12.5%, Kelembaban 18.2% |
| p* | | | | Karbon Tertambat 27.3%, Zat Terbang 42.1% |
| | | Siduarsi | Nikel Laterit | Indikasi |
| | | S. Pis Dan S. Pas | Emas | Indikasi |
| | | Senggi | Tembaga | Anomali 669 Ppm |
| | | | Timah Hitam | Anomali 2482 Ppm |
| 3 | Jayawijaya | Kurulu | Pasir Kuarsa | Sumberdaya 387 Juta Metrik Ton, Kadar Sio 292.2-99.6% |
| | | | Batu Gamping | Kadar Cao 39.05-50.75% Dan Mgo 0.35-3.76% |
| | | Assolokobal | Pasir Kuarsa | Sumberdaya 21.594.200 Ton |
| | | | Batu Gamping | Cadangan 3.391.300 Ton |
| | | Asologaima | Batubara | Data Kanwil DPE (Indikasi) |
| | | Borme Utara | Emas | Anomali Geokimia (Indikasi) |
| | | Okbibab | Tungsten | Indikasi |
| | | Soba | Pb-Zn | Indikasi |
| | | | (Timbal-Seng) | Indikasi |
| | | Holuwon | Pb-Zn | Indikasi |
| | | | (Timbal-Seng) | Indikasi |
| | | Bokondini | Tembaga | Indikasi |
| | | | Emas | Indikasi |
| | | Tiom | Emas, Batugaram | Indikasi |

| No | Kabupaten/ Kota | Lokasi | Bahan Galian Mineral | Keterangan |
|----|------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | Mbua | Batubara | Indikasi |
| | | Nalca | Emas | Anomali Geokimia (Indikasi) |
| | | Dabera | Emas | Data PT Freeport Ind |
| | | | Tembaga | Indikasi |
| | | Aboyi | Emas | Indikasi |
| | | | Molibdenum | Indikasi |
| 4 | Nabire | Yaur (Kwatisore) | Pasir Kuarsa | Sumberdaya 4.095 Juta Ton |
| | | | Granit | Sumberdaya 125 Juta Ton |
| | | | Marmer | Penyebaran 16.25 Km2 |
| | | | | Sumberdaya 163 Juta Ton |
| | | | | Berwarna Abu-Abu Kehitaman, Kuat Tekan 942-100 Kg/Cm2 |
| | | | | Penyerapan Air 0.09-10, Berat Jenis 2.76-2.78 |
| | | Logari | Emas | Anomali Geokimia, Data PT IEMC |
| | | S. Sanoba, Nabire | Emas | Data Kanwil DPE (Positif) |
| | | S. Nabaruwa, Nabire | Emas | Data Kanwil DPE (Positif) |
| | | Nabaruwa, Nabire | Marmer | Sumberdaya 150 Juta Ton |
| | | Uwapa | Seng | Indikasi |
| | | | Kaolin | Sumberdaya 12 Juta Ton |
| | | S. Bumi, Topo | Emas | Data Kanwil DPE |
| | | S. Cemara, Topo | Emas | Data Kanwil DPE |
| | | Haiura | Emas | Anomali Geokimia |
| | | | Tembaga | Data PT IEMC |
| | | Wapoga | Emas | Anomali Geokimia |
| | | | | Data PT IEMC |
| 5 | Biak Numfor | Supiori | Emas | Data Kanwil DPE |
| | | | Batukapur | Indikasi |
| | | Korido | Kalsit | Berupa Bongkah Berukuran 15-20 Cm |
| | | Biak | Phosphat | Indikasi |
| | | | Pasir Besi | Indikasi |
| 6 | Kepulauan Yapen, | Waropen Bawah | Emas | Data Kanwil DPE |
| | Waropen | Waropen Atas | Batubara | Indikasi |
| | | Yapen | Pasir Besi | Indikasi |

| No | Kabupaten/ Kota | Lokasi | Bahan Galian Mineral | Keterangan |
|----|-----------------|----------------|----------------------|--|
| | | P. Num | Nikel | Indikasi |
| 7 | Merauke | Jair | Emas | Indikasi |
| | | | Perak | Indikasi |
| | | Mediptana | Tembaga | Kadar Cu 50.90 Ppm |
| | | | Timah Hitam | Kadar Pb 55.80 Ppm |
| | | | Seng | Kadar Zn 7.87 Ppm |
| | | Kuoh | Emas | Indikasi |
| 8 | Puncak Jaya | Obaa | Emas | Indikasi |
| | | | Perak | Indikasi |
| | | Ilu | Arsenit | Indikasi |
| | | | Tembaga | Nilai Anomali, Cu 1 6-60.6 Ppm, Pb 11.1-37.1 Ppm |
| | | Ilaga | Arsenit | Anomali Geokimia |
| | | | Tembaga | Data PT Freeport Ind |
| | | | Emas | PT NBM |
| | | | Perak | |
| 9 | Paniai | Enarotali | Pasir Kuarsa | |
| | | Bilogai (Wabu) | Emas | Cadangan Terindikasi |
| | | | Garnet | Data PT Freeport Ind |
| | | Mapia | Emas | Cadangan Terindikasi |
| | | | Tembaga | PT NBM |
| | | Kemabu | Tembaga | Anomali Geokimia |
| | | | Emas | Data PT Freeport Ind |
| | | Uwagimamo | Emas | Anomali Geokimia |
| | | | Tembaga | Data PT Freeport Ind |
| | | | Bismuth | |
| | | Mandoga | Tembaga | Anomali Geokimia |
| | | | Emas | Data PT Freeport Ind |
| | | Komopa | Tembaga | Cadangan Terindikasi |
| | | | Emas | PT NBM |
| 10 | Mimika | Tembagapura | Tembaga | Telah Diusahakan PT FI |
| | | | Perak | Kadar Cu 1.59%,Au 1.78 Ppm |
| | | | Emas | |

Sumber : Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

(e). Hidrologi

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat dalam segala bidang kehidupan, maka pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai, sedangkan pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

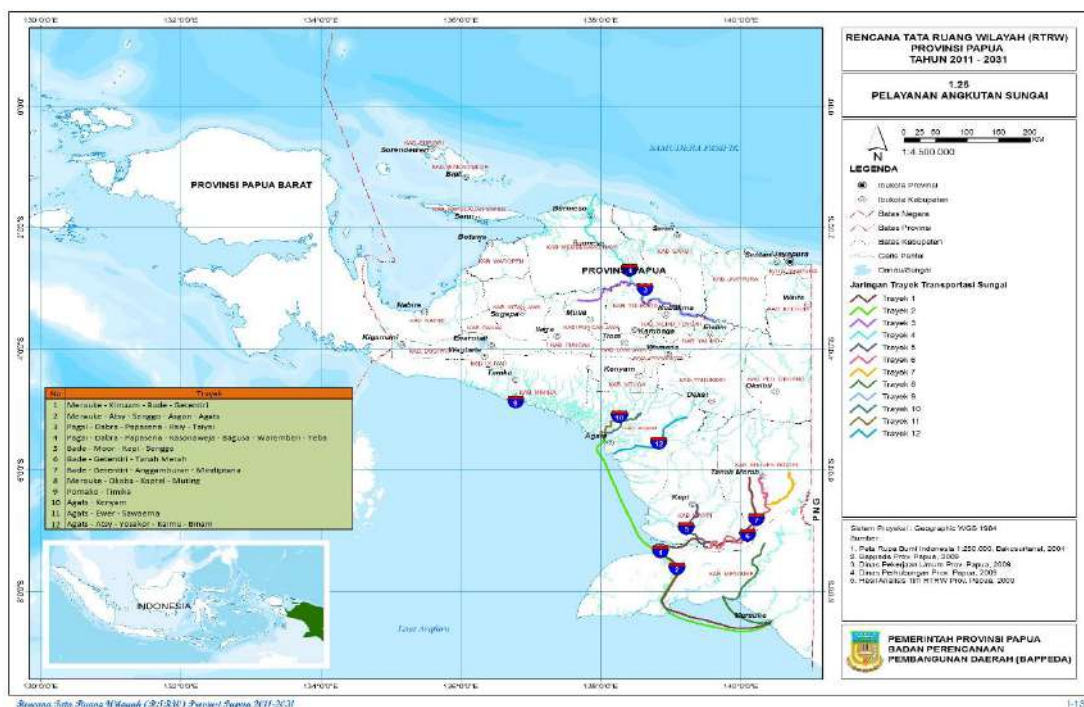
Pada pengelolaan air permukaan seperti, (1). wilayah sungai lintas negara (Provinsi Papua-Indonesia – PNG), sungai Mamberamo – Tami – Apauvar, sungai Einlanden – Digoel – Bikuma, (2). wilayah sungai lintas provinsi (Provinsi Papua – Provinsi Papua Barat) sungai Omba, (3). wilayah sungai lintas kabupaten/kota, sungai Wapoga – Mimika. Sedangkan pengelolaan air tanah atau lapisan air dibawah tanah (hidrogeologis) seperti, (1). Cekungan air tanah lintas negara (Provinsi Papua – Indonesia – PNG) yang terdiri dari CAT Jayapura, pada Kabupaten Jayapuran dan Keerom, CAT Timika – Merauke pada Kabupaten Mimika, Asmat, Mappi, Merauke, Boven Digoel, Yahukimo, Pegunungan Bintang, (2). Cekungan air tanah lintas provinsi (Provinsi Papua – Provinsi Papua Barat) yang terdiri dari CAT Kaimana pada Kabupaten Nabire, CAT Agamanan pada Kabupaten Mimika dan Nabire, (3). Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota yang terdiri dari CAT Warem Demta pada Kabupaten Nabire, Waropen, Sarmi dan Kabupaten Jayapura, CAT Taritatu pada Kabupaten Waropen, Sarmi, Kabupaten Jayapura, Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, Keerom, Pegunungan Bintang, CAT Enarotali pada Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Nabire, Mimika, Jayawijaya dan Yahukimo, CAT Wamena pada Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo, CAT Lereh Leweh pada Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura, CAT Ubrub pada Kabupaten Keerom dan Pegunungan Bintang, CAT Mandal pada Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yahukimo, CAT Nalco Bime pada Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yahukimo, (4). Cekungan air tanah dalam satu Kabupaten/Kota terdiri dari CAT Numfor, CAT Warsa pada Kabupaten Biak Numfor, CAT Urema, CAT Nabire, CAT Legare, Cat Ulawa pada Kabupaten Nabire, CAT Pom, CAT Ansus, CAT Serui, CAT Timur Samberbada pada Kabupaten Kepulauan Yapen, CAT Parekebo pada Kabupaten Mimika, CAT Hulu sungai Senggi, CAT timur Arso pada Kabupaten Keerom.

Daerah aliran sungai pada wilayah-wilayah pembangunan Papua, terbagi pada wilayah Mamta terdiri dari : Das Mamberamo, Gesa, Bigabu,

Sobger, Tariku, Nawa, Taritatu, Van Dalen, Tami, Sermo, Grimer, Sentani, pada Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya. Wilayah Haanim terdiri dari : Das Einlanden, Digoel, Maro, Kumber, Bulaka, Bian, Dolak, Cemara, pada Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat. Wilayah Saireri terdiri dari : Das Omba, Lengguru pada Kabupaten Dogiyai dan Nabire. Wilayah Meepago dan Saireri terdiri dari : Das Wapoga, Aikumuga, Otakwa, Minarjerwi, Kamura, Mimika, Yawe, Parongga, Aidoma, Wanggar, Siriwo, Rombak, Nadubuai, Yapen, Biak, Supiori, Kemabu, pada Kabupaten Mimika, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori, Nabire.

Sungai, pada wilayah-wilayah pembangunan Papua, yang merupakan jalur utama dan jalur alternatif untuk menghubungkan antar wilayah atau antar kabupate/kota dalam satu wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut : jalur sungai yang menghubungkan, (1). Merauke – Kimaam – Bade – Getentiri, (2). Merauke – Atsy – senggo – Asgon – Agast, (3). Pagai – Dabra – Papasena – Kaiy – Taiyai, (4). Pagai – Dabra – Papasena – Kasonaweja – Bagusa – waremberi – Teba, (5). Bade – Moor – Kepi – Senggo, (6). Bade – Getentiri – Tanah Merah, (7). Bade – Getentiri – Anggamburan – Mindiptana, (8). Merauke – Okaba – Kaptel – Muting, (9). Pomako – Timika, (10). Agast – Kenyam, (11). Agast – Ewer – Sawaerna, (12). Agast – Asty – Yosakor – Kaimu – Binam. Adapun jalur sungai dapat dilihat pada Gambar 2.2.

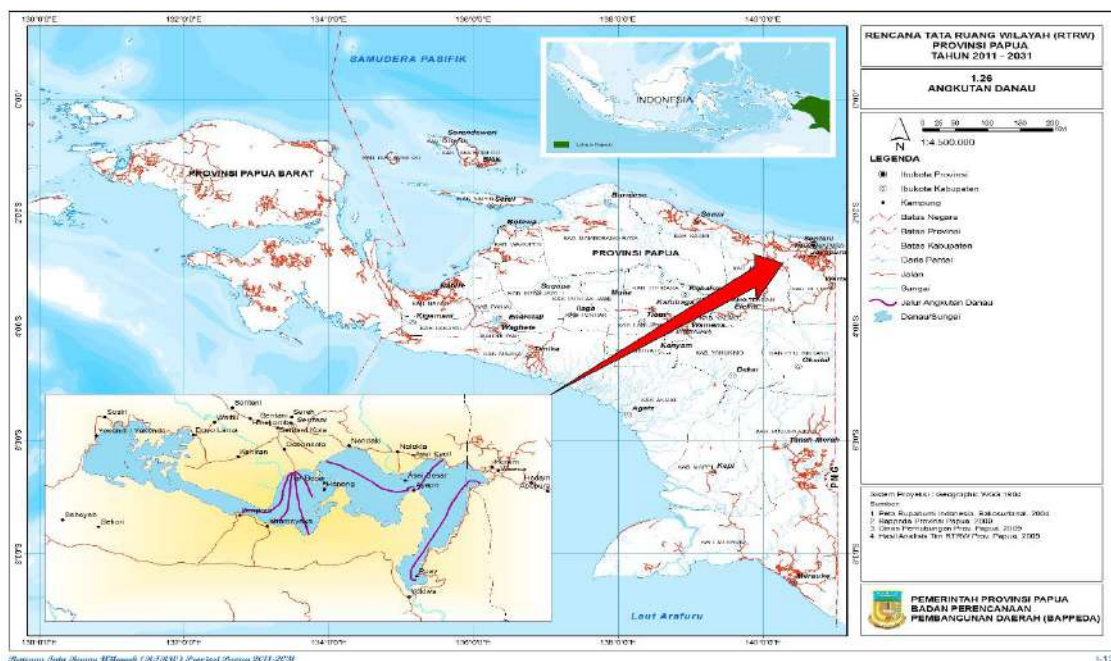
Gambar 2.2.
Peta Angkutan Sungai



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Danau, pada wilayah-wilayah pembangunan Papua, yang merupakan jalur utama dan jalur alternatif untuk menghubungkan antar wilayah atau antar kabupate/kota dalam satu wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pada wilayah pembangunan papua terdapat danau sentani, pada wilayah lain juga terdapat beberapa kumpulan air dalam wadah terbatas yang dikategorikan sebagai telaga atau penyembutan lain yang sama. Artinya dari segi luar lebih kecil dari luasan danau, namun juga memiliki fungsi penghubung dalam pembangunan. Adapun danau dapat dilihat pada peta sebagai berikut.

Gambar 2.3.
Peta Angkutan Danau



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Rawa, pada wilayah-wilayah pembangunan Papua, merupakan kawasan berfungsi sebagai kawasan lindung, dengan persebaran kawasan rawa pada wilayah Mamta (Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Sarmi, Kota Jayapura), wilayah Saireri (Biak Numfor, Supiori, Waropen), wilayah Laapago (Puncak), wilayah Meepago (Intan Jaya, Mimika, Nabire), wilayah Haanim (Boven Digoel, Mappi, Merauke).

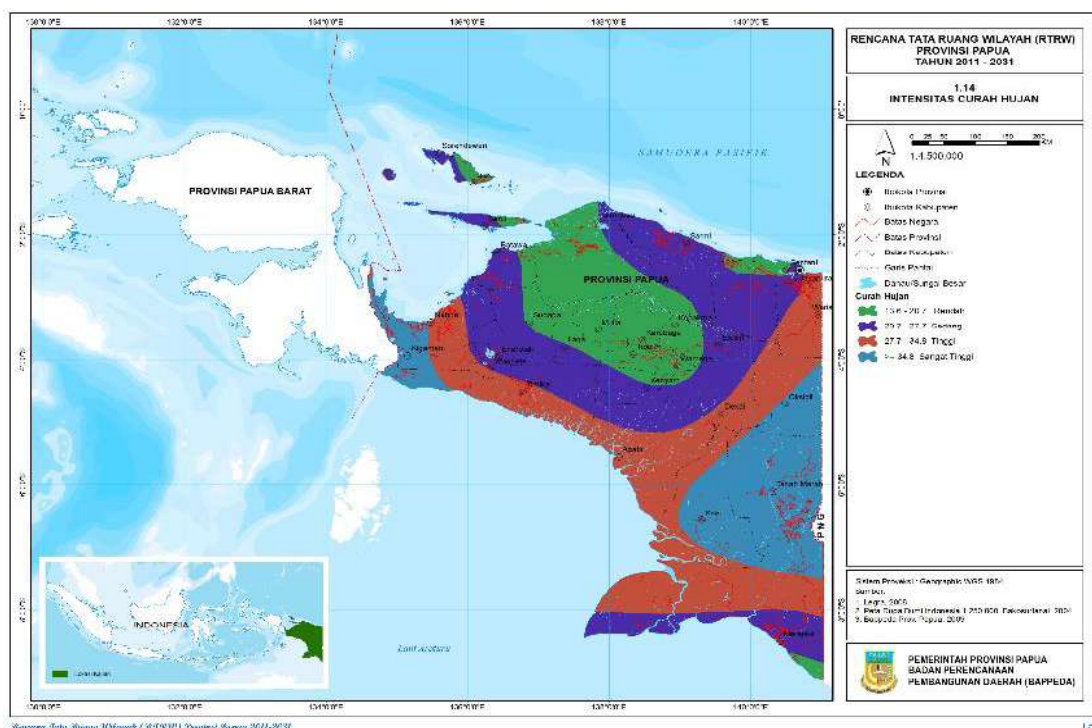
(f). Klimatologi

Keadaan iklim Papua termasuk iklim tropis. Papua terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa, namun dikarenakan daerahnya yang bergunung-gunung maka iklim di Papua sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Di pesisir barat dan utara beriklim tropis basah. Pada saat musim panas di dataran Asia (bulan Maret dan Oktober) Australia mengalami musim

dingin, sehingga terjadi tekanan udara dari daerah yang tinggi (Australia) ke daerah yang rendah (Asia) melintasi pulau Papua sehingga terjadi musim kering terutama Papua bagian selatan (Merauke). Sedikitnya pada saat angin berhembus dari Asia ke Australia (bulan Oktober dan Maret) membawa uap air yang menyebabkan musim hujan, terutama Papua bagian utara, dibagian selatan tidak mendapat banyak hujan karena banyak tertampung di bagian utara.

Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata di hampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat. Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000 mm), hingga sangat tinggi (>4000 mm), secara umum dapat dikatakan tinggi. Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, seperti yang terlihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4.
Peta Intensitas Curah Hujan



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

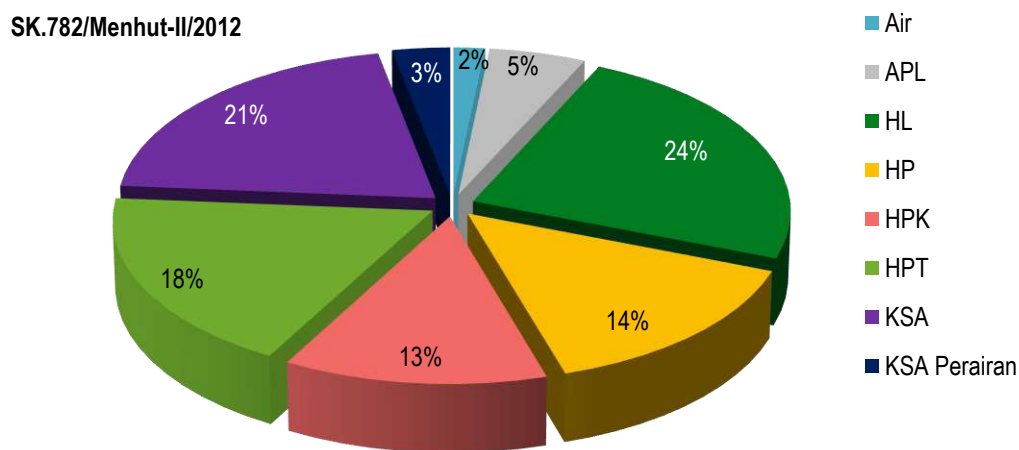
Suhu udara di Provinsi Papua, terklasifikasi dalam persebaran wilayah. Suhu udara pada daerah pengunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C.

Kelembaban udara rata-rata yaitu 78-85% dan dalam periode tahun 2002-2004 durasi penyinaran matahari di Provinsi Papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.

(g). Penggunaan Lahan

Sesuai dengan lingkup penyusunan RTRW Provinsi Papua digunakan data penutupan lahan. secara garis besar penutupan lahan di Provinsi Papua didominasi hutan primer, baik hutan lahan kering, hutan magrove, maupun hutan rawa. Hutan primer merupakan jenis tutupan lahan paling dominan, keseluruhan mencapai 61,85% dari luas wilayah Papua, yang terdiri dari hutan lahan kering primer 45,71%, hutan magrove primer 2, 36% dan hutan rawa primer 13,78%. Selain hutan primer, terdapat hutan lahan kering sekunder, hutan magrove sekunder dan hutan rawa sekunder yang luas seluruhnya mencapai 17,78%, seperti pada gambar sebagai berikut :

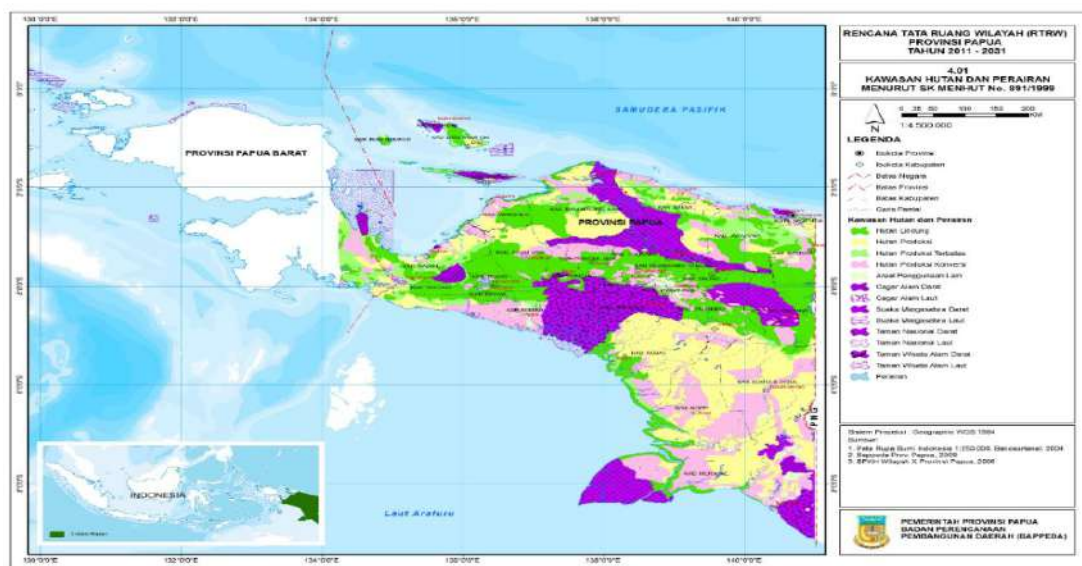
Gambar 2.5.
Persentase Penggunaan Lahan di Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Kawasan budidaya pada dasarnya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi maupun pemenuhan kebutuhan ruang untuk permukiman. Keseluruhan kawasan budidaya mencapai 13.192.477,96 Ha atau 40,27% dari luas wilayah Papua, seperti pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6.
Peta Kawasan Hutan



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Provinsi Papua terdiri dari hutan lindung, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya seperti pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7.
Peta Kawasan Konservasi



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Hutan lindung di Provinsi Papua ditentukan seluas kurang lebih 7.839.51,98 Ha, tersebar pada masing-masing wilayah pembangunan seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Luas Hutan Lindung di Provinsi Papua

| No | Kabupaten | Kawasan Hutan Lindung |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Wilayah Ha Anim | | |
| 1 | Kabupaten Merauke | 272.694,95 |
| 2 | Kabupaten Boven Digul | 102.498,26 |
| 3 | Kabupaten Mappi | 198.368,05 |
| 4 | Kabupaten Asmat | 1.091.345,87 |
| Wilayah Laa Pago | | |
| 1 | Kabupaten Jayawijaya | 17.886,29 |
| 2 | Kabupaten Puncak Jaya | 227.185,80 |
| 3 | Kabupaten Yahukimo | 591.571,23 |
| 4 | Kabupaten Pegunungan Bintang | 490.985,94 |
| 5 | Kabupaten Tolikara | 280.448,14 |
| 6 | Kabupaten Nduga | 151,40 |
| 7 | Kabupaten Lanny Jaya | 55.449,08 |
| 8 | Kabupaten Mamberamo Tengah | 215.413,81 |
| 9 | Kabupaten Yalimo | 255.495,96 |
| 10 | Kabupaten Puncak | 243.450,10 |
| Wilayah Mee Pago | | |
| 1 | Kabupaten Nabire | 324.662,16 |
| 2 | Kabupaten Pania | 275.552,27 |
| 3 | Kabupaten Mimika | 292.233,03 |
| 4 | Kabupaten Dogiyai | 238.632,83 |
| 5 | Kabupaten Intan Jaya | 558.596,42 |
| 6 | Kabupaten Deiyai | 214.506,15 |
| Wilayah Saireri | | |
| 1 | Kabupaten Kepulauan Yapen | 18.777,95 |
| 2 | Kabupaten Biak Numfor | 120.603,95 |
| 3 | Kabupaten Waropen | 294.913,40 |
| 4 | Kabupaten Supiori | 7.763,14 |
| Wilayah Mamta | | |
| 1 | Kabupaten Jayapura | 538.480,82 |
| 2 | Kabupaten Sarmi | 196.914,17 |
| 3 | Kabupaten Keerom | 335.851,86 |
| 4 | Kabupaten Mamberamo Raya | 372.614,68 |
| 5 | Kota Jayapura | 6.586,27 |
| Provinsi Papua | | 7.839.651,98 |

Sumber : Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013 - 2033

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Provinsi Papua, terbagi menjadi 5 (lima) wilayah pembangunan, yang terdiri dari: wilayah Laa Pago, wilayah Mee Pago, wilayah Ha Anim, wilayah Saireri, wilayah Mamta. Pendekatan wilayah dijadikan sebagai asumsi mendasar terhadap perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial. Pilihan terhadap pendekatan pembangunan berbasis wilayah dikelompokkan dalam indikator pembangunan, (1). Adanya kesamaan kultur, (2). Ada kesamaan teritori, (3). Adanya kesamaan indikator pembangunan. Berdasarkan indikator dimaksud, maka pola pendekatan wilayah pembangunan Papua akan memberi arah terhadap pembangunan, memiliki keterhubungan pembangunan serta memberi peluang terhadap pertumbuhan dan pemertaan pembangunan antar wilayah atau pula antar kabupaten/kota dalam satu wilayah.

Dengan pola pendekatan pembangunan tersebut, akan lebih mudah memberi gambaran atau penjelasan tentang kondisi atau kawasan dengan karakteristik tertentu, yang dapat dijadikan sebagai sumber daya pembangunan atau pula menjadi tantangan terhadap pembangunan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa kondisi atau kawasan sesuai karakteristik pada masing-masing wilayah pembangunan, antara lain :

- a. Kondisi atau kawasan pedalaman Papua, terbesar pada wilayah pembangunan Laapago, Meepago dan Haanim yang belum memiliki atau belum memadainya akses terhadap keberlangsungan pembangunan. Akses sebagaimana disebutkan merupakan akses melalui jalur darat, laut/sungai, dan udara. Sebagai akibatnya, daerah-daerah pada wilayah tersebut memiliki permasalahan tersendiri terhadap pembangunan.
- b. Kondisi atau kawasan terpencil Papua, terbesar pada wilayah pembangunan Haanim, Mamta dan Saireri. Pada daerah terpencil ini, terdapat beberapa suku terasing yang sangat homogen, dengan pola kehidupan cenderung nomaden. Interaksi sosial yang terjadi, adalah interaksi sosial antar komunitas homogen tersebut atau pula berinteraksi dengan alam sekitar. Pengetahuan tentang interaksi sosial dengan yang lain dipandang sebagai ancaman baru yang mengganggu keberadaan suku terasing tersebut.
- c. Kondisi atau kawasan Pesisir Papua, terbesar pada wilayah pembangunan Mamta, Saireri, Haanim dan Meepago. Kecenderungan daerah-daerah pesisir memiliki akses yang dapat menghubungkan antar daerah dalam satu wilayah atau antar wilayah dengan wilayah. Akses

terhadap daerah pesisir menggunakan jalur laut/sungai, sehingga memudahkan pergerakan arus barang dan manusia. Namun akses pada kawasan pesisir Papua, belum sepenuhnya memadai, sehingga berdampak terhadap keseluruhan pembangunan.

- d. Kondisi atau kawasan pegunungan Papua tersebar pada wilayah Laapago dan Meepago yang memiliki daerah pegunungan sebesar 38,9%. Bagian morfologi daratan dengan ketinggian kurang dari 100 m menjadi terluas di wilayah Provinsi Papua, yaitu 16.897.806.02 km² (53,3%), serta pegunungan yang sangat tinggi, dengan ketinggian lebih dari 3000m dari permukaan laut menjadi bagian tersempit, yaitu 1.029.618,93 km² (3,2%).

Pada bagian wilayah Laa Pago dan Mee Pago, berjejer rangkaian pegunungan tinggi sepanjang 650 km. Pegunungan tersebut adalah pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena terdapat 3 puncak tertinggi yang walaupun terletak di dekat katulistiwa namun selalu diselimuti oleh salju abadi. Adapun puncak pegunungan tertinggi tersebut adalah, puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5,030 m (15.090 ft), puncak Trikora 5,160 m (15.480 ft), puncak Yamin 5,100 m (15.300 ft). Pada kawasan pegunungan, menjadi kawasan dengan kesulitan akses, sehingga memberi dampak langsung terhadap keseluruhan pembangunan.

Kondisi atau kawasan kepulauan Papua tersebar pada wilayah Mamta, Saireri, Haanim dan Meepago. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki pulau, seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Pulau-pulau Kecil pada Kabupaten/Kotadi Provinsi Papua

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau | Jumlah Pulau bernama | Jumlah Pulau yang belum Bernama |
|----|----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | Kota Jayapura | 8 | 8 | |
| 2 | Jayapura | 16 | 16 | |
| 3 | Sarmi | 15 | 15 | |
| 4 | Waropen | 3 | 3 | |
| 5 | Supiori | 168 | 168 | |
| 6 | Nabire | 38 | 29 | 9 |
| 7 | Kep. Yapen | 35 | 35 | |
| 8 | Biak Numfor | 31 | 31 | |
| 9 | Mimika | 6 | 6 | |

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau | Jumlah Pulau bernama | Jumlah Pulau yang belum Bernama |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|
| 10 | Merauke | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Asmat | 1 | 1 | |
| Jumlah keseluruhan | | 325 | 315 | 10 |

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Papua Biro Tata Pemerintahan, 2008

Sedangkan untuk beberapa wilayah, terdapat beberapa pulau yang letaknya berdekatan dengan negara-negara perbatasan dan keberadaannya terluar dari Provinsi Papua, seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8.
Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar di Provinsi Papua

| No | Nama Pulau | Kabupaten/ Kota | Negara yang berbatasan | Keterangan |
|----|---------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | P. Fanildo | Supiori | Palau | Tidak berpenduduk |
| 2 | P. Brass | Supiori | Palau | Berpenduduk |
| 3 | P. Bepondi | Supiori | Palau | Berpenduduk |
| 4 | P. Liki | Sarmi | Palau | Berpenduduk |
| 5 | P. Kolepon/P. Dolok | Merauke | Australia | Berpenduduk |
| 6 | P. Lagg | Asmat | Australia | Tidak berpenduduk |

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2008

Daerah kepulauan, merupakan daerah dengan akses yang memadai. Keterhubungan antar daerah dan antar wilayah mungkin kontinu terjadi, sehingga arus barang dan manusia mengalami pergeseran yang begitu relatif cepat. Untuk pulau dengan kedudukan berbatasan langsung dengan negara lain atau sebagai pulau terluar, acapkali memiliki permasalahan tersendiri terhadap pembangunan, seperti kesulitan akses, menjadi perebutan antar Negara.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Beberapa wilayah di Provinsi Papua rentan terhadap bencana dan telah diidentifikasi seperti tampak pada 0 Berdasarkan hasil identifikasi tampak bahwa bahaya geologi sering terjadi di wilayah Pesisir Selatan Papua dan Pesisir Utara dan Kepulauan Papua, sedangkan bahaya tanah longsor juga teridentifikasi sering terjadi di kedua wilayah tersebut ditambah sebagian wilayah Pegunungan Tengah. Untuk bahaya Tsunami pernah terjadi di wilayah Pesisir Utara dan Kepulauan. Sedangkan bahaya iklim seperti banjir terjadi di wilayah Papua Selatan dan Utara, sedangkan

kekeringan terjadi di wilayah Pegunungan Tengah meskipun seluruh wilayah Papua juga berpotensi untuk mengalami kekeringan.

Tabel 2.9.
Hasil Identifikasi Bahaya Menurut Pembagian Wilayah Di Provinsi Papua

| Pembagian Wilayah | Kabupaten/Kota | Bahaya Geologi | | | | Bahaya Iklim | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------------|--------------|--------|------------|
| | | Gempa Bumi | Tsunami | Gunung Api | Tanah Longsor | Badai Tropis | Banjir | Kekeringan |
| Pesisir Selatan Papua | Asmat | o | x | x | v | o | v | o |
| | Boven Digoel | o | x | x | v | x | o | o |
| | Mappi | o | x | x | o | v | v | o |
| | Merauke | o | x | x | o | v | v | v |
| | Mimika | o | x | x | v | o | vv | o |
| Pesisir Utara Papua dan Kepulauan | Biak | vv | v | x | o | v | v | o |
| | Dogiyai | v | o | x | o | o | o | o |
| | Jayapura | vv | o | x | vv | o | vv | o |
| | Keerom | vv | o | x | vv | o | vv | o |
| | Kota Jayapura | vv | o | x | vv | v | vv | o |
| | Mamberamo Raya | v | o | x | v | o | v | o |
| | Nabire | vv | o | x | v | o | o | o |
| | Sarmi | vv | o | x | v | v | o | o |
| | Supiori | vv | v | x | o | v | o | o |
| | Waropen | v | v | x | v | o | o | o |
| | Yapen | v | v | x | v | v | o | o |
| Pegunungan Tengah Papua | Jayawijaya | v | x | x | vv | x | v | vv |
| | Lanny Jaya | v | x | x | o | x | o | v |
| | Mamberamo Tengah | v | x | x | o | x | v | o |
| | Nduga | v | x | x | o | x | o | o |
| | Paniai | v | x | x | v | x | v | o |
| | Peg. Bintang | v | x | x | vv | x | o | o |
| | Puncak | v | x | x | o | x | o | v |
| | Puncak Jaya | v | x | x | v | x | o | v |
| | Tolikara | v | x | x | o | x | o | vv |
| | Yahukimo | v | x | x | vv | x | v | vv |
| Yalimo | v | x | x | o | x | o | o | |

Keterangan:
x = Tidak terjadi
o = Mungkin terjadi
v = Telah terjadi
vv = Sering terjadi

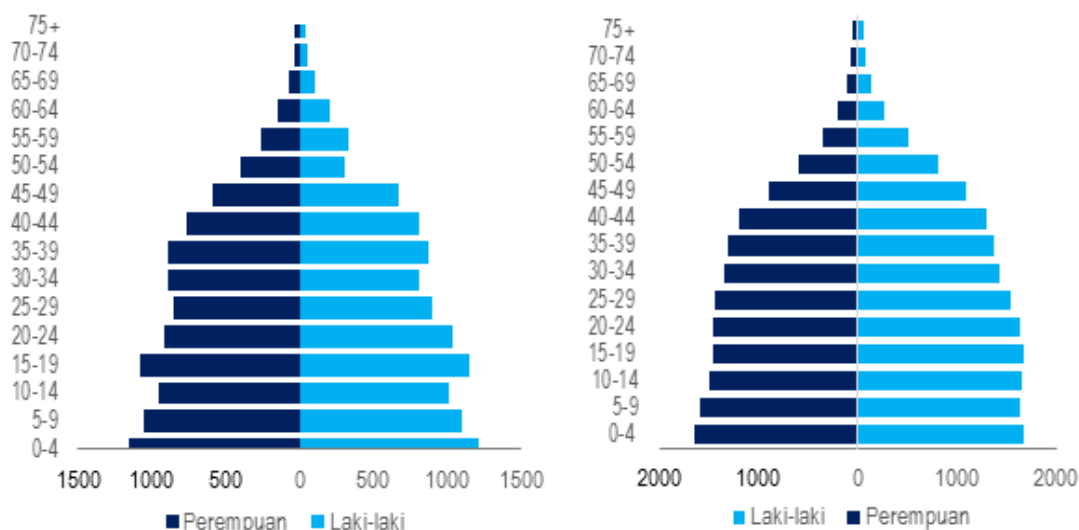
Sumber:
1. Katalog gempa bumi merusak, BADAN GEOLOGI (2006)
2. Atlas Nasional Indonesia, BAKOSURTANAL (2008)
3. Badan Kesatuan Bangsa Prov. Papua (2009)

Sumber: RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, Bappeda Provinsi Papua 2012

2.1.1.4. Demografi

Dilihat berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Baik itu di tahun 2010 maupun 2014 bentuk piramida penduduk Provinsi Papua tidak signifikan mengalami perubahan, penduduk usia muda (0-14 tahun) masih dominan, namun dengan kecenderungan tingkat kelahiran bayi semakin menurun di tahun 2014. Selain itu, bentuk piramida yang gemuk, terutama di antara usia 15-44 tahun mengindikasikan bahwa penduduk usia yang sangat produktif lebih dominan dibandingkan yang non produktif. Adapun bentuk kerucut piramida yang tajam diantara tahun 2010 dan tahun 2016 memvisualisasikan bahwa usia harapan hidup di Provinsi Papua masih berkisar diantara 65-69 tahun, dan ada kecenderungan usia harapan hidup untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan di tahun 2016.

Gambar 2.8.
Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2016



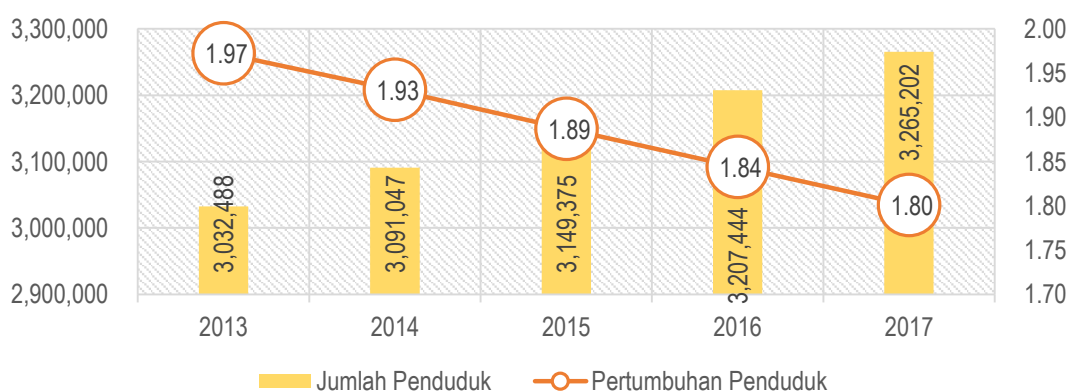
[a]. Piramida Penduduk Tahun 2010

[b]. Piramida Penduduk Tahun 2016

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Jumlah penduduk Papua selama periode 2013-2017 berkembang pada tingkat pertumbuhan yang cukup terkendali dan berfluktuatif. Tahun 2013, jumlah penduduk Papua tercatat sebesar 3,02 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 1,97%. Selanjutnya di tahun 2014 pertumbuhan penduduk Papua mengalami pelambatan, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 1,93%. Kondisi ini terus berlanjut sepanjang periode 2015 – 2017, dimana pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 1,80%, yang terlihat jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Adapun jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2017 tersebut adalah sebanyak 3,27 juta jiwa. Selengkapnya perhatikan Gambar 2.9.

Gambar 2.9.
Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk DI Provinsi Papua Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Terdapat kecenderungan pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan penduduk usia non produktif. Jika diamati berdasarkan kelompok usia produktif 15-64 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok usia ini proporsinya cenderung meningkat. Tahun 2013 penduduk usia produktif mencapai 66,83% dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,23% dari total penduduk Papua, hal ini berarti jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia non produktif.

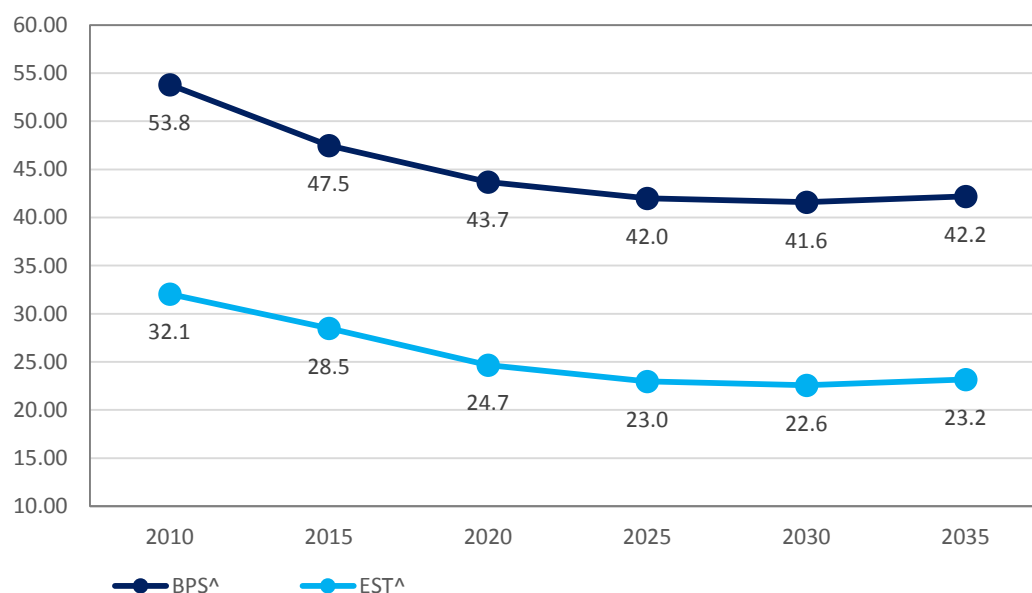
Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2016

| Kelompok Umur | 2013 (ribu orang) | 2014 (ribu orang) | 2015 (ribu orang) | 2016 (ribu orang) | Rata ² Pertumbuhan (% per thn) |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 0 – 4 | 328,5 | 329,3 | 330,0 | 331,6 | 0,31 |
| 5 – 9 | 318,6 | 319,8 | 321,3 | 321,8 | 0,33 |
| 10 – 14 | 315,1 | 315,4 | 316,0 | 316,1 | 0,11 |
| 15 – 19 | 309,6 | 310,9 | 311,6 | 312,7 | 0,33 |
| 20 – 24 | 300,1 | 303,9 | 306,9 | 309,3 | 1,02 |
| 25 – 29 | 282,5 | 286,9 | 292,0 | 297,1 | 1,72 |
| 30 – 34 | 271,7 | 273,6 | 275,5 | 278,6 | 0,85 |
| 35 – 39 | 261,9 | 264,8 | 267,3 | 268,2 | 0,80 |
| 40 – 44 | 224,1 | 233,6 | 241,8 | 249,3 | 3,75 |
| 45 – 49 | 167,1 | 177,9 | 188,6 | 199,1 | 6,38 |
| 50 – 54 | 110,4 | 120,3 | 130,6 | 140,6 | 9,12 |
| 55 – 59 | 64,1 | 70,9 | 78,1 | 86,3 | 11,54 |
| 60 – 64 | 35,0 | 38,4 | 42,5 | 47,1 | 11,52 |
| 65 – 69 | 19,9 | 21,0 | 22,5 | 24,7 | 8,04 |
| 70 – 74 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 13,8 | 2,05 |
| 75 + | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 0,61 |
| Total | 3.032,5 | 3.091,0 | 3.149,4 | 3.207,4 | 0,31 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dampak dari semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, menyebabkan rasio ketergantungan terlihat mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jika menggunakan data proyeksi yang bersumber dari BPS, terlihat bahwa rasio ketergantungan yang cenderung menurun dari 53,8% tahun 2010 turun menjadi 42,2% pada tahun 2035, sedangkan berdasarkan estimasi terlihat gap yang cukup besar, yaitu tahun 2010 rasio ketergantungan mencapai 32,1% turun menjadi 23,2% tahun 2035.

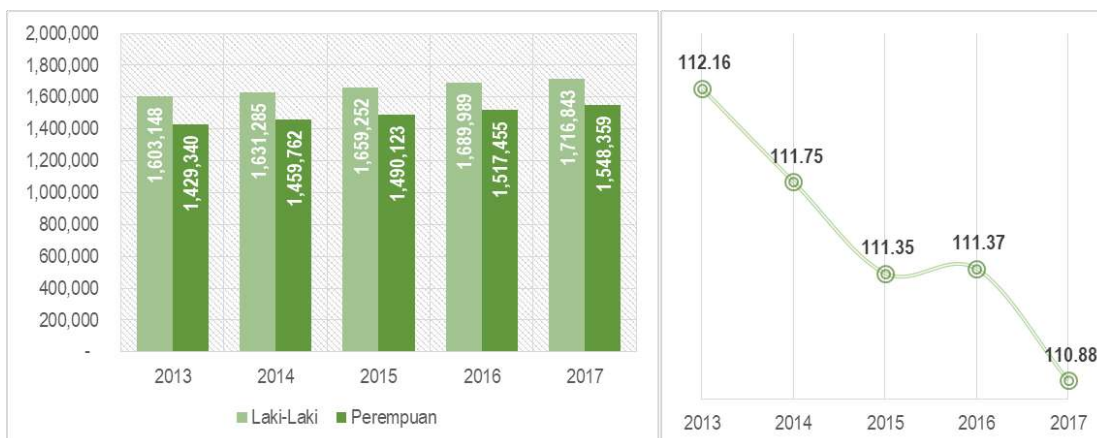
Gambar 2.10.
Proyeksi Bonus Demografi Di Provinsi Papua



Bonus demografi yang akan terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2020-2030 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas. Adanya bonus demografi menandakan bahwa penduduk usia produktif (15-64) lebih banyak dibandingkan penduduk yang nonproduktif (0-14 dan lebih dari 64 tahun), sehingga merupakan modal yang sangat besar bagi pemerintah Papua untuk menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkualitas. Akan tetapi mereka ini merupakan penduduk yang produktif untuk bekerja, membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, dan pangan lebih banyak, karenanya perluasan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih banyak harus diwujudkan oleh pemerintah pada saat itu. Dan semestinya mulai dijalankan sekarang, sehingga manfaat bonus demografi dapat dirasakan seoptimal mungkin pada saat terjadi selama periode 2020-2030 tersebut.

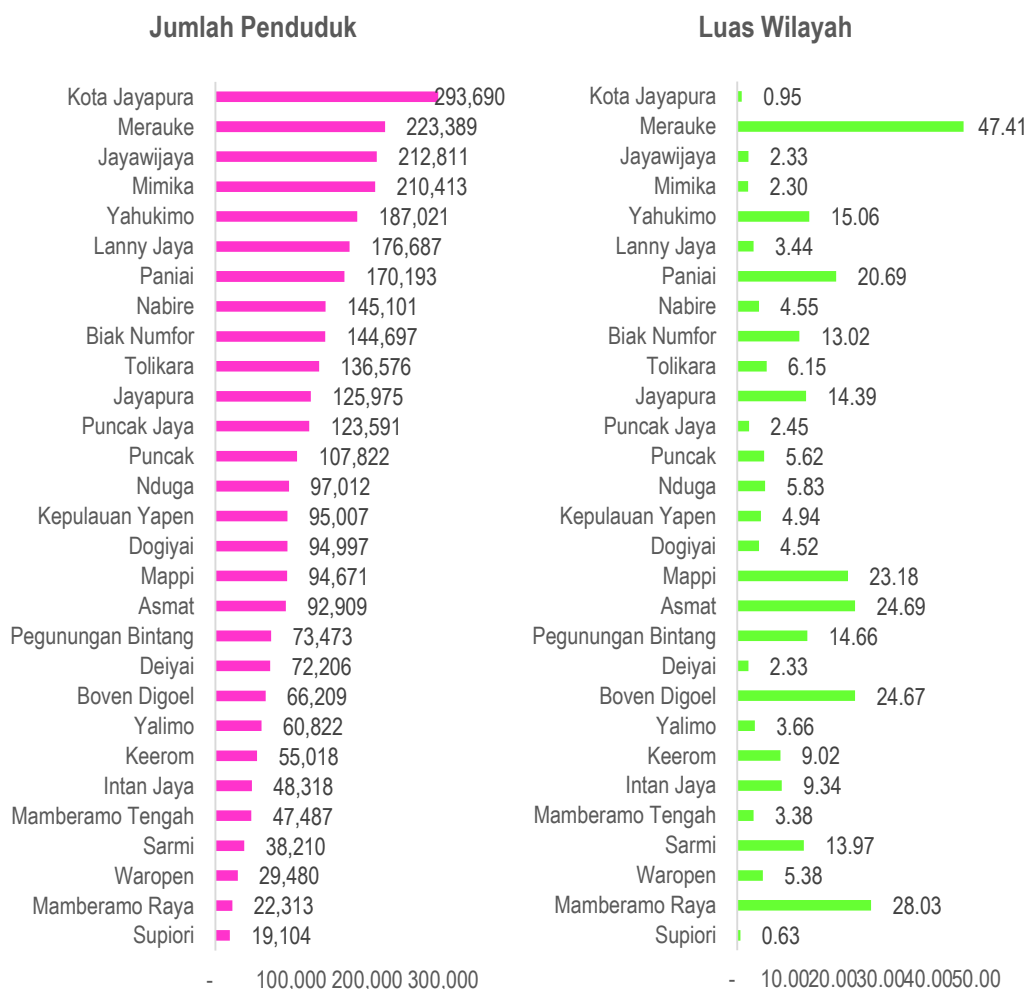
Dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di provinsi Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2013 tercatat 1,603 juta jiwa, angka ini meningkat menjadi 1,717 juta jiwa tahun 2017. Jumlah penduduk perempuan di provinsi Papua, tahun 2013 tercatat 1,429 juta jiwa, meningkat menjadi 1,548 juta jiwa tahun 2017. Hal ini menyebabkan angka sex ratio menjadi lebih besar dari 100, namun mempunyai kecenderungan angka yang menurun. Tahun 2013 angka sex ratio mencapai 112.16 menurun menjadi 110.88 di tahun 2017.

Gambar 2.11.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex Di Provinsi Papua Tahun 2013 - 2017



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Gambar 2.12.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2017

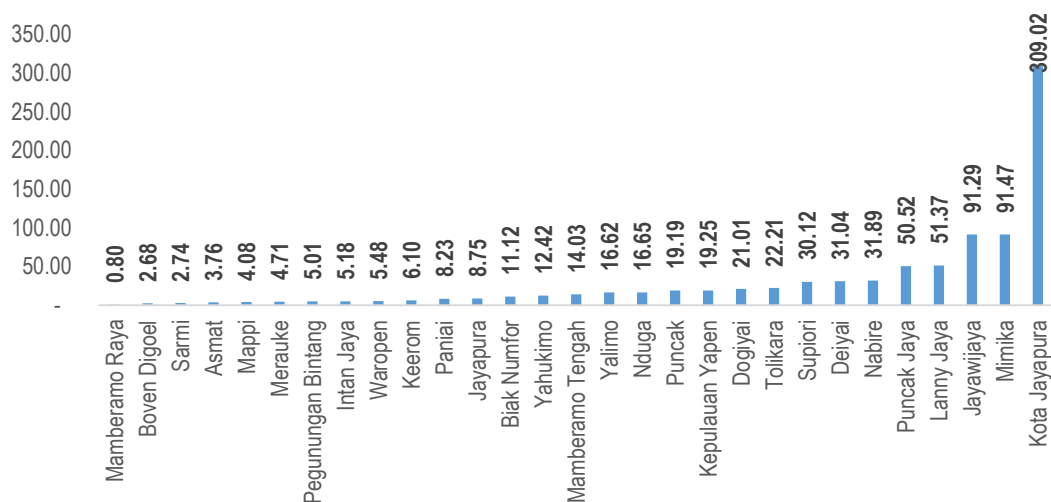


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Posisi kedua tingkat kepadatan terbesar di provinsi Papua, diduduki oleh kabupaten Mimika dengan luas wilayah 2,33 ribu km², mempunyai

jumlah penduduk sebesar 212,81 ribu jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 91 jiwa per km². Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terendah terdapat di kabupaten Supiori dengan jumlah jiwa 19,10 ribu, yang menempati luas wilayah 634 ribu km² terkecil di Papua, namun dari tingkat kepadatannya menempati posisi ke 8 terbesar di provinsi Papua dengan tingkat kepadatan rata-rata 30 jiwa per km², perhatikan Gambar 2.13.

Gambar 2.13.
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua
Tahun 2017
(jiwa/km²)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Kabupaten Merauke menempati posisi ke dua dari sisi jumlah penduduknya yaitu 223,39 ribu jiwa, tetapi dengan luas wilayah yang dimiliki terbesar di provinsi Papua yaitu 47,41 km², menyebabkan tingkat kepadatan penduduknya menempati posisi ke 6 terendah bersama-sama dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Waropen. Kabupaten dengan tingkat kepadatan terendah diduduki oleh kabupaten Mamberamo raya yaitu 1 jiwa per km², hal ini dikarenakan dengan luas wilayah yang merupakan kedua terbesar di provinsi Papua yaitu 28,03 km², jumlah penduduk yang berdiam di wilayah ini tercatat hanya 21,82 ribu jiwa yang merupakan jumlah penduduk terendah ke dua di provinsi Papua.

2.1.1.5. Ketenagakerjaan

Apabila dilihat dari angkatan kerja sampai dengan tahun 2013-2017, jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja di provinsi Papua terlihat meningkat, kecuali tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk jumlah orang yang menganggur, dari tahun 2013-2017 jumlahnya mengalami fluktuasi. Tercatat jumlah angkatan kerja

1.688.876 jiwa pada tahun 2013 dan orang yang bekerja berjumlah 1.634.332 jiwa, sedangkan pengangguran berjumlah 54.544.

Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat sejak tahun 2013-2017, tetapi laju pertumbuhan penduduk yang bekerja berfluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 2,20%,. Tercatat tahun 2013 laju pertumbuhan penduduk yang bekerja mencapai 6,96%, angka ini tidak bertahan karena mengalami penurunan di tahun berikutnya, dan kemudian meningkat kembali sehingga di tahun 2015 mencapai 3,40% dan di tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk yang bekerja mengalami penurunan drastis, dengan capaian -1,67% dan kemabali terjadi peningkatan hingga tahun 2017 yang bertumbuh sebesar 3,32%.

Tabel 2.11.
Indikator-Indikator Tenaga Kerja Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2017

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Angkatan Kerja | 1.688.876 | 1.675.113 | 1.741.945 | 1.722.162 | 1.762,841 |
| 1. Bekerja | 1.634.332 | 1.617.437 | 1.672.480 | 1.644.485 | 1,699,071 |
| 2. Penganggur | 54.544 | 57.676 | 69.465 | 57.677 | 63,770 |
| Bukan Angkatan Kerja | 476.194 | 454.291 | 447.285 | 523.300 | 528,270 |
| Jumlah | 2.165.070 | 2.129.404 | 2.189.230 | 2.245.462 | 2,291,111 |
| Laju Pertumbuhan Yang Bekerja (%) | 6,96 | -1,03 | 3,40 | -1,67 | 3,32 |
| Daya Serap Tenaga Kerja (%) | 96,77 | 96,56 | 96,01 | 95,49 | 96,38 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 78,01 | 78,67 | 79,57 | 74,13 | 77,3 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 3,23 | 3,44 | 3,99 | 3,35 | 3,96 |

Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

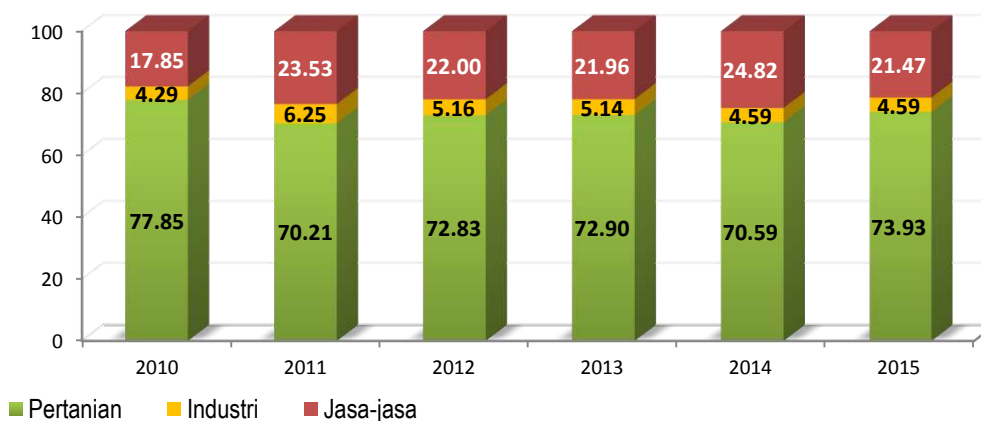
TPAK dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) sedikit berfluktuatif dan cenderung berkembang stabil yang secara rata-rata mencapai 77,53%. Tahun 2013, TPAK provinsi Papua tercatat sebesar 78,01%, yang kemudian naik di tahun 2014 kemudian meningkat di tahun 2015, kemudian turun kembali di tahun 2016 menjadi 74,13%. Sampai dengan tahun 2017 kondisi TPAK Provinsi Papua adalah sebesar 77.30%, dari kondisi ini terlihat bahwa trend lima tahun terakhir TPAK Provinsi Papua mengalami penurunan.

Dari sisi pengangguran, terlihat bahwa jumlah orang yang menganggur di provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) terlihat berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 60,626 orang setiap tahun. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami flukstuasi dan cenderung

meningkat, dengan rata-rata mencapai 3,59 % pertahun selama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017).

Jika mengamati struktur tenaga kerja menurut sektor di provinsi Papua, jumlah orang yang bekerja pada sektor pertanian mendominasi struktur tenaga kerja dengan proporsi yang cenderung menurun sepanjang tahun 2010-2015, yaitu rata-rata pertahun mencapai 73,05. Di sektor industri secara rata-rata mencapai 21,94, sedangkan sektor jasa-jasa rata-rata mencapai 5,00. Dari ketiga sektor ini, sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja yang tercatat mencapai 73,05 sedangkan terkecil ditempati sektor jasa-jasa yang tercatat hanya 5,00.

Gambar 2.14.
Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor Di Provinsi Papua
Tahun 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2015 (diolah)

Walaupun sektor pertanian mendominasi struktur tenaga kerja, tidak serta merta mendominasi struktur PDRB di provinsi Papua. Perekonomian Papua dapat dikatakan merupakan perekonomian yang dualistis. Di satu sisi struktur PDRB didominasi oleh sektor pertambangan (36,61% per tahun), tetapi disisi lain struktur tenaga kerja dikuasai oleh sektor pertanian (73,05% per tahun). Kondisi perekonomian seperti inilah yang dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab mengapa perekonomian di wilayah Papua berjalan timpang karena mekanisme pasar tidak berjalan seperti seharusnya. Apabila hal ini dibiarkan terus berlarut, suatu saat Papua akan mengalami krisis ekonomi yang besar yang dapat mengarah pada krisis multidimensional.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan di berbagai bidang ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan terciptanya kondisi dasar, antara lain: pembangunan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan, penciptaan kesempatan kerja, kestabilan harga-harga barang dan jasa (tingkat inflasi yang rendah), serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

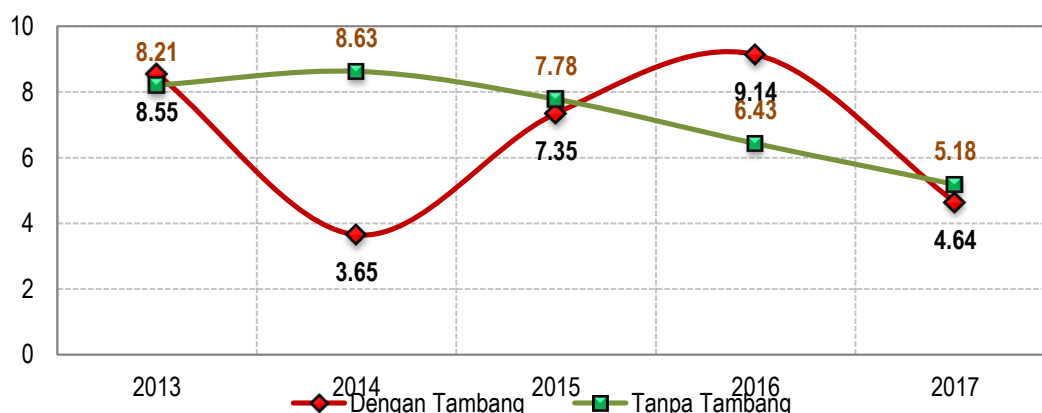
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

(a). Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Provinsi Papua mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) dan cenderung mengalami pelambatan. Hal ini terjadi ketika produksi pertambangan tembaga mengalami gangguan akibat permasalahan internal perusahaan PT Freeport Indonesia, dimana pada tahun 2013-2014 pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan tambang mengalami kontraksi cukup dalam, yang tercatat mencapai 8,55% dan 3,65%. Sementara pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai angka 7,35%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kembali menguat mencapai 9,14% dan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan hingga mencapai 4,64% (dengan tambang).

Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) mencapai 6,67 %, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama yang hanya mencapai 5,33%. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu yang sama (2013-2017).

Gambar 2.15.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua
Tahun 2013– 2017



Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

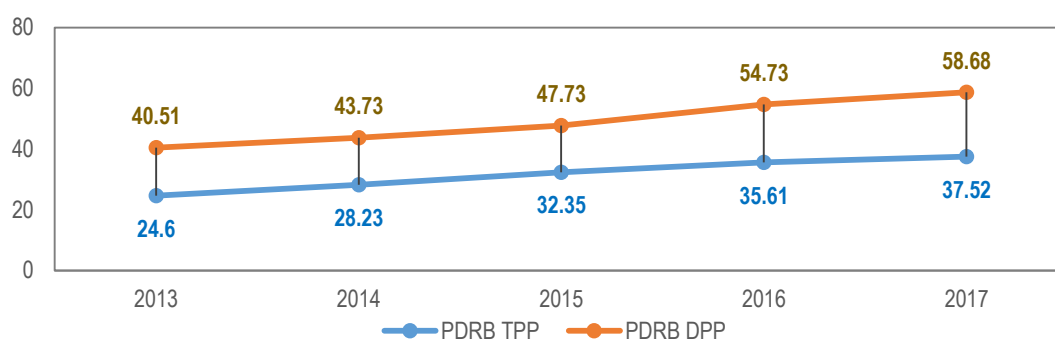
Sementara pertumbuhan ekonomi provinsi Papua tanpa tambang, secara umum mengalami perlambatan dalam kurun waktu 2013-2017 yang tercatat pada tahun 2013 mencapai 8,21% menjadi 5,18% pada tahun 2017. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi tanpa tambang mencapai 7,25% lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi dengan tambang dalam periode yang sama, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 2.15 di atas.

(b). Pendapatan Per Kapita

Secara makro kinerja ekonomi provinsi Papua melalui upaya menaikkan pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita provinsi Papua secara umum mengalami peningkatan positif. Tercatat PDRB perkapita dengan tambang perkembangannya menunjukkan tren positif dari tahun 2013-2017. Secara keseluruhan pertumbuhannya rata-rata mencapai 11,20% per tahun, dimana PDRB per kapita dengan tambang pada tahun 2013 tercatat sebesar 40,51 juta rupiah menjadi 58,68 juta pada tahun 2017 (lihat Gambar 2.16).

Menghitung pendapatan per kapita di Provinsi Papua dengan menyertakan sektor pertambangan dinilai kurang realistis. Hal ini karena sektor pertambangan di Papua, khususnya tambang tembaga dan emas, bersifat enclave dan exclusive, yang mana kurang terkait dengan sektor-sektor lainnya, hanya ada di satu wilayah (Kabupaten Mimika), sedikit menyerap tenaga kerja unskilled. Semuanya ini menyebabkan menjadi tidak fair jika nilai tambah sektor pertambangan di Papua dibagi rata untuk seluruh penduduk. Oleh sebab itu sering kali pembahasan pendapatan per kapita di Provinsi Papua juga menyertakan perhitungan pendapatan per kapita tanpa sektor pertambangan. Dimana apabila diamati tanpa sektor pertambangan, tampak jelas PDRB per kapita Provinsi Papua menjadi lebih rendah. Dengan sektor pertambangan rata-rata PDRB per kapita mencapai Rp. 49.08 juta per tahun selama periode 2013-2017, sedangkan tanpa sektor pertambangan hanya sekitar Rp. 31.66 juta per tahun. Meskipun demikian ada kecenderungan pertumbuhan PDRB per kapita tanpa sektor pertambangan jauh lebih cepat yaitu sekitar 17.41% per tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 mencapai kisaran 5,1 hingga 5,3 persen.

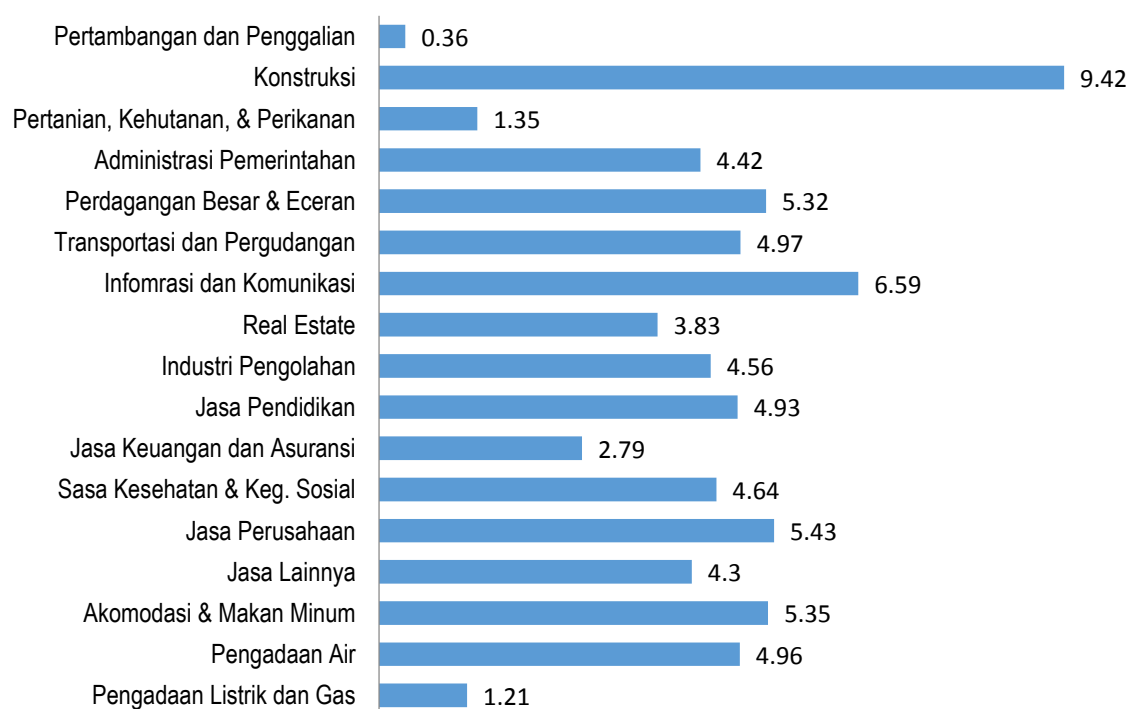
Gambar 2.16.
Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Menurut Harga Konstan 2010
Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017



Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Perekonomian Papua triwulan I-2017 (y-on-y) tumbuh 3,36 persen. Pertumbuhan tersebut lebih cepat dibandingkan dengan Pertumbuhan pada triwulan I-2016 yang mengalami kontraksi tumbuh -0,72 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada triwulan ini masih tergolong cukup rendah, hal ini dikarenakan rendahnya pertumbuhan pada kontributor terbesar yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (28,59 persen) dan kontributor ketiga yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,25 persen) yang masing-masing hanya tumbuh 0,36 persen dan 1,35 persen, perhatikan Gambar 2.17 berikut.

Gambar 2.17.
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I - 2017



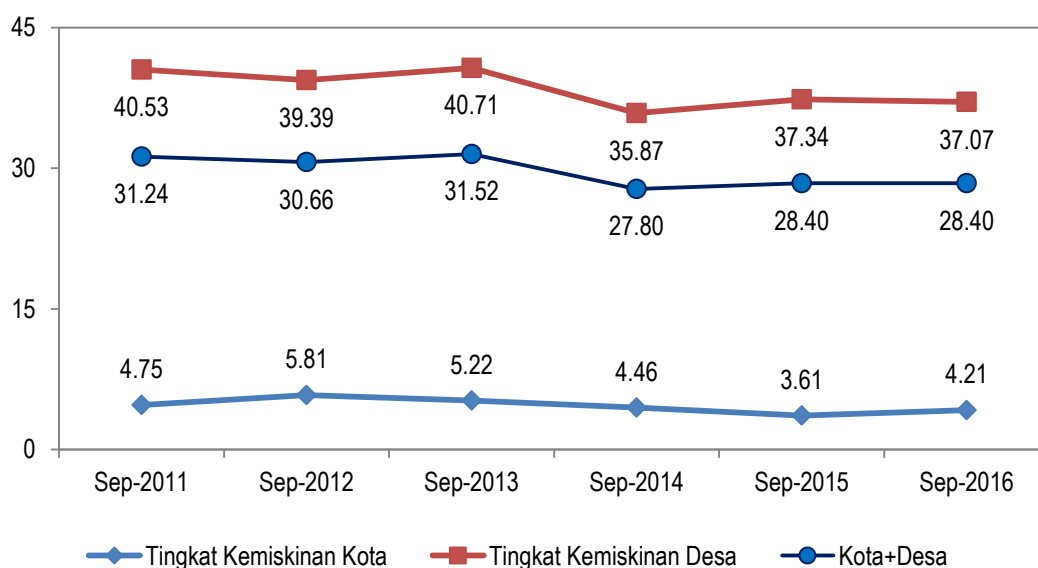
Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Lapangan usaha Pertambangan mempunyai pertumbuhan yang rendah karena kecilnya pertumbuhan produksi PT. Freeport Indonesia sebagai imbas dari berhentinya ekspor di bulan Februari dan Maret, sedangkan untuk lapangan usaha Pertanian dikarenakan turunnya beberapa komoditas tanaman pangan unggulan seperti Ubi Jalar dan Ubi Kayu. Lapangan usaha Konstruksi yang merupakan kontributor kedua (14,34 Persen) mempunyai pertumbuhan tertinggi dibandingkan lapangan usaha lain yaitu sebesar 9,42 persen.

(c). Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan

Sepanjang tahun 2011-2016, terlihat perkembangan tingkat kemiskinan di provinsi Papua mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jika dipilah berdasarkan desa-kota, kemiskinan di desa selalu tampak lebih tinggi dibandingkan kota. Tingkat kemiskinan tertinggi di desa terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 40,71%, sedangkan di kota yang tertinggi pada tahun 2012 sebesar 5,22%. Adapun secara keseluruhan (desa+kota) tingkat kemiskinan paling tinggi terdapat pada tahun 2013 yakni sebesar 31,52%. Apabila dibandingkan tahun 2011, kelihatan jelas Provinsi Papua di tahun 2016 berhasil mereduksi kemiskinan hingga mencapai 28,40%. Dengan kata lain Provinsi Papua mampu menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya sebesar -0,74%. Lihat Gambar 2.18.

Gambar 2.18.
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2011-2016

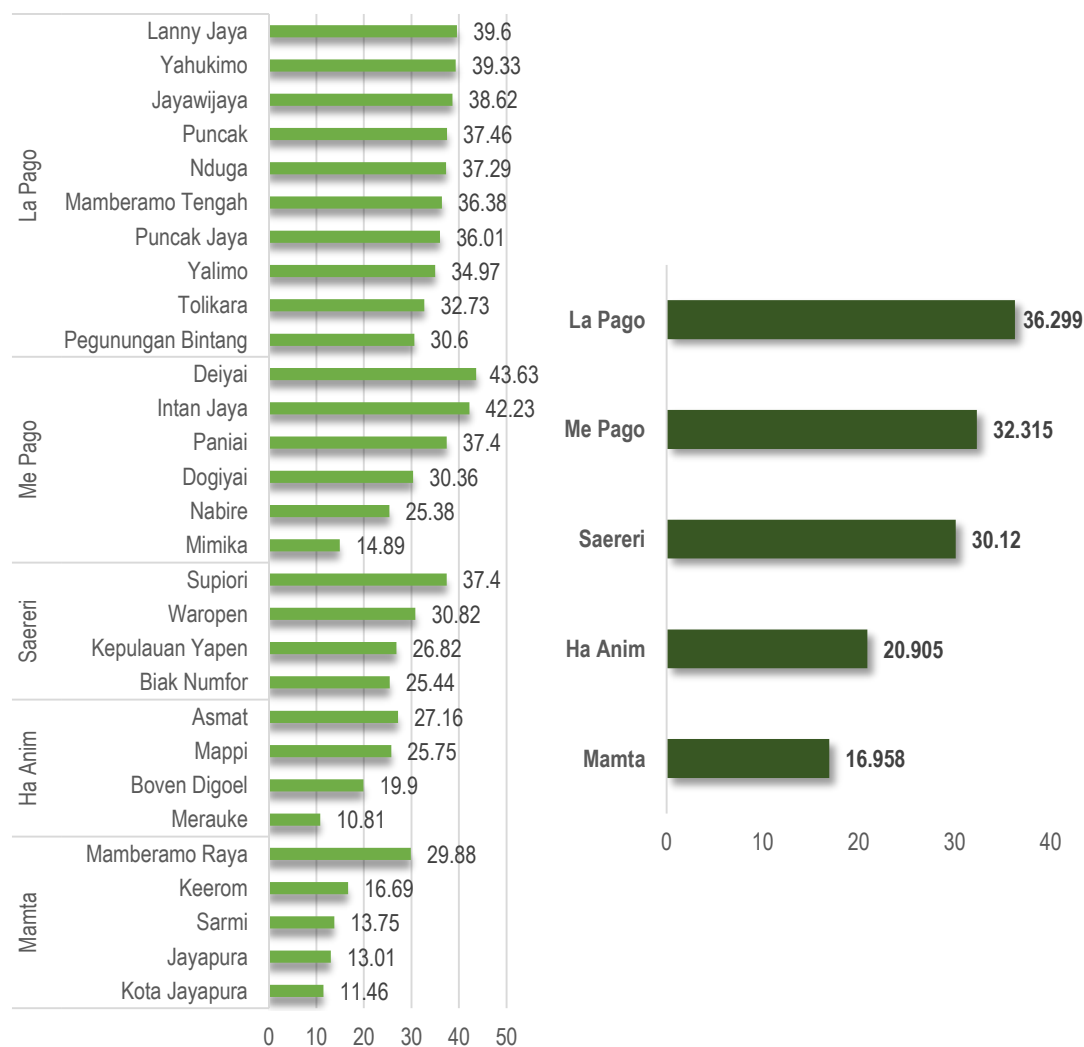


Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Secara kumulatif tahun 2013-2017, jika dipilah berdasarkan kabupaten/kota, terlihat kabupaten Deiyai sebagai penyumbang terbesar

kemiskinan di provinsi Papua. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Deiyai adalah 43,63% yang masuk kawasan pembangunan Me Pago, lihat Gambar 2.19 berikut ini.

Gambar 2.19.
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017



[a] Menurut Kabupaten/Kota

[b] Menurut Kawasan Pembangunan

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Posisi kedua terbesar oleh kabupaten Intan Jaya dengan angka 41,97% dan kabupaten Intan Jaya dengan angka 42,23% yang keduanya masuk kawasan pembangunan La Pago. Sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah, diduduki oleh kabupaten Merauke dengan angka 10,81% yang masuk kawasan pembangunan Mamta, yang diikuti oleh kota Jayapura dengan angka 11,46% dan kabupaten Jayapura dengan angka 13,01% yang keduanya masuk kawasan pembangunan Mamta.

Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka gini ratio menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Papua mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 4

(empat) tahun (2013-2016) dan cenderung mengalami perbaikan. Jika dilihat berdasarkan kawasan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2016, terdapat satu kawasan yang ketimpangan pendapatannya cenderung mengalami perbaikan sampai dengan tahun 2016, daerah yang dimaksud adalah kawasan Ha Anim. Sedangkan kawasan lainnya cenderung mengalami ketimpangan yang setiap tahun meningkat.

Tabel 2.12.
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Dan Rata-rata Menurut Kawasan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016

| Kabupaten/Kota/Kawasan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kawasan Ha'Anim | 0.362 | 0.371 | 0.361 | 0.355 |
| Merauke | 0.466 | 0.451 | 0.411 | 0.340 |
| Boven Digoel | 0.299 | 0.347 | 0.357 | 0.330 |
| Mappi | 0.295 | 0.301 | 0.338 | 0.440 |
| Asmat | 0.389 | 0.387 | 0.339 | 0.310 |
| Kawasan Mamta | 0.313 | 0.335 | 0.336 | 0.318 |
| Jayapura | 0.268 | 0.323 | 0.386 | 0.310 |
| Sarmi | 0.328 | 0.429 | 0.352 | 0.350 |
| Keerom | 0.283 | 0.311 | 0.361 | 0.350 |
| Kota Jayapura | 0.375 | 0.348 | 0.347 | 0.280 |
| Mamberamo Raya | 0.309 | 0.265 | 0.234 | 0.300 |
| Kawasan Saereri | 0.310 | 0.317 | 0.342 | 0.325 |
| Biak Numfor | 0.416 | 0.389 | 0.392 | 0.360 |
| Kepulauan Yapen | 0.322 | 0.360 | 0.369 | 0.320 |
| Supiori | 0.280 | 0.240 | 0.280 | 0.310 |
| Waropen | 0.221 | 0.281 | 0.329 | 0.310 |
| Kawasan La Pago | 0.225 | 0.251 | 0.296 | 0.259 |
| Jayawijaya | 0.367 | 0.336 | 0.397 | 0.340 |
| Yahukimo | 0.271 | 0.299 | 0.257 | 0.250 |
| Pengunungan Bintang | 0.146 | 0.220 | 0.268 | 0.290 |
| Tolikara | 0.198 | 0.218 | 0.365 | 0.380 |
| Puncak Jaya | 0.216 | 0.266 | 0.341 | 0.150 |
| Lanny Jaya | 0.181 | 0.224 | 0.299 | 0.280 |
| Mamberamo Tengah | 0.234 | 0.257 | 0.274 | 0.270 |
| Yalimo | 0.259 | 0.212 | 0.135 | 0.190 |
| Puncak | 0.183 | 0.253 | 0.333 | 0.190 |
| Nduga | 0.199 | 0.222 | n.a. | 0.250 |
| Kawasan Me Pago | 0.280 | 0.306 | 0.301 | 0.307 |
| Nabire | 0.326 | 0.354 | 0.389 | 0.300 |
| Paniai | 0.319 | 0.249 | 0.320 | 0.460 |
| Mimika | 0.299 | 0.340 | 0.333 | 0.290 |
| Dogiyai | 0.192 | 0.248 | 0.204 | 0.250 |
| Intan Jaya | 0.225 | 0.382 | 0.274 | 0.290 |
| Deiyai | 0.319 | 0.262 | 0.284 | 0.250 |
| Papua | 0.411 | 0.410 | 0.422 | 0.313 |

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Jika memperhatikan Tabel 2.12 di atas, sepanjang tahun 2013-2016 terdapat 25 kabupaten rata-rata yang memiliki distribusi pendapatan masuk dalam kategori relative rendah di antaranya adalah Kabupaten Yalimo, Dogiyai, Nduga, Pengunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, LannyJaya, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Mamberamo Raya, Supiori, Deiyai, Waropen, Tolikara, Intan Jaya, Mimika, Jayapura, Keerom, Boven Digoel, Paniai, Kota Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Mappi dan Asmat. Berdasarkan urutan kabupaten di atas dapat dikatakan sepanjang tahun 2013-2016 termasuk dalam ketimpangan yang relatif rendah dengan angka ketimpangan berkisar 0.19 -0,35. Angka gini ratio yang berada di bawah 0,35 mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan penduduk pada kabupaten yang berada pada kawasan ini, cenderung merata dan sedang. Kondisi tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah ini terutama terjadi pada kabupaten yang memiliki angka indeks yang mendekati 0 (nol)

Sedangkan jika diamati terdapat juga daerah dengan kondisi tingkat ketimpangan yang relative tinggi di antaranya adalah Kabupaten Jayawijaya, Sarmi, Biak Numfor dan Merauke. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan ketimpangan pendapatan pada ke empat daerah tersebut dapat dikatakan belum merata dan cukup tinggi.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Harapan Hidup (AHH), merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IPM yang merefleksikan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan AHH di provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan, namun berjalan lambat dan masih dibawah angka maksimum. Tahun 2013, angka harapan hidup 64,76 meningkat 0,83 poin menjadi 65,14 pada tahun 2017 dan masih belum mencapai angka maksimum 85 tahun.

Tabel 2.13.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua
Tahun 2013-2017

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Angka Harapan Hidup (thn) | 64.76 | 64.84 | 65.09 | 65.12 | 65.14 |
| Harapan Lama Sekolah (thn) | 9.58 | 9.94 | 9.95 | 10.23 | 10.54 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (thn) | 5.74 | 5.76 | 5.99 | 6.15 | 6.27 |
| Pengeluaran (Rp. ribu) | 6,394 | 6,416 | 6,469 | 6,637 | 6,996 |
| IPM | 56.25 | 56.75 | 57.25 | 58.05 | 59.09 |
| Rank IPM Papua Di Indonesia | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Berdasarkan data capaian yang ada terlihat bahwa angka harapan lama sekolah maupun angka rata-rata lama sekolah masih jauh di bawah angka ideal dan bergerak sangat lambat. Meskipun demikian pergerakan kedua indikator tersebut sepanjang lima tahun bergerak ke arah yang lebih baik dan mengalami perbaikan. Terlihat bahwa selama tahun 2013-2017, pergerakan angka harapan lama sekolah rata-rata mencapai 2.43 poin per tahun, sedangkan angka rata-rata lama sekolah sebesar 2.24 poin per tahunnya.

Sedangkan jika melihat komponen IPM pembentuk lainnya, yaitu pengeluaran per kapita Provinsi Papua sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan rata-rata pengeluaran per kapita di Provinsi Papua adalah sebesar Rp. 6,582.40,- setiap tahunnya.

Dengan memperhatikan capaian dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran tersebut terlihat bahwa IPM di provinsi Papua tahun 2013-2017, masih dapat dikategorikan IPM rendah dengan pergerakan rata-rata mencapai 1.24 point setiap tahunnya dengan capaian 59,09 pada tahun 2017 dan menduduki ranking 34 di Indonesia.

IPM kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2013-2017, sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Kota Jayapura sepanjang tahun 2013-2017 dapat dikatakan konsisiten dalam peringkat pertama di Provinsi Papua, sampai dengan tahun 2017 kondisi IPM Kota Jayapura adalah sebesar 79,23. Kemudian di ikuti dengan Kabupaten Mimika (konsisiten pada urutan 2) dan Kabupaten Biak Numfor (konsisten pada urutan 3). Adapun pada tahun 2017 daerah dengan IPM terendah terletak di Kabupaten Nduga (peringkat ke 29), Puncak (peringkat 28) dan Kabupaten Pegunungan Bintang (peringkat ke 27). Adapun daerah yang mengalami perubahan baik positif maupun negatif dalam peringkat IPM sepanjang tahun 2013-2017 adalah sebanyak 10 Kabupaten. Daerah yang memiliki perubahan dalam peringkat IPM yang mengarah pada pergerakan positif (peringkat naik) adalah Kabupaten Jayawijaya, Asmat, Mamberamo Raya dan Lanny Jaya. Sedangkan daerah dengan pergeseran peringkat IPM mengalami perubahan ke arah negatif (peringkat turun) antara lain Kabupaten Paniai, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Intan Jaya dan Deiyai.

Tabel 2.14.
IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2017

| Wilayah | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata ² Growth |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Merauke | 66.88 | 67.33 | 67.75 | 68.09 | 59.09 | 0.65 |

| Wilayah | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata ² Growth |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Jayawijaya | 52.94 | 53.37 | 54.18 | 54.96 | 68.64 | 1.41 |
| Jayapura | 69.21 | 69.55 | 70.04 | 70.5 | 55.99 | 0.63 |
| Nabire | 65.45 | 66.25 | 66.49 | 66.64 | 70.97 | 0.63 |
| Kepulauan Yapen | 64.34 | 64.89 | 65.28 | 65.55 | 67.11 | 0.67 |
| Biak Numfor | 69.35 | 70.32 | 70.85 | 71.13 | 66.07 | 0.79 |
| Paniai | 53.7 | 53.93 | 54.2 | 54.34 | 71.56 | 0.56 |
| Puncak Jaya | 43.36 | 44.32 | 44.87 | 45.49 | 54.91 | 1.80 |
| Mimika | 69.5 | 70.4 | 70.89 | 71.64 | 46.57 | 1.03 |
| Boven Digoel | 57.96 | 58.21 | 59.02 | 59.35 | 72.42 | 0.93 |
| Mappi | 55.51 | 55.74 | 56.11 | 56.54 | 60.14 | 0.71 |
| Asmat | 45.54 | 45.91 | 46.62 | 47.31 | 57.1 | 1.58 |
| Yahukimo | 45.63 | 46.36 | 46.63 | 47.13 | 48.49 | 1.25 |
| Pegunungan Bintang | 38.94 | 39.68 | 40.91 | 41.9 | 47.95 | 2.65 |
| Tolikara | 45.68 | 46.16 | 46.38 | 47.11 | 43.24 | 1.19 |
| Sarmi | 59.51 | 60.48 | 60.99 | 61.27 | 47.89 | 1.16 |
| Keerom | 62.49 | 62.73 | 63.43 | 64.1 | 62.31 | 0.99 |
| Waropen | 61.68 | 61.97 | 62.35 | 63.1 | 64.99 | 0.96 |
| Supiori | 59.4 | 59.7 | 60.09 | 60.59 | 64.08 | 0.76 |
| Mamberamo Raya | 47.28 | 47.88 | 48.29 | 49 | 61.23 | 1.54 |
| Nduga | 24.42 | 25.38 | 25.47 | 26.56 | 50.25 | 3.37 |
| Lanny Jaya | 43.05 | 43.28 | 44.18 | 45.16 | 27.87 | 1.94 |
| Mamberamo Tengah | 42.43 | 43.19 | 43.55 | 44.15 | 46.49 | 1.77 |
| Yalimo | 43.33 | 44.21 | 44.32 | 44.95 | 45.5 | 1.61 |
| Puncak | 37.73 | 38.05 | 39.41 | 39.96 | 46.19 | 2.14 |
| Dogiyai | 51.46 | 52.25 | 52.78 | 53.32 | 41.06 | 1.23 |
| Intan Jaya | 42.69 | 43.51 | 44.35 | 44.82 | 54.04 | 1.71 |
| Deiyai | 47.74 | 48.12 | 48.28 | 48.5 | 45.68 | 0.69 |
| Kota Jayapura | 77.46 | 77.86 | 78.05 | 78.56 | 49.07 | 0.57 |
| Papua | 56.25 | 56.75 | 57.25 | 58.05 | 79.23 | 1.24 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Pendidikan

Salah satu upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu melalui bidang pendidikan, yang mana penilaian tentang peningkatan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat berdasarkan perkembangan sarana dan prasarana yang tersedia.

Sarana dan prasarana pendidikan di provinsi Papua, cenderung mengalami perkembangan yang bervariasi. Untuk gedung sekolah selama tahun 2013-2016 terlihat terus mengalami peningkatan. Gedung SMK terlihat mengalami perkembangan pesat dibandingkan gedung sekolah lainnya. Rata-rata pertumbuhan pembangunan SMK mencapai 12.22 % pertahun. Sedangkan SMP dan SMA terlihat perkembangannya agak lambat dengan rata-rata pertumbuhan 2.88 % dan 2.34 %.

Tabel 2.15.
Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2016

| Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata ² growth |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Sekolah Dasar | 2,829 | 2,982 | 2,415 | 2,277 | -6.44 |
| Sekolah Menengah Pertama | 540 | 582 | 582 | 587 | 2.88 |
| Sekolah Menengah Atas | 197 | 202 | 212 | 211 | 2.34 |
| Sekolah Menengah Kejuruan | 93 | 94 | 117 | 130 | 12.22 |
| Jumlah | 3,659 | 3,860 | 3,326 | 3,205 | -3.99 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018

Untuk tenaga guru di provinsi Papua, terlihat mengalami perkembangan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16.23 % pertahun. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh tenaga guru SD yaitu sebesar 26.34 % yang diikuti oleh tenaga guru SMA (18.88%), SMP (16.12%) dan SMK (11.65%).

Tabel 2.16.
Jumlah Guru Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2016

| Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata ² growth |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Sekolah Dasar | 12,348 | 11,997 | 8,310 | 17,667 | 26.34 |
| Sekolah Menengah Pertama | 5,060 | 7,089 | 7,331 | 7,687 | 16.12 |
| Sekolah Menengah Atas | 2,586 | 3,671 | 3,971 | 4,230 | 18.88 |
| Sekolah Menengah Kejuruan | 2,214 | 3,077 | 2,502 | 2,869 | 11.65 |
| Jumlah | 22,208 | 25,834 | 22,114 | 32,453 | 16.23 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018

Perkembangan murid tahun 2013-2016 secara rata-rata mengalami pertumbuhan 4.58%, lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan guru yang mencapai 16.23%. Jika dilihat dari jenjang pendidikan pertumbuhan murid tingkat SMK menempati urutan pertama yang mencapai 9,46%, disusul dengan SMA yang mencapai 6.43 dan tingkat SMP mencapai 5.44%, sedangkan SD tercatat sebesar 3.85%.

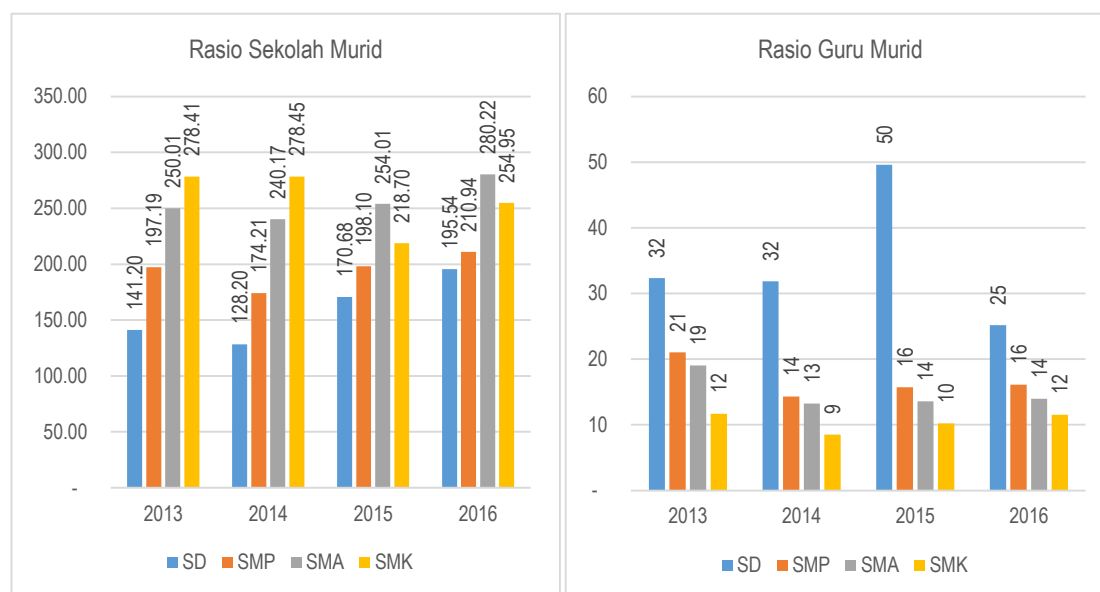
Tabel 2.17.
Jumlah Murid Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2016

| Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata ² growth |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Sekolah Dasar | 399,444 | 382,292 | 412,187 | 445,243 | 3.85 |
| Sekolah Menengah Pertama | 106,482 | 101,392 | 115,296 | 123,823 | 5.44 |
| Sekolah Menengah Atas | 49,252 | 48,514 | 53,851 | 59,126 | 6.43 |
| Sekolah Menengah Kejuruan | 25,892 | 26,174 | 25,588 | 33,144 | 9.46 |
| Jumlah | 581,070 | 558,372 | 606,922 | 661,336 | 4.58 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018

Pesatnya pertumbuhan pembangunan gedung sekolah dibanding perkembangan murid berdampak pada rasio sekolah murid. Rasio sekolah murid di tingkat SD tahun 2013-2016 terlihat bergerak turun dari 181 murid per sekolah menjadi 159 murid per sekolah. Rasio murid SMP dan SMA dengan sekolah terlihat mengalami hal yang sama sedangkan rasio sekolah murid SMK terlihat tidak terjadi perubahan sejak tahun 2012-2014. Jumlah murid SD tahun 2012 turun dari 393.794 orang menjadi 382.292 orang tahun 2014, sehingga rata-rata pertumbuhan dari menjadi -1,43%.

Gambar 2.20.
Rasio Sekolah Dan Guru Terhadap Murid Menurut
Jenjang Sekolah Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2016



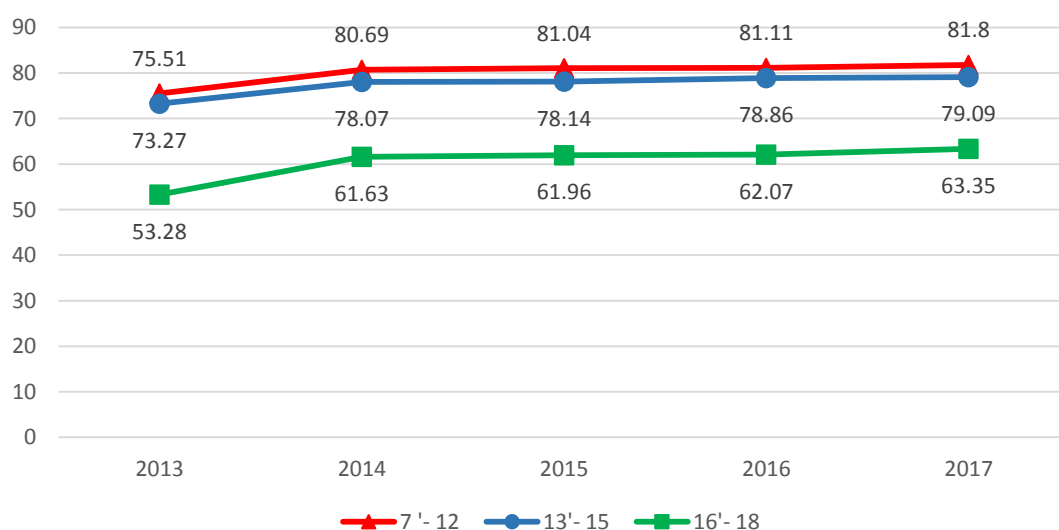
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Rasio guru murid untuk setiap jenjang pendidikan di provinsi Papua terlihat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2013-2015. Rasio guru murid untuk jenjang SD tahun 2013 sebesar 32 murid per guru, turun menjadi 24 murid per guru tahun 2015. Demikian pula untuk tingkat SMP, SMA dan

SMK juga mengalami hal yang sama, sebagaimana yang digambarkan pada gambar 2.19. Berdasarkan data sarana dan prasarana di tabel sebelumnya terlihat bahwa turunnya rasio guru sekolah untuk semua jenjang pendidikan disebabkan karena adanya ketidak seimbangan perkembangan sekolah dan guru, dengan kata lain perkembangan sarana lebih cepat dibandingkan perkembangan guru.

Angka partisipasi sekolah di provinsi Papua terlihat mengalami perkembangan yang cukup berarti sepanjang tahun 2013-2017, walaupun dalam perjalanannya sempat turun. Angka partisipasi sekolah provinsi Papua, memang belum mencapai angka yang ideal, terlihat dari akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan 2013 untuk usia 7-12 tahun tercatat 75,514% artinya masih terdapat 24,49% penduduk usia 7-12 yang tidak bersekolah. Tahun 2017, terlihat ada perkembangan positif untuk usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah meningkat menjadi 81,80%. Demikian juga untuk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun terlihat ada perkembangan angka partisipasi sekolah namun angkanya lebih rendah dari penduduk usia 7-12 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Perkembangan angka partisipasi sekolah dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Gambar 2.21.
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2010-2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Angka Partisipasi Kasar provinsi Papua pada setiap jenjang pendidikan terlihat bervariasi. APK jenjang pendidikan sekolah dasar sepanjang tahun 2013-2017 terlihat mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 91.98 persen. Kemudian jenjang pendidikan SMP dan SMA

juga terlihat meningkat setiap tahunnya, dengan masing-masing mencapai rata-rata SMP (72.77 %) dan SMA/SMK (63.35 %), namun untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat jauh lebih rendah yaitu sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 82.2% dan 67.94%. Kondisi ini merefleksikan bahwa daya serap penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan tanpa melihat batas usia di provinsi Papua masih rendah.

Tabel 2.18.
Angka Partisipasi Pendidikan Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2017

| Angka Partisipasi | Tahun | SD | SMP | SMA/SMK |
|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| Angka Partisipasi Kasar | 2013 | 86.39 | 64.95 | 53.47 |
| | 2014 | 90.67 | 71.02 | 61.53 |
| | 2015 | 95.15 | 73.59 | 66.97 |
| | 2016 | 94.74 | 72.07 | 66.85 |
| | 2017 | 92.94 | 82.2 | 67.94 |
| | Rata-Rata | 91.98 | 72.77 | 63.35 |
| Angka Partisipasi Murni | 2013 | 72.9 | 45.88 | 36.53 |
| | 2014 | 78.36 | 53.68 | 43.11 |
| | 2015 | 78.56 | 54.21 | 43.22 |
| | 2016 | 78.66 | 54.26 | 43.27 |
| | 2017 | 78.83 | 56.13 | 43.48 |
| | Rata-Rata | 77.46 | 52.83 | 41.92 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain itu, angka partisipasi murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya di provinsi Papua terlihat semakin meningkat angkanya tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Bisa jadi disebabkan karena ada yang *drop out* atau masih berada di jenjang SMP. Terlihat angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD sebesar 72.9% tahun 2013, meningkat menjadi 78,36% pada tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2017 meningkat lagi sebesar 78.83%. Angka partisipasi murni ditingkat SMP dan SMA/SMK sampai dengan tahun 2017 juga meningkat masing-masing sebesar 56.13% dan 43.48. meskipun demikian nilai rata-rata capaian APM setiap jenjang pendidikan SD masih mendominasi jika dibandingkan tingkat SMP dan SMA/SMK. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya proporsi penduduk usia sekolah di provinsi Papua yang

sekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan ideal. Masih ada ketimpangan penduduk yang cukup tinggi terhadap akses pendidikan.

Jika dilihat antar kabupaten/kota terlihat masih terdapat kesenjangan angka partisipasi murni (APM) dan dan angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan. APK tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI, diduduki oleh Kabupaten Mappi dengan angka 119.11% kemudian diikuti Kabupaten Merauke sebesar 116.99%, Kabupaten Biak Numfor sebesar 115.9% dan seterusnya. Sedangkan terdapat 13 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai APK di bawah 100% di antaranya adalah Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Paniai, Deiyai, Yahukimo, Intan Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara dan Puncak. Selain itu, APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah Kabupaten Mamberamo Raya yaitu sebesar 97.6%, kemudian diikuti Kabupaten Merauke dan Supiori masing-masing sebesar 95.65% dan 94.25%. terdapat juga daerah dengan capaian APM terendah di antaranya adalah Kabupaten Deiyai (59.51%), Nduga (56.95%) dan Puncak (48.88). Terlihat selisih antara APK dan APM pada masing-masing kabupaten. karena angka partisipasi sekolah (APM) menunjukkan anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu maka bila semuanya bersekolah tepat waktu maka nilainya mencapai 100. Biasanya angka APM akan lebih rendah dari APK dikarenakan nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Jadi selisih antara APK dan APM menggambarkan proporsi murid yang terlambat sekolah atau terlalu cepat sekolah.

Tabel 2.19.
Angka Partisipasi Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Papua Tahun 2017

| Kabupaten/Kota | SD / MI | | SMP / MTS | | SMA / SMK / MA | |
|-----------------|---------|-------|-----------|-------|----------------|-------|
| | APK | APM | APK | APM | APK | APM |
| Merauke | 116.99 | 95.65 | 94.2 | 68.2 | 91.07 | 67.13 |
| Jayawijaya | 97.4 | 88.09 | 98.09 | 71.2 | 103.4 | 70.67 |
| Jayapura | 110.55 | 93.94 | 100.54 | 71.57 | 131.83 | 68.06 |
| Nabire | 105.17 | 89.72 | 92.18 | 68.12 | 92.02 | 60.89 |
| Kepulauan Yapen | 108.91 | 93.97 | 94.08 | 65.55 | 87.91 | 56.23 |
| Biak Numfor | 115.9 | 91.64 | 104.38 | 71.13 | 106.17 | 64.59 |
| Paniai | 86.07 | 72.52 | 94.08 | 55.99 | 39.4 | 22.73 |
| Puncak Jaya | 89.13 | 73.69 | 55.89 | 28.46 | 47.62 | 18.18 |
| Mimika | 104.14 | 91.87 | 125.32 | 73.15 | 119.56 | 68.98 |
| Boven Digoel | 100.2 | 83.48 | 106.19 | 67.65 | 58.96 | 29.84 |
| Mappi | 119.11 | 85.68 | 57.44 | 35.96 | 26.39 | 15.16 |

| Kabupaten/Kota | SD / MI | | SMP / MTS | | SMA / SMK / MA | |
|--------------------|---------|-------|-----------|--------|----------------|--------|
| | APK | APM | APK | APM | APK | APM |
| Asmat | 100.35 | 81.34 | 58.23 | 36.45 | 41.42 | 18.11 |
| Yahukimo | 77.56 | 60.4 | 47.98 | 22.73 | 28.44 | 16.03 |
| Pegunungan Bintang | 86.86 | 67.28 | 53.04 | 28.24 | 42.59 | 26.28 |
| Tolikara | 62.87 | 60.46 | 73.33 | 50.85 | 48.66 | 32.09 |
| Sarmi | 111.46 | 93.78 | 93.2 | 75.79 | 71.37 | 48.83 |
| Keerom | 101.89 | 87.68 | 95.5 | 69.54 | 81.1 | 62.88 |
| Waropen | 110.33 | 91.29 | 78.19 | 69.41 | -109.41 | -64.97 |
| Supiori | 110.56 | 94.25 | -101.86 | -66.32 | 86.88 | 57.24 |
| Mamberamo Raya | 112.15 | 97.6 | 69.17 | 52.65 | 54.43 | 49.38 |
| Nduga | 66.45 | 56.95 | 47.77 | 30.67 | 12.69 | 6.46 |
| Lanny Jaya | 72.87 | 68.85 | 87.48 | 67.74 | 51.56 | 43.67 |
| Mamberamo Tengah | 88.13 | 85.85 | 71.03 | 70.31 | 79.18 | 59.91 |
| Yalimo | 91.77 | 83.34 | 78.46 | 53.32 | 42.4 | 30.14 |
| Puncak | 58.82 | 48.88 | 35.71 | 18.76 | 19.04 | 12.41 |
| Dogiyai | 102.49 | 84.24 | 81.59 | 64.45 | 49.06 | 40.7 |
| Intan Jaya | 74.73 | 61.74 | -40.84 | -12.61 | -25.31 | -12.01 |
| Deiyai | 81.26 | 59.51 | 53.91 | 41.42 | 45.96 | 39.86 |
| Kota Jayapura | 105.23 | 93.28 | 108.69 | 80.85 | 105.25 | 62.75 |
| Papua | 92.94 | 78.83 | 82.2 | 56.13 | 67.94 | 43.48 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

APK dan APM untuk jenjang SMP/MTS yang tertinggi di Kabupaten Mimika, yang terlihat mencolok dibandingkan daerah kabupaten lainnya di Provinsi Papua. APK dan APM Kabupaten Mimika memiliki nilai masing-masing 125.32% dan 73.15% sedangkan kabupaten Puncak memiliki APK dan APM terendah dengan nilai masing-masing 35.71% dan 18.76%. Pada jenjang SMA/SMK/MA angka partisipasi kasar tertinggi diduduki oleh kabupaten Jayapura dengan angka sebesar 131.83% dan angka partisipasi murni tertinggi diduduki oleh kabupaten Jayawijaya dengan nilai mencapai 70.67%. Sedangkan kabupaten dengan APK dan APM terendah yaitu kabupaten Nduga dengan nilai 12.69% dan 6.46%.

Berdasarkan APK dan APM per wilayah kabupaten/kota di atas, terlihat jelas bahwa Provinsi Papua selama ini mengalami ketimpangan *with in* dan *with out* dalam pembangunan pendidikan. Dikatakan ketimpangan *with in* karena sebagian besar daerah di Papua mempunyai angka APM yang rendah, bahkan diantaranya ada yang dibawah 50, terutama untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA, seperti Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mamberamo Raya. Sedangkan dikatakan *with out* karena ketimpangan pembangunan pendidikan juga terjadi antarwilayah. Untuk itu perlu dipikirkan

suatu kebijakan pembangunan pendidikan yang inovatif dan efektif untuk mengatasi kedua ketimpangan tersebut dalam pembangunan pendidikan di masa mendatang.

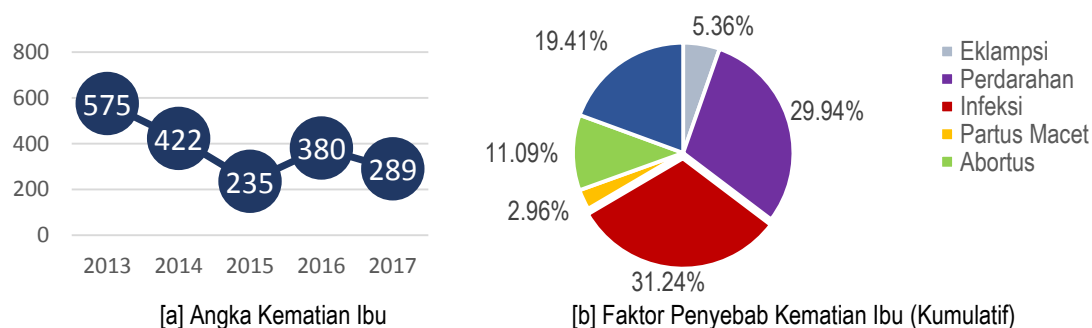
2.1.3.2. Kesehatan

1. Angka kematian ibu

Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat yaitu, kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, prevalensi gizi kurang dan umur angka harapan hidup.

Derajat kesehatan di provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan positif yang tergambar dalam perkembangannya dari tahun 2013-2017. Dari data yang ada terlihat angka kematian ibu perkulahiran tercatat mencapai 575 di tahun 2013, kemudian dapat ditekan menjadi 289 per 100.000 kelahiran tahun 2017. Faktor penyebab kematian ibu saat kelahiran, pemicu terbesarnya disebabkan karena infeksi yaitu mencapai 31,24% dan pendarahan mencapai 29,94%.

Gambar 2.22.
Angka Kematian Ibu Dan Faktor-Faktor Penyebabnya Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

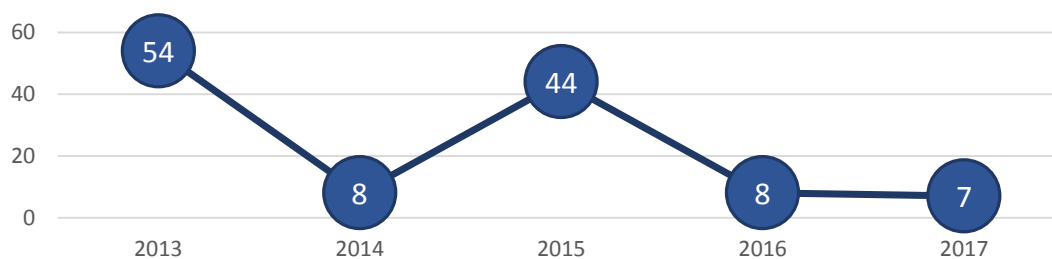


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018

2. Angka kematian Bayi

Jika melihat angka kematian bayi (AKB) di Papua perkembangannya mengalami fluktuasi, yang tercatat 54 kematian bayi lahir pada tahun 2013 turun menjadi 8 pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 44 pada tahun 2015 dan kemudian turun menjadi 7 pada tahun 2017. Secara rata-rata angka kematian bayi dalam kurun waktu 2013-2017 mencapai 24,20 per 1.000 bayi yang lahir. Artinya, ada sekitar 24,20 kematian setiap 1.000 bayi yang lahir. Angka ini masih lebih tinggi dari angka kematian bayi secara nasional yang dicatat BPS pada tahun 2016 yang mencapai 25,5 kematian setiap 1.000 bayi lahir.

Gambar 2.23.
Angka Kematian Bayi Di Provinsi Papua Tahun 2013 - 2017



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017

3. Perkembangan HIV/AIDS

Sampai dengan tahun 2016, secara kumulatif jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan mencapai 319.103 kasus, dimana Papua penyumbang nomor 3 terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sejak tahun 1987-2013 kasus HIV/AIDS di Papua yang dilaporkan mencapai 25.851 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2011-2014, kasus HIV/AIDS yang dilaporkan cenderung menurun. Sampai dengan tahun 2016, kasus HIV/AIDS yang dilaporkan naik jika dibandingkan tahun 2015 menjadi 3.936 kasus, serta menempati posisi ke 5 terbesar di Indonesia.

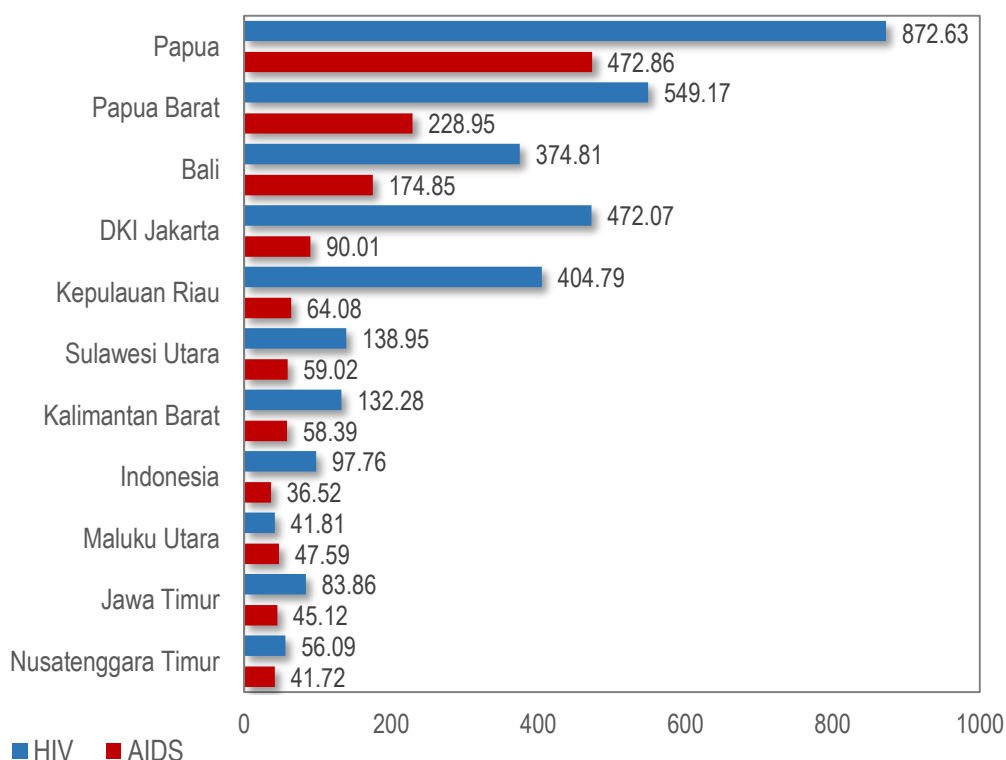
Tabel 2.20.
Perkembangan HIV/AIDS Di Indonesia dan 10 Provinsi Yang Terbanyak Melaporkan HIV/AIDS Sampai Dengan Tahun 2014

| Provinsi | 1987-2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| 1. DKI Jakarta | 36.623 | 5.981 | 4.825 | 6.574 | 54.003 |
| 2. Jawa Timur | 28.788 | 6.131 | 5.798 | 7.623 | 48.340 |
| 3. Papua | 25.851 | 4.616 | 3.720 | 3.936 | 38.123 |
| 4. Jawa Barat | 14.349 | 3.801 | 4.398 | 5.848 | 28.396 |
| 5. Jawa Tengah | 10.302 | 3.607 | 3.968 | 5.434 | 23.311 |
| 6. Bali | 12.143 | 3.009 | 2.985 | 3.249 | 21.386 |
| 7. Sumatera Utara | 11.444 | 1.859 | 1.544 | 2.009 | 16.856 |
| 8. Sulawesi Selatan | 5.555 | 1.048 | 941 | 1.564 | 9.108 |
| 9. Kalimantan Barat | 6.245 | 867 | 635 | 635 | 8.382 |
| 10. Kepulauan Riau | 4.498 | 1.017 | 1.097 | 1.261 | 7.873 |
| Total 10 Provinsi | 155.798 | 31.936 | 29.911 | 38.133 | 255.778 |
| Total Indonesia | 191.568 | 40.674 | 38.120 | 48.741 | 319.103 |

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI (2016)

Prevalensi HIV/AIDS pada penduduk Papua tahun 2014 tertinggi di Indonesia. Diperkirakan dari 100.000 penduduk yang terjangkit HIV mencapai 873 orang dan AIDS sebanyak 473 orang. Angka prevalensi Papua ini jauh diatas DKI Jakarta dan Bali yang pada umumnya lebih banyak menyebar kaum expatriat. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mayoritas yang terkena HIV/AIDS adalah usia produktif yang penularannya kurang lebih 90 persen disebabkan karena hubungan seks. Sementara untuk rata-rata Indonesia angka prevalensi HIV adalah 98 orang dan AIDS sebanyak 37 orang.

Gambar 2.24.
Angka Prevalensi HIV/AIDS Di Provinsi Papua
Tahun 1987 – 2016 (per 100.000 penduduk)



Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI (2016)

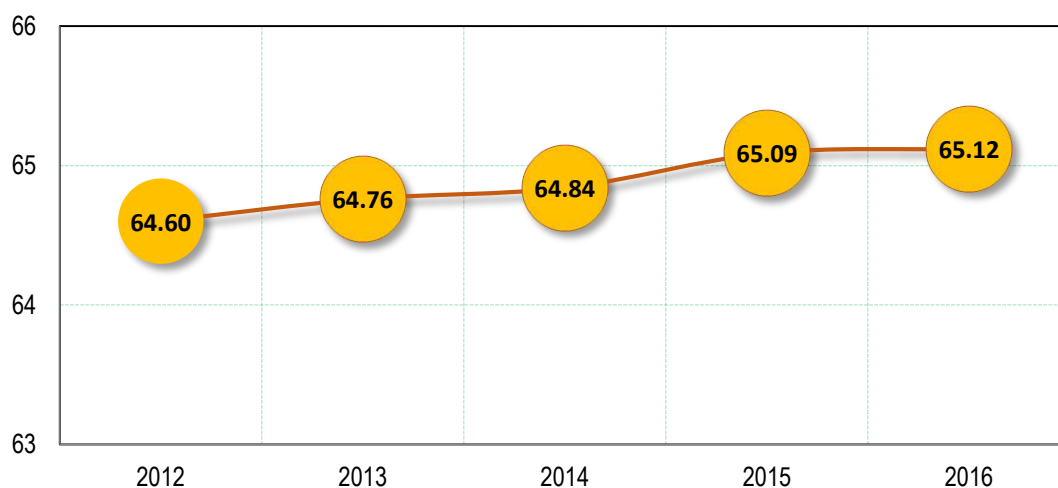
Secara kumulatif berdasarkan penyebarannya per kabupaten di Papua tahun 2014, tercatat bahwa pengidap HIV/AIDS tertinggi terdapat di kabupaten Mimika yaitu mencapai 3.921 orang, kemudian di kabupaten Nabire yaitu mencapai 3.760 orang dan di kota Jayapura mencapai 2.210 orang. Kabupaten Intan Jaya, kabupaten Puncak jaya dan kabupaten Yahukimo, terlihat pengidap HIV/AIDS terendah di Papua dengan besaran masing-masing 2 orang, 19 orang dan 22 orang (Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2016). Tentunya tindakan preventif untuk penyebaran dan

penularan HIV/AIDS perlu lebih ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

4. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator derajat kesehatan adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Papua menunjukkan perbaikan namun pergerakannya cenderung melambat dan masih dibawah rata-rata harapan hidup ideal. Tahun 2010, angka harapan hidup rata-rata Papua 64,31 meningkat 0,15 tahun menjadi 64,46 di tahun 2012. Tahun 2013 capaian angka harapan hidup naik 0,14 tahun menjadi 64,60 tahun. Tahun 2014, angka harapan hidup bergerak naik menjadi 64,84 tahun atau hanya naik sebesar 0,08 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 65,09 tahun dan pada tahun 2016 naik 0,03 menjadi 65,12 tahun. Angka harapan hidup masih dibawa dari angka harapan hidup nasional yang tercatat mencapai 70,8 tahun pada tahun 2016 atau masih minus (- 4,88) tahun dari angka harapan hidup di Indonesia.

Gambar 2.25.
Angka Harapan Hidup Di Provinsi Papua Tahun 2012 – 2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018

5. Cakupan Persalinan Yang Ditolong Tenaga Medis

Kesehatan ibu merupakan prioritas pembangunan kesehatan baik secara nasional maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pembangunan kesehatan, salah satunya adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Cakupan persalinan di Papua yang ditolong tenaga kesehatan cenderung menurun persentasenya dari 53,42% di tahun 2011 menjadi 32,85% di tahun 2012. Tahun berikutnya menunjukkan peningkatan menjadi

33,31% pada tahun 2013 dan 33,77% di tahun 2014, masih jauh di bawah angka nasional yang mencapai 92,08 pada tahun 2014. Lihat Gambar 2.26.

Kejadian kematian tertinggi pada bayi dan balita terjadi pada masa neonatus. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa 78,5% dari kematian neonatal terjadi pada umur 0-6 hari. Dengan melihat adanya risiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama kelahiran, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering, minimal dua kali dalam minggu pertama. Langkah ini dilakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Gambar 2.26.
Cakupan Persalinan Di Tolong Tenaga Kesehatan Di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2011-2014



Jumlah kelahiran bayi di Papua cenderung menurun, walaupun terlihat sempat melonjak tinggi di tahun 2012 yang kemudian menurun kembali menjadi hampir setengahnya di tahun 2014. Dari jumlah bayi yang ada di Papua, angka kunjungan neonatal pertama persentasenya cenderung meningkat. Tahun 2010 tercatat jumlah kunjungan neonatal pertama (KN1) mencapai 10.562 bayi atau hanya 24,54% dari total bayi yang dilahirkan, dan persentase ini masih jauh dibawah rata-rata Indonesia yang mencapai 86,65%. Kunjungan neonatal pertama terendah terjadi tahun 2012, yaitu sebesar 17.905 bayi atau sebesar 17,91% dari total bayi yang dilahirkan.

Tahun 2014, kunjungan neonatal pertama terlihat jumlahnya meningkat yaitu sebesar 19.823 bayi atau mencapai 76,04% dari total bayi yang dilahirkan.

Tabel 2.21.
Kunjungan Neonatus Dan Pelayanan Kesehatan Bayi Di Provinsi Papua Dan Perbandingannya Dengan Indonesia Tahun 2010-2014

| Thn | Jumlah Bayi | KN1 | | | KN Lengkap | | | Yankes Bayi | | |
|------|-------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|---------|---------------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | Papua Jumlah KN1 (bayi) | Papua (%) | Indonesia (%) | Papua Jumlah KN Lengkap (bayi) | Papua % | Indonesia (%) | Papua Jumlah Yankes (bayi) | Papua (%) | Indonesia (%) |
| 2010 | 43.048 | 10.562 | 24,54 | 86.65 | 9.000 | 20,91 | 80.86 | 6.109 | 14,19 | 81.23 |
| 2011 | 57.326 | 11.969 | 20,88 | 91.31 | 10.792 | 18,83 | 84.95 | 15.041 | 26,24 | 86.06 |
| 2012 | 99.980 | 17.905 | 17,91 | 85.49 | 14.689 | 14,69 | 81.15 | 20.899 | 20,90 | 79.88 |
| 2013 | 42.886 | 21.098 | 49,20 | 95.91 | 14.036 | 32,73 | 92.00 | 17.966 | 41,89 | 91.69 |
| 2014 | 26.068 | 19.823 | 76,04 | 91.56 | 12.680 | 48,64 | 88.68 | 7.046 | 27,03 | 87.27 |

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 2015 (data diolah)

Untuk kunjungan neonatal lengkap persentasenya terlihat semakin rendah dibanding kunjungan neonatal pertama. Kunjungan neonatal lengkap tahun 2010 tercatat hanya 9000 bayi atau 20,91% dari total bayi yang dilahirkan, demikian juga tahun 2012, walaupun jumlah bayi meningkat namun persentase yang melakukan kunjungan neonatal lengkap hanya 14,69% dari total bayi yang dilahirkan. Kunjungan neonatal lengkap tertinggi terlihat di tahun 2014, yaitu sebesar 12.680 bayi atau mencapai 48,64% dari total bayi yang dilahirkan.

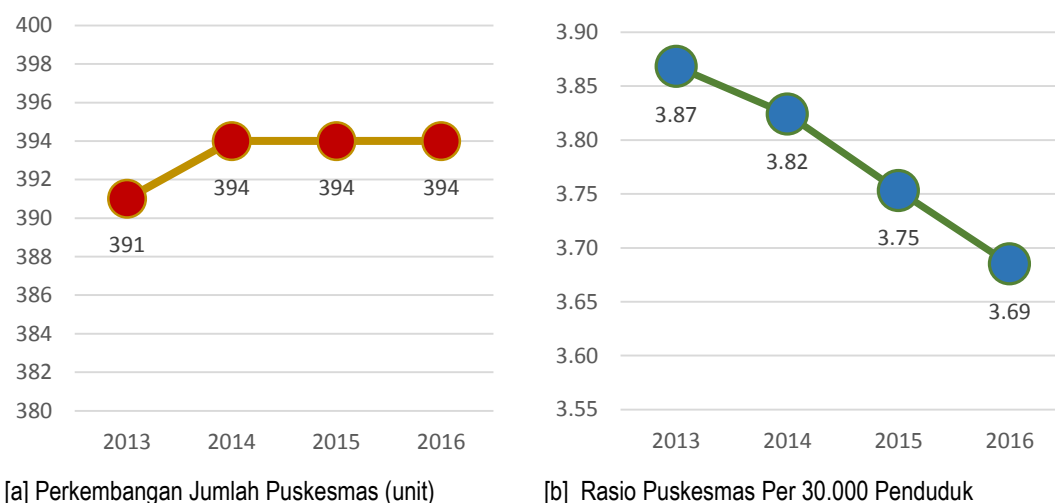
Kondisi yang sama terjadi juga untuk pelayanan kesehatan bayi yang jumlah dan persentasenya terlihat semakin mengecil. Tahun 2010, pelayanan kesehatan bayi hanya 6.109 bayi atau 14,19% dari jumlah bayi yang dilahirkan, dan kondisi ini jauh dibawah rata-rata Indonesia yang mencapai 81,23%. Pelayanan kesehatan bayi tertinggi terlihat di tahun 2012, yaitu mencapai 20.889 bayi, namun dari persentase pelayanan bayi tertinggi terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 41,89% dari total bayi yang dilahirkan.

6. Jumlah Puskesmas

Jumlah puskesmas di provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2016 bertambah sebanyak 3 puskesmas. Perkembangan puskesmas terlihat di tahun 2013, yang meningkat sebanyak 3 puskesmas yaitu dari 334

puskesmas menjadi 394 puskesmas. Sementara tahun 2014 – 2016 tidak ada peningkatan jumlah puskesmas..

Gambar 2.27.
Jumlah Puskesmas Dan Rasio Puskesmas Terhadap
Penduduk Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2016



Jika dilihat dari rasio puskesmas per 30 ribu penduduk, rasio di provinsi Papua nampak lebih baik dibanding rata-rata Indonesia. Rasio puskesmas per 30 ribu penduduk tahun 2013 mencapai 3,87 puskesmas melayani 30 ribu penduduk. Jika diperhatikan rasio puskesmas per penduduk di Papua, perkembangannya cenderung menurun. Rasio puskesmas per penduduk tertinggi terjadi di tahun 2013 yaitu 3,87 puskesmas melayani 30 ribu penduduk. Sampai dengan tahun 2014-2016, rasio puskesmas per penduduk terus menurun.

7. Perkembangan Tenaga Kesehatan

Perkembangan tenaga kesehatan dan non kesehatan di provinsi Papua tahun 2014-2016, terlihat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 1,63% per tahun. Tenaga dokter spesialis di provinsi Papua, walaupun jumlahnya sempat menurun dari tahun 2014 ke 2015, namun tahun 2016 jumlahnya meningkat 2 kali lipat menjadi 251 orang dengan laju pertumbuhan 26,62% per tahun. Tenaga kesehatan dokter umum terlihat jumlahnya terus meningkat dari 592 orang di tahun 2015, menjadi 774 di tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan 7,00%. Tenaga farmasi, dan bidan terlihat juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 61,47% dan 20,23%. Selain yang disebutkan diatas, tenaga

kesehatan lainnya cenderung menurun jumlahnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai (-11,67%) per tahun.

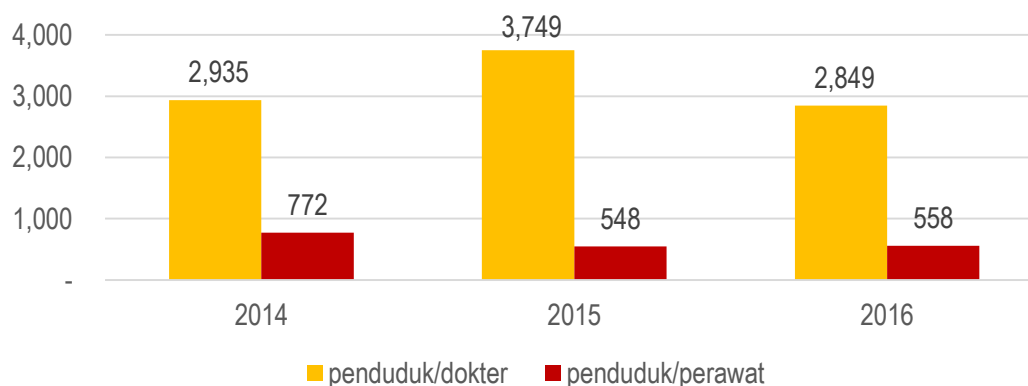
Tabel 2.22.
Perkembangan Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan
Di Provinsi Papua
Tahun 2014-2016

| Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan | | 2014 | 2015 | 2016 | Rata ² Pertumb 2010-2014 |
|------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|--|
| | | (orang) | (orang) | (orang) | (%) |
| Tenaga Kesehatan | Dokter Spesialis | 244 | 124 | 251 | 26,62 |
| | Dokter Umum | 711 | 592 | 774 | 7,00 |
| | Dokter Gigi | 98 | 124 | 101 | 3,99 |
| | Perawat | 4.006 | 4.383 | 5.744 | 20,23 |
| | Bidan | 1.602 | 1.841 | 1.794 | 6,18 |
| | Farmasi | 327 | | 528 | 61,47 |
| | Lainnya | 1.068 | 1.161 | 789 | -11,67 |
| | Jumlah | 8.056 | 8.225 | 9.981 | 11,72 |
| Tenaga Non Kesehatan | | 1.281 | 802 | 1.128 | 1,63 |
| Total SDM Kesehatan | | 9.337 | 9.027 | 11.109 | 9,87 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Perkembangan rasio dokter per penduduk, tahun 2014-2016 rasionya semakin menurun, sedangkan untuk rasio perawat per penduduk terlihat meningkat di provinsi Papua, namun keduanya masih masuk kategori ideal. Untuk jumlah penduduk 2.935 dilayani oleh 1 orang dokter di tahun 2014, dan tahun 2016, 2.849 penduduk dilayani oleh 1 orang dokter, sedangkan untuk rasio perawat per penduduk di tahun 2014, 1 perawat melayani 772 penduduk, dan tahun 2015 sempat turun rasionya menjadi 548 penduduk dilayani 1 perawat, namun di tahun 2016 terlihat naik menjadi 1 perawat melayani 558 penduduk.

Gambar 2.28.
Rasio Dokter Dan Perawat Terhadap Penduduk
Di Provinsi Papua Tahun 2014-2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.1.3.3. Sosial Dan Budaya

Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Agama Kanwil Provinsi Papua, dari total penduduk di tahun 2016 sebanyak 4,061 juta tercatat 2,66 juta orang atau sebesar 65,53% bergama kristen protestan, disusul kemudian yang beragama katolik dengan jumlah 772,17 ribu atau 18,99% dan Islam dengan jumlah 614,684 ribu atau 15,12%.

Tabel 2.23.
Perkembangan Penduduk Menurut Agama Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2016

| Tahun | Kristen Protestan | Katolik | Islam | Hindu | Budha | Total |
|-------|-------------------|---------|---------|-------|-------|-----------|
| 2013 | 1.855.246 | 500.545 | 460.907 | 2.420 | 1.452 | 2.820.570 |
| 2014 | 2.020.150 | 762.461 | 551.057 | 5.513 | 3.898 | 3.343.079 |
| 2015 | 2.036.442 | 784.403 | 651.953 | 6.439 | 4.239 | 3.483.476 |
| 2016 | 2.664.172 | 772.176 | 614.684 | 7.901 | 6.032 | 4.064.965 |

Sumber : Kementerian Agama KANWIL Provinsi Papua, 2016

Pendidikan karakter di Papua dapat dikembangkan melalui budaya lokal berbasis gereja dan masyarakat adat. Unsur budaya dan agama perlu diikutsertakan dalam kurikulum dan program pendidikan masyarakat Papua. Keberadaan tempat ibadah untuk pendidikan karaktermasyarakat menjadi penting untuk dikembangkan. Media gereja dan tempat ibadahlain adalah komponen masyarakat Papua yang dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan (Bappenas, 2015).

Sesuai dengan jumlah penganut Kristen Protestan yang terbesar di Papua, demikian juga sarana ibadahnya terbesar jumlahnya yaitu sampai dengan tahun 2016 tercatat terdapat 5.525 gereja, disusul berikutnya sarana ibadah agama Katholik dengan jumlah 1.054 gereja pada tahun 2016. Untuk sarana ibadah agama Islam, terlihat jumlahnya bertambah dari 835 mesjid di tahun 2013 menjadi 1.171 mesjid di tahun 2016. Sedangkan sarana ibadah agama Hindu, terlihat lambat mengalami pertambahan sepanjang tahun 2013-2016 dengan jumlahnya di tahun 2016 sebanyak 31 Pura, kemudian untuk sarana ibadah agama Budha di tahun 2016 sebanyak 21 vihara.

Tabel 2.24.
Perkembangan Tempat Beribadah Dirinci Menurut Agama
Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016

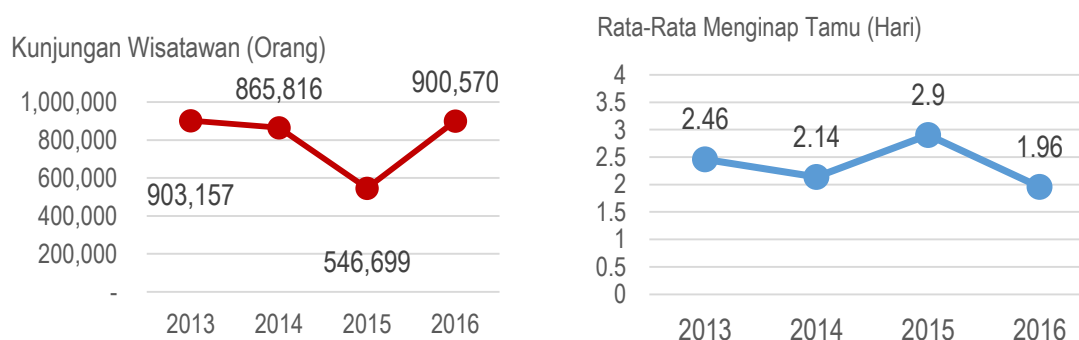
| Tahun | Gereja Kristen Protestan | Gereja Katolik | Masjid | Pura | Vihara |
|-------|--------------------------|----------------|--------|------|--------|
| 2012 | 5.262 | 968 | 625 | 25 | 9 |
| 2013 | 5.948 | 988 | 835 | 27 | 13 |
| 2014 | 8.048 | 1.021 | 935 | 27 | 13 |
| 2015 | 9.948 | 1.054 | 1.022 | 31 | 16 |

Sumber : Kementerian Agama KANWIL Provinsi Papua, 2016

2.1.3.4. Pariwisata

Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi multiplier effect untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain. Objek wisata yang dimiliki Papua belum ditata dengan baik menjadi daya tarik wisata unggulan, padahal potensinya sangat besar karena alam yang dimiliki masih asli dan memiliki budaya khas dan unik Papua. Akibatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Papua masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Wisatawan asing maupun domestic yang berkunjung ke Papua belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Papua meningkat setiap tahunnya walaupun peningkatan jumlah kunjungan tersebut dianggap tidak signifikan. Hal ini juga terlihat dari jumlah tamu yang menginap di hotel dan komodasi lainnya di Provinsi Papua. Salah satu penyebab peningkatan jumlah kunjungan yang tidak signifikan adalah terkendala biaya transportasi yang sulit untuk menjangkau lokasi wisata. Pertimbangan faktor biaya karena sulitnya transportasi menjadi salah satu kendala bagi wisatawan yang berkunjung ke Papua (Bappenas, 2015).

Gambar 2.29.
Kunjungan Wisatawan Dan Lama Tinggal Wisatawan Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2014

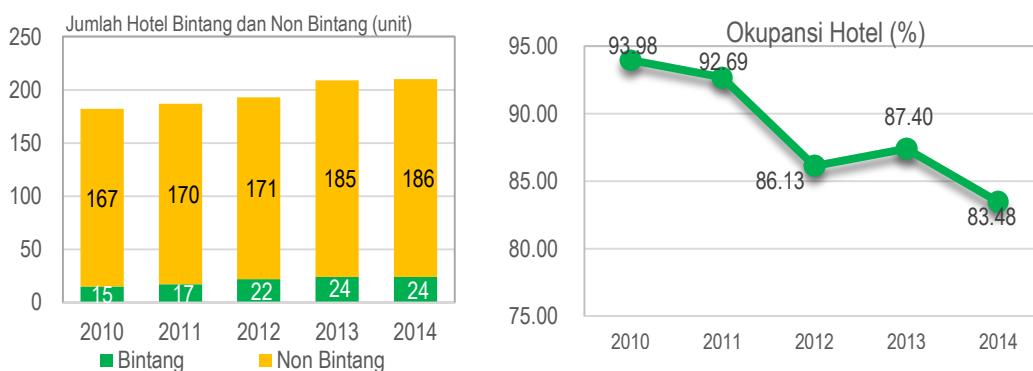


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sektor pariwisata terlihat cenderung fluktuatif, yang tergambarkan dari jumlah kunjungan dan rata-rata menginap tamu yang trendnya mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisata tercatat 903.157 orang, turun menjadi 546.699 orang di tahun 2015 kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 900.570 orang atau meningkat dengan rata-rata 7,91% per tahun. Untuk rata-rata lama tinggal wisatawan perkembangannya terlihat fluktuatif karena sempat menurun di tahun 2014. Tahun 2013 rata-rata lama tinggal wisatawan yaitu selama 2,46 hari, kemudian turun menjadi 2,14 hari di tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan -3,30% per tahun.

Perkembangan hotel berbintang dan non berbintang terlihat meningkat namun disisi lain tingkat okupansi trendnya terlihat cenderung menurun. Sepanjang tahun 2010-2014 jumlah hotel berbintang bertambah 19 unit dan hotel non berbintang bertambah 9 unit dengan tingkat okupansi turun dari 93,98% di tahun 2010 menjadi 83,48% di tahun 2014.

Gambar 2.30.
Jumlah Hotel Dan Tingkat Okupansi Hotel Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2014



2.1.3.5. Pembangunan Gender

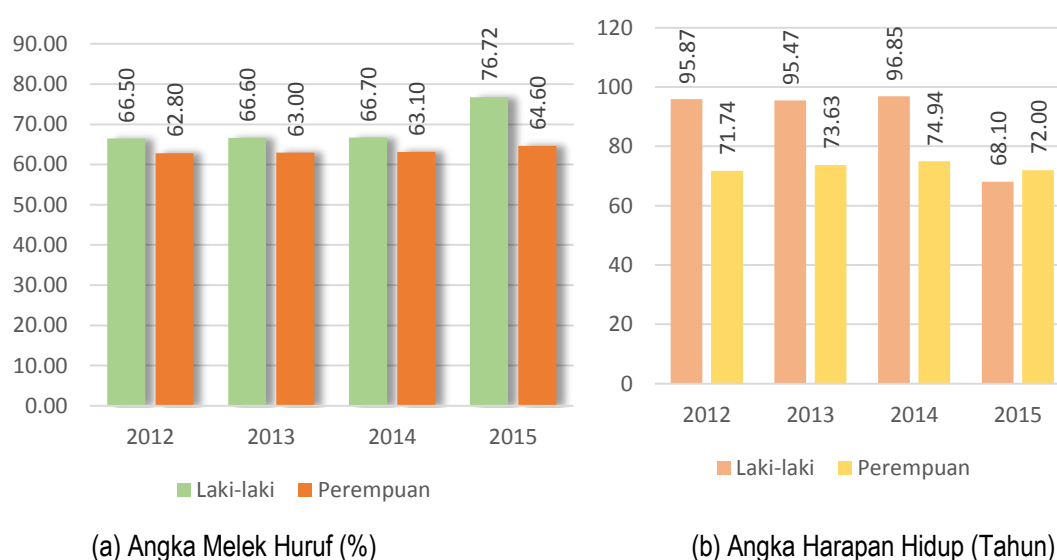
Dalam perspektif Pembangunan Manusia Provinsi Papua pada umumnya, kita masih dikategorikan rendah, dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 58.05. Selanjutnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi trennya terus naik.

Dari sisi kualitas pendidikan gender, terlihat penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum/tidak sekolah proporsinya berfluktuasi dan lebih dominan penduduk perempuan dibanding laki-laki dengan trend yang meningkat. kondisi ini menyebabkan angka melek huruf penduduk perempuan proporsinya berfluktuasi dan juga lebih rendah dari penduduk laki-laki. Tahun

2012 angka melek huruf perempuan hanya mencapai 62,80% sementara Laki-laki mencapai 66,50%. Sampai dengan tahun 2015 angka melek huruf perempuan naik menjadi 64,60% dan laki-laki mencapai 76,72%.

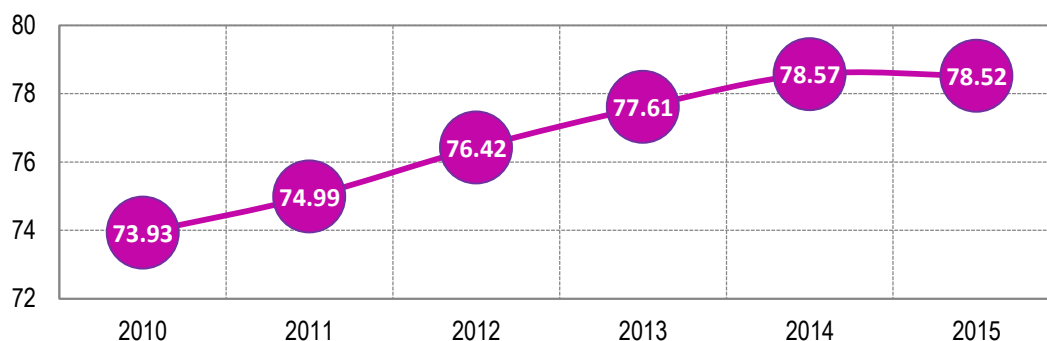
Demikian pula dengan angka harapan hidup (AHH) perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2012 AHH perempuan mencapai 71,74 tahun naik menjadi 72,00 pada tahun 2015, sementara AHH laki-laki pada tahun 2012 tercatat 95,87 turun menjadi 68,10 pada tahun 2015.

Gambar 2.31.
Kualitas Pendidikan Perempuan Dan Laki-Laki Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015



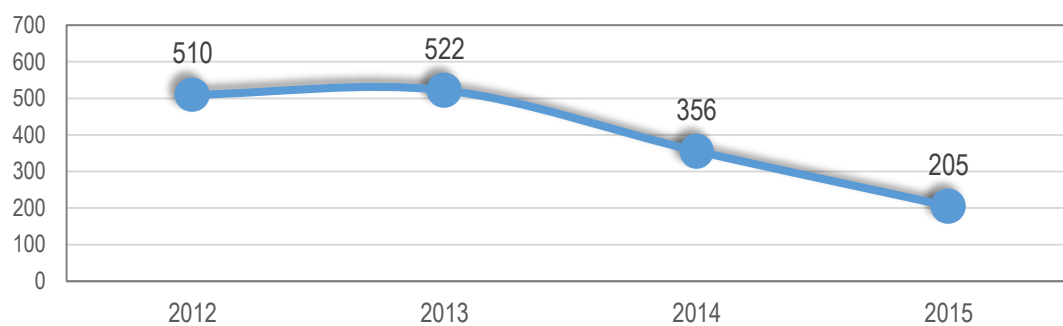
Indeks pembangunan gender di provinsi Papua digunakan untuk melihat bagaimana penduduk di Papua mempunyai kesempatan untuk dapat mengakses hasil pembangunan, dan memanfaatkan haknya untuk mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dari data yang ada terlihat bahwa IPG provinsi Papua mengalami perkembangan, yang mana pada tahun 2010 tercatat 73,93% meningkat 4,64 point menjadi 78,52% di tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua semakin besar, walaupun masih di bawah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia yang berada di angka 92.74% (sambutan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI, Desember 2016). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran aktif Gender dalam pembangunan di Provinsi Papua jika dibandingkan dengan peran aktif Gender dalam pembangunan secara Nasional masih rendah.

Gambar 2.32.
Indeks Pembangunan Gender Di Provinsi Papua
Tahun 2010 dan 2015



Dalam 5 tahun terakhir terlihat kasus KDRT di provinsi Papua angkanya cenderung menurun. Tahun 2012 KDRT tercatat 510 kasus, kemudian naik menjadi 522 kasus di tahun 2013, dan selanjutnya di tahun 2014 terlihat terus menurun signifikan sehingga di tahun 2015 tercatat 205 kasus. Secara rata-rata KDRT di provinsi Papua tercatat sebanyak 398 pertahun dalam kurun waktu 2012-2015.

Gambar 2.33.
Jumlah Kasus KDRT Di Provinsi Papua
Tahun 2012-2015



Sumber : Polda Papua

2.1.3.6. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemerintah Daerah sangat memperhatikan peningkatan kapasitas para pemuda untuk mendapatkan pencapaian terbaik di segala bidang, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, organisasi maupun bidang olahraga. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Ini berarti generasi muda dapat dikatakan penduduk yang berusia antara 0 - 30 tahun.

Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak 3.207,40 ribu jiwa. Dimana jika dirinci menurut usia generasi muda kondisinya sebagai berikut :

Tabel 2.25.
Jumlah Penduduk Papua Menurut Kelompok Generasi
Tahun 2016

| Usia | Jumlah (ribu) | Kelompok Generasi | Proporsi (%) |
|---------|---------------|-------------------------|--------------|
| 0 - 4 | 331.60 | Balita | 10.34 |
| 5 - 9 | 321.80 | Usia Sekolah dan Remaja | 19.89 |
| 10 - 14 | 316.10 | | |
| 15 - 19 | 312.70 | | |
| 20 - 24 | 309.30 | Pemuda | 37.34 |
| 25 - 29 | 297.10 | | |
| 30 - 34 | 278.60 | | |
| 35+ | 1,040.20 | Lainnya (bukan pemuda) | 32.43 |
| Total | 3,207.40 | | |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Terlihat bahwa pada Tabel 2.25 di atas jumlah penduduk yang tergolong generasi muda sangat mendominasi komposisi penduduk di Provinsi Papua tahun 2016. Kurang lebih mencapai 67,57% penduduk di Papua merupakan generasi muda, dimana sekitar 37,34% yang tergolong pemuda atau sebanyak 1.197,70 ribu jiwa. Penduduk dengan usia sebanyak inilah yang harus dibangun dan dibina oleh pemerintah provinsi untuk dikembangkan dan ditingkatkan segala potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dalam undang-undang juga telah ditegaskan bahwa pemberian layanan kepada pemuda harus diwujudkan dengan memberikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Terkait dengan hal tersebut, Provinsi Papua selama ini telah memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pemuda untuk pengembangan karir dan potensi mereka. Misalkan melalui Karang Taruna Papua sebagai wadah pengembangan generasi muda dalam bidang layanan sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Kemudian HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Papua sebagai wadah untuk menjadikan pemuda Papua sebagai pengusaha muda yang handal dan mandiri, dengan cara melibatkan para pengusaha muda Papua untuk memanfaatkan berbagai

peluang bisnis. Selain itu kelompok-kelompok pemuda yang berada dalam lingkungan pendidikan juga selalu dibina dan dibangun karakternya agar dapat menjadi calon pemimpin dan penerus bangsa dimasa mendatang, misalkan pembinaan terhadap Himpunan Pelajar dan Mahasiswa, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Perguruan Tinggi, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Papua, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Papua, dan sebagainya. Adapun dibidang politik, pemerintah provinsi selama ini juga telah memberikan wadah yang dapat diakses oleh seluruh pemuda Papua misalkan KNPI (Kominte Nasional Pemuda Indonesia) Papua yang tersebar di seluruh DPD kabupaten/kota dan DPC distrik. Secara keseluruhan, total jumlah organisasi kepemudaan sampai dengan tahun 2015 adalah 44 organisasi (Disorda Provinsi Papua, 2017).

Pemuda selalu diidentikan dengan prestasinya di bidang olah raga, termasuk juga untuk pemuda Papua. Berbagai prestasi cabang olah raga telah dicetak oleh para pemuda Papua. Segudang prestasi di level nasional, regional dan internasional sudah diukir anak-anak Papua pada berbagai cabang olahraga. Indonesia pun turut bangga. Duta-duta olahraga asal Papua ini tak hanya mengharumkan nama Papua, tapi juga bangsa Indonesia di ajang internasional. Sebut saja Lisa Rumbewas yang sukses meraih medali perak pada Olimpiade tahun tahun 2000 di Beijing, Perlina Karoba dengan medali perunggu di Asian Games Doha Qatar, Ruli Nere dan Metu Duaramuri di cabang sepak bola. Pada level Asia Tenggara, ada Franklin Burumi yang sukses merebut medali emas pada Sea Games di cabang atletik untuk nomor bergengsi 100 meter. Di era sebelumnya, pada cabang atletik, para pendahulu Franklin Burumi juga mencatat prestasi yang sama (Enembe, 2017).

Semua fakta di atas tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah provinsi dalam memberi pembinaan dan pengembangan olah raga di tanah papua selama ini. Berbagai bangunan gedung yang disediakan oleh pemerintah daerah menjadi tempat pengembangan kemampuan para pemuda Papua dalam bidang olahraga, seperti halnya stadion lapangan bola dan atletik, lapangan tenis, Futsal, Gedung Olah Raga dan lain-lainnya. Selain itu juga pemerintah provinsi melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi olah raga dan klub-klub olahraga. Dimana semua ini memberi dampak terhadap peningkatan olahragawan yang berprestasi, yang dari tahun ketahunnya selalu mengalami kenaikan. Selengkapny semua ini dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26.
Pembangunan Olahraga Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2015

| Indikator Pembangunan Olahraga | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Gedung Olah Raga (unit) | 8 | 8 | 10 |
| Olahragawan Berprestasi (orang) | 32 | 43 | 115 |
| Organisasi Olahraga (organisasi) | 43 | 43 | 44 |
| Klub Olahraga (klub) | 105 | 112 | 114 |

Sumber : Disorda Provinsi Papua, 2017

Papua sebagai gudang atlit tiada hentinya selalu mencetak prestasi di setiap event olah raga. Sebagai contoh di event bergengsi nasional yaitu PON (Pekan Olah Raga Nasional), Provinsi Papua selalu dapat mempertahankan posisinya di peringkat 10 besar mulai tahun 1981, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 2.27 berikut ini.

Tabel 2.27.
Peringkat Provinsi Papua Dalam Pekan Olah Raga Nasional
Periode 1973-2016

| Tahun | Event | Prestasi | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah | Peringkat |
| 1973 | PON VIII | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 |
| 1977 | PON IX | 7 | 14 | 7 | 28 | 10 |
| 1981 | PON X | 13 | 24 | 19 | 56 | 7 |
| 1985 | PON XI | 23 | 24 | 26 | 73 | 5 |
| 1989 | PON XII | 23 | 23 | 16 | 62 | 6 |
| 1993 | PON XIII | 17 | 14 | 16 | 47 | 6 |
| 1996 | PON XIV | 17 | 17 | 16 | 50 | 6 |
| 2000 | PON XV | 18 | 17 | 23 | 58 | 7 |
| 2004 | PON XVI | 23 | 13 | 18 | 54 | 7 |
| 2008 | PON XVII | 14 | 23 | 16 | 53 | 11 |
| 2012 | PON XVIII | 9 | 11 | 16 | 36 | 15 |
| 2016 | PON XIX | 19 | 18 | 32 | 69 | 7 |

Sumber : dihimpun dari berbagai sumber

Posisi yang gemilang sempat ditorehkan Provinsi Papua di PON XI Tahun 1985. Kala itu Provinsi Papua mampu berada diperingkat ke-5 dengan perolehan medali sebanyak 73 buah dari 27 Cabor (Cabang Olah Raga) yang diikuti. Meskipun terjadi penurunan peringkat namun sampai dengan tahun 2004 Provinsi Papua masih berada di posisi 10 besar di Indonesia. Akan tetapi di PON XVII – XVIII prestasi Provinsi Papua menurun tajam, karena

sudah tidak ada lagi di posisi 10 besar. Kemudian di tahun 2016 pada PON XIX, kembali Provinsi Papua dapat mengoreksi peringkatnya naik ke posisi 10 besar berada di urutan ke-7, dengan total medali yang diperoleh hampir menyamai prestasi di PON XI sebelumnya yaitu sebanyak 69 buah medali.

Pada PON XIX yang diadakan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua menyertakan kontingennya untuk mengikuti 25 Cabang (Cabang Olah Raga), diantaranya atletik, dayung, sepak bola, basket, wushu, dan sebagainya. Cabang yang paling banyak menyumbangkan medali emas adalah Dayung, Selam, Bilyar dan Dansa. Total perolehan medali emas dari keempat Cabang tersebut sebanyak 10 buah medali. Sepak bola yang sangat dibanggakan oleh Papua, saat itu hanya mampu memberikan medali perunggu. Selengkapnya perolehan medali dari setiap Cabang pada PON XIX yang diperoleh kontingen Provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel 2.28.
Perolehan Medali Kontingen Provinsi Papua Pada PON XIX
Di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016

| No | Cabang Olah Raga | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|----|------------------|------|-------|----------|-------|
| 1 | Dayung | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 2 | Selam | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Bilyar | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Dansa | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Atletik | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Terbang Layang | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Tenis Lapangan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Pabsi | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Karate | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Berkuda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Hoki Field | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Sepatu Roda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tarung Derajat | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Tinju | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Layar & Selancar | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Menembak | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Hoki Indor | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Kempo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Softball | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Tenis Meja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Bola Basket | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Sepakbola | 0 | 0 | 1 | 1 |

| No | Cabang Olah Raga | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|-------|------------------|------|-------|----------|-------|
| 23 | Drumband | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Voli Pasir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Wushu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | | 19 | 18 | 32 | 69 |

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri dan lain sebagainya. Adapun potensi pengembangan wilayah sebagaimana dokumen spasial, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033 maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang adalah sebagai berikut.

(a). Perikanan

Di sektor perikanan, produksi Perikanan darat dan perikanan laut cenderung meningkat, ini terlihat dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Dimana tahun 2014, Produksi perikanan tercatat 309.687 ton yang terdiri dari 290.439 ton perikanan laut, 8.705 ton dari perairan umum dan 7.096 ton dari perikanan budidaya. Adapun kondisi produksi perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.29.
Produksi Perikanan menurut Sub Sektor Perikanan Provinsi Papua Tahun 2011-2014

| Sektor | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Satuan |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| Perikanan Laut | | 269.257,80 | 281.479,10 | 286.340,10 | 290.439 | Ton |
| Perikanan Darat : | | | | | | |
| 1 | Perairan Umum | 7.624,80 | 7.790,80 | 7.830,80 | 8.705 | Ton |
| 2 | Budidaya | 4.350,70 | 5.770,30 | 9.096,70 | 7.574 | Ton |
| Jumlah | | 281.233,30 | 295.040,20 | 303.267,60 | 309.687 | Ton |

Sumber: Papua Dalam Angka, 2015

(b). Pertanian

Sejak terjadi pemekaran Provinsi Papua, luas areal panen tanaman padi Provinsi Papua terus meningkat. Tahun 2013 seluas 41.111 ha, kemudian meningkat menjadi 45.493 tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi 49.207 tahun 2015 hingga 2016. Luas areal tanam ini sejalan dengan jumlah produksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah produksi 196.015 ton, meningkat dari tahun sebelumnya 169.791 ton, namun

mengalami penurunan produksi di tahun 2015-2016. Keadaan jumlah produksi kedelai juga terlihat mengalami penurunan 2015-2016, sedangkan produksi tanaman jagung yang cenderung tidak stabil. Adapun kondisi pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.30.
Gambaran Keadaan Pertanian di Provinsi Papua
Tahun 2013-2016

| Pertanian | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Satuan |
|-------------------|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| a. Padi | | | | | | | |
| | 1 | Luas Areal Panen | 41.111 | 45.493 | 49.207 | 49.207 | ha |
| | 2 | Jumlah produksi | 169.791 | 196.015 | 173.643 | 173.643 | ton |
| | 3 | Rata-rata produksi | 12,29 | 43,09 | 44,55 | 35,29 | kw/ha |
| b. Jagung | | | | | | | |
| | 1 | Luas Areal Panen | 3.005 | 3.076 | 2.274 | 2736 | Ha |
| | 2 | Jumlah produksi | 7.034 | 7.283 | 6.666 | 6.666 | Ton |
| | 3 | Rata-rata produksi | 23,41 | 23.68 | 24,36 | 24,36 | kw/ha |
| c. Kedelai | | | | | | | |
| | 1 | Luas Areal Panen | 3.750 | 3.384 | 1.847 | 2761 | ha |
| | 2 | Jumlah produksi | 4.609 | 3.983 | 3.523 | 3.523 | ton |
| | 3 | Rata-rata produksi | 12,29 | 11,77 | 12,76 | 12,76 | kw/ha |

Sumber : Papua Dalam Angka, 2015

(c). Kehutanan

Kawasan hutan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan fungsinya yaitu:

- a. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan bagi produksi kayu, rotan, getah, dan hasil hutan lainnya. Hutan produksi ini terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas meliputi 35% dari luas kawasan hutan di Papua (kurang lebih 10.700.567 hektar);
- b. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang memiliki sifat fisik yang khas yang harus dijaga keberadaannya sehingga fungsinya terutama sebagai pengatur tata air, dapat dipelihara dan dipertahankan. Luas hutan lindung adalah 7.815.283 hektar atau 26% dari luas seluruh kawasan hutan yang ada;
- c. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, meliputi kawasan seluas kurang lebih 7.755.288 hektar atau 26% kawasan hutan di Papua dan kawasan

hutan ini diperuntukan bagi perlindungan dan pelestarian sumber plasma nutfah dan sistem penyangga kehidupan, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata;

- d. Hutan Konversi yaitu kawasan hutan yang karena keadaan serta kemungkinan-kemungkinannya dapat dikonversi menjadi peruntukan lain seperti pertanian, perkebunan dan pemukiman. Luas hutan konversi saat ini kurang lebih 4.116.365 hektar atau 14% dari luas kawasan hutan yang ada di Papua.

Luas hutan mangrove di Provinsi Papua seluas 1.053.841,09 hektar. Kabupaten/kota yang memiliki wilayah kawasan hutan mangrove terluas adalah kabupaten Asmat, Mimika, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Nabire. Potensi Kayu bakau terdiri dari diameter 7-9 cm kisaran potensi 190-307 batang/ha, diameter 10 cm Up kisaran 60- 80 batang/ha atau 50-70 m³/ha. Jenis hasil hutan bakau terdiri dari: Komersil ekspor (bakau dan tumuk) dan Komersil Lokal (Langadai, Tengar, Nyirih, Gedabu, Api-api). Potensi tegakan bakau hampir beragam pada diameter 10 cm Up yaitu 10 pohon per hektar atau 39,93 m³/ha. Adapun kondisi hutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.31.
Kawasan Hutan sesuai Fungsinya di Provinsi Papua

| No | Fungsi Hutan | Luas (Ha) | Persen |
|----|---|------------|--------|
| 1. | Kawasan Konservasi (KSA/KPA) | 7.755.288 | 25,52 |
| 2. | Hutan Lindung (HL) | 7.815.283 | 25,72 |
| 3. | Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 5.961.240 | 19,62 |
| 4. | Hutan Produksi (HP) | 4.739.327 | 15,60 |
| 5. | Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) | 4.116.365 | 13,55 |
| | Jumlah | 30.387.499 | 100 |

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

(d). Peternakan

Menurut jenisnya, populasi ternak di Provinsi Papua terbagi atas dua jenis, yaitu ternak besar (kuda, sapi, kerbau, dan sapi perah) dan ternak kecil (kambing, domba, dan babi). Gambaran tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2016, pemeliharaan hewan kecil masih jauh lebih banyak dibandingkan hewan besar. Data terakhir Pada data tabel memperlihatkan tahun 2016 jumlah hewan kecil mencapai 760.472 ekor, sedangkan hewan besar berjumlah 4.392 ekor. Adapun kondisi peternakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.32.
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Papua
Tahun 2013 – 2016

| Pternakan | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ternak Besar | | | | | |
| 1 | Kuda | 1.559 | 1.611 | 1.635 | 47 |
| 2 | Sapi | 79.574 | 94.865 | 100.135 | 3.561 |
| 3 | Kerbau | 549 | 751 | 787 | 768 |
| 4 | Sapi Perah | 5 | - | - | 16 |
| Jumlah | | 81.687 | 97.227 | 102.557 | 4.392 |
| Pternakan | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 |
| Ternak Kecil | | | | | |
| 1 | Kambing | 35.251 | 49.247 | 49.849 | 54.060 |
| 2 | Domba | 11 | 14 | 18 | 18 |
| 3 | Babi | 579.024 | 680.099 | 722.768 | 760.472 |
| Jumlah | | 614.286 | 729.360 | 772.635 | 814.550 |

Sumber: Papua Dalam Angka, 2016

(e) Perkebunan

Pada tahun 2016, sebanyak 115.797 petani di Provinsi Papua terlibat dalam perkebunan rakyat. Luas areal tanaman perkebunan rakyat adalah sebesar 135.656 hektar dengan produksi tanaman perkebunan rakyat sebesar 69.517 ton. Luas tanaman yang terbesar pada perkebunan rakyat adalah coklat yaitu 34.999 ha dengan produktivitas 290,49 kg/ha dan jumlah petani 30.032. Sedangkan produksi terbanyak adalah Sagu yaitu sebesar 28.340 ton dengan rata-rata produksi 801,67 kg/ha dan jumlah petani 8.477. Adapun kondisi perkebunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.33.
Gambaran Keadaan Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman
Di Provinsi Papua
Tahun 2016

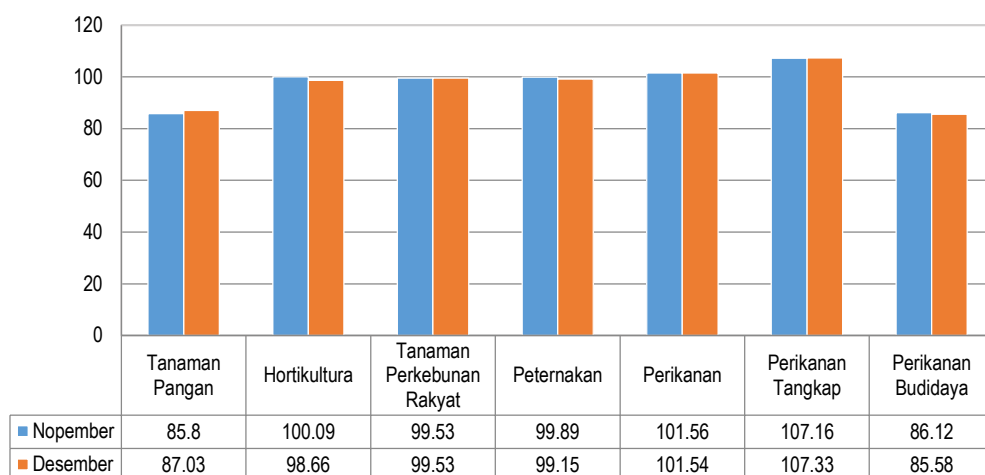
| No | Perkebunan | Luas Tanaman | Produksi | Produktifitas (kg/ha) | Jumlah Petani |
|--------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Karet | 4.387 | 3.342 | 761,80 | 4.153 |
| 2 | Kelapa Sawit | 14.244 | 8.121 | 570,13 | 14.236 |
| 3 | Kopi | 10.749 | 2.042 | 189,97 | 8.993 |
| 4 | Kelapa Dalam | 25.151 | 15.993 | 635,88 | 41.284 |
| 5 | Cokelat | 34.999 | 10.167 | 290,49 | 30.032 |
| 6 | Cengkeh | 576 | 3 | 5,21 | 288 |
| 7 | Jarak | 664 | 278 | 418,67 | 263 |
| 8 | Lada | 45 | 6 | 133,33 | 23 |
| 9 | Kapok Randu | 799 | 35 | 43,80 | 370 |
| 10 | Jambu Mente | 4.796 | 584 | 121,77 | 3.790 |
| 11 | Pinang | 3.895 | 606 | 155,58 | 3.888 |
| 12 | Sagu | 35.351 | 28.340 | 801,67 | 8.477 |
| Jumlah | | 135.656 | 69.517 | 512,45 | 115.797 |

Sumber: Papua Dalam Angka, 2015

(f) Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani terhadap harga dibayar petani (dalam persen). NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

Gambar 2.34.
Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor Provinsi Papua Tahun 2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, Tahun 2016

NTP Papua pada Desember 2016 mengalami penurunan -0,11 persen menjadi 94,49 dibandingkan NTP November 2016. Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, penurunan indeks NTP disebabkan oleh perubahan indeks harga diterima petani sebesar 0,67 persen lebih rendah dari perubahan indeks harga dibayar petani yang mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen.

Pada grafik di atas menunjukkan perkembangan NTP Papua bulan Desember 2016 dengan bulan sebelumnya dimana 1(satu) subsektor yang mengalami kenaikan indeks yaitu subsektor Tanaman Pangan naik 1,43%. Sedangkan subsektor Hortikultura turun -1,43%; subsektor Peternakan turun -0,75%; dan subsektor Perikanan turun -0,02%. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat tidak mengalami perubahan angka indeks terendah sebesar 0,46%.

2.1.4.1. Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur mempunyai peran yang penting dan pemicu pembangunan suatu kawasan/wilayah untuk menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Peran infrastruktur dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Menurut Kirmanto (2005) ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas.

2.1.4.1.1. Panjang Jalan Dan Jembatan

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Papua tahun 2016 tercatat jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 2.957,64 km. Kondisi ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2015, namun dengan tahun 2014 terlihat ada peningkatan pembangunan jalan yang sangat signifikan yaitu sebesar 1.505,51 km, karena pada tahun 2014 tercatat panjang jalan di Provinsi Papua baru mencapai 1.452,13 km. Lihat Tabel 2.34 berikut ini.

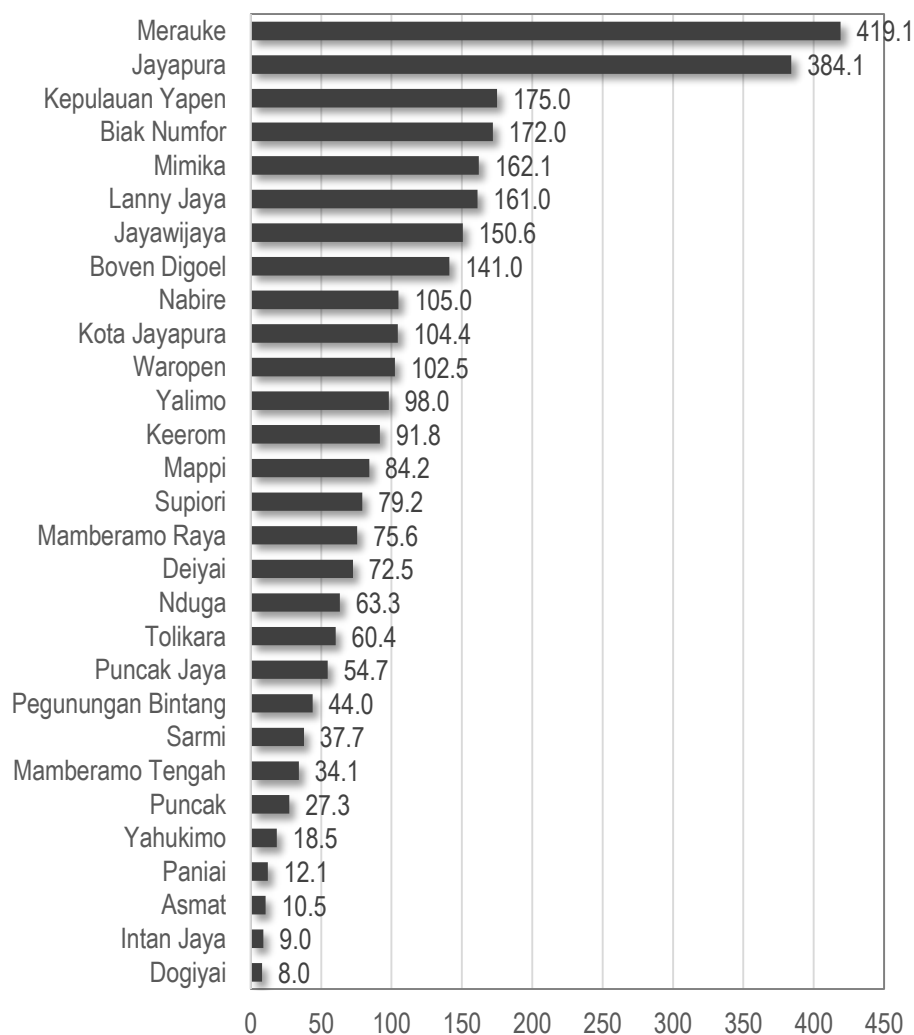
Tabel 2.34.
Panjang Jalan Di Provinsi Papua Menurut Permukaan Dan Kondisi Jalan Tahun 2014 - 2016

| Tahun | Panjang Jalan Menurut Permukaan (km) | | | Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|----------|--|--------|--------------|-------------|----------|
| | Aspal | Lainnya | Jumlah | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Jumlah |
| 2014 | 640,74 | 811,39 | 1 452,13 | 974,12 | - | 259,32 | 218,69 | 1 452,13 |
| 2015 | 999,40 | 1 958,16 | 2 957,56 | 972,50 | 828,91 | 312,70 | 843,45 | 2 957,56 |
| 2016 | 1 025,18 | 1 932,46 | 2 957,64 | 1 014,78 | 378,60 | 611,20 | 953,22 | 2 957,64 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Pada Tabel 2.34 di atas juga terlihat jelas bahwa sampai tahun 2016 panjang jalan yang telah diaspal sudah mencapai 1.025,18 km atau sekitar 34,66% dari total panjang jalan yang ada. Dimana jika dibandingkan dengan tahun 2014 tampak terjadi peningkatan permukaan jalan aspal sepanjang 384,44 km atau naik tinggi mencapai 60%. Hal ini tidaklah sama dengan kondisi jalan yang sudah terbangun, hingga tahun 2016 jalan dalam kondisi baik hanya dapat ditingkatkan 4,17% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sementara jalan dalam kondisi rusak (ringan dan berat), rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan 88,59%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pembangunan jalan di Provinsi Papua selama itu tidak diiringi dengan peningkatan pemeliharaan jalan (reservasi) secara proporsional. Sehingga terlihat persentase kenaikan jalan yang rusak lebih cepat dibandingkan penambahan pembangunan jalan.

Gambar 2.35.
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
(dalam Km)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Jalan provinsi terlihat lebih banyak dibangun di Kabupaten Merauke dan Jayapura, masing-masing sepanjang 419,1 km dan 384,1 km (lihat Gambar 2.35). Dengan kata lain sekitar 27,16% dari total panjang jalan provinsi berada di kedua kabupaten tersebut. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Dogiyai dan Intan Jaya, kurang dari 10 km. Disini terlihat jelas ada ketimpangan pembangunan jalan yang cukup mencolok. Dimana dapat dikatakan konsentrasi pembangunan jalan di Provinsi Papua masih berada di pusat-pusat wilayah kabupaten induk, seperti di Kabupaten Jayapura, Merauke, Jayawijaya, Biak Numfor, Nabire dan Mimika. Situasi ini sudah barang tentu berdampak terhadap ketimpangan wilayah yang akan semakin melebar.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ditargetkan seluruh wilayah Papua dan Papua Barat terhubung dengan Jalan Nasional di tahun 2019. Jalan nasional yang kali ini diberi nama Trans Papua panjangnya 4.325 km terdiri atas 2.902 km di Provinsi Papua dan 1.423 km di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan laporan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2015 tercatat kondisi panjang jalan Trans Papua yang dapat direalisasikan sebagai berikut.

Tabel 2.35.
Panjang Jalan Dan Jembatan Trans Papua
Tahun 2015

| Nama Ruas Jalan Trans Papua | Target (km) | Realisasi (km) | | | Jembatan (m) |
|------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|--------------|
| | | Aspal | Tanah | Total | |
| Merauke-Tanah Merah-Waropko | 534 | 479 | 55 | 534 | 638 |
| Waropko-Oksibil | 136 | 5 | 65 | 70 | 800 |
| Dekai-Oksibil | 225 | 12 | 185 | 197 | 2160 |
| Kenyam-Dekai | 180 | - | 10 | 10 | 1100 |
| Wamena-Habema-Kenyam-Mamug | 295 | 25 | 233 | 258 | 567 |
| Wamena-Elelim-Jayapura | 585 | 342 | 128 | 470 | 620 |
| Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali | 466 | 51 | 186 | 237 | 1440 |
| Wagete-Timika | 196 | 81 | 91 | 172 | 640 |
| Enarotali-Wagete-Nabire | 285 | 285 | - | 285 | 152 |
| Total | 2902 | 1280 | 953 | 2233 | 8117 |

Sumber : Kementerian PUPR, 2015 (data diolah)

Ini berarti realisasi panjang jalan Trans Papua hingga tahun 2015 sudah mencapai 76,95 persen dengan sisa panjang jalan yang belum terealisasi 669 km. Ruas jalan Trans Papua yang sangat rendah pencapaian realisasinya adalah ruas Kenyam - Dekai, baru mencapai 5% dari target yang

ditetapkan sepanjang 180 km, atau masih ada 170 km yang harus dibangun. Sedangkan ruas jalan yang sudah 100 persen direalisasikan adalah ruas Merauke-Tanah Merah-Waropko dan Enarotali-Wagete-Nabire.

Menurut Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk membangun jalan Trans Papua sejauh 827 km dengan lebar rata-rata 9 meter di Provinsi Papua dan Papua Barat dibutuhkan anggaran Rp. 12,53 triliun. Sedangkan menurut Kepala Balai Jalan dan Jembatan X Provinsi Papua, untuk membangun jalan sepanjang 827 km tersebut membutuhkan biaya kurang lebih Rp. 15 triliun (tabloidjubi.com). Jika diambil titik tengahnya maka dapat dikalkulasi kebutuhan biaya pembangunan jalan Trans Papua setiap satu kilometernya yaitu sebesar Rp. 16,79 milyar. Sehingga untuk merealisasi sisa pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 669 km untuk 5 tahun mendatang paling tidak dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 11,67 triliun atau perlu disiapkan anggaran pertahunnya sebesar Rp. 2,79 triliun.

2.1.4.1.2. Aksesibilitas daerah

Aksesibilitas daerah dapat diketahui dengan menghitung Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel 2.36.
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang

| No | Uraian | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Unit/Km | 1:18 | 1:91 | 1:96 |
| 2. | Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun. | Orang | 3.472.236 | 3.759.034 | 3.880.282 |

Dari Tabel 2.33, terlihat bahwa Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan provinsi Papua dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 tercatat 1:18 meningkat menjadi 1:91 pada tahun 2014 dan menjadi 1:96 pada tahun 2015. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan jumlah kendaraan di Provinsi Papua dari tahun 2013 sebanyak 52.183 menjadi 432.126 kendaraan pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjadi 456.377 unit . Sementara itu panjang jalan yang ada masih berada pada angka 4.748.31 Km, sehingga dapat dikatakan kondisi arus lalu lintas jalan semakin padat.

Pada indikator jumlah arus penumpang angkutan umum yang terangkut juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2015, yang secara rata-rata mencapai 3.703.851 orang. Dimana berdasarkan Tabel 2.30 di atas dapat dilihat arus penumpang setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata mencapai 5,74%. Dimana pada tahun 2013 tercatat sebanyak 3.472.236 orang meningkat menjadi 3.880.282 orang atau meningkat sebesar 408.046 orang (11,75%). Hal ini menunjukkan bahwa arus penumpang yang datang maupun yang meninggalkan Papua semakin banyak. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa konektivitas antara wilayah dari Papua ke luar wilayah Papua dan sebaliknya, juga semakin terbuka. Dengan semakin terbukanya konektivitas antar wilayah diharapkan akan meningkatkan akses pembangunan di Provinsi Papua sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.1.3. Sanitasi

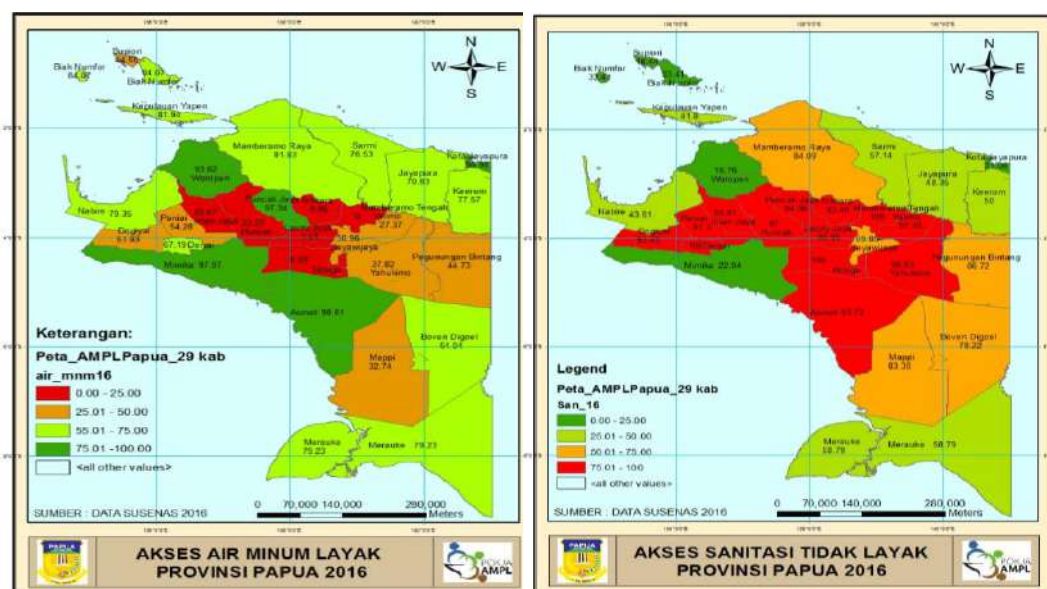
Air dan sanitasi merupakan satu kesatuan yang penting dalam kehidupan. Tanpa sanitasi yang baik maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun. pembahasan mengenai air tidak hanya membahas tentang air yang kita minum, melainkan juga mengenai bagaimana menjaga hutan apabila rusak sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya air. Oleh karena itu Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Papua terus mengkampanyekan pentingnya setiap daerah kabupaten/kota sadar sanitasi.

Sampai dengan tahun 2016 jumlah keluarga yang dapat mengakses air minum layak di Provinsi Papua baru mencapai 57,51%, dan yang memiliki sanitasi yang baik dan layak hanya 27,60%, lihat Gambar 2.35 di atas. Kondisinya sangat jauh dibawah data nasional, dimana menurut Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menkon PMK) saat ini terdapat 63% untuk akses air minum layak, dan 53% yang menggunakan sanitasi layak.

Terkait dengan kondisi semacam itu, maka program akses air minum dan sanitasi harus dapat diperluas agar dapat menjangkau wilayah-wilayah padat penduduk, wilayah perdesaan, wilayah nelayan, dan daerah tertinggal lainnya. Upaya perluasan akses air minum dan sanitasi yang layak, selain melalui Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat juga dilakukan melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat

menggunakan APB Kampung yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung.

Gambar 2.36.
Peta Akses Air Minum Layak Dan Sanitasi Layak Di Provinsi Papua Tahun 2016



2.1.4.1.4. Tata Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah di Provinsi Papua yaitu Provinsi Papua mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua. Penataan Ruang di Provinsi Papua telah diatur pengelolaan dan sanksinya oleh Peraturan Daerah Provinsi Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033. Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam.

Hal ini dilakukan dengan menetapkan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah yang diharapkan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan melalui Peraturan Gubernur yaitu pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Tabel 2.37.
Kawasan Budidaya

| WILAYAH ADAT | KABUPATEN | Kawasan Budidaya | | | | | | | | | | Total Budidaya | |
|--------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| | | HPK | HPT | HP | Industri | Pelabuhan | Perkebunan | Permukiman | Pertambangan | PLB | PLK | | PLTU Batubara |
| HANIM | ASMAT | 6.353.16 | 329.636.32 | 35.789.87 | | | | | | 181.90 | 37.415.41 | | 416.071.95 |
| | MERAUKE | 111.109.29 | 184.382.81 | 870.079.07 | | | 218.455.38 | 120.562.02 | 493.641.78 | 273.910.37 | | | 2.272.140.71 |
| | MAPPI | 438.655.04 | 291.157.50 | 426.073.81 | | | 22.211.25 | 11.703.98 | 15.207.38 | 34.931.88 | | | 1.239.940.85 |
| | BOVEN DIGOEL | 295.406.03 | 356.700.10 | 1.246.642.51 | | | 246.901.28 | 27.897.27 | 9.398.51 | 9.942.87 | | | 2.192.888.57 |
| SAERER | BIAK NUMFOR | 778.32 | 35.182.24 | 24.382.07 | | | | 33.233.22 | | | | | 93.575.84 |
| | KEP.YAPEN | 15.853.54 | 74.775.53 | 2.418.77 | | | | 14.456.64 | 713.73 | 2.612.61 | | | 110.830.83 |
| | SUPIORI | | | 1.034.39 | | | | 17.753.79 | | | | | 18.788.18 |
| MAMTA | WAROPEN | 49.971.05 | 11.242.72 | 130.985.82 | | | | 28.922.18 | 21.266.77 | 9.654.00 | | | 251.942.53 |
| | JAYAPURA | 139.700.89 | 327.679.54 | 73.625.75 | 12.133.51 | | 82.874.13 | 64.795.44 | 17.429.47 | 30.969.10 | | | 749.207.83 |
| | KEEROM | 142.355.29 | 165.296.54 | 116.016.79 | | | 35.588.20 | 70.407.90 | 4.982.11 | 26.990.12 | | | 561.636.94 |
| | MAMBERAMO RAYA | 71.895.04 | 571.778.66 | 200.479.01 | | | | 15.699.81 | 23.153.87 | 2.726.17 | | | 885.732.57 |
| MEPAGO | SARMI | 126.968.57 | 326.196.07 | 250.855.45 | | | 43.395.58 | 54.536.19 | 121.73 | 21.043.94 | | | 846.276.95 |
| | KOTA JAYAPURA | 6.670.61 | 15.239.59 | 15.349.55 | | 1.12 | | 18.905.63 | 1.382.11 | 2.226.33 | 20.42 | | 59.795.37 |
| | MIMIKA | 229.840.55 | 287.173.95 | 49.670.69 | 5.14 | 294.52 | 21.379.75 | 37.358.38 | 39.450.46 | 63.014.83 | | | 730.417.75 |
| | DEIYAI | 18.105.02 | 5.324.90 | 9.241.92 | | | 16.913.93 | 3.924.13 | | 5.514.88 | | | 59.024.78 |
| | DOGIYAI | 18.955.35 | 37.363.83 | 17.554.46 | | | | 4.464.17 | | 660.82 | | | 92.878.76 |
| | INTAN JAYA | 37.937.20 | 103.987.34 | 236.888.31 | | | | 13.485.08 | 1.526.43 | 7.206.11 | | | 401.030.46 |
| LAPAGO | NABIRE | 97.085.30 | 242.070.57 | 112.604.26 | | | 25.922.28 | 55.552.37 | 17.517.14 | 4.380.24 | | | 555.132.17 |
| | PANIAI | 44.765.29 | 48.770.64 | 8.149.35 | | | | 7.670.54 | | | | | 109.355.82 |
| | JAYAWIJAYA | 52.296.41 | 6.842.75 | | | | | 89.103.11 | 294.99 | | | | 148.537.26 |
| | LANNY JAYA | 46.219.42 | 17.973.66 | | | | | 22.322.29 | | | | | 86.515.37 |
| | MAMBERAMO TENGAH | 36.856.41 | 0.00 | | | | | 4.205.90 | | | | | 41.062.31 |
| PUNCAK | NDUGA | | 10.693.02 | 88.566.71 | | | | 1.270.59 | | | | | 100.530.31 |
| | PEG. BINTANG | 97.935.75 | 102.337.86 | 198.948.62 | | | | 5.927.42 | | 0.17 | | | 405.149.81 |
| | PUNCAK | 21.077.39 | 32.808.74 | | | | | 14.513.42 | 333.20 | 743.81 | | | 69.476.55 |

| WILAYAH ADAT | KABUPATEN | Kawasan Budaya | | | | | | | | | | | Total Budidaya |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | HPK | HPT | HP | Industri | Pelabuhan | Perkebunan | Permukiman | Pertambangan | PLB | PLK | PLTU Batubara | |
| | PUNCAK JAYA | 70.371.93 | 81.345.04 | | | | | 2.889.82 | | 2.880.16 | 3.383.92 | | 160.870.86 |
| | TOLIKARA | 63.021.35 | 19.001.06 | | | | | 10.011.08 | | 167.38 | 136.40 | | 92.337.27 |
| | YAHUKIMO | 145.618.58 | 96.736.82 | 60.002.54 | | | | 17.061.66 | | | 58.12 | | 319.477.72 |
| | YALIMO | 54.591.28 | 7.744.95 | | | | | 11.717.33 | | | | | 74.053.56 |
| | Grand Total | 2,440,394.06 | 3,789,442.74 | 4,175,358.73 | 12,138.66 | 295.64 | 713,641.78 | 786,947.82 | 39,572.19 | 649,345.92 | 537,522.12 | 20.42 | 13,144,679.88 |

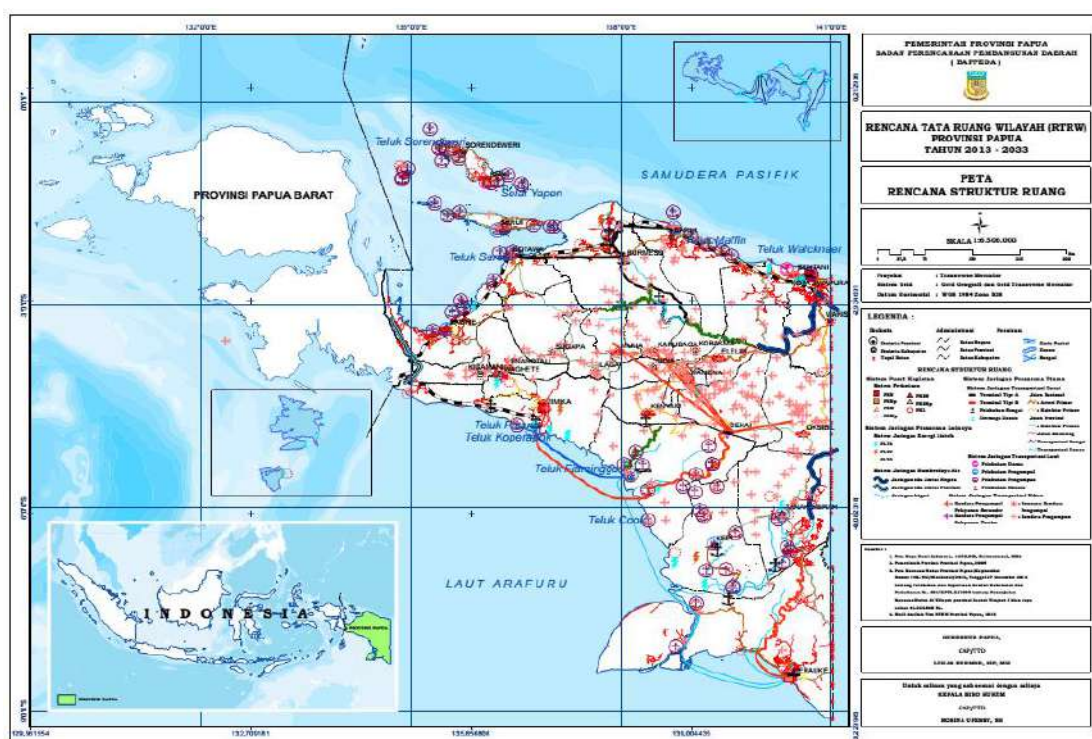
Tabel 2.38.
Kawasan Lindung

| WILAYAH ADAT | KABUPATEN | Kawasan Lindung | | | | | | | | | | Total Lindung | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Kawasan Bakau | Kawasan Bergambut | Hutan Lindung | Lindung Geologi | Kawasan Rawa | Kawasan Savana | Sempadan Danau | Sempadan Pantai | Sempadan Sungai | KSA Air | | KSA/KPA | |
| HAANIM | ASMAT | | 173,924.53 | 1,089,442.55 | | 640,331.70 | | | 0.04 | 18.53 | 104,402.66 | 57,318.49 | 332,528.96 | 2,397,967.45 |
| | MERAUKE | 2,643.58 | 68,052.34 | 271,206.51 | 284,044.23 | 204,658.70 | 98,843.39 | | | 100.63 | 100,522.28 | | 1,422,837.63 | 2,452,909.30 |
| | MAPPI | | 311,034.95 | 197,727.61 | | 324,643.80 | 2,245.15 | | | | | 66,218.25 | | |
| SAERERI | BOVENDIGOEL | | 84,649.08 | 101,490.32 | | 60,254.89 | | | | | 26,633.39 | | | 273,027.66 |
| | BIAKNUMFOR | | 238.94 | 121,634.25 | | 742.41 | | | | | 14.28 | 173,841.03 | 10,205.68 | 306,676.58 |
| | KEP.YAPEN | 85.17 | 1,016.17 | 18,942.14 | | 510.85 | | | | 6.68 | 79.83 | | 113,445.13 | 134,0896 |
| MAMTA | SUPIORI | | 158.81 | 7,832.26 | | | | | | | | | 40,952.79 | 48,952.79 |
| | WAROPEN | 411.15 | 21,251.95 | 296,213.46 | | 15,650.56 | | | 12.30 | | 3,330.92 | | | 336,870.33 |
| | JAYAPURA | | 3,999.42 | 534,521.84 | | 41,388.79 | | | 22.21 | 3.04 | 16,439.41 | | 91,011.85 | 687,386.56 |
| MEEPAG | KEEROM | | 5,356.12 | 332,586.03 | | 22,333.58 | | | 93.07 | | 6,309.39 | | 7,970.01 | 374,648.20 |
| | MAMBERAMORAYA | 419.46 | 29,938.05 | 373,468.09 | | 281,991.19 | | | | | 72,653.69 | | 920,195.54 | 1,678,666.02 |
| | SARMI | 146.57 | 28,143.89 | 196,172.97 | | 87,689.25 | | | 48.53 | 27.01 | 13,887.90 | | 229,821.09 | 555,937.21 |
| LAPAGO | KOTAJAYAPURA | | 1.40 | 6,516.54 | | 5,897.05 | | | 31.68 | 538.89 | 256.68 | | 9,084.28 | 22,326.52 |
| | MIMIKA | 3.48 | 34,335.86 | 293,921.69 | | 86,378.63 | | | | | 46,699.77 | 56,614.35 | 677,359.49 | 1,195,313.29 |
| | DEIYAI | | 5.20 | 215,763.15 | | 30.91 | | | | | 5,188.19 | | 8,520.53 | 229,507.99 |
| LAPAGO | DOGIYAI | | 826.93 | 240,718.22 | | 13,178.23 | | | | | 3,456.19 | | 94,655.67 | 352,835.25 |
| | INTANJAYA | | 12,491.95 | 560,894.99 | | 93,417.36 | | | | | 3,796.62 | | 47,685.93 | 718,286.85 |
| | NABIRE | 118.49 | 106,231.50 | 327,985.36 | | 26,138.85 | | | 37.31 | 441.83 | 13,914.17 | 740,659.84 | 131,614.48 | 1,347,141.84 |
| LAPAGO | PANIAI | | 2,338.68 | 277,137.69 | | 4,481.03 | | | | | 16,005.01 | | 243,166.81 | 543,129.23 |
| | JAYAWIJAYA | | | 17,828.63 | | | | | | | 970.26 | | 75,899.84 | 94,098.72 |
| | LANNYJAYA | | | 55,380.54 | | | | | | | 245.50 | | 220,777.29 | 276,403.33 |
| | MAMBERAMOTENGAH | | | 214,622.72 | | | | | | | 5,876.64 | | 66,830.30 | 287,329.67 |
| | NDUGA | | | 151.26 | | 24,181.08 | | | | | 4,687.46 | | 525,872.69 | 554,892.49 |
| PEG.BINTANG | | | 486,447.11 | | 12,611.85 | | | | | 11,511.46 | | 520,181.36 | 1,030,751.79 | |

| WILAYAH ADAT | KABUPATEN | Kawasan Lindung | | | | | | | | | | | Total Lindung | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|------------|--------------|
| | | Kawasan Bakau | Kawasan Bergambut | Hutan Lindung | Lindung Geologi | Kawasan Rawa | Kawasan Savana | Sempadan Danau | Sempadan Pantai | Sempadan Sungai | KSA Air | KSA/KPA | | | | |
| | PUNCAK | | 8,900.04 | 243,917.46 | | 20,886.81 | | | | | | 2,645.70 | | | 196,162.02 | 472,512.02 |
| | PUNCAKJAYA | | 19,091.73 | 227,270.38 | | 37,707.07 | | | | | | 5,411.22 | | | 59,492.50 | 348,972.90 |
| | TOLIKARA | | 24,848.31 | 280,024.34 | | 8,109.34 | | | | | | 12,726.54 | | | 216,608.11 | 542,316.63 |
| | YAHUKIMO | | | 587,916.13 | | 39,461.17 | | | | | | 10,719.25 | | | 381,345.17 | 1,019,441.71 |
| | YALIMO | | | 254,122.96 | | | | | | | | 6,507.43 | | | 98,612.84 | 359,243.23 |
| | GrandTotal | 3,827.91 | 936,835.84 | 7,831,857.21 | 284,044.23 | 2,052,675.11 | 101,088.54 | 245.15 | 1,136.60 | 561,110.07 | 1,028,433.71 | 6,742,846.93 | 19,544,101.30 | | | |

Di samping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman, pembangunan infrastruktur dan pengembangan investasi dengan memperhatikan penggunaan lahan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya sehingga 90% kawasan hutan dapat dipertahankan. Penggunaan lahan kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada peta pola ruang provinsi papua.

Gambar 2.38.
Peta Struktur Ruang



Sumber: Perda Nomor 23 Tahun 2013

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua mengatur tentang Pola Ruang dan struktur ruang. Pola ruang mengatur mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya, sedangkan Struktur ruang mengatur mengenai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

2.1.4.2. Investasi

Meskipun wilayah Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan investasi, realisasi rencana investasi di daerah ini masih rendah. Dari 2010 sampai 2014, hanya 47 persen dari rencana investasi dari investasi langsung asing dan penanaman modal dalam negeri di provinsi Papua. Angka-angka yang rendah sebagian besar disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh investor dalam berinvestasi di wilayah Papua.

Terciptanya iklim investasi yang kondusif membuat para penanam modal/investor tidak ragu-ragu untuk berinvestasi, dan hal ini sangat mempengaruhi dalam meningkatkan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Dengan semakin banyak investor atau perusahaan dalam menanamkan modalnya akan berdampak positif terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah/PAD, pelaku usaha memperoleh laba tinggi dan tenaga kerja terserap sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

Tabel 2.39.
Persentase peningkatan nilai Investasi PMA Provinsi Papua
Tahun 2014-2016

| Tahun | Jumlah Perusahaan | Realisasi Investasi (US\$) |
|-----------|-------------------|----------------------------|
| 2014 | 103 | 18.545.113 |
| 2015 | 108 | 47.393.679 |
| 2016 | 122 | 69.783.691 |
| rata-rata | 111 | 45.240.828 |

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018

Jika memperhatikan tabel di atas, jumlah perusahaan (PMA) yang berinvestasi di Papua mengalami peningkatan yaitu tercatat 103 perusahaan pada tahun 2014 menjadi 122 pada tahun 2016, atau naik 18,45%. Demikian pula dengan realisasi investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 276,29% dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir (2014-2016). Secara rata-rata nilai investasi PMA di Papua mencapai US\$ 45.240.828.

Sementara jumlah perusahaan (PMDN) yang berinvestasi di Papua lebih rendah jika dibandingkan dengan PMA dalam kurun waktu yang sama (2014-2016). Realisasi investasi PMDN pada tahun 2014 mencapai Rp.10.679.551 juta pada tahun 2014, naik menjadi Rp.59.833.954 juta pada tahun 2016, naik sebesar Rp.51.238.578 juta atau sebesar 460,27%. Seperti yang digambarkan dalam tabel 2.34 di bawah.

Walaupun jumlah perusahaan (PMDN) yang berinvestasi di Papua lebih rendah dari pada perusahaan (PMA), namun persentase perkembangan nilai investasi PMDN yang mencapai 460,27% lebih tinggi dari persentase nilai investasi PMA sebesar 276,29% dalam periode yang sama. Peningkatan nilai investasi di Papua baik PMA maupun PMDN ini menggambarkan bahwa iklim investasi di Papua semakin Kondusif.

Selain iklim investasi yang semakin kondusif di Papua, proses perizinan juga terus mengalami perbaikan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang

lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah ini. Provinsi Papua sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan tahun 2011 bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi telah mempunyai e-perijinan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Papua. Dari sejumlah jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan adanya PTSP ini diharapkan semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

2.1.4.3. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

2.1.4.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Dan Desa

Dengan mengetahui kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah seperti seberapa banyak angkatan kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja, kualitas yang diukur dengan pendidikan tenaga kerja, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dan situasi ketenagakerjaan lainnya, dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2.40.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun 2016

| Daerah Tempat Tinggal | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | |
|-----------------------|---|-------|------------------------------------|------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Perkotaan | 63,32 | 63,95 | 10,69 | 7,1 |
| Perdesaan | 85,63 | 81,76 | 1,77 | 2,18 |
| Perkotaan+Perdesaan | 79,57 | 76,70 | 3,99 | 3,35 |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPAK Provinsi Papua pada tahun 2016 sebesar 76,70% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 79,57%, perhatikan Tabel 2.39 di atas. Penurunan ini merupakan indikasi menurunnya kecenderungan penduduk usia kerja untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. TPAK penduduk perkotaan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 63,95% sedangkan TPAK penduduk perdesaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 85,63% menjadi 81,76% di tahun 2016.

Indikator selanjutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan seberapa banyak angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha; tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dari Tabel 2.31 terlihat bahwa terjadi penurunan pengangguran sebesar 0,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2016 TPT Papua tercatat 3,35%. Penurunan tersebut disumbangkan oleh menurunnya pengangguran di daerah perkotaan, di mana tingkat pengangguran perkotaan sebesar 7,10% mengalami peningkatan sebesar 3,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya pada periode yang sama, tingkat pengangguran di daerah perdesaan meningkat sebesar 1,77% menjadi 2,18%.

2.1.4.3.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja provinsi Papua tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 2.41.
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2013 - 2017

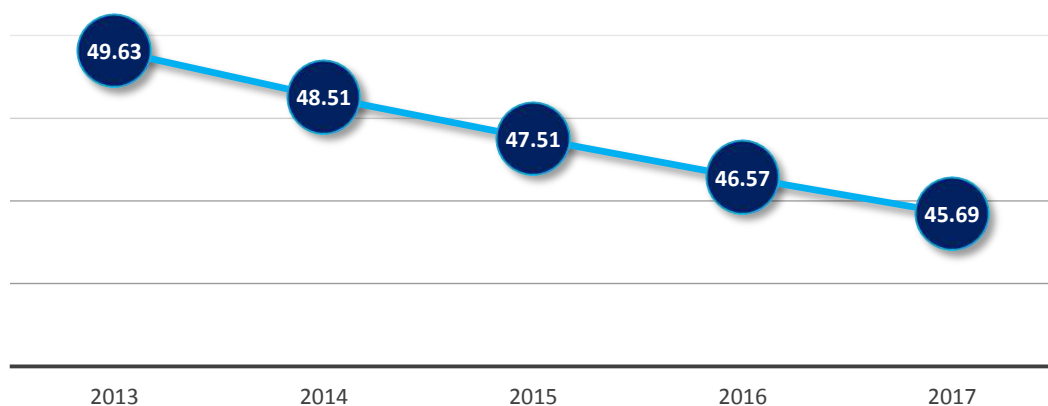
| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Penduduk | 3.032.488 | 3.091.047 | 3.149.375 | 3.207.444 | 3.265.202 |
| Umur 0-14 Tahun | 1.002.491 | 999.307 | 995.256 | 969.515 | 971.638 |
| Umur 15-64 Tahun | 1.995.634 | 2.054.482 | 2.113.607 | 2.188.370 | 2.241.145 |
| Umur 65 Tahun ke Atas | 34.363 | 37.258 | 40.512 | 49.559 | 52.419 |
| Angka Beban Ketergantungan | 49,63 | 48,51 | 47,51 | 46,57 | 45,69 |

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2015 (BPS)

Pada tabel 2.40 menunjukkan angka ketergantungan provinsi Papua dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami penurunan. Dimana pada tahun

2013 tercatat sebesar 49,63 turun menjadi 48,51 pada tahun 20117 atau turun sebesar 2,82. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ketergantungan di provinsi Papua setiap tahunnya mengalami perbaikan. Secara rata-rata rasio ketergantungan mencapai 47,58 dalam periode 2013-2017, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 51,96% penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas). Rasio ketergantungan Provinsi Papua masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan nasional yang tercatat mencapai 49,2, (SUPAS) 2015. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.39.

Gambar 2.39.
Rasio Ketergantungan Provinsi Papua
Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

Evaluasi kinerja RKPD tahun 2017 dilakukan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan didasarkan pada urusan wajib yang terbagi atas urusan wajib terkait pelayanan dasar dan tidak terkait serta urusan pilihan. Terkait pelayan dasar terbagi: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan (7) Sosial. Tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: (1) Tenaga Kerja, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak, (3) Pangan, (4) Pertahanan, (5) Lingkungan Hidup, (6) Adminsitrası Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (7) Pemberdayaan Masyarakat dan desa, (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (9) Perhubungan, (10) Komunikasi dan Informasi, (11) Koperasi dan UKM, (12) Penanaman Modal, (13) Keper mudaan dan Olahraga, (14) Statistik, (15)

Persandian, (16) Kebudayaan, (17) Perpustakaan, dan (18) Kearsipan. Kemudian Urusan Pilihan meliputi: (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Pariwisata, (3) Pertanian, (4) Kehutanan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral, (6) Perdagangan, (7) Perindustrian, dan (8) Transmigrasi.

Adapun untuk perhitungan peringkat kinerja, sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menggunakan formula berikut :

- a. Rata-rata kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja;
- b. Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud;
- c. Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.42.
Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja

| No. | Interval | Kriteria Penilaian | Notasi |
|-----|-------------|--------------------|--------|
| 1. | 91 % ≤ 100% | Sangat Tinggi | ST |
| 2. | 76 % ≤ 90% | Tinggi | T |
| 3. | 66 % ≤ 75% | Sedang | S |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah | R |
| 5. | ≤ 51% | Sangat Rendah | SR |

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Apabila dianalisis secara parsial (masing-masing indikator), maka untuk kriteria penilaian yang Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) baik itu pada capaian kinerja maupun penyerapan anggaran dapat diinterpretasikan bahwa capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Menggunakan formula dan kriteria penilaian di atas, berikut ini disampaikan hasil evaluasi capaian kinerja program dan penyerapan anggarannya tahun 2017 jika ditelusuri menurut urusan pembangunan, berikut perubahan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016.

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik Pelaksanaan Program
Menurut Urusan Tahun 2016-2017
(dalam %)

| Urusan | Rasio Capaian Kinerja Anggaran | | Rasio Capaian Kinerja Fisik | | Perubahan Kinerja | |
|---|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | Anggaran | Fisik |
| Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral | 80.97 | 28.81 | 88.81 | 50.83 | Turun | Turun |
| Urusan Kearsipan | 94.89 | 92.68 | 100.00 | 95.88 | Turun | Turun |
| Urusan Kebudayaan | 0.00 | 90.23 | 0.00 | 93.90 | Naik | Naik |
| Urusan Kehutanan | 96.84 | 98.02 | 96.27 | 87.85 | Naik | Turun |
| Urusan Kelautan dan Perikanan | 97.84 | 60.72 | 80.09 | 79.09 | Turun | Turun |
| Urusan Kepegawaian | 96.42 | 99.15 | 95.40 | 91.12 | Naik | Turun |
| Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 82.60 | 95.19 | 89.48 | 98.80 | Naik | Naik |
| Urusan Kesehatan | 79.67 | 68.66 | 90.45 | 73.44 | Turun | Turun |
| Urusan Komunikasi dan Informatika | 99.25 | 95.55 | 100.00 | 99.26 | Turun | Turun |
| Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 73.87 | 73.84 | 80.00 | 89.59 | Turun | Naik |
| Urusan Lingkungan Hidup | 91.48 | 99.37 | 92.26 | 99.58 | Naik | Naik |
| Urusan Pariwisata | 94.16 | 72.33 | 95.01 | 92.98 | Turun | Turun |
| Urusan Pekerjaan Umum | 84.90 | 73.33 | 90.43 | 86.90 | Turun | Turun |
| Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 97.08 | 93.89 | 93.28 | 96.30 | Turun | Naik |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan | 98.72 | 97.97 | 100.00 | 98.35 | Turun | Turun |
| Urusan Pemerintahan Umum | 90.30 | 89.39 | 94.13 | 78.84 | Turun | Turun |
| Urusan Pemuda dan Olahraga | 83.66 | 77.98 | 93.37 | 82.55 | Turun | Turun |
| Urusan Penanaman Modal Daerah | 73.84 | 98.55 | 76.07 | 98.69 | Naik | Naik |
| Urusan Pendidikan | 92.05 | 39.95 | 90.26 | 30.00 | Turun | Turun |
| Urusan Perencanaan Pembangunan | 89.38 | 87.61 | 85.21 | 50.96 | Turun | Turun |
| Urusan Perhubungan | 64.59 | 53.40 | 66.23 | 60.51 | Turun | Turun |
| Urusan Perindustrian | 94.24 | 87.73 | 89.10 | 30.18 | Turun | Turun |
| Urusan Pertanian | 95.36 | 90.88 | 95.40 | 95.98 | Turun | Naik |
| Urusan Perumahan | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 65.04 | Naik | Naik |
| Urusan Sosial | 90.56 | 88.57 | 96.40 | 100.00 | Turun | Naik |
| Urusan Tenaga Kerja | 96.17 | 90.05 | 97.23 | 90.51 | Turun | Turun |
| Total | 85.94 | 75.33 | 90.23 | 69.11 | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tabel 2.43 di atas, jika diperhatikan perubahan kinerja maka tampak capaian kinerja anggaran maupun fisik tahun 2017 dibandingkan dengan capaian tahun 2016 dominan mengalami penurunan. berdasarkan

urusan tampak jelas menurut hasil penilaian dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja tahun 2016 lebih baik dari capaian kinerja tahun 2017. capaian kinerja tahun 2016 telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata pencapaian kinerja fisik dinilai Tinggi (T) mencapai 90,23%, sedangkan anggaran yang terserap belum 100% yaitu 85,94% maka dapat diindikasikan bahwa penggunaan anggaran di tahun 2016 secara merata sudah berjalan secara efektif dan efisien. Sebaliknya capaian kinerja tahun 2017 belum memenuhi target dan berada dibawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, karena rata-rata pencapaian kinerja anggaran maupun fisik hanya dinilai sedang yaitu dengan rata-rata kinerja fisik hanya mencapai 69,11% dan capaian anggaran 75,33% maka dapat diindikasikan bahwa penggunaan anggaran di tahun 2017 secara merata belum berjalan secara efektif dan efisien

Dari 26 urusan capaian realisasi penyerapan anggaran yang terlihat turun sebanyak 19 urusan, sedangkan untuk capaian fisik 17 urusan, namun jika dilihat secara keseluruhan, maka capaian realisasi penyerapan anggaran maupun fisik yang konsisten naik adalah :

- Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- Urusan Lingkungan Hidup
- Urusan Penanaman Modal Daerah
- Urusan Perumahan

Sedangkan urusan yang mengalami kenaikan dalam capaian kinerja fisik namun turun dalam capaian kinerja anggaran yaitu :

- Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Urusan Pertanian
- Urusan Sosial

Berikut ini disajikan hasil evaluasi kinerja anggaran dan fisik dari pelaksanaan program tahun 2016 dan 2017 yang dirinci menurut OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Jika diperhatikan capaian kinerja fisik maupun anggaran pelaksanaan program tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yang ditelusuri pada masing-masing OPD dominan mengalami penurunan yaitu 33 OPD dengan capaian kinerja anggaran dan 34 OPD dengan capaian kinerja fisik. Perhatikan Tabel 2.44 berikut ini.

Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik Pelaksanaan Program
Menurut OPD Tahun 2016-2017
(dalam %)

| Urusan | Rasio Capaian Kinerja Anggaran | | Rasio Capaian Kinerja Fisik | | Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|--|--------------------------------|-------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | Anggaran | Fisik |
| Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral | 80.97 | 28.81 | 88.81 | 50.83 | Turun | Turun |
| Dinas Kebudayaan | 0.00 | 90.23 | 0.00 | 93.90 | Naik | Naik |
| Dinas Kehutanan | 96.84 | 98.02 | 96.27 | 87.85 | Naik | Turun |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 97.84 | 60.72 | 80.09 | 79.09 | Turun | Turun |
| Dinas Kesehatan | 81.00 | 79.62 | 84.83 | 82.23 | Turun | Turun |
| Dinas Ketahanan Pangan | 98.74 | 95.36 | 99.50 | 96.97 | Turun | Turun |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 99.25 | 95.55 | 100.00 | 99.26 | Turun | Turun |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 73.87 | 73.84 | 80.00 | 89.59 | Turun | Naik |
| Dinas Olah Raga dan Pemuda | 83.66 | 77.98 | 93.37 | 82.55 | Turun | Turun |
| Dinas Pariwisata | 94.16 | 72.33 | 95.01 | 92.98 | Turun | Turun |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 84.90 | 73.33 | 90.43 | 86.90 | Turun | Turun |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung | 97.08 | 93.89 | 93.28 | 96.30 | Turun | Naik |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlind Anak dan KB | 98.72 | 97.97 | 100.00 | 98.35 | Turun | Turun |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 73.84 | 98.55 | 76.07 | 98.69 | Naik | Naik |
| Dinas Pendidikan | 92.05 | 39.95 | 90.26 | 30.00 | Turun | Turun |
| Dinas Pengelola Lingkungan Hidup | 91.48 | 99.37 | 92.26 | 99.58 | Naik | Naik |
| Dinas Perhubungan | 64.59 | 53.40 | 66.23 | 60.51 | Turun | Turun |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 94.24 | 87.73 | 89.10 | 30.18 | Turun | Turun |
| Dinas Perkebunan | 91.20 | 92.89 | 93.72 | 94.79 | Naik | Naik |
| Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 94.89 | 92.68 | 100.00 | 95.88 | Turun | Turun |
| Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 65.04 | Naik | Naik |
| Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 95.64 | 93.09 | 97.46 | 99.06 | Turun | Naik |
| Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil | 90.56 | 88.57 | 96.40 | 100.00 | Turun | Naik |
| Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 95.87 | 82.16 | 90.93 | 93.11 | Turun | Naik |
| Dinas Tenaga Kerja | 96.17 | 90.05 | 97.23 | 90.51 | Turun | Turun |
| Badan Kepegawaian Daerah | 98.64 | 99.15 | 92.34 | 91.12 | Naik | Turun |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 70.25 | 96.11 | 72.54 | 98.86 | Naik | Naik |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 95.52 | 99.23 | 95.94 | 98.99 | Naik | Naik |
| Badan Pendidikan dan Pelatihan | 94.20 | 0.00 | 98.45 | 0.00 | Turun | Turun |
| Badan Penelitian dan Pengembangan | 0.00 | 99.64 | 0.00 | 97.15 | Naik | Naik |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | 92.37 | 83.35 | 91.72 | 80.03 | Turun | Turun |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 84.50 | 75.72 | 98.65 | 84.80 | Turun | Turun |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 88.03 | 97.76 | 92.72 | 99.81 | Naik | Naik |
| Badan Penghubung Daerah | 90.36 | 90.59 | 92.36 | 15.13 | Naik | Turun |
| Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua | 76.57 | 0.00 | 93.83 | 0.00 | Turun | Turun |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 86.28 | 88.97 | 87.38 | 90.57 | Naik | Naik |
| Sekretariat Daerah | 99.51 | 99.21 | 99.27 | 0.00 | Turun | Turun |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua | 87.96 | 78.86 | 91.00 | 88.77 | Turun | Turun |
| Sekretariat Majelis Rakyat Papua | 76.11 | 53.81 | 86.63 | 33.77 | Turun | Turun |
| Biro Hukum | 88.01 | 85.01 | 95.26 | 86.33 | Turun | Turun |

| Urusan | Rasio Capaian Kinerja Anggaran | | Rasio Capaian Kinerja Fisik | | Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|--|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | Anggaran | Fisik |
| Biro Humas dan Protokol | 96.21 | 98.17 | 98.48 | 99.54 | Naik | Naik |
| Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan | 95.13 | 79.01 | 52.47 | 3.45 | Turun | Turun |
| Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa | 0.00 | 94.07 | 0.00 | 95.48 | Naik | Naik |
| Biro Organisasi | 98.12 | 96.78 | 99.61 | 98.26 | Turun | Turun |
| Biro Otonomi Khusus | 0.00 | 95.07 | 0.00 | 47.16 | Naik | Naik |
| Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 98.55 | 91.87 | 100.00 | 94.67 | Turun | Turun |
| Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 97.71 | 93.88 | 98.39 | 80.13 | Turun | Turun |
| Biro Tata Pemerintahan | 98.65 | 99.53 | 94.72 | 94.72 | Naik | Turun |
| Biro Umum | 82.53 | 94.22 | 87.68 | 83.41 | Naik | Turun |
| Inspektorat | 84.17 | 85.08 | 89.53 | 92.10 | Naik | Naik |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 82.03 | 90.22 | 99.97 | 98.54 | Naik | Turun |
| Rumah Sakit Jiwa | 88.40 | 66.22 | 99.91 | 37.16 | Turun | Turun |
| Rumah Sakit Umum Daerah Abepura | 67.27 | 71.84 | 83.03 | 94.76 | Naik | Naik |
| Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura | 82.02 | 56.97 | 94.02 | 79.59 | Turun | Turun |
| Total | 85.94 | 75.33 | 90.23 | 69.11 | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Namun jika ditelusuri dari 57 OPD yang naik capaian kinerja anggaran maupun fisik tercatat sebanyak 15 OPD yaitu :

- (1) Dinas Kebudayaan
- (2) Dinas Perkebunan
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (4) Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
- (5) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
- (6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan
- (9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (11) Biro Humas dan Protokol
- (12) Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
- (13) Biro Otonomi Khusus
- (14) Inspektorat
- (15) Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

Sedangkan OPD yang terlihat naik kinerja anggaran namun turun capaian kinerja fisik yaitu :

- (1) Dinas Kehutanan
- (2) Badan Kepegawaian Daerah

- (3) Badan Penghubung Daerah
- (4) Biro Tata Pemerintahan
- (5) Biro Umum
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja

Pada tabel 2.45 berikut ini, jika capaian kinerja anggaran dan fisik dipilah menurut program rutin atau lintas OPD maka terlihat bahwa secara rata-rata capaian kinerja anggaran program terlihat naik yaitu dari 86,79% di tahun 2016 menjadi 87,19% di tahun 2017, namun untuk capaian kinerja fisik terlihat turun yaitu dari 88,09% tahun 2016 menjadi 82,95% di tahun 2017 dengan kriteria tinggi. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja anggaran maupun fisik pelaksanaan program menurut program rutin walaupun perubahan kinerja menurun namun dapat dikatakan capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik Pelaksanaan Program
Menurut Program Rutin Tahun 2016-2017
(dalam %)

| Program | Rasio Capaian Kinerja Anggaran | | Rasio Capaian Kinerja Fisik | | Perubahan Kinerja | |
|---|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | Anggaran | Fisik |
| A. Program Lintas OPD (Rutin) | 91.88 | 92.99 | 93.71 | 86.60 | Naik | Turun |
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 91.07 | 93.04 | 94.62 | 88.50 | Naik | Turun |
| 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 96.86 | 99.37 | 98.89 | 99.80 | Naik | Naik |
| 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 85.00 | 87.87 | 87.00 | 82.49 | Naik | Turun |
| 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 95.61 | 94.30 | 94.75 | 87.52 | Turun | Turun |
| 5. Program peningkatan disiplin aparatur | 95.04 | 95.57 | 96.59 | 84.05 | Naik | Turun |
| 6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 87.72 | 87.80 | 90.44 | 77.26 | Naik | Turun |
| B. Program Pembangunan Daerah | 86.79 | 87.19 | 88.09 | 82.95 | Naik | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Program rutin yang mengalami perubahan kinerja anggaran maupun fisik yang naik yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, sedangkan program yang mengalami perubahan kinerja yang turun adalah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Untuk pembahasan evaluasi kinerja yang lebih mendalam, berikut ini disampaikan dengan lengkap bagaimana kinerja masing-masing OPD jika dilihat berdasarkan pelaksanaan program sesuai dengan tupoksinya. Sama seperti sebelumnya, evaluasi juga dilakukan terhadap capaian kinerja anggaran dan fisik.

2.2.1. Urusan Pendidikan

2.2.1.1. Dinas Pendidikan

Prestasi kinerja fisik program pada urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada Tahun 2016 rata-rata termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) dengan hanya 1 program yang masuk kategori Sedang (S) yaitu Program Pendidikan Non Formal. Demikian juga untuk penyerapan anggaran dominan masuk dalam kategori ST dan T, terkecuali untuk 1 (satu) program yang terindikasi penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR), hanya 43,58% yaitu Program Pelayanan Pendidikan Non Formal.

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Program Dinas Pendidikan
Provinsi Papua Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 91.58 | ST | 92.12 | ST | 81.55 | T | 81.74 | T | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 97.45 | ST | 97.44 | ST | 96.00 | ST | 95.97 | ST | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 91.93 | ST | 100 | ST | 99.97 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 97.02 | ST | 100 | ST | 89.49 | T | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 86.19 | T | 99.84 | ST | 99.69 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 94.75 | ST | 95.72 | ST | 92.15 | ST | 50.55 | R | Turun | Turun |
| 7 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 97.61 | ST | 95.37 | ST | 96.25 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 8 | Program Pendidikan Menengah Atas | 96.70 | ST | 99.35 | ST | 30.70 | SR | 20.27 | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Pendidikan Non Formal | 67.08 | S | 43.58 | SR | 98.43 | ST | 78.12 | T | Naik | Naik |
| 10 | Program Pendidikan Luar Biasa | 99.38 | ST | 100.00 | ST | 99.74 | ST | 67.37 | S | Naik | Turun |
| 11 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 95.64 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 12 | Program Manajemen Pelayanan | 93.07 | ST | 92.10 | ST | 22.20 | SR | 16.73 | SR | Turun | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| | Pendidikan | | | | | | | | | | |
| 13 | Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi | 82.40 | T | 82.47 | T | 87.42 | T | 92.47 | ST | Naik | Naik |
| 14 | Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | 94.85 | ST | 99.86 | ST | 76.47 | T | 81.95 | T | Turun | Turun |
| 15 | Program Pendidikan Layanan Khusus | 92.95 | ST | 93.88 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 16 | Program Pendidikan Menengah Kejuruan | 91.23 | ST | 93.73 | ST | 37.22 | SR | 16.91 | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017, dari 16 program yang ada pada Dinas Pendidikan terdapat 9 program yang masuk kategori ST dan T dan 5 program dengan capaian kinerja Sangat Rendah (SR) yaitu Program Pendidikan Menengah Atas, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Layanan Khusus dan Program Pendidikan Menengah Kejuruan sedangkan sisanya masuk kategori Sedang dan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pendidikan belum memenuhi target dan berada dibawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, serta terindikasi belum efisien dan efektif.

2.2.2. Urusan Kesehatan

2.2.2.1. Dinas Kesehatan

Prestasi kinerja fisik program pada urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan mengalami perubahan yang dominan meningkat. Tahun 2016 terdapat 9 program dengan capaian kinerja anggaran masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) dan Sedang namun di tahun 2017 turun menjadi 5 program. Capaian kinerja fisik tahun 2016 terdapat 8 program dengan kategori SR, R dan S, sedangkan di tahun 2017 turun menjadi 2 program dengan kategori S dan SR yaitu : Program peningkatan disiplin aparatur (SR) dan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (S). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Kesehatan sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, serta terindikasi sudah efisien dan efektif.

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Program Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 91.37 | ST | 100.00 | ST | 87.34 | T | 97.31 | ST | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 73.36 | S | 72.67 | S | 44.52 | SR | 94.53 | ST | Turun | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.82 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 88.19 | T | 99.74 | ST | 62.55 | R | 99.09 | ST | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 82.51 | T | 100.00 | ST | 80.62 | T | 97.55 | ST | Turun | Turun |
| 6 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 77.57 | T | 93.46 | ST | 86.47 | T | 99.45 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 45.25 | SR | 59.32 | R | 68.40 | S | 93.21 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 49.03 | SR | 49.49 | SR | 98.76 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 9 | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | - | SR | - | SR | 75.27 | T | 87.22 | T | Naik | Naik |
| 10 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | 41.15 | SR | 46.51 | SR | 87.75 | T | 93.67 | ST | Naik | Naik |
| 11 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 87.92 | T | 93.05 | ST | 99.46 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 12 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 85.09 | T | 92.39 | ST | 77.91 | T | 82.08 | T | Turun | Turun |
| 13 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 68.35 | S | 63.41 | R | 86.55 | T | 93.69 | ST | Naik | Naik |
| 14 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | - | SR | - | SR | 54.79 | R | 74.06 | S | Naik | Naik |
| 15 | Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | - | SR | - | SR | 91.29 | ST | 75.35 | T | Naik | Naik |
| 16 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 72.75 | S | 92.79 | ST | 76.72 | T | 88.40 | T | Naik | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

Prestasi kinerja fisik program pada urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura mengalami perubahan yang cenderung menurun. Tahun 2016 terdapat 14 program dengan capaian kinerja fisik masuk dalam kategori Sangat tinggi (ST) dan Tinggi (T) namun di tahun 2017 turun menjadi 7 program. Capaian kinerja anggaran tahun 2016 terdapat 8 program dengan kategori ST dan T, sedangkan di tahun 2017 turun menjadi 5 program sisanya atau 3 program masuk dalam S dan SR. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura belum memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, serta terindikasi belum efisien dan efektif.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Program Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 83.78 | T | 100.00 | ST | 90.66 | ST | 92.53 | ST | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 93.10 | ST | 93.45 | ST | 98.51 | ST | 71.89 | S | Naik | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 86.87 | T | 100.00 | ST | 60.56 | R | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 74.22 | S | 100.00 | ST | 61.71 | R | 92.48 | ST | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 69.74 | S | 91.63 | ST | Turun | Turun |
| 6 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 58.87 | R | 98.87 | ST | 89.60 | T | 91.63 | ST | Naik | Turun |
| 7 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | 90.33 | ST | 100.00 | ST | 99.83 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 79.04 | T | 99.04 | ST | 76.23 | T | 91.77 | ST | Turun | Turun |
| 9 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 71.46 | S | 89.91 | T | 39.39 | SR | 84.26 | T | Turun | Turun |
| 10 | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 80.58 | T | 90.34 | ST | 91.13 | ST | 91.23 | ST | Naik | Naik |
| 11 | Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 50.00 | SR | 23.66 | SR | Turun | Turun |
| 12 | Program peningkatan kesehatan perorangan | 96.96 | ST | 97.85 | ST | 86.92 | T | 63.78 | R | Turun | Turun |
| 13 | Program Sumberdaya Kesehatan | - | SR | - | SR | - | SR | - | SR | Naik | Naik |
| 14 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (KEWAJIBAN) | 97.54 | ST | 98.57 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 15 | Program peningkatan kesehatan perorangan (KEWAJIBAN) | 76.61 | T | 76.61 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.2.3. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

Prestasi kinerja fisik program pada urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abepura mengalami

perubahan yang dominan meningkat. Di tahun 2016 dan 2017 dari 10 program pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura terdapat 8 program dengan capaian kinerja fisik masuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). 2 program yang memiliki capaian kinerja Sangat Rendah (SR) yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata di tahun 2016.

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Program Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 86.76 | T | 100.00 | ST | 89.01 | T | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 35.86 | SR | 34.91 | SR | 90.24 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.50 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 119.52 | ST | 100.00 | ST | 99.93 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 94.19 | ST | 100.00 | ST | 98.29 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 31.35 | SR | 100.00 | ST | 71.55 | S | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 69.41 | S | 75.04 | T | 87.91 | T | 98.28 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 81.61 | T | 85.23 | T | 62.75 | R | 86.05 | T | Turun | Naik |
| 9 | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 33.23 | SR | 34.95 | SR | 98.86 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua | 95.55 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Untuk tahun 2017 terdapat 2 program yaitu Program peningkatan disiplin aparatur dan Program Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua. Capaian kinerja anggaran tahun 2016 dan 2017 terdapat 6 program dengan kategori ST dan T, sisanya atau 4 program masuk dalam dengan kategori S, R dan SR. Terlihat juga adanya penurunan kinerja anggaran yaitu Program peningkatan disiplin aparatur, Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua.

secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, serta terindikasi sudah efisien dan efektif.

2.2.2.4. Rumah Sakit Jiwa

Prestasi kinerja fisik program pada urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa mengalami perubahan yang cenderung menurun. Tahun 2016 terdapat 9 program dengan capaian kinerja fisik masuk dalam kategori Sangat tinggi (ST) dan Tinggi (T) namun di tahun 2017 turun menjadi 3 program. Capaian kinerja anggaran tahun 2016 dan 2017 terdapat 8 program dengan kategori ST dan T, dengan program yang berbeda dan sisanya atau 2 program masuk kategori R dan SR yaitu Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata untuk tahun 2016 dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah.

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Program Rumah Sakit Jiwa
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 98.35 | ST | 100.00 | ST | 97.78 | ST | 97.44 | ST | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 99.51 | ST | 100.00 | ST | 52.81 | R | 54.74 | R | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.00 | ST | 100.00 | ST | 99.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 98.26 | ST | 100.00 | ST | 90.06 | ST | 74.89 | S | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 98.53 | ST | 81.97 | T | Turun | Turun |
| 6 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 43.41 | SR | 50.00 | SR | 82.93 | T | 49.14 | SR | Naik | Turun |
| 7 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 97.57 | ST | 100.00 | ST | 44.81 | SR | 14.49 | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 51.34 | R | 100.00 | ST | 90.46 | ST | 41.64 | SR | Naik | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 9 | Program Peningkatan Kesehatan Perorangan | 78.00 | T | 100.00 | ST | 81.38 | T | 50.11 | R | Naik | Turun |
| 10 | Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat | 95.51 | ST | 100.00 | ST | 93.03 | ST | 48.69 | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Rumah Sakit Jiwa belum memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, serta terindikasi belum efisien dan efektif.

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

2.2.3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prestasi kinerja fisik program pada urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami perubahan yang cenderung menurun. Tahun 2016 terdapat 9 program dengan capaian kinerja anggaran masuk dalam kategori Sangat tinggi (ST) dan Tinggi (T) namun di tahun 2017 turun menjadi 8 program. Capaian kinerja fisik tahun 2016 terdapat 10 program dan 11 program di tahun 2017 dengan kategori ST dan T, dan sisanya masuk kategori S, R dan SR.

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 97.64 | ST | 100.00 | ST | 88.34 | T | 88.52 | T | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 65.30 | S | 65.75 | S | 95.73 | ST | 96.87 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 98.57 | ST | 99.21 | ST | 99.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 95.30 | ST | 95.83 | ST | 89.12 | T | 91.55 | ST | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem | 93.72 | ST | 97.52 | ST | 96.00 | ST | 96.08 | ST | Naik | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| | pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | |
| 6 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 86.60 | T | 91.55 | ST | 68.86 | S | 81.30 | T | Turun | Turun |
| 7 | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 98.79 | ST | 99.99 | ST | 85.66 | T | 94.79 | ST | Turun | Turun |
| 8 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 99.91 | ST | 99.98 | ST | 97.47 | ST | 99.96 | ST | Turun | Turun |
| 9 | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 99.67 | ST | 100.00 | ST | 63.18 | R | 84.73 | T | Turun | Turun |
| 10 | Program penyediaan dan pengolahan air baku | - | SR | - | SR | 33.48 | SR | 42.80 | SR | Naik | Naik |
| 11 | Program pengendalian banjir | 99.66 | ST | 99.43 | ST | 49.55 | SR | 73.98 | S | Turun | Turun |
| 12 | Program pembangunan infrastruktur pedesaan | 66.97 | S | 69.47 | S | 60.19 | R | 69.05 | S | Turun | Turun |
| 13 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | 70.97 | S | 82.49 | T | 81.11 | T | 98.41 | ST | Naik | Naik |
| 14 | Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 68.60 | S | 90.31 | ST | 74.07 | S | 80.90 | T | Naik | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Adapun program dengan perubahan capaian kinerja anggaran yang turun kategori yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang turun dari ST ke T, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan turun dari kategori Tinggi (T) ke Sedang (S), Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dari Sangat Tinggi (ST) ke Rendah (R), Program pengendalian banjir dan Program pembangunan infrastruktur pedesaan dari Sedang (S) ke Rendah (R). Sedangkan capaian kinerja fisik program yang terlihat turun kategori dari ST ke T yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dan program yang turun kategori dari ST ke S yaitu Program pengendalian banjir.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, serta terindikasi belum efisien dan efektif.

2.2.4. Urusan Perumahan

2.2.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Prestasi kinerja program pada urusan perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mengalami perubahan yang cenderung meningkat. Tahun 2016 terdapat 5 program dengan capaian kinerja anggaran maupun fisik masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) dan 1 program yang masuk kategori Tinggi (T). Tahun 2017 capaian kinerja anggaran untuk keseluruhan program masuk kategori sangat tinggi dan tinggi, sedangkan untuk capaian kinerja fisik bervariasi hasilnya dari T, S dan SR.

Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Program Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | SR | - | SR | 90.55 | ST | 79.69 | T | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | - | SR | - | SR | 82.71 | T | 6.99 | SR | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | - | SR | - | SR | 99.53 | ST | - | SR | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | - | SR | - | SR | 191.62 | ST | 70.23 | S | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | SR | - | SR | 94.04 | ST | 25.53 | SR | Naik | Naik |
| 6 | Program Pengembangan Perumahan | 84.16 | T | 89.01 | T | 83.06 | T | 66.07 | S | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Secara keseluruhan kondisi ini menunjukkan baik kinerja realisasi anggaran pembangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tinggi dan sangat tinggi berarti pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal

kelulusan penilaian kinerja sedangkan untuk capaian kinerja fisik belum memenuhi target dan masih berada dibawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.5. Urusan Perencanaan Pembangunan

2.2.5.1. Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri

Prestasi kinerja program pada Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri mengalami arah perubahan yang cenderung meningkat. Tahun 2016 keseluruhan program dengan capaian kinerja anggaran maupun fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Tahun 2017 capaian kinerja anggaran maupun fisik masih dominan masuk kategori sangat tinggi dan tinggi, kecuali untuk Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur masuk kategori Rendah (R). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik pembangunan pada Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.53.
Capaian Kinerja Program Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 99.54 | ST | 100.00 | ST | 99.96 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 99.65 | ST | 100.00 | ST | 92.67 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.15 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 89.42 | T | 100.00 | ST | 60.87 | R | 63.88 | R | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.67 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 6 | Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan | 98.94 | ST | 100.00 | ST | 99.96 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas | 97.58 | ST | 100.00 | ST | 94.87 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 8 | Program Pengelolaan Potensi dan Tata Ruang | 97.98 | ST | 100.00 | ST | 98.22 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 9 | Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri | 98.28 | ST | 100.00 | ST | 83.41 | T | 88.89 | T | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.5.2. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Prestasi kinerja program yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mengalami arah perubahan yang cenderung menurun. Tahun 2016 teridentifikasi 13 program dengan capaian kinerja anggaran maupun fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Tahun 2017 capaian kinerja anggaran masih dominan masuk kategori sangat tinggi dan tinggi yaitu sebanyak 12 program sedangkan untuk capaian kinerja fisik secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat Rendah (SR). , kecuali untuk Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur masuk kategori Rendah (R). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik pembangunan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan belum memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Program Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 99.30 | ST | 100.00 | ST | 98.48 | ST | - | SR | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 96.03 | ST | 97.57 | ST | 97.74 | ST | - | SR | Naik | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 75.55 | T | 76.33 | T | 96.20 | ST | - | SR | Naik | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 88.26 | T | 88.01 | T | 92.48 | ST | 3.35 | SR | Naik | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.93 | ST | 31.77 | SR | Turun | Turun |
| 6 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 99.99 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 7 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 99.66 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 99.81 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 10 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | - | SR | Naik | Turun |
| 11 | Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat | - | SR | - | SR | 99.64 | ST | - | SR | Naik | Naik |
| 12 | Program perencanaan sosial dan budaya | - | SR | - | SR | 95.48 | ST | 2.16 | SR | Naik | Naik |
| 13 | Program Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan | 99.43 | ST | 99.85 | ST | | SR | | SR | Turun | Turun |
| 14 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | - | SR | - | SR | | SR | | SR | Naik | Naik |
| 15 | Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitas di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan | - | SR | - | SR | 98.95 | ST | - | SR | Naik | Naik |
| 16 | Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spritual dan Bina Kemasyarakatan | - | SR | - | SR | 98.20 | ST | 4.73 | SR | Naik | Naik |
| 17 | Program Kelembagaan Sosial dan Masyarakat | 100.00 | ST | 100.00 | ST | | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 18 | Program Pengembangan Data dan Informasi | - | SR | - | SR | | SR | - | SR | Naik | Naik |
| 19 | Program Pembinaan Mental Spritual | - | SR | - | SR | 98.99 | ST | - | SR | Naik | Naik |
| 20 | Program pemberdayaan keagamaan | 94.77 | ST | 44.97 | SR | 76.70 | T | 3.66 | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.5.3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prestasi kinerja program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami arah perubahan yang cenderung menurun. Tahun 2016 teridentifikasi 11 program dengan capaian kinerja anggaran maupun fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) dan 3 program yaitu Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, Program Perencanaan Tata Ruang masuk kategori sangat rendah (SR).

Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 94.58 | ST | 99.39 | ST | 92.68 | ST | 93.17 | ST | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 88.56 | T | 89.83 | T | 79.99 | T | 80.10 | T | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 97.17 | ST | 98.61 | ST | | SR | | SR | Turun | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 77.89 | T | 80.96 | T | 75.86 | T | 78.68 | T | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 97.39 | ST | 100.00 | ST | 98.40 | ST | 98.40 | ST | Naik | Turun |
| 6 | Program Pengembangan data/informasi | 92.00 | ST | 96.53 | ST | 86.47 | T | 90.75 | ST | Turun | Turun |
| 7 | Program Perencanaan Tata Ruang | 91.66 | ST | 93.85 | ST | 91.98 | ST | 88.54 | T | Naik | Turun |
| 8 | Program Kerjasama Pembangunan | 85.88 | T | 89.75 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | - | SR | - | SR | 88.07 | T | 94.00 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | - | SR | - | SR | 92.41 | ST | 92.43 | ST | Naik | Naik |
| 11 | Program perencanaan pembangunan daerah | 82.59 | T | 81.48 | T | 86.47 | T | 88.22 | T | Naik | Naik |
| 12 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 98.95 | ST | 99.77 | ST | 96.79 | ST | 98.06 | ST | Turun | Turun |
| 13 | Program perencanaan sosial dan budaya | 96.96 | ST | 98.40 | ST | 96.63 | ST | 98.38 | ST | Turun | Turun |
| 14 | Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup | 97.36 | ST | 99.26 | ST | 85.23 | T | 88.99 | T | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Tahun 2017 capaian kinerja anggaran maupun fisik masih dominan masuk kategori sangat tinggi dan tinggi yaitu sebanyak 12 program namun dengan program yang berbeda dengan kondisi tahun 2016. Adapun program yang masuk kategori sangat rendah yaitu: Program peningkatan disiplin aparatur, Program Kerjasama Pembangunan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

2.2.5.4. Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua

Prestasi kinerja program yang dilaksanakan oleh Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua mengalami arah perubahan yang menurun. Tahun 2016 teridentifikasi 7 program dengan capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) dengan 2 program masuk kategori sedang (S) sedangkan capaian kinerja fisik keseluruhan masuk kategori sangat tinggi (ST). Tahun 2017 capaian kinerja anggaran maupun fisik masih dominan masuk kategori sangat rendah (SR) Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua tahun 2017 belum memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.56.
Capaian Kinerja Program Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 88.82 | T | 81.58 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 96.50 | ST | 97.48 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.79 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 93.27 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 72.64 | S | 97.38 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 6 | Program Pemanfaatan Ruang | 83.08 | T | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 7 | Program Pengembangan Kemitraan | 99.70 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program Pengembangan Data/Informasi | 84.88 | T | 89.62 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Cepat Tumbuh | 67.29 | S | 96.17 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.6. Perhubungan

2.2.6.1. Dinas Perhubungan

Prestasi kinerja program pada Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan mengalami arah perubahan yang cenderung tidak berubah yang mana dari 10 program menunjukkan kinerja turun sebanyak 5 program. Adapun program yang mengalami arah perubahan konsiten menurun baik kinerja anggaran maupun fisik yaitu: Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan pelayanan angkutan, dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Tabel 2.57.
Capaian Kinerja Program Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 78.78 | T | 85.05 | T | 87.35 | T | 87.71 | T | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 95.28 | ST | 96.81 | ST | 49.79 | SR | 48.65 | SR | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.85 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 91.39 | ST | 91.39 | ST | 97.25 | ST | 97.25 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 93.71 | ST | 93.71 | ST | 90.00 | T | 90.00 | T | Turun | Turun |
| 6 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | - | SR | - | SR | 1.92 | SR | 1.92 | SR | Naik | Naik |
| 7 | Program peningkatan pelayanan angkutan | 76.91 | T | 100.00 | ST | | SR | | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 65.64 | S | 67.25 | S | 52.55 | R | 60.01 | R | Turun | Turun |
| 9 | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | 50.98 | R | 51.58 | R | 93.56 | ST | 95.33 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan | 71.73 | S | 71.73 | S | 90.41 | ST | - | SR | Naik | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Tahun 2016 teridentifikasi 6 program dengan capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) dengan 4 program lainnya bervariasi dengan kategori sedang (S), rendah (R), sangat rendah

(SR). Tahun 2017 terdapat 6 program capaian kinerja anggaran masuk kategori sangat tinggi (ST) dan tinggi (T) namun untuk capaian kinerja fisik hanya 5 program yang masuk kategori sangat tinggi (ST) dan tinggi (T). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Perhubungan tahun 2017 sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

2.2.7. Urusan Lingkungan Hidup

2.2.7.1. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup

Prestasi kinerja program pada Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Lingkungan Hidup mengalami arah perubahan yang naik kecuali untuk 2 program yaitu Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Tahun 2016 teridentifikasi 9 program dengan capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) dengan 4 program lainnya bervariasi dengan kategori rendah (R), sangat rendah (SR). Tahun 2017 terdapat 11 program capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori sangat tinggi (ST) dan 2 program capaian kinerja masuk kategori sangat rendah (SR). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Pengelola Lingkungan Hidup tahun 2016 dan 2017 sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.58.
Capaian Kinerja Program Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 98.20 | ST | 98.32 | ST | 99.93 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 94.93 | ST | 95.15 | ST | 99.98 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 98.51 | ST | 98.73 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 95.68 | ST | 95.92 | ST | 99.47 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 94.20 | ST | 95.88 | ST | 99.61 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 87.32 | T | 87.65 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 62.73 | R | 63.59 | R | 99.84 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 9 | Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan | - | SR | - | SR | 99.23 | ST | 99.91 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 84.90 | T | 87.33 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 11 | Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim | 96.27 | ST | 99.52 | ST | 99.91 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 12 | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH | - | SR | - | SR | 99.02 | ST | 98.86 | ST | Naik | Naik |
| 13 | Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | SR | - | SR | 90.47 | ST | 92.65 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.8. Urusan Sosial

2.2.8.1. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Prestasi kinerja program pada Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami arah perubahan yang variative namun dominan program terlihat naik kecuali untuk 4 program yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti, Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan Perumahan memiliki arah perubahan yang turun.

Tabel 2.59.
Capaian Kinerja Program Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 74.40 | S | 78.91 | T | 77.54 | T | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 97.66 | ST | 100.00 | ST | 94.12 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.13 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 62.50 | R | 62.50 | R | 96.72 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial | - | SR | - | SR | 96.83 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 95.66 | ST | 96.41 | ST | 71.49 | S | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 8 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | - | SR | - | SR | 97.02 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 9 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | SR | | SR | 96.01 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 99.65 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 11 | Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti | 91.33 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 12 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | - | SR | - | SR | 92.05 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 13 | Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat | - | SR | - | SR | 78.20 | T | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 14 | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial | 99.97 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 15 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | - | SR | - | SR | 98.39 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 16 | Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti | - | SR | - | SR | 97.20 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 17 | Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran | - | SR | - | SR | 95.91 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| | Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | |
| 18 | Program Pengembangan Perumahan | 93.09 | ST | 100.00 | ST | - | SR | | SR | Turun | Turun |
| 19 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur bagi Masyarakat | - | SR | - | SR | - | SR | | SR | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

Tahun 2016 teridentifikasi 8 program memiliki capaian kinerja anggaran dan 9 program memiliki capaian fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Tahun 2017 terdapat 13 program capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) dan 15 program capaian kinerja fisik masuk kategori sangat tinggi (ST). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.9. Urusan Pemberdayaan Perempuan

2.2.9.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdapat 6 program dengan arah perubahan yang dominan naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik hanya 4 program yang terlihat naik. Tahun 2016 keseluruhan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Tahun 2017 terdapat 9 program capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) sedangkan 1 program yaitu Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak masuk kategori sangat rendah (SR). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di tahun 2016 dan 2017 sudah

memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.60.
**Capaian Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 Tahun 2016-2017**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 98.61 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.83 | ST | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 95.58 | ST | 100.00 | ST | 99.95 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 88.51 | T | 100.00 | ST | 79.84 | T | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.75 | ST | 92.28 | ST | Turun | Turun |
| 6 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 99.52 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 99.19 | ST | 100.00 | ST | 99.74 | ST | 99.96 | ST | Naik | Turun |
| 8 | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak | 99.78 | ST | 100.00 | ST | 94.53 | ST | 94.42 | ST | Turun | Turun |
| 9 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | 99.40 | ST | 100.00 | ST | 99.68 | ST | 99.67 | ST | Naik | Turun |
| 10 | Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 99.05 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.10. Urusan Tenaga Kerja

2.2.10.1. Dinas Tenaga Kerja

Prestasi kinerja program pada Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dari total 14 program terdapat 7 program dengan arah perubahan yang turun untuk capaian kinerja anggaran dan 8 program capaian kinerja fisik dengan arah perubahan naik. Tahun 2016 terdapat 10 program Dinas Tenaga Kerja memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) sedangkan 4 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program Pengembangan

Perumahan, Program Pengawasan Ketenagakerjaan, Program Peningkatan Kinerja Organisasi dan Program Pengembangan Produktivitas Kerja.

Tabel 2.61.
Capaian Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 96.08 | ST | 96.42 | ST | 96.56 | ST | 96.56 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 96.37 | ST | 96.65 | ST | 94.59 | ST | 94.85 | ST | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.44 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 92.81 | ST | 95.46 | ST | 81.91 | T | 83.04 | T | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 88.17 | T | 90.77 | ST | 97.74 | ST | 99.23 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Pengembangan Perumahan | - | SR | - | SR | 95.72 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 92.29 | ST | 94.21 | ST | 98.25 | ST | 98.61 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program Pembinaan Kependudukan | 99.58 | ST | 99.72 | ST | 99.16 | ST | 99.16 | ST | Turun | Turun |
| 9 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 98.01 | ST | 99.06 | ST | 42.24 | SR | 42.24 | SR | Turun | Turun |
| 10 | Program Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Produktivitas | 99.95 | ST | 100.00 | ST | 95.52 | ST | 95.67 | ST | Turun | Turun |
| 11 | Program Peningkatan Kinerja Organisasi | 86.34 | T | 99.65 | ST | 98.02 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 12 | Program Pengembangan Produktivitas Kerja | 99.68 | ST | 100.00 | ST | 97.83 | ST | 100.00 | ST | Turun | Tetap |
| 13 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lokal | 99.92 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 14 | Program Pengawasan Ketenagakerjaan | - | SR | - | SR | 99.84 | ST | 99.84 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

Tahun 2017 terdapat 12 program capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) sedangkan 2 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lokal. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja di tahun 2016 dan 2017 sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.2.11.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prestasi kinerja program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari total 9 program terdapat 7 program dengan arah perubahan yang turun untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik terdapat 7 program memiliki arah perubahan naik. Tahun 2016 terdapat 7 program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) sedangkan 2 program masuk kategori sedang (S) dan rendah (R). Untuk capaian kinerja fisik terlihat 1 program saja yang memiliki kategori capaian rendah (R) yang juga untuk capaian kinerja anggaran yaitu Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Tahun 2017 terdapat 7 program capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) sedangkan 2 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dan Program pengembangan data/informasi.

Tabel 2.62.
Capaian Kinerja Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 72.68 | S | 97.62 | ST | 84.88 | T | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 98.62 | ST | 100.00 | ST | 83.56 | T | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.98 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 83.68 | T | 100.00 | ST | 82.64 | T | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 99.95 | ST | 100.00 | ST | 99.88 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 6 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 54.21 | R | 59.64 | R | 48.07 | SR | 49.64 | SR | Turun | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 7 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 92.00 | ST | 89.80 | T | 86.57 | T | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 8 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 91.23 | ST | 88.50 | T | 76.15 | T | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 9 | Program pengembangan data/informasi | 91.86 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2016 dan 2017 sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

2.2.12. Urusan Penanaman Modal

2.2.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prestasi kinerja program pada Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari total 9 program terdapat 7 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik terdapat 5 program yang memiliki arah perubahan naik. Tahun 2016 terdapat 7 program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) sedangkan 2 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan daya saing Investasi.

Tabel 2.63.

Capaian Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 95.37 | ST | 96.89 | ST | 98.12 | ST | 99.04 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 99.40 | ST | 99.42 | ST | 99.91 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.47 | ST | 100.00 | ST | 99.07 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 85.07 | T | 94.96 | ST | 90.62 | ST | 94.76 | ST | Naik | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 99.63 | ST | 97.91 | ST | 98.59 | ST | 84.61 | T | Turun | Turun |
| 6 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 25.31 | SR | 27.89 | SR | 98.79 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal | 98.40 | ST | 100.00 | ST | 99.34 | ST | 96.95 | ST | Naik | Turun |
| 8 | Program Peningkatan daya saing Investasi | | SR | | SR | | SR | | SR | Naik | Naik |
| 9 | Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal | 97.48 | ST | 100.00 | ST | 99.76 | ST | 99.53 | ST | Naik | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Tahun 2017 terdapat 8 program capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) sedangkan 1 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program Peningkatan daya saing Investasi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2016 dan 2017 sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.13. Urusan Kebudayaan

2.2.13.1. Dinas Kebudayaan

Prestasi kinerja program pada Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dari total 13 program terdapat 7 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik terdapat 9 program yang memiliki arah perubahan naik. Tahun 2016 terdapat 7 program Dinas Kebudayaan memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan 6 program masuk kategori sangat rendah (SR) sedangkan untuk capaian kinerja fisik terdapat 5 program yang masuk kategori sangat tinggi (ST) dan tinggi (T).

Tabel 2.64.
Capaian Kinerja Program Dinas Kebudayaan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | SR | - | SR | 81.05 | T | 63.43 | R | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | - | SR | - | SR | 99.96 | ST | 90.02 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | - | SR | - | SR | 99.96 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 99.87 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.89 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 7 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 99.70 | ST | 79.03 | T | 83.45 | T | 98.82 | ST | Turun | Naik |
| 9 | Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya | - | SR | - | SR | 95.18 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 100.00 | ST | 63.80 | R | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 11 | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kebudayaan Budaya | 98.36 | ST | 67.55 | S | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 12 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 93.45 | ST | 94.16 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 13 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 100.00 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017 terdapat 9 program capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) dan 4 program masuk kategori sangat rendah (SR). Capaian kinerja fisik yang masuk kategori ST dan T ada 8 program dengan 5 program lainnya masuk kategori rendah (R) dan SR. Adapun program dengan capaian kinerja anggaran dan fisik sangat rendah (SR) yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kebudayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Kebudayaan di tahun 2016 dan 2017 sudah cukup memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.14. Urusan Pemuda dan Olahraga

2.2.14.1. Dinas Olah Raga dan Pemuda

7. Prestasi kinerja program pada Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Olah Raga dan Pemuda dari total 11 program terdapat 9 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik terdapat 10 program yang memiliki arah perubahan naik. Tahun 2016 terdapat 4 program Dinas Olah Raga dan Pemuda memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan tinggi (T) sedangkan 7 program masuk kategori sedang (S), rendah (R), sangat rendah (SR). Capaian kinerja fisik pada Dinas Olah Raga dan Pemuda terdapat 6 program yang masuk kategori sangat tinggi (ST) dan tinggi (T). Adapun program dengan capaian kinerja fisik maupun anggaran yang masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Keolahragaan, Program Penyelenggaraan Kompetisi/ Pekan Olahraga/ Kejuaraan Olahraga, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Program Dinas Olah Raga dan Pemuda
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 72.91 | S | 98.57 | ST | 90.33 | ST | 99.94 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 60.61 | R | 60.61 | R | 99.51 | ST | 98.36 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | - | SR | - | SR | 98.78 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 48.03 | SR | 84.27 | T | 95.20 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Keolahragaan | - | SR | - | SR | 97.09 | ST | 96.25 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan Olahraga | - | SR | - | SR | 99.77 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program peningkatan peran serta | 99.29 | ST | 100.00 | ST | 92.59 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| | kepemudaan | | | | | | | | | | |
| 8 | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 9 | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga | 40.22 | SR | 49.39 | SR | 97.01 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 92.97 | ST | 100.00 | ST | 96.37 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 11 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 84.09 | T | 93.89 | ST | 76.58 | T | 81.19 | T | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017 program yang dilaksanakan oleh Dinas Olah Raga dan Pemuda memiliki capaian kinerja anggaran maupun fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Olah Raga dan Pemuda di tahun 2016 dan 2017 sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2.2.15.1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Prestasi kinerja program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dari total 8 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran untuk capaian kinerja fisik terdapat 7 program yang memiliki arah perubahan naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 6 program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan 2 program masuk kategori sedang (S) dan sangat rendah (SR). Capaian kinerja fisik pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 1 program yang masuk kategori sangat rendah (SR). Pada tahun 2017 program yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 1 program dengan capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat rendah (SR). Adapun program dengan capaian kinerja fisik dan anggaran yang masuk kategori sangat rendah (SR) tahun 2016 dan

2017 yaitu Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2016 dan 2017 sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.66.
Capaian Kinerja Program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 74.72 | S | 100.00 | ST | 89.12 | T | 98.32 | ST | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 97.92 | ST | 100.00 | ST | 95.25 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 90.30 | ST | 100.00 | ST | 93.63 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 99.65 | ST | 99.72 | ST | 99.13 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 90.79 | ST | 100.00 | ST | 99.66 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan | 97.98 | ST | 100.00 | ST | 99.92 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan | - | SR | - | SR | - | SR | - | SR | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.15.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prestasi kinerja program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari total 10 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik terdapat 7 program yang memiliki arah perubahan naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 6 program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) sisanya masuk kategori sedang (S) dan sangat rendah (SR).

Tabel 2.67.
Capaian Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 65.06 | S | 67.48 | S | 96.44 | ST | 99.56 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 25.28 | SR | 26.54 | SR | 79.16 | T | 83.17 | T | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.55 | ST | 100.00 | ST | 99.94 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 89.28 | T | 88.15 | T | 77.05 | T | 83.84 | T | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 98.17 | ST | 93.03 | ST | Turun | Turun |
| 6 | Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | - | SR | - | SR | 98.20 | ST | 52.25 | R | Naik | Naik |
| 7 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | 94.61 | ST | 100.00 | ST | 99.99 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 97.57 | ST | 99.59 | ST | 96.01 | ST | 99.99 | ST | Turun | Naik |
| 9 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 42.79 | SR | 44.83 | SR | 97.10 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Fasilitasi Pengangkatan Anggota DPRD | 96.42 | ST | 99.20 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017 program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 program dengan capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat rendah (SR). Adapun Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal capaian kinerja anggaran masuk kategori sangat tinggi (ST) namun untuk capaian kinerja fisik masuk kategori rendah (R). Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2016 dan 2017 sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.15.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prestasi kinerja program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dari total 13 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik terdapat 7 program yang memiliki arah perubahan naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 1 program Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) sisanya masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan disiplin aparatur, Program Pengembangan data/informasi.

Tabel 2.68.
Capaian Kinerja Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 99.51 | ST | 100.00 | ST | 99.97 | ST | 98.83 | ST | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 75.11 | T | 75.53 | T | 99.99 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 99.82 | ST | 100.00 | ST | 88.55 | T | 88.53 | T | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Pengembangan data/informasi | - | SR | - | SR | 99.80 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 99.07 | ST | 100.00 | ST | 99.68 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan | 99.96 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Kedaruratan Penanganan Bencana | 99.97 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 10 | Program Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | 97.86 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 11 | Program Kedaruratan Penanganan Bencana | 99.66 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 12 | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran BPBD | 100.00 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 13 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 99.55 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017 hanya 7 program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki capaian kinerja anggaran dan

fisik masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 6 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu : Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Program Kedaruratan Penanganan Bencana, Program Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Program Kedaruratan Penanganan Bencana, Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran BPBD, dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun 2016 dan 2017 sudah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16. Urusan Pemerintahan Umum

2.2.16.1. Sekretariat Daerah

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dari total 7 program terdapat 3 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik terdapat 1 program yang memiliki arah perubahan naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 6 program Sekretariat Daerah memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) sisanya masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan disiplin aparatur, Program Pengembangan data/informasi.

Tabel 2.69.
Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 99.65 | ST | 99.72 | ST | 99.65 | ST | - | SR | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 95.51 | ST | 91.63 | ST | 85.32 | T | - | SR | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.71 | ST | 100.00 | ST | 86.21 | T | - | SR | Turun | Turun |
| 4 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | - | SR | Naik | Turun |
| 5 | Program Pemerintahan Umum | 91.69 | ST | 98.62 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 6 | Program Pengembangan data/informasi | - | SR | - | SR | 96.00 | ST | - | SR | Naik | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 7 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.56 | ST | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017 hanya 6 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan untuk capaian fisik seluruh program masuk kategori sangat rendah (SR) a. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Sekretariat Daerah di tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2017. Dan capaian realisasi fisik maupun anggaran belum dapat memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16.2. Biro Tata Pemerintahan

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan dari total 10 program terdapat 7 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik terdapat 4 program yang memiliki arah perubahan naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 8 program Biro Tata Pemerintahan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) sisanya masuk kategori rendah (R) dan sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Pemerintahan Umum.

Tabel 2.70.
Capaian Kinerja Program Biro Tata Pemerintahan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 99.95 | ST | 89.38 | T | 99.99 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 98.55 | ST | 100.00 | ST | 99.38 | ST | 74.53 | S | Naik | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.41 | ST | - | SR | Turun | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 90.41 | ST | 93.05 | ST | 86.30 | T | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 60.87 | R | 60.87 | R | 100.00 | ST | 40.00 | SR | Naik | Turun |
| 6 | Program Pemerintahan Umum | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 96.32 | ST | 99.44 | ST | 99.64 | ST | 95.78 | ST | Naik | Turun |
| 8 | Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan | 98.20 | ST | 98.82 | ST | 100.00 | ST | 85.71 | T | Naik | Turun |
| 9 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua | 99.58 | ST | 100.00 | ST | 98.08 | ST | 61.66 | R | Turun | Turun |
| 10 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 99.57 | ST | 100.00 | ST | 99.99 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017 hanya 6 program yang dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan untuk capaian fisik 6 program masuk kategori sangat tinggi (ST) dan sisanya masuk kategori Sedang (S), rendah (R), dan sangat rendah (SR). Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Biro Tata Pemerintahan di tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2017. Dan capaian realisasi fisik maupun anggaran sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16.3. Biro Hukum

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dari total 9 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan fisik namun dengan program yang berbeda. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 8 program Biro Hukum memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) sisanya masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada tahun 2017 juga terdapat 8 program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori

tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 1 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Biro Hukum di tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.71.
Capaian Kinerja Program Biro Hukum
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 79.33 | T | 91.73 | ST | 99.50 | ST | 96.93 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 76.52 | T | 88.95 | T | 32.22 | SR | 32.28 | SR | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.90 | ST | 100.00 | ST | 99.93 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 30.77 | SR | 32.00 | SR | 76.63 | T | 77.70 | T | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.46 | ST | 83.74 | T | Turun | Turun |
| 6 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 99.29 | ST | 100.00 | ST | 99.84 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda | 90.44 | ST | 99.30 | ST | 94.43 | ST | 97.61 | ST | Naik | Turun |
| 8 | Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum | 90.96 | ST | 80.76 | T | 90.44 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 9 | Program Dokumentasi dan Informasi Hukum | 81.38 | T | 99.93 | ST | 99.74 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.16.4. Biro Organisasi

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dari total 6 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan fisik namun dengan program yang berbeda. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 secara keseluruhan pelaksanaan program pada Biro Organisasi memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori Sangat Tinggi (ST). Pada tahun 2017 terdapat 5 program yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori Sangat

Tinggi (ST) dan 1 program masuk kategori sedang (S) yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Biro Organisasi di tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.72.
Capaian Kinerja Program Biro Hukum
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----|---------------|----|------------------|----|---------------|----|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 99.04 | ST | 99.61 | ST | 99.55 | ST | 99.39 | ST | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 93.94 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.15 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 91.77 | ST | 95.93 | ST | 72.39 | S | 72.90 | S | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 99.89 | ST | 100.00 | ST | 99.95 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan | 98.32 | ST | 100.00 | ST | 98.61 | ST | 99.96 | ST | Naik | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.16.5. Biro Umum

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Umum dari total 6 program terdapat 3 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 1 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 keseluruhan program pada Biro Umum memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.73.
Capaian Kinerja Program Biro Umum
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan | 93.09 | ST | 100.00 | ST | 94.54 | ST | 76.00 | T | Naik | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| | Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 80.10 | T | 84.86 | T | 94.04 | ST | 86.80 | T | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 98.20 | ST | 100.00 | ST | 97.94 | ST | 96.59 | ST | Turun | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 98.21 | ST | 100.00 | ST | 99.99 | ST | 99.99 | ST | Naik | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.17 | ST | 98.04 | ST | 84.62 | T | 84.62 | T | Turun | Turun |
| 6 | Program Penyediaan Fasilitas Mahasiswa Daerah | 77.85 | T | 98.78 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017 juga terdapat 5 program yang dilaksanakan oleh Biro Umum memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST) dan 1 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program Penyediaan Fasilitas Mahasiswa Daerah. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Biro Umum di tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16.6. Inspektorat

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat dari total 9 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 8 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 7 program Inspektorat memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) sisanya masuk kategori sedang (S), dan rendah (R), yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Untuk capaian kinerja fisik terdapat 1 program dengan kategori sedang (S) yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada tahun 2017 juga terdapat 8 program yang dilaksanakan oleh Inspektorat memiliki capaian

kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 1 program masuk kategori rendah (R) untuk capaian fisik dan sangat rendah (SR) untuk capaian anggaran yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kondisi ini dapat dinyatakan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Inspektorat di tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Inspektorat
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 82.68 | T | 94.16 | ST | 87.34 | T | 96.05 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 90.57 | ST | 91.55 | ST | 91.92 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 98.71 | ST | 100.00 | ST | 98.48 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 58.80 | R | 70.16 | S | 28.57 | SR | 53.79 | R | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 93.11 | ST | 98.24 | ST | 96.09 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 70.64 | S | 84.98 | T | 77.76 | T | 99.92 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 89.34 | T | 92.30 | ST | 87.34 | T | 94.17 | ST | Turun | Naik |
| 8 | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur | 95.78 | ST | 97.74 | ST | 99.96 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 9 | Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | 76.48 | T | 80.00 | T | 79.04 | T | 84.48 | T | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.16.7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dari total 9 program terdapat 5 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan fisik.

Tabel 2.75.
Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 95.34 | ST | 95.44 | ST | 95.68 | ST | 98.13 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 95.98 | ST | 95.98 | ST | 92.22 | ST | 93.35 | ST | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 97.57 | ST | 97.57 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 91.46 | ST | 91.47 | ST | 63.75 | R | 65.49 | S | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 91.47 | ST | 91.47 | ST | 82.14 | T | 82.04 | T | Turun | Turun |
| 6 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 91.45 | ST | 90.45 | ST | 78.08 | T | 71.48 | S | Turun | Turun |
| 7 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | - | SR | - | SR | - | SR | - | SR | Naik | Naik |
| 8 | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota | 77.34 | T | 73.80 | S | 98.34 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 95.34 | ST | 95.44 | ST | 95.68 | ST | 98.13 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 8 program Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 1 program masuk kategori sangat rendah (SR). Untuk capaian kinerja fisik terdapat 2 program dengan kategori sedang (S) dan sangat rendah (SR). Pada tahun 2017 juga terdapat 7 program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah memiliki capaian kinerja anggaran yang masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 2 program masuk kategori rendah (R) dan sangat rendah (SR). sedangkan untuk capaian kinerja fisik hanya 6 program dengan kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan sisanya masuk kategori sedang (S) dan sangat rendah (SR). Dengan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16.8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dari total 10 program terdapat 3 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 2 program untuk capaian kinerja fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 8 program Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 2 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

Tabel 2.76.
Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 82.94 | T | 99.28 | ST | 74.86 | S | 82.06 | T | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 84.75 | T | 97.96 | ST | 85.95 | T | 93.53 | ST | Naik | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | - | SR | - | SR | 99.91 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program fasilitas pindah/purna tugas PNS | 91.94 | ST | 100.00 | ST | 43.38 | SR | 43.38 | SR | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 78.58 | T | 98.72 | ST | 56.97 | R | 63.00 | R | Turun | Turun |
| 6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 92.80 | ST | 97.60 | ST | Turun | Turun |
| 7 | Program Pengembangan data/informasi | 85.46 | T | 98.76 | ST | 52.29 | R | 97.59 | ST | Turun | Turun |
| 8 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 92.06 | ST | 98.06 | ST | 78.05 | T | 77.36 | T | Turun | Turun |
| 9 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 84.16 | T | 98.06 | ST | 60.71 | R | 73.30 | S | Turun | Turun |
| 10 | Program Peningkatan Pendapatan Daerah | - | SR | | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017 juga terdapat 5 program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki capaian kinerja anggaran yang masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 5 program dengan

capaian yang masuk kategori rendah (R) dan sangat rendah (SR). Selanjutnya untuk capaian kinerja fisik terdapat 7 program dengan kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 3 program masuk kategori sedang (S) dan sangat rendah (SR). Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16.9. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa memiliki arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 5 program Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori sangat rendah (SR). Pada tahun 2017 dari total 5 program yang dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa 3 program memiliki capaian kinerja anggaran yang masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan 2 program dengan capaian yang masuk kategori sedang (S) dan sangat rendah (SR). Sedangkan untuk capaian kinerja fisik terdapat 4 program dengan kategori Sangat Tinggi (ST) dan 1 program masuk kategori sedang (S). Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa tahun 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.77.
Capaian Kinerja Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | SR | - | SR | 90.16 | ST | 93.20 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | - | SR | - | SR | 72.38 | S | 74.39 | S | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | - | SR | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan | - | SR | - | SR | 97.78 | ST | 98.26 | ST | Naik | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| | kapasitas sumber daya aparatur | | | | | | | | | | |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.16.10. Biro Humas dan Protokol

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol dari total 8 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 7 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik.

Tabel 2.78.
Capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 97.29 | ST | 99.42 | ST | 99.86 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 90.41 | ST | 100.00 | ST | 99.30 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.95 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 92.86 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | 97.43 | ST | 98.59 | ST | 97.73 | ST | 98.90 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program kerjasama informasi dengan mas media | 95.47 | ST | 97.28 | ST | 96.96 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan | 99.51 | ST | 100.00 | ST | 99.32 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

Jika diperhatikan pada Tahun 2016 semua program Biro Humas dan Protokol memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori sangat tinggi (ST). Pada tahun 2017 sebanyak 7 program yang dilaksanakan

oleh Biro Humas dan Protokol memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan 1 program dengan capaian yang masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan disiplin aparatur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Biro Humas dan Protokol tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16.11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari total 7 program terdapat 3 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 5 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 semua program pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST).

Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 88.80 | T | 80.76 | T | 89.68 | T | 98.62 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 77.11 | T | 91.29 | ST | 39.50 | SR | 65.59 | S | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 92.15 | ST | 85.16 | T | 94.18 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 95.90 | ST | 79.15 | T | 90.16 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 99.95 | ST | 91.05 | ST | 99.99 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 92.51 | ST | 92.08 | ST | 91.65 | ST | 95.95 | ST | Turun | Naik |

Pada tahun 2017 sebanyak 5 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan

2 program dengan capaian yang masuk kategori sedang (S) dan sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16.12. Sekretariat Majelis Rakyat Papua

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Rakyat Papua dari total 6 program terdapat 1 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik arah perubahan kinerja terlihat turun untuk semua program.

Tabel 2.80.
Capaian Kinerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 89.68 | T | 99.99 | ST | 63.94 | R | 59.98 | R | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 91.03 | ST | 100.00 | ST | 49.47 | SR | 7.77 | SR | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.11 | ST | 100.00 | ST | 99.70 | ST | - | SR | Naik | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 97.86 | ST | 100.00 | ST | 73.47 | S | 66.07 | S | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 56.40 | R | 42.30 | SR | Turun | Turun |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP | 71.31 | S | 82.68 | T | 49.78 | SR | 30.53 | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Jika diperhatikan pada Tahun 2016 hampir semua program pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST) kecuali untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP capaian kinerja anggarannya masuk kategori sedang (S). Pada tahun 2017 hanya 1 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Rakyat Papua memiliki capaian kinerja anggaran Sangat Tinggi (ST) sedangkan program lainnya memiliki capaian kinerja baik

anggaran dan fisik masuk kategori sedang (S), rendah (R) dan sangat rendah (SR). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua tahun 2016 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja namun untuk tahun 2017 belum dapat memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16.13. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari total 11 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan untuk capaian kinerja fisik arah perubahan kinerja terlihat turun untuk 6 program. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 hampir semua program pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST) kecuali untuk Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur capaian kinerja anggarannya masuk kategori rendah (R).

Tabel 2.81.
Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 77.31 | T | 91.92 | ST | 95.81 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 62.38 | R | 100.00 | ST | 95.21 | ST | 98.74 | ST | Naik | Turun |
| 3 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 92.45 | ST | 100.00 | ST | 99.80 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program perencanaan pembangunan daerah | 86.32 | T | 87.85 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 6 | Program Kerjasama Pembangunan | 92.40 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 7 | Program pengembangan data dan informasi | 99.15 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | 89.43 | T | 93.55 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| | Manusia Papua | | | | | | | | | | |
| 9 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 94.35 | ST | 97.77 | ST | 99.28 | ST | 99.94 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program Pendidikan Kedinasan | 94.61 | ST | 99.38 | ST | 98.17 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 11 | Program Pengembangan Kemitraan | 97.27 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Selanjutnya pada tahun 2017 hanya 6 program yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) sedangkan 5 program lainnya memiliki capaian kinerja baik anggaran dan fisik masuk kategori sangat rendah (SR). Namun demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.16.14. Badan Penelitian dan Pengembangan

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dari total 6 program semuanya menunjukkan arah perubahan yang naik baik untuk capaian kinerja anggaran maupun untuk capaian kinerja fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 hanya 1 program pada Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST) yaitu Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya pada tahun 2017 semua program yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2016 belum dapat memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja namun untuk tahun 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.82.
Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | - | - | 99.43 | ST | 97.53 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | - | - | - | - | 99.88 | ST | 90.37 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | - | - | - | - | 99.79 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | - | - | - | - | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | - | - | - | 99.19 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan | 89.21 | T | 91.08 | ST | 99.96 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.16.15. Biro Otonomi Khusus

Prestasi kinerja program Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Khusus dari total 6 program semuanya menunjukkan arah perubahan yang naik baik untuk capaian kinerja anggaran maupun untuk capaian kinerja fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 program yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Khusus memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori sangat rendah (SR). Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 5 program yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Khusus memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) sedangkan untuk capaian kinerja fisik hanya 1 program yang masuk kategori Sangat Tinggi (ST) sedangkan yang lainnya masuk kategori sedang (S), rendah (R), dan sangat rendah (SR). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Biro Otonomi Khusus tahun 2016 dan 2017 belum dapat memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.83.
Capaian Kinerja Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Papua Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | - | - | 92.34 | ST | 54.73 | R | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | - | - | - | - | 98.19 | ST | 19.18 | SR | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | - | - | - | - | 99.32 | ST | 104.16 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | - | - | - | - | 96.45 | ST | 72.32 | S | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | - | - | - | - | 100.00 | ST | 64.29 | R | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.16.17. Badan Penghubung Daerah

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah dari total 9 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 4 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 5 program yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST) sedangkan 4 program masuk kategori sangat rendah (SR). Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 7 program yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) sedangkan untuk capaian kinerja fisik hanya 1 program yang masuk kategori Sangat Tinggi (ST) sedangkan yang lainnya masuk kategori sangat rendah (SR). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Badan Penghubung Daerah tahun 2017 belum dapat memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.84.
Capaian Kinerja Program Badan Penghubung Daerah
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 89.31 | T | 91.15 | ST | 94.22 | ST | 15.30 | SR | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 94.66 | ST | 97.29 | ST | 87.21 | T | - | SR | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 95.46 | ST | 100.00 | ST | 99.99 | ST | - | SR | Naik | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | - | - | - | - | 95.11 | ST | 4.99 | SR | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 23.07 | SR | 20.55 | SR | Turun | Turun |
| 6 | Program Pengembangan data/informasi | - | - | - | - | 99.96 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | - | - | - | - | 100.00 | ST | 29.45 | SR | Naik | Naik |
| 8 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 98.57 | ST | 98.58 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Mahasiswa | - | - | - | - | 98.75 | ST | 17.59 | SR | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

2.4.16.18. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Prestasi kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam dari total 7 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 4 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 semua program yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori sangat tinggi (ST) sedangkan pada tahun 2017 terdapat 5 program yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 2 program masuk dalam kategori sangat rendah (SR), sedangkan untuk capaian kinerja fisik hanya 4 program yang masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) sedangkan yang lainnya masuk kategori rendah (R) dan sangat rendah (SR).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2016 dan 2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja Program Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 96.73 | ST | 97.17 | ST | 99.83 | ST | 81.84 | T | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 99.35 | ST | 99.53 | ST | 99.78 | ST | 56.68 | R | Naik | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.79 | ST | 100.00 | ST | 96.55 | ST | 96.55 | ST | Turun | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 98.88 | ST | 100.00 | ST | 46.12 | SR | 46.12 | SR | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program pengembangan data/informasi | 97.17 | ST | 98.16 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 7 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 98.36 | ST | 99.15 | ST | 85.27 | T | 85.24 | T | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.17. Urusan Kepegawaian

2.2.17.1. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Prestasi kinerja program pada Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan dari total 7 program terdapat keseluruhan program dengan arah perubahan yang turun untuk capaian kinerja anggaran dan fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 semua program yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T), dan sangat tinggi (ST) sedangkan pada tahun 2017 keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori sangat rendah (SR). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program

pembangunan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2016 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan untuk tahun 2017 belum dapat memenuhi target.

Tabel 2.86.
Capaian Kinerja Program Badan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 96.87 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 88.89 | T | 96.64 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 96.62 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 83.94 | T | 86.96 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 97.88 | ST | 98.95 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.17.2. Balai Latihan Kerja

Prestasi kinerja program pada Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja dari total 12 program terdapat 8 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 7 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 11 program yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja memiliki capaian kinerja anggaran yang masuk kategori sangat tinggi (ST) sedangkan 1 program masuk kategori sangat rendah (SR) sedangkan untuk capaian kinerja fisik 9 program masuk kategori sangat tinggi (ST). Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 11 program yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja memiliki capaian kinerja anggaran masuk kategori Sangat Tinggi (ST) dan untuk capaian kinerja fisik hanya 8 program yang masuk kategori Sangat Tinggi (ST) sedangkan 4 program yang lainnya masuk kategori rendah (R) dan sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin

aparatur, Program Data/ Informasi, dan Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Balai Latihan Kerja tahun 2016-2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.87.
Capaian Kinerja Program Balai Latihan Kerja
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 98.89 | ST | 92.03 | ST | 99.90 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 92.05 | ST | 94.62 | ST | 98.54 | ST | 56.21 | R | Naik | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 97.74 | ST | 100.00 | ST | 99.54 | ST | 45.19 | SR | Naik | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 99.43 | ST | 93.50 | ST | 99.37 | ST | 93.96 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 99.81 | ST | 57.79 | R | 99.97 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Data/Informasi | 99.69 | ST | 45.74 | SR | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 7 | Program Pengembangan data/informasi | - | SR | - | SR | 99.31 | ST | 97.65 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | 99.87 | ST | 100.00 | ST | 94.43 | ST | 38.13 | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 99.67 | ST | 100.00 | ST | 99.76 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program penerapan pemerintahan yang baik | 96.88 | ST | 100.00 | ST | 96.33 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 11 | Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda | 99.54 | ST | 100.00 | ST | 99.76 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 12 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 99.37 | ST | 100.00 | ST | 99.46 | ST | 99.66 | ST | Naik | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.18. Urusan Kearsipan

2.2.18.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prestasi kinerja program pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dari total 10 program terdapat 3 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 4 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik. Jika

diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 9 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST) sedangkan 1 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program Perbaikan Sistem. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 8 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) sedangkan 2 program yang lainnya masuk kategori sedang (S), rendah (R) dan sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2016-2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.88.
Capaian Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 93.14 | ST | 100.00 | ST | 95.13 | ST | 98.46 | ST | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 97.90 | ST | 100.00 | ST | 94.46 | ST | 97.77 | ST | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.76 | ST | 100.00 | ST | 87.87 | T | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 79.07 | T | 100.00 | ST | 60.36 | R | 65.48 | S | Turun | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | - | SR | - | SR | 90.62 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 99.81 | ST | 100.00 | ST | 84.59 | T | 85.02 | T | Turun | Turun |
| 8 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 94.09 | ST | 100.00 | ST | 89.42 | T | 86.72 | T | Turun | Turun |
| 9 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan | 98.64 | ST | 100.00 | ST | 96.76 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| | Perpustakaan | | | | | | | | | | |
| 10 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan | 96.33 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.19. Urusan Komunikasi dan Informatika

2.2.19.1. Dinas Komunikasi dan Informatika

Prestasi kinerja program pada Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dari total 8 program terdapat 3 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 7 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik.

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 98.95 | ST | 100.00 | ST | 100.05 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 97.99 | ST | 100.00 | ST | 97.10 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 99.47 | ST | 100.00 | ST | 95.51 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | 99.51 | ST | 100.00 | ST | 94.31 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 7 | Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 99.69 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----|---------------|----|------------------|---|---------------|----|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| 8 | Program kerjasama informasi dengan mas media | 98.21 | ST | 100.00 | ST | 88.66 | T | 92.59 | ST | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Jika diperhatikan pada Tahun 2016 semua program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori sangat tinggi (ST). Demikian juga pada tahun 2017 semua program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.20. Urusan Pertanian

2.2.20.1. Dinas Ketahanan Pangan

Prestasi kinerja program pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dari total 12 program terdapat 6 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 8 program yang menunjukkan arah capaian kinerja fisik yang naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 8 program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori sangat tinggi (ST).

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 94.17 | ST | 96.36 | ST | 98.84 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 97.81 | ST | 100.00 | ST | 97.60 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 3 | Program peningkatan | 99.85 | ST | 100.00 | ST | 99.68 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| | disiplin aparatur | | | | | | | | | | |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | - | - | - | - | 99.15 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | 99.26 | ST | 99.84 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program Perencanaan Pembangunan | 99.96 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan | 99.47 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 10 | Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian | 99.68 | ST | 99.91 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 11 | Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan | - | - | - | - | 92.97 | ST | 94.91 | ST | Naik | Naik |
| 12 | Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian | - | - | - | - | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

Pada tahun 2017 terdapat 8 program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST) sedangkan 4 program masuk kategori sangat rendah (SR) yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Program Perencanaan Pembangunan, Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dan Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.20.2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Prestasi kinerja program pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dari total 11 program terdapat 5 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan kinerja fisik yang naik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 10 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki capaian kinerja anggaran yang masuk kategori sangat tinggi (ST), sedangkan untuk capaian kinerja fisik terdapat 8 program yang masuk kategori sangat tinggi (ST).

Tabel 2.91.
Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----|---------------|----|------------------|----|---------------|----|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 97.72 | ST | 50.14 | R | 98.07 | ST | 99.87 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 95.74 | ST | 99.93 | ST | 96.83 | ST | 99.79 | ST | Naik | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.36 | ST | 99.76 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 98.11 | ST | 100.00 | ST | 94.53 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 98.73 | ST | 10.84 | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | 94.77 | ST | 91.35 | ST | 97.47 | ST | 96.73 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program perencanaan pembangunan daerah | - | SR | - | SR | 94.79 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program Perencanaan Pembangunan | 94.08 | ST | 95.49 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Pengembangan Agribisnis | 95.28 | ST | 95.52 | ST | 91.67 | ST | 92.38 | ST | Turun | Turun |
| 10 | Program Pengembangan Kawasan Agribisnis dan Daerah Khusus | 96.41 | ST | 93.31 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 11 | Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian | 98.00 | ST | 89.90 | T | 50.85 | R | 85.09 | T | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki capaian kinerja

anggaran dan 8 program capaian kinerja fisik masuk kategori Sangat Tinggi (ST). Adapun program dengan capaian kinerja fisik dan anggaran sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan disiplin aparatur, Program Perencanaan Pembangunan, dan Program Pengembangan Kawasan Agribisnis dan Daerah Khusus. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2016-2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.20.3. Dinas Perkebunan

Prestasi kinerja program pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dari total 16 program terdapat 9 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 10 program untuk capaian kinerja fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 11 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST), sedangkan 5 program lainnya masuk dalam kategori sedang (S), rendah (R), dan sangat rendah (SR).

Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 12 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan memiliki capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja fisik yang masuk kategori Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST). Adapun program dengan capaian kinerja fisik dan anggaran sangat rendah (SR) yaitu Program Perencanaan Pembangunan, Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah dan Program Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Perkebunan tahun 2016-2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Dinas Perkebunan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan | 97.16 | ST | 97.47 | ST | 89.27 | T | 100.00 | ST | Turun | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| | Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 74.58 | S | 72.91 | S | 97.37 | ST | 74.87 | S | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 93.85 | ST | 100.00 | ST | 99.78 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 94.62 | ST | 100.00 | ST | 114.71 | ST | 77.50 | T | Naik | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 99.06 | ST | 61.08 | R | 97.85 | ST | Turun | Turun |
| 6 | Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | - | SR | - | SR | 97.54 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 8 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 79.69 | T | 86.31 | T | 94.26 | ST | 97.59 | ST | Naik | Naik |
| 9 | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 99.63 | ST | 100.00 | ST | 99.95 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 10 | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 96.42 | ST | 97.66 | ST | 90.11 | ST | 93.34 | ST | Turun | Turun |
| 11 | Program perencanaan pembangunan daerah | - | SR | - | SR | 99.83 | ST | 98.67 | ST | Naik | Naik |
| 12 | Program Perencanaan Pembangunan | 99.90 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 13 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 99.97 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 14 | Program Kerangka Regulasi | - | SR | - | SR | 90.63 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 15 | Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian | 99.95 | ST | 100.00 | ST | 99.31 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 16 | Program Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan | 94.98 | ST | 99.42 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.20.4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Prestasi kinerja program pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari total 16 program terdapat 9 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 10 program untuk capaian kinerja fisik. Jika diperhatikan pada Tahun

2016 terdapat 15 program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST), sedangkan 1 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah (SR) yaitu Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 12 program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja fisik yang masuk kategori Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 87.64 | T | 91.23 | ST | 87.73 | T | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 91.18 | ST | 93.34 | ST | 97.44 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 87.31 | T | 100.00 | ST | 99.90 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 99.99 | ST | 100.00 | ST | 99.33 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 93.46 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 97.73 | ST | 100.00 | ST | 87.16 | T | 88.45 | T | Turun | Turun |
| 7 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | 99.91 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 93.74 | ST | 96.71 | ST | 99.59 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 9 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | 98.40 | ST | 99.64 | ST | 91.55 | ST | 99.00 | ST | Turun | Turun |
| 10 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | 98.25 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 11 | Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | 99.78 | ST | 100.00 | ST | 99.48 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 12 | Program Perencanaan Pembangunan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.78 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 13 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 99.96 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 14 | Program Peningkatan keamanan pangan dan ketahanan pangan asal hewan | 91.53 | ST | 99.39 | ST | 96.24 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 15 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | - | SR | - | SR | 98.95 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 16 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 87.64 | T | 91.23 | ST | 87.73 | T | 100.00 | ST | Naik | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

Adapun program dengan capaian kinerja fisik dan anggaran sangat rendah (SR) yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016-2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.21. Urusan Kehutanan

2.2.21.1. Dinas Kehutanan

Prestasi kinerja program pada Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dari total 17 program terdapat 9 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 11 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori sangat tinggi (ST), sedangkan 6 program lainnya masuk dalam kategori rendah (R) dan sangat rendah (SR) yaitu Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, Program rehabilitasi hutan dan lahan, Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, Program

perencanaan dan pengembangan hutan, Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat, Program Pengelolaan DAK Bidang Kehutanan.

Tabel 2.94.
Capaian Kinerja Dinas Kehutanan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 97.83 | ST | 100.00 | ST | 97.36 | ST | 97.72 | ST | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 96.17 | ST | 97.96 | ST | 99.27 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 98.39 | ST | 100.00 | ST | 99.82 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 94.61 | ST | 100.00 | ST | 99.75 | ST | 85.69 | T | Naik | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 99.02 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan | 98.62 | ST | 93.97 | ST | 94.63 | ST | 97.50 | ST | Turun | Naik |
| 7 | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | 98.79 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 98.47 | ST | 91.03 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | 98.50 | ST | 98.91 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 10 | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 11 | Program Pengelolaan Hutan Masyarakat Hukum Adat | 98.74 | ST | 98.86 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 12 | Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan | - | SR | - | SR | 96.39 | ST | 90.46 | ST | Naik | Naik |
| 13 | Program rehabilitasi hutan dan lahan | - | SR | - | SR | 98.34 | ST | 81.13 | T | Naik | Naik |
| 14 | Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan | - | SR | - | SR | 99.06 | ST | 83.32 | T | Naik | Naik |
| 15 | Program perencanaan dan pengembangan hutan | - | SR | - | SR | 91.13 | ST | 91.13 | ST | Naik | Naik |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 16 | Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat | - | SR | - | SR | 98.58 | ST | 98.97 | ST | Naik | Naik |
| 17 | Program Pengelolaan DAK Bidang Kehutanan | 55.84 | R | 55.94 | R | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Demikian juga pada tahun 2017 terdapat 11 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan memiliki capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja fisik yang masuk kategori Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST). Adapun program dengan capaian kinerja fisik dan anggaran sangat rendah (SR) yaitu Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Pengelolaan Hutan Masyarakat Hukum Adat dan Program Pengelolaan DAK Bidang Kehutanan. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Kehutanan tahun 2016-2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.22. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

2.2.22.1. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Prestasi kinerja program pada Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dari total 15 program terdapat 5 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 11 program yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST), sedangkan 4 program lainnya masuk dalam kategori rendah (R) dan sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program Pelayanan Air Bersih, Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak

(BBM) dan bahan bakar gas (BBG), Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Tabel 2.95.
Capaian Kinerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|---------------------|----------|---------------|----------|---------------------|----------|---------------|----------|---|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 81.09 | T | 100.00 | ST | 97.51 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 66.17 | S | 67.71 | S | 52.01 | R | 55.77 | R | Turun | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 99.40 | ST | 100.00 | ST | 99.92 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 47.89 | SR | 54.64 | R | 75.84 | T | 15.43 | SR | Naik | Turun |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 99.92 | ST | 100.00 | ST | 94.75 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 6 | Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan | 75.03 | T | 98.44 | ST | 63.88 | R | 64.58 | R | Turun | Turun |
| 7 | Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral | 76.49 | T | 100.00 | ST | 50.94 | R | 70.81 | S | Turun | Turun |
| 8 | Program pelayanan air bersih | 97.06 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program pembinaan, pengawasan, perusahaan mineral dan batubara | 91.41 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 10 | Program Pelayanan Air Bersih | - | SR | - | SR | 96.10 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 11 | Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) | 36.90 | SR | 40.01 | SR | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 12 | Program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi | 96.66 | ST | 99.96 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 13 | Program penelitian dan pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium | 94.16 | ST | 97.95 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| | Pertambahan | | | | | | | | | | |
| 14 | Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi | - | SR | - | SR | 25.51 | SR | 48.82 | SR | Naik | Naik |
| 15 | Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi | 79.26 | T | 86.52 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Demikian juga pada tahun 2017 terdapat 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral memiliki capaian kinerja anggaran dan 4 program capaian kinerja fisik yang masuk kategori Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST). Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral tahun 2016 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan tahun 2017 belum dapat memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.23. Urusan Pariwisata

2.2.23.1. Dinas Pariwisata

Prestasi kinerja program pada Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dari total 8 program terdapat 4 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 6 program untuk capaian kinerja fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST), sedangkan 1 program lainnya masuk dalam kategori sedang (S) dan rendah (R) yaitu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Demikian juga pada tahun 2017 terdapat 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata memiliki capaian kinerja anggaran dan 8 program untuk capaian kinerja fisik yang masuk kategori Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST). dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Pariwisata tahun 2016-2017

sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 2.96.
Capaian Kinerja Dinas Pariwisata
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 97.63 | ST | 99.45 | ST | 96.71 | ST | 97.73 | ST | Turun | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 84.31 | T | 90.99 | ST | 99.30 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 98.53 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 72.27 | S | 64.28 | R | 92.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 88.10 | T | 92.33 | ST | 99.42 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 7 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 99.82 | ST | 99.07 | ST | 57.97 | R | 89.35 | T | Turun | Turun |
| 8 | Program Pengembangan Kemitraan | 99.65 | ST | 97.50 | ST | 99.15 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |

Sumber : Lampiran 1.

2.2.24. Urusan Kelautan dan Perikanan

2.2.24.1. Dinas Kelautan dan Perikanan

Prestasi kinerja program pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dari total 27 program terdapat 14 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 15 program untuk capaian kinerja fisik.

Jika diperhatikan pada Tahun 2016 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, 16 program memiliki capaian kinerja anggaran dan 13 program untuk capaian kinerja fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST), sedangkan program lainnya masuk dalam kategori sedang (S), rendah (R) dan sangat rendah (SR).

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 99.91 | ST | 94.64 | ST | 90.76 | ST | 100.00 | ST | Turun | Naik |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 99.81 | ST | 100.00 | ST | 99.90 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 90.88 | ST | 90.97 | ST | 99.98 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 99.96 | ST | 36.64 | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 6 | Program Pengembangan Data dan Informasi | 99.48 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 7 | Program Pengembangan Budaya Perikanan | 99.10 | ST | 79.63 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 95.96 | ST | 71.03 | S | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 9 | Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengolah dan Pemasaran | 99.99 | ST | 73.84 | S | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 10 | Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan | 60.62 | R | 38.77 | SR | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 11 | Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) | 96.78 | ST | 77.90 | T | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 12 | Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 13 | Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 99.75 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 14 | Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan | 99.80 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 15 | Program peningkatan kesadaran dan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Anggaran | Fisik |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | | |
| | penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| 16 | Program pengembangan budidaya perikanan | - | SR | - | SR | 99.63 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 17 | Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | - | SR | - | SR | 99.79 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 18 | Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 19 | Program Pengembangan Data dan Informasi | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 20 | Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 21 | Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 22 | Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | - | SR | - | SR | 98.75 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 23 | Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 24 | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | - | SR | - | SR | 100.00 | ST | 100.00 | ST | Naik | Naik |
| 25 | Program Pengembangan Prasarana Perikanan | - | SR | - | SR | 25.52 | SR | 59.49 | R | Naik | Naik |
| 26 | Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan | 100.00 | ST | 100.00 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |
| 27 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan | 89.70 | T | 90.71 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

Demikian juga pada tahun 2017 terdapat 14 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja fisik yang masuk kategori Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST). Adapun 13 program memiliki capaian kinerja fisik dan anggaran masuk kategori rendah (R) dan sangat rendah (SR). Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2017 sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.2.25. Perindustrian dan Perdagangan

2.2.25.1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Prestasi kinerja program pada Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari total 13 program terdapat 9 program dengan arah perubahan yang naik untuk capaian kinerja anggaran dan 3 program untuk capaian kinerja fisik. Jika diperhatikan pada Tahun 2016 terdapat 10 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki capaian kinerja anggaran dan fisik yang masuk kategori tinggi (T) dan sangat tinggi (ST), sedangkan 3 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah (SR) yaitu Program peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2016-2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|---|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 92.75 | ST | 96.18 | ST | 92.85 | ST | 84.78 | T | Naik | Turun |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 96.88 | ST | 78.43 | T | 97.35 | ST | 23.51 | SR | Naik | Turun |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | - | SR | - | SR | 99.97 | ST | 39.62 | SR | Naik | Naik |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 98.34 | ST | 100.00 | ST | 90.44 | ST | 46.84 | SR | Turun | Turun |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | 2016 | | | | 2017 | | | | Arah Perubahan Kinerja 2016-2017 | |
|----|--|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|
| | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | Kinerja Anggaran | | Kinerja Fisik | | | |
| | | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | TR (%) | Kategori | Anggaran | Fisik |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 99.96 | ST | 100.00 | ST | 100.00 | ST | 80.50 | T | Naik | Turun |
| 6 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 93.50 | ST | 94.33 | ST | 96.08 | ST | 23.69 | SR | Naik | Turun |
| 7 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 91.31 | ST | 93.40 | ST | 87.93 | T | 47.22 | SR | Turun | Turun |
| 8 | Program Sistim Logistik dan Distribusi Bapokstra | 99.99 | ST | 100.00 | ST | 99.75 | ST | 77.79 | T | Turun | Turun |
| 9 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 97.89 | ST | 100.00 | ST | 99.59 | ST | 48.34 | SR | Naik | Turun |
| 10 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | - | SR | - | SR | 65.88 | S | 3.54 | SR | Naik | Naik |
| 11 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | - | SR | - | SR | 87.11 | T | 88.22 | T | Naik | Naik |
| 12 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 99.41 | ST | 95.16 | ST | 99.67 | ST | 25.95 | SR | Naik | Turun |
| 13 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 90.86 | ST | 93.30 | ST | - | SR | - | SR | Turun | Turun |

Sumber : Lampiran 1.

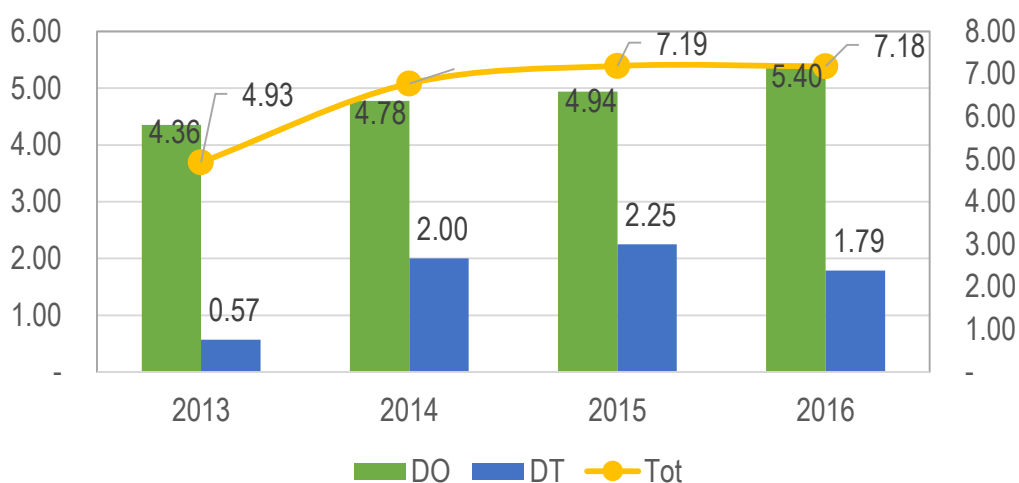
Demikian juga pada tahun 2017 terdapat 11 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki capaian kinerja anggaran yang masuk kategori tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST) dan 4 program capaian kinerja fisik yang masuk kategori Tinggi (T). kondisi ini menunjukkan bahwa bahwa kinerja realisasi anggaran maupun fisik program pembangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016 lebih baik dari kinerja tahun 2017 sehingga dapat disimpulkan tahun 2016 kinerja anggaran dan fisik sudah dapat memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan untuk tahun 2017 belum memenuhi target dan berada di bawah syarat minimal kelulusan penilaian kinerja .

2.3. Otonomi Khusus Provinsi Papua

2.3.1. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

Dalam kurun waktu 2013 – 2016, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Otsus dan Dana tambahan Infrastruktur kepada Provinsi Papua sebesar Rp. 26.08 triliun. Dari Gambar 2.40. terlihat Dana Otsus meningkat dengan rata-rata sebesar Rp. 346 juta per tahun. Berbeda dengan Dana Tambahan Infrastruktur, dimana terlihat perkembangan dalam 2 tahun pertama, namun menurun di tahun terkahir. Penerimaan dana tambahan infrastruktur ini berpengaruh pada angka total penerimaan dari sumber Otsus yang terlihat jelas turun di tahun 2016 dibanding 2015.

Gambar 2.40.
Penerimaan Dana Otsus Periode 2013-2016



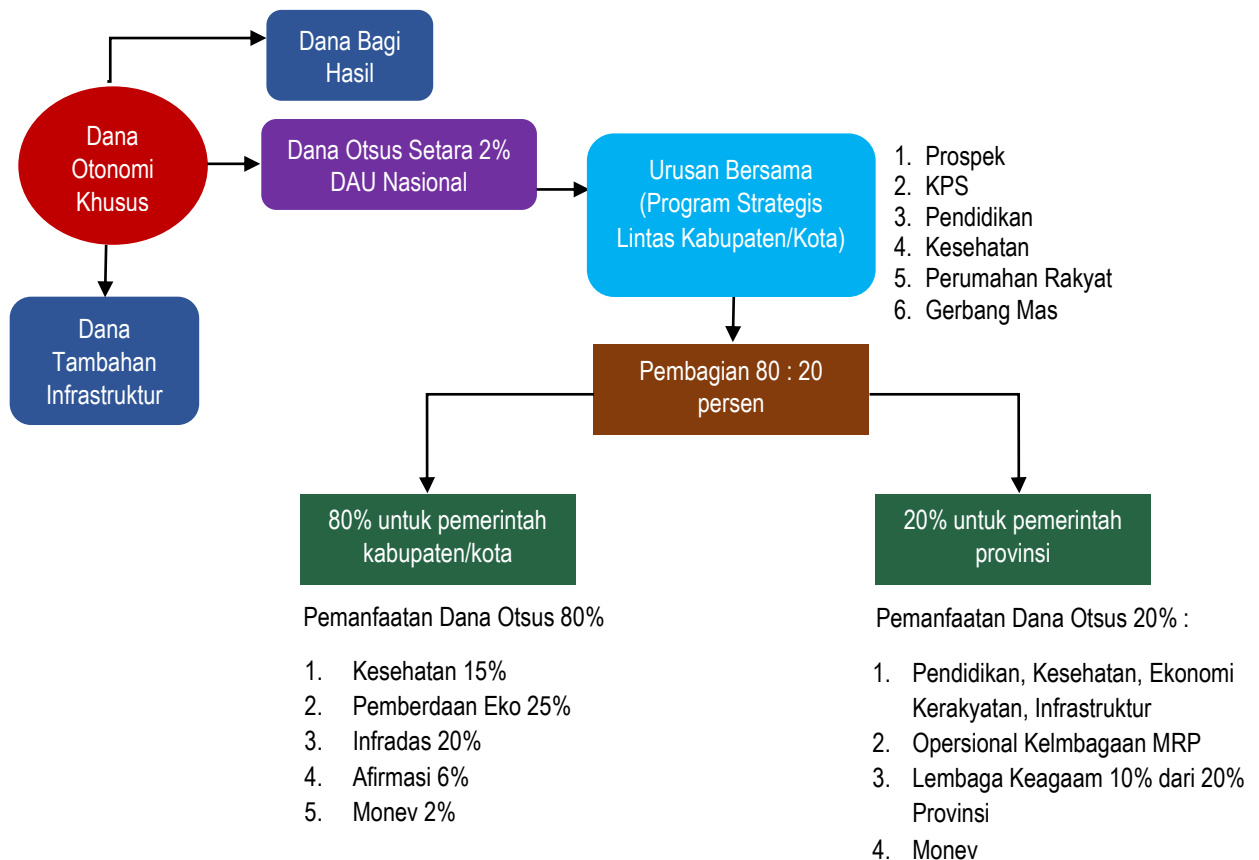
Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Pemerintah Provinsi Papua mengatur pembagian penerimaan dana Otsus melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Perdasus ini efektif berlaku untuk pembagian dana Otsus tahun anggaran 2014. Sebelum tahun tersebut, pembagian dana Otsus mengacu pada yang Perdasus Nomor 1 Tahun 2007. Perbedaan pokok antara kedua Perdasus tersebut terjadi untuk pembagian dana antara Provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Perdasus Nomor 1 Tahun 2007 diatur pembagian antara Provinsi dan kabupaten/kota 40% dan 60%, sedang dalam Perdasus 25 Tahun 2013 pembagian Provinsi dan kabupaten/kota 20% dan 80%.

Pembagian dana Otsus dengan porsi makin besar ke kabupaten/kota (80%) dilakukan Provinsi Papua dengan beberapa pertimbangan. Pertama, sesuai amanat UU21/2001 bahwa kebijakan Otsus Papua ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi Orang Asli Papua (OAP) yang sebagian

besar berada dibawah kewenangan pemerintah kabupaten/ kota. Kedua, bahwa sesuai dasar pemerintah Provinsi relatif diberi kewenangan perundangan untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring hasil pembangunan yang dilaksanakan kabupaten/kota. Ketiga, bahwa dari sisi kedekatan dengan warga masyarakat, kabupaten/kota lebih dekat dan banyak mengetahui kondisi, keberadaan, masalah dan kebutuhan warganya.

Gambar 2.41.
Skema Sumber Dana Dan Pembagian Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Sumber : data diolah

(a). Alokasi Penggunaan Dana Otsus Tahun 2013

Tahun 2013 merupakan tahun pertama kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe. Alokasi penggunaan dana Otsus pada tahun anggaran ini masih menggunakan kebijakan Gubernur Suebu. Kebijakan alokasi dana Otsus 2013:

- a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua TA. 2013 setara dengan 2% dari DAU Nasional sejumlah Rp4.355.950.048.000 dan Alokasi dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar Rp571.428.572.000
- b. Pembagian alokasi dana Otsus Papua sebesar 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten/kota dilakukan setelah dikurangi dengan

- pembiayaan Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) sebesar Rp515.594.870.000
- c. Sisa dana otsus yang disharing antara Provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Papua sebesar Rp3.375.851.966.000
 - d. Dana otsus bagian provinsi 40 persen sebesar Rp1.536.142.071.200 untuk mendukung program/kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan infrastruktur.
 - e. 60 persen dana otsus bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp2.304.213.106.800 ditransfer langsung ke kas daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung program/kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan infrastruktur.

(b). Alokasi Penggunaan Dana Otsus Tahun 2014

Pada akhir tahun 2013, Provinsi Papua telah menetapkan Perdasus 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. Perdasus ini efektif diimplementasikan untuk APBD TA 2014, yang mengatur alokasi dana Otonomi Khusus sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua TA. 2014 setara dengan 2% dari DAU Nasional sejumlah Rp4.777.070.560.000
- b. Pembagian alokasi dana Otsus Papua sebesar 20 persen untuk provinsi dan 80 persen untuk kabupaten/kota dilakukan setelah dikurangi dengan pembiayaan
 - Program (PROSPEK) sebesar Rp515.594.870.000
 - KPS (Kartu Papua Sehat sebesar Rp250.000.000.000
 - GERBANGMAS sebesar Rp150.000.000.000
- c. Sisa dana otsus yang disharing antara Provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Papua sebesar Rp3.861.476.105.000
- d. Dana otsus bagian provinsi 20 persen sebesar Rp772.297.237.000 untuk mendukung program/kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- e. 80 persen dana otsus bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.089.178.868.000 ditransfer langsung ke kas daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung program/kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan infrastruktur.

- f. Alokasi dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar Rp2.000.000.000.000 yang pengelolaannya oleh Provinsi Papua. Dana Infrastruktur di bagi untuk sektor : Dinas Pekerjaan Umum Rp1.3 trilyun, Dinas Perhubungan Rp350 milyar, Bantuan Program Khusus Infrastruktur ke Kab/Kota Rp350 milyar. Khusus digunakan untuk membangun Jalan, Jembatan, Dermaga dan Lapangan Terbang

(c). Alokasi Penggunaan Dana Otsus Tahun 2015

Total Dana Otsus yang diterima Provinsi Papua pada TA 2015 sebesar 4.940.429.880.000 (di luar penerimaan Dana Tambahan Infrastruktur). Dana Otsus ini pertama-tama dialokasikan untuk program lintas kabupaten/kota yaitu : PROSPEK, KPS, GERBANGMAS, dan Perumahan Rakyat; setelah itu dialokasikan untuk bagian kabupaten/kota. Lebih lengkapnya dalam Tabel 2.75 berikut ini.

Tabel 2.99.
Alokasi Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2015

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1 | Dana Otsus 2015 | 4.940.429.880.000 |
| 2 | PROSPEK | 515.596.975.000 |
| 3 | KPS | 250.000.000.000 |
| 4 | Gerbangmas | 250.000.000.000 |
| 5 | Perumahan Rakyat | 63.359.320.000 |
| 6 | Bagian Yg Dibagi Provinsi | 3.861.473.585.000 |
| 7 | Provinsi 20% | 772.294.717.000 |
| 8 | Kabupaten/Kota 80% | 3.089.178.868.000 |

Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

(d). Alokasi Penggunaan Dana Otsus Tahun 2016

Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi Papua pada TA 2016 berjumlah Rp. 5.395.051.859.400 atau meningkat sebesar Rp. 454.621.979.400 dibanding TA 2015. Peningkatan ini dianggarkan untuk Program Pengembangan Pendidikan yang semula (TA 2015) dianggarkan dalam bagian 20% Dana Otsus Provinsi. Kondisi ini sudah menyesuaikan Perubahan Perdasus 25 Tahun 2013.

2.3.2. Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2016 dan 2017

2.3.2.1. Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi 80 : 20 Persen

Evaluasi pengelolaan Dana Otsus 80 : 20 persen yang dikelola oleh SKPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua dilakukan dengan membedah dan menganalisis realisasi penggunaan dana otsus oleh SKPD penerima dalam kurun waktu 2013-2016 (tergantung ketersediaan data disaat melakukan evaluasi). Hasilnya mengindikasikan beberapa isu strategis yang patut di perhatikan dalam mengarahkan pengelolaan dana otsus di tahun 2019 mendatang, yaitu sebagai berikut.

(1) Isu-Isu Strategis Dalam Pengelolaan Dana Otsus 20 Persen :

- a. Berdasarkan data realisasi Dana Otsus 20% tahun 2016 (Inspektorat, 2016) teridentifikasi bahwa 94,59% dari total kegiatan yang dilaksanakan SKPD sudah mengarah pada upaya untuk menekan biaya yang serendah-rendahnya bagi Orang Asli Papua. Fenomena ini mengindikasikan bahwa program OTSUS untuk menurunkan biaya pendidikan, kesehatan dan ekonomi telah diterjemahkan dengan baik oleh SKPD pelaksana kegiatan di tingkat Provinsi;
- b. Hasil monitoring menunjukkan jika dipetakan berdasarkan penerima manfaat langsung yaitu Orang Asli Papua, Unit Layanan, tenaga medis/ guru, dan SKPD (aparatur, perkantoran, dan sebagainya), terlihat pemerintah provinsi dalam mengalokasikan belanja otsus lebih dominan sasarannya kepada Orang Asli Papua (52,48%). Namun demikian, ternyata masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan amanat UU Otsus dan Perdasus 13 tahun 2013, karena ditemukan alokasi belanja di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SKPD (8,84%) seperti untuk aparatur dan perkantoran;
- c. Belum diterapkannya ABK (Anggaran Berbasis Kinerja), karena tidak mentargetkan *outcome* dan *impact* dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dana otsus. Hal lainnya, terlihat juga dalam pelaksanaan kegiatannya, ada yang kurang tepat lokasi pelaksanaan kegiatan jika dilihat dari keberadaan masyarakat OAP. Semua kondisi ini bisa menyebabkan terjadi inefisiensi dalam penggunaan dana otsus 80 persen akibat tidak jelasnya target sasaran pada penerima manfaat langsung Orang Asli Papua.

(2) Isu-Isu Strategis Dalam Pengelolaan Dana Otsus 80 Persen :

- a. Meskipun proporsi penggunaan dana otsus per bidang telah memenuhi aturan, namun dalam pengelolaan dana otsus 80 persen masih banyak juga ditemukan alokasi belanja di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan yang belum mengarah pada sasaran penerima manfaat langsung Orang Asli Papua. Misalkan masih adanya alokasi belanja dana otsus untuk kegiatan-kegiatan aparatur dan perkantoran SKPD (21,40%). Secara keseluruhan, alokasi belanja dana otsus 80 persen lebih dominan pada sasaran Unit Layanan (37,87%);
- b. Jika dibandingkan dengan pengelolaan dana otsus 20 persen, ada kecenderungan kegiatan-kegiatan dana otsus 80 persen yang diimplementasikan oleh kabupaten/kota belum banyak mengarah pada upaya untuk mewujudkan biaya serendah-rendahnya, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Dari hasil monitoring teridentifikasi hanya 24,43% dari total kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang mengarah pada biaya serendah-rendahnya untuk Orang Asli Papua. Fakta ini menandakan bahwa kabupaten/kota belum begitu baik menterjemahkan amanat otsus untuk biaya serendah-rendahnya bagi Orang Asli Papua dalam perencanaannya, yang berarti secara tidak langsung menunjukkan pemerintah provinsi kurang begitu cermat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten/kota;
- c. Sama halnya dengan pemerintah provinsi, di tingkat kabupaten/kota pengelolaan dana otsus 80 persen juga tidak menerapkan ABK (Anggaran Berbasis Kinerja), Selain itu juga dalam pelaksanaan kegiatannya, ada yang kurang tepat lokasi pelaksanaan kegiatan jika dilihat dari keberadaan masyarakat OAP, yang dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan dana otsus 80 persen akibat tidak jelasnya target sasaran pada penerima manfaat langsung Orang Asli Papua;
- d. Terdapat juga dalam beberapa target capaian program/kegiatan yang dinilai tidak sesuai antara dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dengan yang tercantum pada rencana definitif (RD) yang telah dibahas dan ditetapkan. Dari sisi penerima manfaat masyarakat OAP, masih terdapat keluhan walaupun tidak terdapat pada semua Kabupaten/kota di Papua, mengenai kurangnya partisipasi dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan, kurangnya informasi dan sosialisasi tentang adanya program/ kegiatan yang berasal dari dana Otsus, kurangnya transparansi dan keberpihakan program/kegiatan untuk masyarakat OAP. Kondisi ini menyebabkan banyaknya keluhan masyarakat di daerah terpencil yang merasa belum mendapatkan bantuan atau merasakan pembangunan yang bersumber dari dana Otsus. Di lingkup SKPD, adanya keluhan SKPD pengelola dana otsus bidang infrastruktur, bahwa proses pencairan yang menggunakan triwulan I, II, dan III cukup menyulitkan SKPD pengelola dana otsus untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu, adanya URD yang belum di tanda tangani oleh Gubernur sehingga menyulitkan SKPD untuk melaksanakan kegiatan di Kabupaten, dan ketidak sesuaian SKPD pelaksanaan kegiatan antara RD dan DPA dan tempat pelaksanaan kegiatan yang berbeda dengan yang tertuang dalam dokumen;

- e. Pada saat dilakukan monitoring, sebagian besar kegiatan belum mencapai kinerja output yang maksimal, karena realisasi capaiannya rata-rata masih dibawah 50%. Hal ini lebih banyak disebabkan beberapa faktor yaitu: (a) keterlambatan pencairan dana otsus dari pemerintah provinsi, (b) ada pengurangan anggaran karena terjadi perubahan unit fisik, (b) proses revisi kegiatan, (c) aksesibilitas yang sulit ke lokasi kegiatan, (d) kendala dalam bahan baku yang mencakup harga, ketersediaan dan kualitas, dan (e) keterlambatan dalam SPJ;
- f. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh SKPD, walaupun sudah berjalan dengan cukup baik, dan melakukan monitoring meja dan lapangan namun pada beberapa kabupaten informasi yang didapat dari kelompok kerja, diketahui bahwa SKPD teknis jarang melakukan kunjungan untuk monitoring program/kegiatan yang dikerjakan. Peran pengawasan ini dinilai oleh masyarakat sangat penting untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, atau mengidentifikasi masalah serta mencari cara untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut, sehingga output, outcome dan impact dari program/kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai.

Sementara untuk hasil evaluasi pengelolaan dana Otsus 80 : 20 persen yang terfokus kepada realisasi pencapaian impact bagi masyarakat Orang Asli Papua penerima manfaat, melibatkan kurang lebih 1.517 RT orang Asli Papua lokal (OAP suku setempat) sebagai responden yang

tersebar pada 29 kabupaten/kota, dengan rata-rata anggota keluarga 5 orang dan rata-rata lama tinggal 28 tahun. Hasil dari evaluasi impact dari pengelolaan dana otsus tersebut bagi Orang Asli Papua diindikasikan dengan beberapa isu strategis berikut ini.

1. Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah rumah tangga OAP masih sangat rendah hanya 5,5 tahun jika dilihat secara keseluruhan di Papua. Dimana berdasarkan kewilayahan yang paling rendah di Wilayah Me Pago, La Pago dan Ha Anim yang berada di bawah rata-rata Papua;
2. Untuk sektor kesehatan, terlihat juga derajat kesehatan RT OAP lokal masih terbilang rendah. Kondisi ini teridentifikasi dari persentase ibu rumah tangga OAP yang persalinan pertamanya ditangani oleh dokter dan bidan hanya 66,46%. Selain itu, juga ditemukan yang jarang dan bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan sekitar 44,04%. Meskipun tidak semua responden memberikan jawaban, namun paling tidak dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kematian pada OAP ternyata lebih banyak pada anak usia antara 0 - 5 tahun. Sementara untuk penyebab kematian, yang paling banyak ditemukan pada kasus kematian karena penyakit malaria dan paru-paru;
3. Kondisi ekonomi rumah tangga OAP yang sangat rendah menjadi salah satu penyebab mengapa kualitas pendidikan dan kesehatannya terlihat rendah. Hal ini tergambarkan pada rata-rata pengeluaran per kapita OAP per bulan yang hanya sebesar Rp. 520.120,96 jauh dibawah catatan BPS Papua untuk pengeluaran per kapita seluruh penduduk di tahun 2015 mencapai Rp. 829.753 per bulan;
4. Kualitas perumahan rumah tangga OAP lokal masih jauh dari yang diharapkan. Misalkan untuk ketersediaan air bersih dan minum, hanya 48.66% yang menggunakan air terlindungi dan bersih (air ledeng, pompa dan sumur), sisanya lebih banyak menggunakan sumber air dari sungai, hujan, mata air, dan sebagainya, Fakta lainnya, hanya 69.93% rumah tangga OAP yang menggunakan penerangan listrik PLN atau pun non PLN (seperti : genset). Dengan kata lain ada 30,07% rumah tangga OAP dalam kondisi gelap. Selanjutnya, juga terlihat kondisi sanitasi perumahan pada rumah tangga OAP lokal masih ada yang belum layak, karena sekitar 64,74% saja yang memiliki pembuangan air;
5. Terkait dengan pengelolaan dana otsus yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota selama ini (2013 - 2015)

teridentifikasi ada beberapa aspek yang direspon dan dinilai oleh rumah tangga OAP lokal sebagai berikut :

- a. Sebagian besar rumah tangga OAP, atau 68,91% yang tidak mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dievaluasi ini bersumber dari dana otsus (baik itu pada pengelolaan dana otsus 80 persen maupun 20 persen). Namun, ada kecenderungan rumah tangga OAP lebih mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan Prospek, Gerbang Mas, KPS dan perumahan rakyat berasal dari dana otsus;
- b. Walaupun rumah tangga OAP tidak tahu kegiatan tersebut menggunakan dana otsus, akan tetapi sekitar 53,13% yang mengatakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka;
- c. Pengelolaan dana otsus dinilai rumah tangga OAP belum begitu transparan. Hal ini tercermin dari 55,37% responden yang menyatakan seperti demikian. Ini berarti hanya 44,63% yang mengatakan sudah transparan. Selain itu rumah tangga OAP juga menilai pengelolaan dana otsus selama ini belum akuntabel (66,06%), dan kurang partisipatif (54,78%);
- d. Bagi rumah tangga OAP lokal, selama ini pengelolaan dana otsus belum banyak menumbuhkan atau meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat OAP terhadap pemerintah, dan pada dirinya sendiri. Pernyataan ini keluar dari 57,09% responden rumah tangga OAP. Termasuk juga terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan (afirmasi), keduanya lebih banyak dinilai belum menunjukkan dampak;
- e. Sementara penilaian secara sektoral, bagi rumah tangga OAP, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana otsus untuk meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dinilai sudah cukup berhasil dan sangat dirasakan oleh masyarakat OAP (rata-rata di atas 55% yang menyatakan demikian). Namun, untuk peningkatan di sektor ekonomi, khususnya ekonomi rumah tangga dan kampung, dianggap belum optimal, dimana kurang lebih ada 61,04% yang berpandangan demikian.

Beranjak pada berbagai isu strategis dalam pengelolaan dana Otsus di atas, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua di tahun 2019 sebagai berikut :

(1) Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang ekonomi kerakyatan :

- a. Pemerintah perlu memperhatikan potensi dan kebutuhan riil masyarakat OAP dalam memberikan bantuan kepada masyarakat OAP;
- b. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada perempuan OAP seperti pelatihan dalam usaha pembuatan batik Papua, kursus jahit, pemintalan benang, pembuatan kerajinan anyaman, noken dan pemanfaatan hasil hutan (kulit kayu, dll);
- c. Selain bantuan modal, dan kemudahan mendapatkan bantuan kredit, diperlukan bantuan peralatan untuk melakukan aktivitas ekonomi serta juga pendampingan dalam pembuatan produk yang bernilai ekonomi sampai dengan pemasaran hasil produk masyarakat OAP, artinya dibutuhkan suatu konsep/model pembangunan/pengembangan ekonomi orang asli Papua (hilir-hulu) secara terpadu untuk setiap program/kegiatan;
- d. Harus ada sosialisasi program/kegiatan bidang ekonomi kerakyatan yang dibiayai dana Otsus kepada masyarakat OAP di lokasi pembangunan;
- e. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini harus dapat meningkatkan pembangunan kampung OAP dengan memanfaatkan potensi SD kampung.

(2) Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang pendidikan:

- a. Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah rumah tangga OAP masih perlu ditingkatkan. Terutama di Wilayah Me Pago. La Pago dan Ha Anim yang berada di bawah rata-rata Papua;
- b. Pendidikan sudah sangat baik sesuai dengan keinginan pemerintah daerah untuk memberlakukan bebas biaya, namun di beberapa sekolah dasar masyarakat inginkan agar perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, buku dan alat-alat tulis juga disiapkan pemerintah daerah;
- c. Tingkat kesadaran agar anak-anak harus bersekolah telah ada, namun di beberapa daerah (kampung) perlu dilakukan sosialisasi bagi para orangtua khususnya pola pendidikan satu atap bukan saja pada tingkat SD tetapi juga tingkat SMP dan SMA;

- d. Selain kebutuhan akan guru juga ketersediaan rumah bagi guru-guru pada daerah terpencil perlu dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah;
- e. Perlu peningkatan kebutuhan sarana prasarana dan operasional asrama bagi pelajar dan mahasiswa OAP;
- f. Sosialisasi pada orang tua masyarakat OAP di kampung untuk pentingnya menyekolahkan anak perempuan OAP sampai jenjang SMA atau PT (Perguruan Tinggi);
- g. Sosialisasi program kegiatan bidang pendidikan perlu ditingkatkan sampai pada kampung-kampung terpencil dan menginformasikan kepada masyarakat kampung pembiayaan program/kegiatan yang bersumber dari dana Otsus dan menyertakan peran serta masyarakat OAP dalam pengawasan pelaksanaan program kegiatan di kampung.

(3) Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang kesehatan :

- a. Masyarakat telah banyak merasakan manfaat pelayanan pemerintah di bidang kesehatan yaitu pengobatan tanpa bayar, namun masyarakat tidak mengetahui bahwa hal itu telah dibayarkan melalui dana otsus. Diperlukan tenaga pembantu ditingkat Puskesmas maupun Pustu serta rumah petugas kesehatan;
- b. Perlu adanya pelayanan kesehatan terutama dokter spesialis yang secara periodik memberikan pelayanan yang menjangkau lokasi terpencil;
- c. Diberikan kemudahan bantuan pengobatan masyarakat OAP di kampung mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang memiliki peralatan kesehatan yang lebih memadai;
- d. Perlunya perhatian terhadap kesehatan anak-anak usia dini 0-5 tahun di kampung;
- e. Menyediakan pelayanan kesehatan sampai ditingkat kampung dan daerah terisolir. Wilayah yang begitu luas dengan jumlah penduduk asli Papua yang tersebar di kampung-kampung atau kelompok-kelompok kecil dengan wilayah yang terisolasi menyebabkan masih ada penduduk yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas baik;
- f. Sosialisasi hidup sehat sampai ke kampung dan wiayah terisolir perlu ditingkatkan;

- g. Pengobatan gratis di puskesmas dan bantuan obat-obatan, tambahan makanan dan vitamin pada ibu hamil dan menyusui OAP perlu ditingkatkan.

(4) Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang infrastruktur :

- a. Diperlukan peningkatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat OAP yang belum memiliki rumah sehat di kampung, menyediakan air bersih dan layak minum bagi RT OAP di kampung, menyediakan penerangan listrik, dan menyediakan akses jalan yang baik kampung;
- b. Pembangunan rumah layak huni agar dapat diperhatikan kualitas pembangunannya dan instalasi listrik agar cepat terealisasi;
- c. Perlunya perbaikan jalan-jalan yang rusak untuk memudahkan masyarakat kampung melakukan aktivitas dan memperlancar akses perekonomian kampung ke distrik dan ke kota;
- d. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur jalan dari kabupaten ke distrik dan kampung agar sepenuhnya terbuka karena cakupan wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang sulit di jangkau;
- e. Meningkatkan kondisi jembatan-jembatan kecil berbahan kayu yang menghubungkan kampung-kampung di Distrik ke jalur jalan utama beraspal perlu mendapat perhatian pemerintah setempat karena banyak yang terlihat dalam kondisi rusak;
- f. Perlu pendekatan dengan masyarakat untuk pengambilan bahan-bahan bangunan untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah OAP;
- g. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus dapat membuka Hubungan transportasi pada Orang Asli Papua yang tinggal di daerah-daerah pedalaman/terpencil;

(5) Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang afirmasi :

- a. Perlu bantuan modal, pengetahuan ketrampilan usaha untuk mengembangkan usaha khas Papua, seperti noken, kerajinan kulit kayu, batik asli papua yang dilakukan oleh mama mama Papua;
- b. Bantuan usaha pertanian, perikanan dan peternakan bagi mama-mama Papua;
- c. Pasar Mama Mama Papua agar segera dapat difungsikan dan dioptimalkan penggunaannya dalam upaya meningkatkan pendapatan mama mama papua.

Secara umum, berdasarkan seluruh hasil kajian monitoring dan evaluasi pengelolaan dana otsus tersebut, dapat disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Memperjelas kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang dan peruntukannya, sehingga tidak terjadi ketimpangan belanja per bidang yang mencolok antar bidang;
2. Harus ada verifikasi dalam perencanaan kegiatan untuk melihat konsistensi dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan penggunaan dana Otsus kesesuaian dengan regulasi;
3. Perencanaan program kegiatan yang bersumber dari dana Otsus sebaiknya berasal dari masyarakat karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan permasalahan dan sosial budaya di lokasi pembangunan. Sehingga dapat meminimalkan terjadi kesalahan perencanaan yang tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat OAP, untuk hal itu maka harus diperhatikan dan diimplementasikan :
 - a. Melibatkan masyarakat setempat dalam hal perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana Otsus pada bidang ekonomi kerakyatan;
 - b. Memperhatikan potensi dan kebutuhan riil masyarakat OAP dalam memberikan bantuan kepada masyarakat OAP;
 - c. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus dapat menciptakan kemandirian (tidak ketergantungan dengan pihak lain), meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan, dan meningkatkan ekonomi RT pada masyarakat Orang Asli Papua;
 - d. Program/kegiatan bidang ekonomi kerakyatan perlu dilakukan secara merata, adanya keberpihakan terhadap OAP, transparan dan akuntabel.
4. Dalam dokumen perencanaan harus mencantumkan sasaran, target capaian *outcome* dan *impact* berikut lokasi pelaksanaan kegiatan yang jelas untuk memudahkan monitoring dan evaluasi, serta penilaian kinerja dan kemanfaatan penggunaan dana otsus;

5. Kegiatan yang menggunakan dana Otsus sebaiknya diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan bukan konsumtif semata;
6. Beberapa kegiatan yang membutuhkan penyediaan fisik sebaiknya diutamakan demi mendukung lancarnya kegiatan. Misalnya penyediaan gedung dan fasilitas posyandu disetiap distrik;
7. Perlu adanya konsolidasi kelembagaan terhadap Pembagian dan Peruntukan Dana Otsus, kelembagaan terhadap Perencanaan dan Penganggaran Dana Otsus, serta kelembagaan terhadap Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Dana Otsus;
8. Mengembangkan sistem monitoring dan pelaporan yang terintegrasi mulai dari perencanaan dan penganggaran;
9. Menyusun M&E Framework (kerangka monitoring dan evaluasi) Penggunaan Dana Otsus, untuk menjelaskan pengukuran efektifitas dan perkembangan program prioritas di setiap bidang berbasis data dengan mengacu pada capaian outcome dan output.

2.3.2.2. Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Urusan Bersama (Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota)

Pada tahun 2017, dibawah Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Bappeda Provinsi Papua melakukan evaluasi pengelolaan dana otsus untuk Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota yang lazim dikatakan Urusan Bersama atau UB. Menggunakan data-data dan informasi yang bersifat sekunder dari berbagai publikasi penggunaan dana Otsus tersebut, diperoleh beberapa isu strategis yang patut diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi dalam mengelola dan memafaatkan dana UB di tahun 2019.

(1) Isu-Isu Strategis Hasil Evaluasi Pengelolaan Dana UB

a. Gerbangmas

- Mampu menggerakkan Pendapatan Perkapita di 8 Kabupten;
- Mampu mempercepat penurunan kemiskinan di 10 Kabupaten yang sebagian besar berada di Wilayah Adat La Pago dan Me Pago;
- Program Gerbang Mas tampak kurang efektif untuk mempercepat pembangunan manusia di Provinsi Papua;
- Secara trend maka kabupaten waropen, pegunungan bintang, dan yalimo menunjukkan kondisi membanggakan dalam peningkatan pendapatan dan IPM serta penurunan kemiskinan.

b. Prospek

- Trend perkembangan Dana PROSPEK cukup signifikan sepanjang tahun 2013-2016;
- Pentingnya pengelolaan Dana PROSPEK yang profesional pada tingkat Kab/Kota;
- Perlu kerja keras jika bersandar dari Potret IDM pada tahun 2015 dengan kondisi rata-rata kab/kota mendapatkan prediket sangat tertinggal, sehingga Provinsi Papua dan Kab/Kota .

c. K P S

- Untuk OPD Pengelola level provinsi Papua terlihat memiliki daya serap anggaran yang relatif tinggi;
- Pentingnya pengelolaan Dana KPS yang profesional pada tingkat Kab/Kota.

d. Perumahan

- Daya serap anggaran kegiatan terlihat membanggakan;
- Mekanisme penganggaran dalam penyediaan rumah layak huni dalam menjawab kerangka pemerataan.

(2) Rekomendasi

1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan & Penganggaran bagi Kab/Kota Pengelola GERBANGMAS;
2. Konsistensi dalam Pengendalian dan MONEV keseluruhan Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Mempercepat pencapaian Target di seluruh Program Strategis Lintas kab/kota;
4. Percepatan dalam pembangunan ekonomi produktif pada daerah-daerah yang relatif memiliki capaian indikator makro yang kurang membanggakan;
5. Peningkatan kualitas Komunikasi dan koordinasi antara Provinsi dan Kab/Kota;
6. Perlu secepatnya dilakukan REPLIKASI kesuksesan Program, dalam rangka efektifitas Program Strategis lintas Kab/Kota;
7. Perlunya penerapan Analisis Standar Belanja untuk menilai kewajaran penganggaran pada program-program lintas kabupaten/kota;
8. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran program-program lintas kabupaten/kota harus lebih dioptimalkan

2.4. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu berupa dana APBN dekonsentrasi yang diserahkan sepenuhnya kepada OPD Provinsi, dan dana APBN tugas pembantuan, yang dikelola oleh OPD di kabupaten/kota maupun oleh OPD Provinsi. Besarnya alokasi APBN yang masuk ke Provinsi Papua setiap tahunnya mengalami fluktuasi, tercatat sampai dengan tahun 2016 mencapai Rp. 72.459.043.000 yang sebagian besar bersumber dari Dana TP sebesar Rp. 47.194.275.000, dan sisanya Rp. 25.264.768.000 dari Dana Dekon. Dimana jika dirinci menurut kementerian yang terbesar dari berasal dari Kementerian Pertanian dan Sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan mitra pembangunan dalam pembangunan Provinsi Papua sangat berarti sekali, dan sudah berjalan lama sejak masa pembangunan dilaksanakan di Provinsi Papua. Secara umum terdapat beberapa bidang cakupan pembiayaan yang dilaksanakan oleh mitra pembangunan selama ini di Provinsi Papua, antara lain :

1. Bidang pendidikan, yaitu memberikan bantuan pendidikan formal atau informal, baik kepada masyarakat, organisasi atau individu, termasuk di dalamnya beasiswa dan pelatihan. Secara umum bantuan yang diberikan lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan dan sumber daya tenaga pendidikan dan kependidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
2. Bidang kesehatan, yaitu memberikan bantuan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, dan sumber daya kesehatan. Sumber pembiayaan di bidang ini dapat dimanfaatkan oleh individu-individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khusus, atau dimanfaatkan oleh kelompok.
3. Bidang ekonomi, yaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan modal, menciptakan mata pencarian dan meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk juga penyediaan layanan finansial. Sumber pembiayaan di bidang ini dapat membantu program-program yang terkait untuk penyediaan modal, penyiapan dan pengelolaan usaha produktif; pembukaan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan; dan lainnya.
4. Infrastruktur dan teknologi, yaitu pembangunan fisik serta penyediaan, pembuatan dan penelitian mengenai teknologi pendukung. Misalkan membantu pembiayaan dalam penyediaan dana instalasi fasilitas umum pembangkit listrik, instalasi air minum untuk masyarakat, penyediaan teknologi tepat guna pendukung usaha produktif, dan lainnya.

5. Lingkungan hidup, yaitu berbagai upaya untuk menjaga kelestarian alam, serta memberikan penyadaran serta pendidikan kepada masyarakat mengenai manajemen sumber daya alam. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan seperti penyadaran masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan, dan sebagainya.
6. Pemerintahan dan kebijakan, yaitu berbagai upaya advokasi dan penyusunan peraturan serta anggaran negara (tingkat pusat dan lokal) yang dapat mewakili kebutuhan pengembangan sektor tertentu misalnya sektor energi yang ramah lingkungan.
7. Gender, yaitu memastikan adanya kesetaraan antara peran laki-laki dengan perempuan dalam segala aspek. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pelaksanaan suatu program pembangunan di suatu daerah yang mengedepankan keseimbangan gender.

Terhadap program dan kegiatan dalam prioritas pembangunan daerah, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas atau infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha serta lembaga non pemerintah atau lembaga donor melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema diantaranya Kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional. Kemitraan ini diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

Kerjasama dengan pihak swasta maupun kemitraan lembaga non pemerintah merupakan terobosan yang dapat dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan lembaga mitra dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang saat ini telah menjadi kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Saat ini lembaga non pemerintah atau lembaga donor dan NGO yang mempunyai program dan kegiatan yang tercatat di Provinsi Papua kurang lebih 33 lembaga non pemerintah atau lembaga donor.

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dimaknai sebagai kondisi dimana, adanya perbedaan antara harapan dengan kondisi yang dicapai. Dalam konteks substantif penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2019 di Provinsi Papua. Penjabaran Permasalahan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 mendatang didasarkan pada suatu analisis kondisi historis yang dicerminkan melalui perkembangan indikator makro pembangunan daerah.

Dalam kaidah pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, maka dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 didesain untuk meminimalisir terjadinya asimetris permasalahan publik dengan program pembangunan yang direncanakan. Oleh sebab itu, maka analisis kondisi faktual serta memperhatikan Evaluasi Pelaksanaan Program dimasa lalu di Provinsi Papua menjadi dasar utama dalam mewujudkan *Evidence Based Policy Making* dalam penyusunan dokumen Perencanaan Daerah ini. Dalam hal ini, maka permasalahan disajikan menurut keterkaitan permasalahan faktual daerah dengan Prioritas Daerah dan Sasaran Pembangunan, diharapkan kondisi ini menjadi sebuah klarifikasi penetapan sasaran pembangunan secara teknokratik dan juga dasar dalam penentuan setiap program daerah. Sajian permasalahan dalam RKPD Tahun 2019 di Provinsi Papua, menurut prioritas pelayanan umum di Provinsi Papua. Kondisi Obyektifitas Permasalahan ini, yang menjadi dasar dalam penetapan Program Prioritas pada setiap OPD.

2.5.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Dipahami bahwa perencanaan pembangunan hendaknya diawali dengan pemetaan kondisi obyektif di Provinsi Papua. Salah satu permasalahan pokok yang menjadi tantangan pembangunan ialah dari segi Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kebudayaan, dan Infrastruktur. Pada pokok bahasan sebelumnya telah dijelaskan secara rinci mengenai perkembangan data dan informasi indikator makro pembangunan di Provinsi Papua. Salah satu keterkaitan erat (Prinsip Tematik-Holistik) dalam perencanaan daerah ialah penetapan Sasaran Daerah di Provinsi Papua Tahun 2019 didasari dengan rumusan permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi historis indikator makro di Papua.

Pada RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 ditetapkan 10 Sasaran Strategis Antara lain: (1) Terwujudnya Kualitas & Akses Pendidikan Pada Semua Jalur & Jenjang, (2) Terwujudnya Kualitas & Akses Kesehatan & Gizi, (3) Terciptanya Kawasan strategis yang mendukung perekonomian daerah,

(4) Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari, (4) Meningkatnya standar pelayanan public, (5) Meningkatnya Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal, (6) Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni bagi rumahtangga Orang Asli Papua, (7) Meningkatnya gizi balita Orang Asli Papua, (8) Meningkatnya kualitas pendidikan Orang Asli Papua, (10) Menguatnya hak-hak adat. Sasaran Daerah tersebut tidak ditetapkan secara intuitif, namun lebih kepada informasi faktual yang dijadikan kondisi awal sebagai dasar dalam menentukan perubahan capaian dampak pembangunan pada tahun berikutnya. Keterkaitan Antara penetapan prioritas daerah dan sasaran daerah dalam RKPD Tahun 2019 di Provinsi Papua akan dijelaskan sebagai berikut:

2.5.1.1. Prioritas Daerah Peningkatan Pembangunan Manusia

2.5.1.1.1. Terwujudnya Kualitas & Akses Pendidikan Pada Semua Jalur & Jenjang

Tantangan Pembangunan di Provinsi Papua ialah pembangunan yang berorientasi pada akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan Berdasarkan kondisi obyektif baik secara kuantitatif dan kualitatif, saat ini Provinsi Papua masih terjadi permasalahan pembangunan (a) Belum optimalnya pemerataan Sarana & Prasarana Pendidikan, (b) Lambatnya Pertumbuhan Angka Melek Huruf (AMH), dan (c) Lambatnya Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM). Kondisi Ini secara kausalitas, jika tidak menjadi perhatian serius pada RKPD Tahun 2019, maka akan memeberikan dampak negatif teradap capaian Angka Rata-Rata lama Sekolah di Provinsi Papua.

2.5.1.1.2. Terwujudnya Kualitas & Akses Kesehatan & Gizi

Walaupun perjuangan peningkatan pelayanan kesehatan selama ini di Provinsi Papua telah menjadi perhatian serius, namun hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai berdasarkan kondisi kinerja obyektif indikator makro pembangunan di Bidang Pelayanan Dasar Khususnya Bidang Kesehatan bahwa (a) Tingginya Angka Kematian Ibu, (b) Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan bagi gisi anak balita, (c) Rendahnya perilaku hidup bersih pada masyarakat, (d) Pravelensi HIV/AIDS di Papua masih tinggi, (d) Belum meratanya pelayanan kesehatan bagi komunitas adat terpencil. Kondisi faktual ini secara hirarki mampu

memberikan dampak kepada pencapaian Angka Usia Harapan Hidup di Provinsi Papua

2.5.1.1.3. Meningkatnya gizi balita Orang Asli Papua

Provinsi Papua perlu secara baik dalam memperkuat pondasi generasi emas, salah satu prioritas yang diwujudkan nyatakan dalam UU/21/2001 Tentang Otonomi Khusus ialah kesehatan Orang Asli Papua (OAP). Secara faktual bahwa hingga saat ini masih dijumpai permasalahan bahwa (a) Belum optimalnya orientasi kepada masyarakat papua terkait peranan kesehatan bagi perkembangan gizi balita asli papua. Dalam kerangka itu, Pemerintah Provinsi Papua, terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan generasi papua dengan berpihak kepada kualitas balita Orang Asli Papua.

2.5.1.1.4. Meningkatnya kualitas pendidikan Orang Asli Papua

Kualitas Pendidikan Orang Asli Papua (OAP), menjadi dasar utama dalam menggapai cita-cita “Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”. Semangat ini secara parsial didukung dengan semangat Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Menjadi isu umum bahwa pendidikan Orang Asli Papua hingga saat ini masih jauh dari harapan khususnya mereka yang berada jauh dari Ibukota Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga permasalahan secara makro mengenai Pendidikan Orang Asli Papua menunjukkan bahwa (a) Tingginya angka putus sekolah Orang Asli Papua (OAP), menjadi Pokok masalah dalam mengupayakan kualitas SDM Orang Asli Papua.

2.5.1.2. Prioritas Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah

2.5.1.2.1. Terciptanya kawasan strategis yang mendukung perekonomian daerah

Salah satu kebijakan kewilayahan di Provinsi Papua ialah kewilayahan berbasis adat (Ha Anim, Mamta, Saireri, Me Pago, dan La Pago). Namun hingga saat ini dari segi perspektif ekonomi, pada 5 wilayah adat ini, belum secara optimal dalam mengembangkan perekonomian dimasing-masing wilayah adat tersebut. Diharapkan terdapat kawasan strategis yang memiliki ciri khas dari sektor komoditas ekonomi yang mampu mendongkrak perekonomian pada wilayah adat masing-masing maupun berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Belum optimalnya kawasan strategis ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual (a) Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan.

2.5.1.2.2. Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari

Salah satu variabel yang sangat memberikan kontribusi perkembangan perekonomian di Provinsi Papua ialah dari segi Produksi pada masing-masing sektor prioritas. Diakui bahwa, Perekonomian Provinsi Papua masih sangat tergantung dengan sektor Pertambangan yakni PT.Freeport Indonesia. Diharapkan struktur perekonomian di Papua dapat digerakkan dari sektor lainnya yang sebenarnya memiliki potensi cukup besar. Fenomena ini terjadi disebabkan adanya permasalahan bahwa (a) Rendahnya produktifitas sektoral. Kondisi Permasalahan ini, jika tidak menjadi perhatian maka akan berakibat pada capaian pertumbuhan PDRB di Provinsi Papua

2.5.1.3. Prioritas Daerah Peningkatan Pelayanan Umum

2.5.1.3.1. Meningkatkan Standar Pelayanan Publik

Dengan Kondisi geografis Papua, menjadi tantangan hebat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan secara keseluruhan di Provinsi Papua, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bagi masyarakat. Beberapa permasalahan yang masih terjadi saat ini, berdasarkan opini publik bahwa (a) Belum optimalnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi, (c) Lemahnya Perencanaan & Penganggaran yang berbasis kepada kebutuhan dasar masyarakat, (d) Rendahnya kapasitas ASN dalam melakukan Inovasi dalam pengentasan persoalan strategis daerah.

2.5.1.3.2. Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal

Pengawasan pembangunan daerah, tercermin dari sejauh mana proses perencanaan hingga pada pelaporan dilakukan dengan mekanisme yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Sejangkau ini, secara faktual bahwa dijumpai persoalan-persoalan yang memberikan dampak khusus kepada kualitas dampak penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua, salah satu pokok masalah ialah (a) Masih rendahnya mekanisme fungsi Monitoring & Evaluasi Kemanfaatan Program Pembangunan. Selain itu juga pengawasan yang baik kepada setiap entitas penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua.

2.5.1.3.3. Menguatnya Hak-Hak Adat

Napas UU/21/2001 tercermin melalui keberpihakan dan proteksi, oleh sebab itu berlandaskan beberapa kondisi faktual yang sedang terjadi di

Provinsi Papua yang strategis untuk dijadikan perhatian pada RKPD 2019 di Provinsi Papua ialah bagaimana pemetaan kewilayahan berdasarkan ekologi masyarakat adat di Papua. Sehingga sasaran daerah ini, ditetapkan dari fakta bahwa (a) Rendahnya pemetaan dan legalitas kepemilikan hak ulayat atas tanah. Dalam kerangka proteksi terhadap kepemilikan hak ulayat, maka perlu disikapi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Papua.

2.5.1.4. Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Papua pada umumnya, selain kebutuhan infrastruktur dasar. Perumahan Layak Huni khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) masih belum merata dinikmati. Kondisi ini diperkuat dengan permasalahan bahwa (a) Masih rendahnya proporsi Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki rumah layak huni. Ketersediaan infrastruktur perumahan bagi masyarakat, merupakan input bagi perkembangan kualitas setiap dimensi keluarga Orang Asli Papua.

2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Proses identifikasi permasalahan operasional yang sifatnya urusan pelayanan umum yang perlu mendapatkan prioritas permusunan Program Prioritas Pada masing-masing OPD pada RKPD Tahun 2019, berikut ini permasalahan akan disajikan menurut Pengelompokan Bidang Urusan yang merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

2.5.2.1. Pendidikan

- Belum optimalnya pemerataan Sarana & Prasarana Pendidikan;
- Lambatnya Pertumbuhan Angka Melek Huruf;
- Lambatnya Peningkatan Angka Partisipasi Murni;
- Tingginya angka putus sekolah Orang Asli Papua (OAP).

2.5.2.2. Kesehatan

- Lambatnya Peningkatan Angka Partisipasi Murni;
- Tingginya Angka Kematian Ibu;
- Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan bagi gisi anak balita
- Rendahnya perilaku hidup bersih pada masyarakat;
- Pravelensi HIV/AIDS di Papua masih tinggi;
- Belum meratanya pelayanan kesehatan bagi komunitas adat terpencil;
- Belum optimalnya orientasi kepada masyarakat Papua terkait peranan kesehatan bagi perkembangan gizi balita asli Papua.

2.5.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih banyaknya panjang jalan dengan kondisi rusak;
- Rendahnya Ketersediaanya Infrastruktur Dasar Masyarakat.

2.5.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Rendahnya ketersediaan Rumah Layak Huni;
- Pemukiman layak huni yang masih sangat terbatas.

2.5.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesatuan bangsa;
- Rendahnya kapasitas masyarakat terkait pendidikan politik;
- Masih dijumpai kasus criminal pada beberapa daerah.

2.5.2.6. Sosial

- Jangkauan mutu dan akses pelayanan social bagi penyandang masalah kesejahteraan soasial;
- Belum optimalnya system jaminan sosial masyarakat di Provinsi Papua.

2.5.2.7. Tenaga Kerja

- Pengangguran relatif masih tinggi;
- Laju pertumbuhan penduduk yang bekerja masih tergolong melambat;
- Tenaga Kerja di Papua masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

2.5.2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kasus KDRT yang masih tinggi;
- Belum memadainya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak;
- Masih adanya ketimpangan gender.

2.5.2.9. Pangan

- Tingkat kewaspadaan rawan pangan yang masih rendah;
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses pangan yang lebih baik;
- Tingkat produksi pangan regional yang masih rendah.

2.5.2.10. Pertanian

- Belum maksimalnya pendataan, pemetaan, dan sertifikat bagi pemiliki hak ulayat;

2.5.2.11. Lingkungan Hidup

- Kelastarian cagar alam dan tumbuhan endemic di Provinsi Papua;
- Masih lemahnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

2.5.2.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Rendahnya *Legal Identity* masyarakat di Papua khususnya pada daerah perkampungan;
- Ketersediaan data terpilah yang belum memadai.

2.5.2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum maksimalnya pengawasan pembangunan desa;
- Rendahnya dampak pemberdayaan masyarakat kampung;
- Masih banyak kampung yang belum berstatus kampung mandiri.

2.5.2.14. Perhubungan

- Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan;

2.5.2.15. Komunikasi dan Informatika

- Rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik;
- Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dibidang Teknologi Informasi.

2.5.2.16. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

- Rendahnya pertumbuhan UMKM;
- Lemahnya kelembagaan koperasi;
- Lemahnya wirausaha baru yang berbasis pada Komoditas Unggulan.

2.5.2.17. Penanaman Modal

- Pertumbuhan PMA dan PMDN yang melambat;
- Adanya ketimpangan investasi antarwilayah yang sangat tinggi.

2.5.2.18. Kepemudaan dan Olah Raga

- Rendahnya pengawasan prestasi olahraga pada tingkat daerah
- Ketersediaan sarana dan prasarana venue PON yang belum memadai.

2.5.2.19. Statistik

- Lemahnya ketersediaan Data dan Informasi perencanaan dan penganggaran pada tingkat OPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2.5.2.20. Kebudayaan

- Belum maksimalnya perlindungan kekayaan budaya perspektif OTSUS.

2.5.2.21. Perpustakaan

- Lemahnya kolaborasi peranan dalam kerangka pemberantasan keaksaraan;
- Budaya baca yang masih rendah.

2.5.2.22. Pariwisata

- Belum dioptimalnya kawasan strategis pengembangan kawasan pariwisata;
- Rendahnya pengembangan dan promosi pariwisata alam dan kebudayaan di papua.

2.5.2.23. Pertanian

- Rendahnya diversifikasi produk komoditas sektor pertanian;
- Rendahnya produktifitas produksi berbasis kewilayahan.

2.5.2.24. Kehutanan

- Kasus pembakaran hutan yang masih belum banyak teratasi dengan baik.

2.5.2.25. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Masih Minimnya inovasi dalam penyediaan energy terbarukan dalam mengatasi tantangan energy di papua

2.5.2.26. Perdagangan dan Perindustrian

- Kondisi Pertumbuhan EKspor yang fluktuatif;
- Rendahnya produktifitas UMKM;
- Lemahnya Pertumbuhan sektor rill;
- Rendahnya komoditas unggulan berbasis kewilayahan dan kawasan ekonomi strategis yang dikembangkan.

2.5.2.28. Kelautan dan Perikanan

- Rendahnya perananan sektor kelautan dan perikanan pada struktur PDRB.

2.5.2.29. Perencanaan Pembangunan

- Kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memadai;
- Rendahnya pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah.

2.5.2.30. Keuangan

- Masih Rendahnya Kemandirian Fiskal;
- Belum optimalnya penataan pengelolaan keuangan daerah pada tingkat OPD level Provinsi, Kab/Kota, dan Pemerintah Kampung.

2.5.2.33. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

- Masih rendahnya tingkat professional Aparat Negeri Sipil (ASN);
- Belum maksimalnya inovasi dalam kerangka menjawab tantangan pembangunan.

2.5.2.34. Penelitian dan pengembangan

- Lemahnya penggunaan hasil riset/penelitian yang diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

2.5.2.35. Pengawasan

- Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengawasan pembangunan yang masih belum memadai.
- Mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih rendah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makroekonomi, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2019 tidak akan terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2017, proyeksi Tahun 2018 dan 2019. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2017, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019. Bagian akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2019.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis kewilayahan. Hal ini sesuai dengan misi ketiga RPJPD yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, dengan arah kebijakan peningkatan pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat Papua yang berbasis pada kekuatan lokal; peningkatan pembangunan infrastruktur yang membantu memenuhi kecukupan kebutuhan secara lokal; pemenuhan kebutuhan berbasis aset alam lokal secara berkelanjutan pengelolaan dan penataan ruang dan wilayah yang dirancang berdasarkan daya dukung serta peruntukan ruang yang telah disepakati bersama; tercapainya peningkatan dan pemerataan akses dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi tersebut, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Papua serta proyeksinya untuk tahun 2018 dan 2019.

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua

3.1.1.1. Pertumbuhan Sektor dan Struktur Ekonomi

Jika dirinci berdasarkan sektoral, hampir semua sektor pertumbuhannya terlihat tidak stabil yang cenderung menurun selama periode 2013-2017. Sektor konstruksi terlihat memiliki rata-rata dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,01% per tahun untuk periode tersebut, disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Transportasi dan Pergudangan, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dimana ke-4 sektor ini tumbuh relatif sama semua berkisar 8,00 - 8,87% per tahun. Adapun sektor yang terlihat paling rendah pertumbuhannya adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya mencapai 4,53% per tahun. Selengkapnya lihat Tabel 3.1 berikut.

Tabel. 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Di Provinsi Papua Periode 2013 - 2017
(dalam %)

| Lapangan Usaha | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata ² |
|---------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|------|-------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6.04 | 5.64 | 5.26 | 1.75 | 3.98 | 4.53 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 9.00 | -2.81 | 6.72 | 13.10 | 3.90 | 5.98 |
| C | Industri Pengolahan | 2.13 | 8.72 | 3.77 | 4.47 | 6.46 | 5.11 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 7.45 | 8.41 | 0.63 | 11.86 | 4.11 | 6.49 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6.53 | 6.25 | 3.99 | 3.37 | 6.38 | 5.31 |
| F | Konstruksi | 11.79 | 8.56 | 10.70 | 8.81 | 5.18 | 9.01 |
| Q | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9.36 | 7.30 | 8.13 | 6.91 | 6.24 | 7.59 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 8.15 | 10.57 | 9.59 | 8.13 | 5.98 | 8.48 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 11.67 | 12.57 | 7.52 | 6.54 | 6.04 | 8.87 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 12.79 | 6.63 | 5.19 | 3.42 | 6.99 | 7.01 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 13.89 | 7.26 | 2.63 | 6.08 | 2.61 | 6.49 |
| L | Real Estate | 11.67 | 8.09 | 5.86 | 7.02 | 5.60 | 7.65 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 5.88 | 9.65 | 3.97 | 5.68 | 5.77 | 6.19 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.80 | 14.85 | 10.89 | 9.64 | 4.36 | 8.51 |
| P | Jasa Pendidikan | 9.75 | 7.45 | 7.23 | 7.83 | 5.55 | 7.56 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9.29 | 9.36 | 8.36 | 8.08 | 5.20 | 8.06 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 10.42 | 8.55 | 7.04 | 6.43 | 5.62 | 7.61 |
| Pertumbuhan PDRB dengan tambang | | 8.55 | 3.65 | 7.35 | 9.14 | 4.64 | 6.67 |
| Pertumbuhan PDRB tanpa tambang | | 8.21 | 8.63 | 7.78 | 6.43 | 5.18 | 7.25 |

Sumber : BPS Papua, 2017 (data diolah)

Peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi Papua masih sangat dominan setiap tahunnya selama periode 2013-2017. Walaupun sempat berkontribusi negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi Papua yaitu di tahun 2014, namun setelah itu kontribusinya terus positif sehingga secara keseluruhan sepanjang tahun 2013-2017 andil sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mencapai 2,48% per tahun. Setelah sektor pertambangan, sektor konstruksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor semuanya cukup berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Sementara sektor-sektor utilitas seperti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta Pengadaan Listrik dan Gas kurang signifikan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Papua oleh karena kontribusinya yang paling kecil diantara semua sektor, tidak lebih dari 0,01% per tahun. Lihat Tabel 3.2 berikut.

Tabel. 3.2.
Kontribusi Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua
Periode 2013 – 2017
(dalam %)

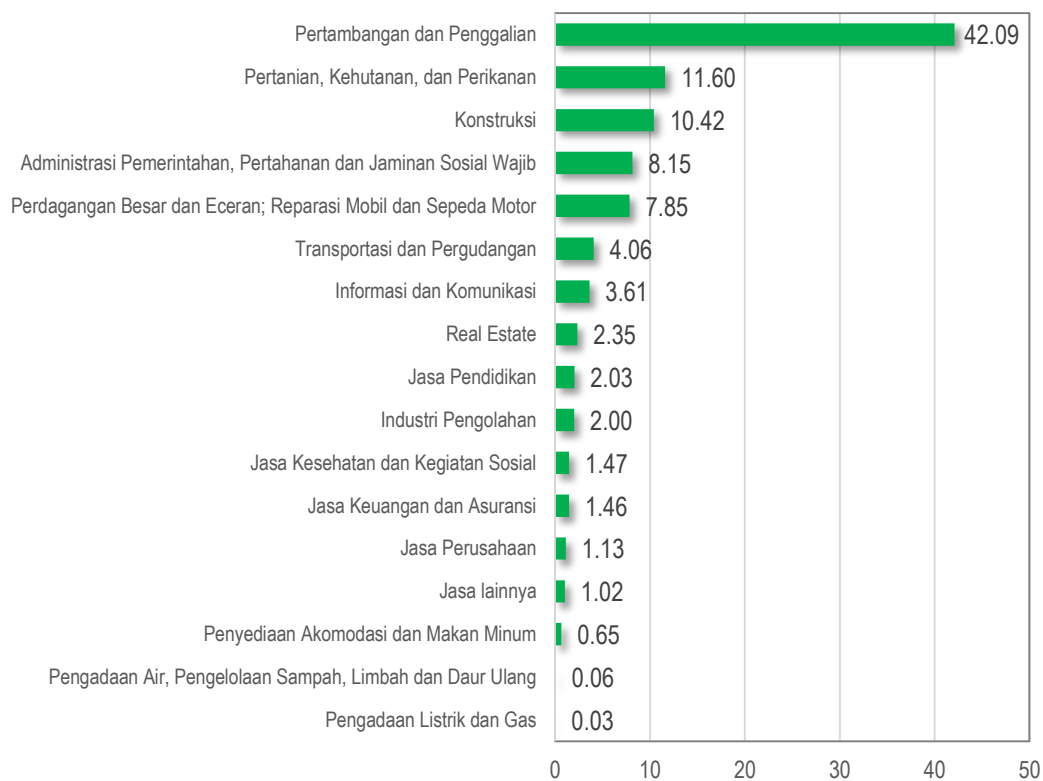
| Lapangan Usaha | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata ² |
|-------------------|--|------|-------|------|------|------|-------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.20 | 0.43 | 0.53 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3.90 | -1.22 | 2.74 | 5.32 | 1.64 | 2.48 |
| C | Industri Pengolahan | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | Konstruksi | 1.15 | 0.86 | 1.13 | 0.96 | 0.56 | 0.93 |
| Q | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0.72 | 0.56 | 0.65 | 0.56 | 0.49 | 0.60 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.34 | 0.25 | 0.34 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 0.45 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.25 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.20 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| L | Real Estate | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.18 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0.22 | 1.11 | 0.90 | 0.82 | 0.37 | 0.69 |
| P | Jasa Pendidikan | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.15 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.12 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| Total Pertumbuhan | | 8.55 | 3.65 | 7.35 | 9.14 | 4.64 | 6.67 |

Sumber : BPS Papua, 2017 (data diolah)

Struktur perekonomian Provinsi Papua bila dinilai dengan memasukkan sektor pertambangan terlihat masih bersifat *resourced based* yang sangat bertumpu pada dua sektor sumber daya alam yaitu sektor pertambangan dan pertanian. Peranan sektor pertambangan sangat dominan dengan rata-rata

pertahun mencapai 42,09% namun dengan kecenderungan yang terus menurun. Begitu juga dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menempati urutan kedua kontribusinya, sekitar 11,60% per tahun, cenderung mengalami penurunan setiap tahun, termasuk sektor konstruksi. Adapun sektor yang berkembang pesat peranannya terhadap penciptaan PDRB Provinsi Papua selama ini adalah sektor-sektor produktif yang bersifat *nontradeable* yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta sektor Perdagangan. Dua sektor ini kontribusinya dalam perekonomian Provinsi Papua bisa mencapai sekitar 7,85% sampai dengan 8,15% per tahun. Perhatikan Gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1.
Struktur Ekonomi Provinsi Papua Periode 2013-2017
(dalam %)



Sumber : BPS Papua, 2017 (data diolah)

Perhitungan keunggulan komparatif sektoral dengan dan tanpa sektor pertambangan, terlihat sangat berbeda. Dengan memperhitungkan sektor pertambangan, maka sektor yang memiliki daya saing tinggi hanya 4 sektor yang didominasi oleh sektor pertambangan dengan angka 4,62 disusul kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan angka 2,27, sektor jasa kesehatan dan kegiatan social dengan angka 1,35 disusul kemudian oleh sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan masing masing 1,06 dan 1,05.

Tabel. 3.3.
Daya Saing Sektoral Berdasarkan Indeks LQ Rata-Rata 2011-2016

| Lapangan Usaha | Dengan Tambang | | Tanpa Tambang | |
|--|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LQ | Tingkat Daya Saing | LQ | Tingkat Daya Saing |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.88 | Rendah | 1.29 | Tinggi |
| Pertambangan dan Penggalian | 4.62 | Tinggi | 3.30 | Tinggi |
| Industri Pengolahan | 0.09 | Rendah | 0.14 | Rendah |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0.03 | Rendah | 0.05 | Rendah |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 0.68 | Rendah | 1.04 | Tinggi |
| Konstruksi | 1.06 | Tinggi | 1.56 | Tinggi |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Spd Motor | 0.57 | Rendah | 0.84 | Rendah |
| Transportasi dan Pergudangan | 1.05 | Tinggi | 1.55 | Tinggi |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.21 | Rendah | 0.32 | Rendah |
| Informasi dan Komunikasi | 0.81 | Rendah | 1.19 | Tinggi |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.38 | Rendah | 0.56 | Rendah |
| Real Estate | 0.82 | Rendah | 1.21 | Tinggi |
| Jasa Perusahaan | 0.71 | Rendah | 1.04 | Tinggi |
| Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.27 | Tinggi | 3.36 | Tinggi |
| Jasa Pendidikan | 0.65 | Rendah | 0.96 | Rendah |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.38 | Tinggi | 2.04 | Tinggi |
| Jasa lainnya | 0.65 | Rendah | 0.95 | Rendah |

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Kemudian jika dieliminasi sektor pertambangan, maka sektor yang mempunyai daya saing tinggi terlihat lebih banyak. Sektor pertambangan tetap terlihat memiliki daya saing tinggi yaitu dengan angka 3,30. Sektor pertanian terlihat masuk sebagai sektor yang memiliki keunggulan bersama-sama dengan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan Pergudangan, sektor Informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan komponen pengeluaran, laju pertumbuhan ekonomi terlihat sangat variatif dengan capaian tertinggi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dengan rata-rata pertahun 8,38% selama periode 2013-2017, kemudian disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, masing-masing sebesar 6,66% dan 6.14% per tahun untuk periode yang sama. Laju pertumbuhan negatif rata-rata terbesar terlihat dialami oleh komponen Net Ekspor Antar Daerah yaitu -88,16% per tahun.

Tabel. 3.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran
Tahun 2012-2016
(dalam %)

| Komponen Pengeluaran | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata ² |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 6.23 | 7.10 | 6.11 | 5.84 | 5.43 | 6.14 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPR | 7.25 | 12.29 | 5.89 | 6.52 | 9.95 | 8.38 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 8.73 | 8.62 | 5.14 | 2.08 | 4.20 | 5.75 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 6.56 | 7.76 | 7.11 | 5.75 | 6.13 | 6.66 |
| Perubahan Inventori | 90.61 | -182.91 | -172.26 | 23.51 | -75.25 | -63.26 |
| Ekspor Luar Negeri | 32.38 | -46.83 | 38.88 | 6.74 | -5.49 | 5.14 |
| Impor Luar Negeri | -41.20 | 105.27 | -20.50 | 4.64 | -36.03 | 2.44 |
| Net Ekspor Antar Daerah | 367.41 | -151.90 | -115.99 | -488.92 | -51.41 | -88.16 |
| Total PDRB | 8.55 | 3.65 | 7.47 | 9.02 | 4.64 | 6.67 |

Sumber : BPS Papua, 2017 (data diolah)

Dari sisi pengeluaran, faktor stimulus perekonomian Provinsi Papua sampai saat ini masih didominasi oleh pengeluaran rumahtangga. Kontribusi pengeluaran rumahtangga dalam menstimulasi PDRB Provinsi Papua sangat besar dan cukup fluktuatif dengan kisaran rata-ratanya per tahun mencapai 42,38% sepanjang periode 2013-2017. Lihat Tabel 3.5 berikut.

Tabel. 3.5.
Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran
Tahun 2013-2017
(dalam %)

| Komponen Pengeluaran | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pengeluaran Konsumsi | 42.68 | 41.78 | 43.25 | 42.70 | 41.47 | 42.38 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 18.83 | 18.86 | 19.76 | 19.33 | 18.10 | 18.98 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 26.77 | 26.28 | 27.32 | 27.23 | 26.42 | 26.80 |
| Perubahan Inventori | 0.11 | 0.19 | -0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| Ekspor Luar Negeri | 22.51 | 27.44 | 14.08 | 18.19 | 17.82 | 20.01 |

Sumber : BPS Papua, 2017 (data diolah)

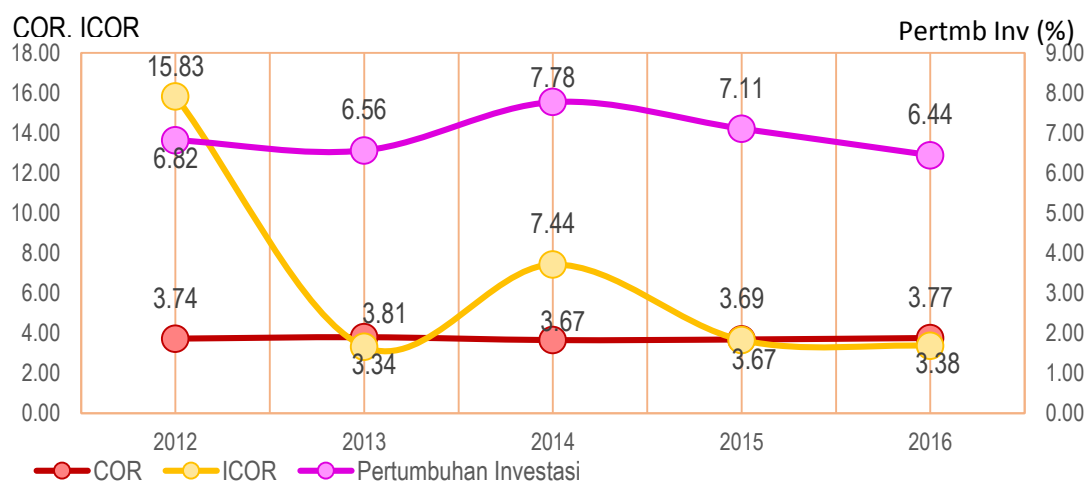
Selanjutnya yang juga dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua adalah komponen investasi, yang cenderung stagnan pada rata-rata 26,80% per tahun. Adapun untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, terindikasi kontribusinya hanya mencapai 18,89% per tahun, relatif di bawah komponen ekspor luar negeri yang bisa mencapai 20,01% per tahun.

Peningkatan investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua dan menurunkan angka pengangguran di Provinsi Papua. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi untuk mencapai sasaran pertumbuhan output tersebut. Namun perlu disadari bahwa besar kecilnya Capital Output Ratio

(COR) tersebut, sangat dipengaruhi juga oleh teknologi yang digunakan, efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, pengelolaan sumber daya alam, persebaran penduduk, kemampuan manajerial, laju dan komposisi investasi dan prasarana sosial ekonomi yang tersedia.

Dalam perkembangannya, pertumbuhan investasi di provinsi Papua tahun 2012-2016 terlihat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan investasi tertinggi terjadi di tahun 2014 yaitu 7,78%, dengan ICOR 7,44 dan COR sebesar 3,67. Ini mengindikasikan bahwa kebutuhan investasi untuk meningkatkan perekonomian Papua terlihat mengalami fluktuasi namun masih realistis kecuali untuk tahun 2012, dan 2014 dimana angka ICOR terlihat sangat tinggi berada pada angka di atas 4 yaitu 7,44. Artinya Kebutuhan untuk menaikkan 1 unit output di Papua dibutuhkan 7,44 unit modal, sehingga jika dilihat secara rata-rata maka dapat dikategorikan Papua masih mengalami ekonomi biaya tinggi.

Gambar 3.2.
Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR Provinsi Papua
Tahun 2012-2016

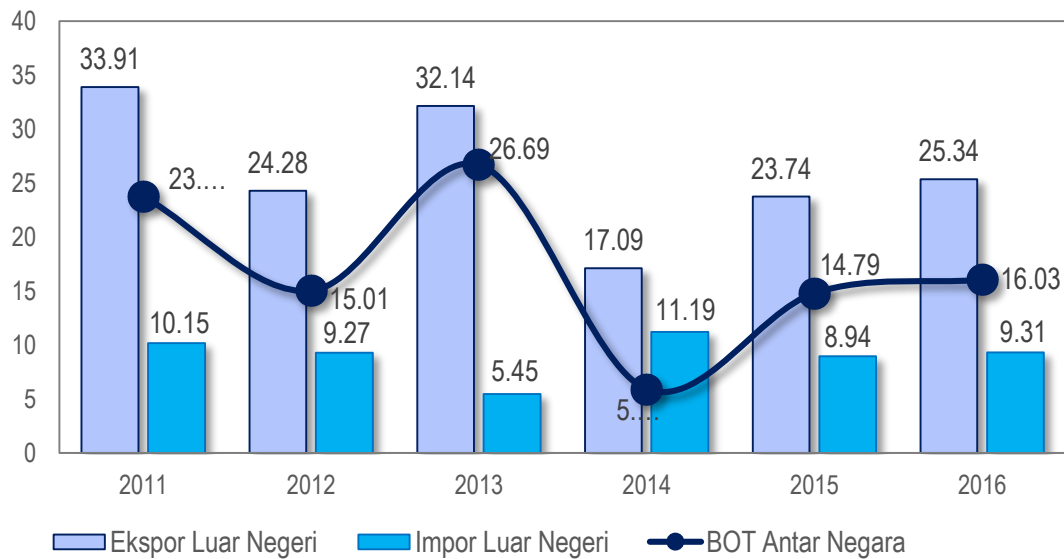


Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Perkembangan nilai ekspor luar negeri provinsi Papua mengalami surplus, atau selalu lebih besar dari pada impor, namun dengan perkembangan yang berkontraksi sepanjang tahun 2011-2016. Tahun 2011 dan Tahun 2013, terlihat ekspor Papua mencapai angka tertinggi yaitu masing-masing sebesar Rp 33,91 Triliun dan Rp 32,14 triliun. Kondisi ini tidak berlangsung lama, karena mengalami penurunan di tahun 2014 atau terendah sepanjang tahun 2011-2016. namun kemudian terlihat meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Impor Luar Negeri Provinsi Papua tertinggi terlihat di Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 11,19 triliun dan terendah di tahun 2013 yaitu sebesar Rp 5,45 triliun. Kondisi ini juga yang menyebabkan neraca perdagangan atau

Balance of Trade (BOT) antar negara tahun 2013 menjadi tertinggi jika dibanding tahun tahun lainnya.

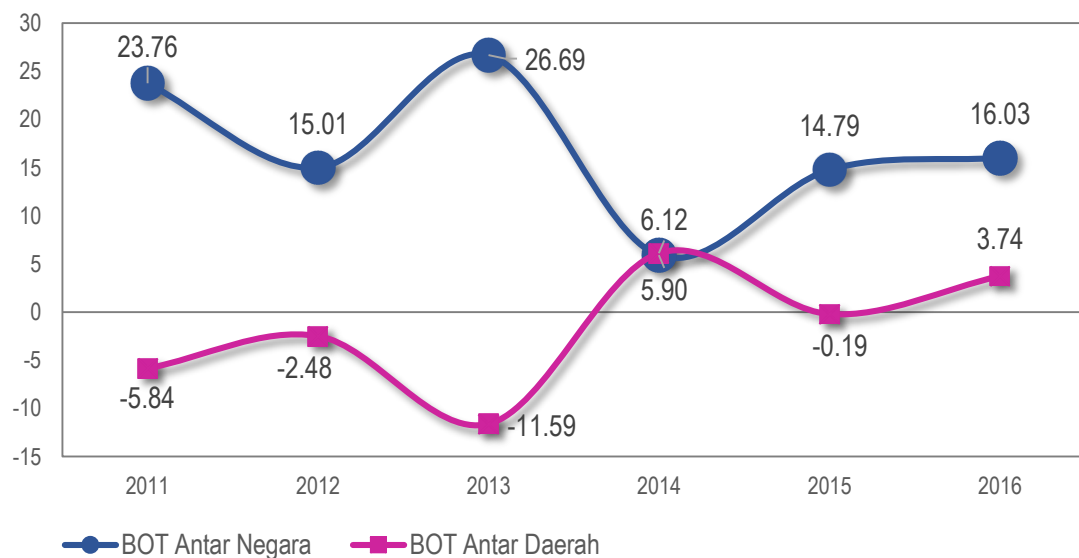
Gambar 3.3.
Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri
Provinsi Papua Tahun 2011-2016
(Rp. Triliun)



Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Kondisi berbeda jika dibandingkan BOT antar negara dengan BOT antar daerah. Neraca perdagangan antar daerah provinsi Papua terlihat dominan defisit kecuali untuk tahun 2014 dan 2016. Defisit tertinggi terlihat di tahun 2013 yang mencapai Rp 11,59 triliun.

Gambar 3.4.
Perbandingan Neraca Perdagangan Luar Negeri Dan Antar Daerah
Provinsi Papua Tahun 2011-2016
(Rp. Triliun)



Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Jlka disimak pada Tabel 3.7, tujuan ekspor dari Provinsi Papua terbesar ke enam negara yaitu Spanyol, Jepang, Filipina, Korea Selatan, India dan

Tiongkok. Negara tujuan ekspor tahun 2013-2015 terbesar terlihat ke India dengan proporsi paling besar di tahun 2014 yang mencapai 38,81% atau mencapai 778,15 juta US\$. Tahun 2016, proporsi ekspor terbesar bergeser ke negara Jepang yaitu 24,46% atau mencapai 489,14 juta US\$. Secara keseluruhan total ekspor dari Provinsi Papua, paling tinggi dicapai di tahun 2013 yaitu sebesar 2,728.04 juta US\$.

Tabel. 3.6.
Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan
Tahun 2013 - 2016

| Negara Tujuan | Jan-Des 2013 | | Jan-Des 2014 | | Jan-Des 2015 | | Jan-Des 2016 | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | juta US\$ | Share % | juta US\$ | Share % | juta US\$ | Share % | juta US\$ | Share % |
| Spanyol | 295.18 | 10.82 | 297.93 | 19.48 | 56.57 | 2.82 | 54.22 | 2.71 |
| Jepang | 685.97 | 25.15 | 270.23 | 17.67 | 403.16 | 20.11 | 489.14 | 24.46 |
| Filipina | 223.14 | 8.18 | 24.51 | 1.60 | 183.32 | 9.14 | 258.88 | 12.95 |
| Korea Selatan | 263.09 | 9.64 | 80.11 | 5.24 | 109.23 | 5.45 | 178.97 | 8.95 |
| India | 754.42 | 27.65 | 338.79 | 22.15 | 778.15 | 38.81 | 482.93 | 24.15 |
| Tiongkok | 414.05 | 15.18 | 359.32 | 23.49 | 310.71 | 15.50 | 460.43 | 23.02 |
| Total 6 Negara Utama | 2,635.85 | 96.62 | 1,370.89 | 89.62 | 1,841.12 | 91.82 | 1,924.57 | 96.24 |
| Lainnya | 92.19 | 3.38 | 158.78 | 10.38 | 164.04 | 8.18 | 75.20 | 3.76 |
| Total | 2,728.04 | 100.00 | 1,529.67 | 100.00 | 2,005.16 | 100.00 | 1,999.77 | 100.00 |

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

3.1.1.2. Kesempatan Kerja

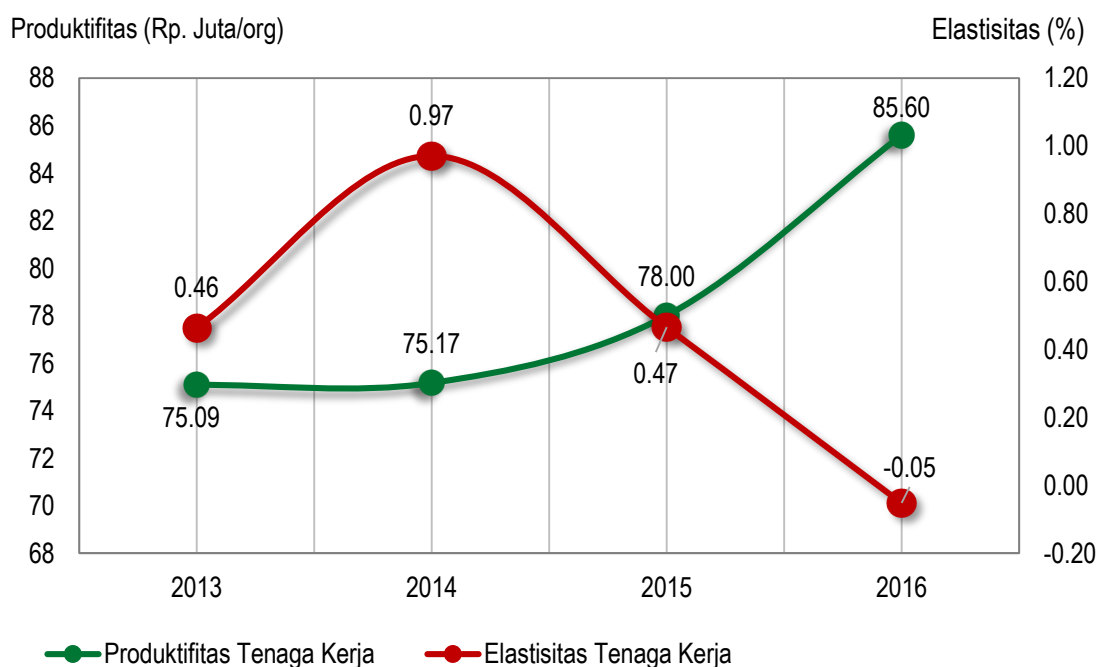
Seperti yang telah disampaikan pada Bab II sebelumnya di Tabel 2.11, jumlah penduduk usia produktif terus mengalami kenaikan namun dengan jumlah yang semakin menurun dan disisi lain jumlah angkatan kerja terlihat semakin meningkat kecuali terjadi penurunan di tahun 2016 sebesar 19,783 orang. Kondisi ini mengindikasikan semakin besarnya jumlah penduduk yang masuk kategori bukan angkatan kerja yang disebabkan karena sedang bersekolah atau menjadi ibu rumah tangga. Hal ini terlihat adanya peningkatan drastis jumlah bukan angkatan kerja dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 76.015 orang.

Fakta lainnya, TPAK dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua cenderung berkembang stabil. Tahun 2011, TPAK provinsi Papua tercatat sebesar 78,27%, yang kemudian turun di tahun 2011 namun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2015, dan menurun kembali di tahun 2016

menjadi 74,13%. Dari sisi pengangguran, terlihat bahwa jumlah orang yang menganggur di provinsi Papua terlihat cenderung mengalami peningkatan, namun dari sisi proporsinya mengalami fluktuasi yang penurunan, sehingga hal ini berdampak pada tingkat pengangguran terbuka di provinsi Papua. Tahun 2012 tercatat angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,65%, yang mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 3,15%, namun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2015 sehingga menjadi 3,99%, dan kemudian menurun kembali di tahun 2016 menjadi 3,35% sehingga dari sisi Tingkat Kesempatan Kerja (TKT) tentunya meningkat dari 96,01% di tahun 2015 naik menjadi 96,65% di tahun 2016.

Elastisitas tenaga kerja di provinsi Papua terlihat lebih kecil dari satu atau inelastis. Elastisitas tenaga kerja tertinggi terlihat di tahun 2013 yaitu sebesar 0,97 dan terendah di tahun 2016 yaitu 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan PDRB atau produksi 1 persen akan menyebabkan perubahan tenaga kerja yang terserap kurang dari 0,97 persen di tahun 2013 atau 0,05 persen di tahun 2016. Dari sisi produktifitas tenaga kerja di Provinsi Papua terlihat mengalami peningkatan sejak tahun 2013 yaitu dari Rp 75,09 juta per orang naik menjadi Rp 85,60 juta per orang.

Gambar 3.5.
Produktifitas Dan Elastisitas Tenaga Kerja Di Provinsi Papua
Tahun 2011-2016

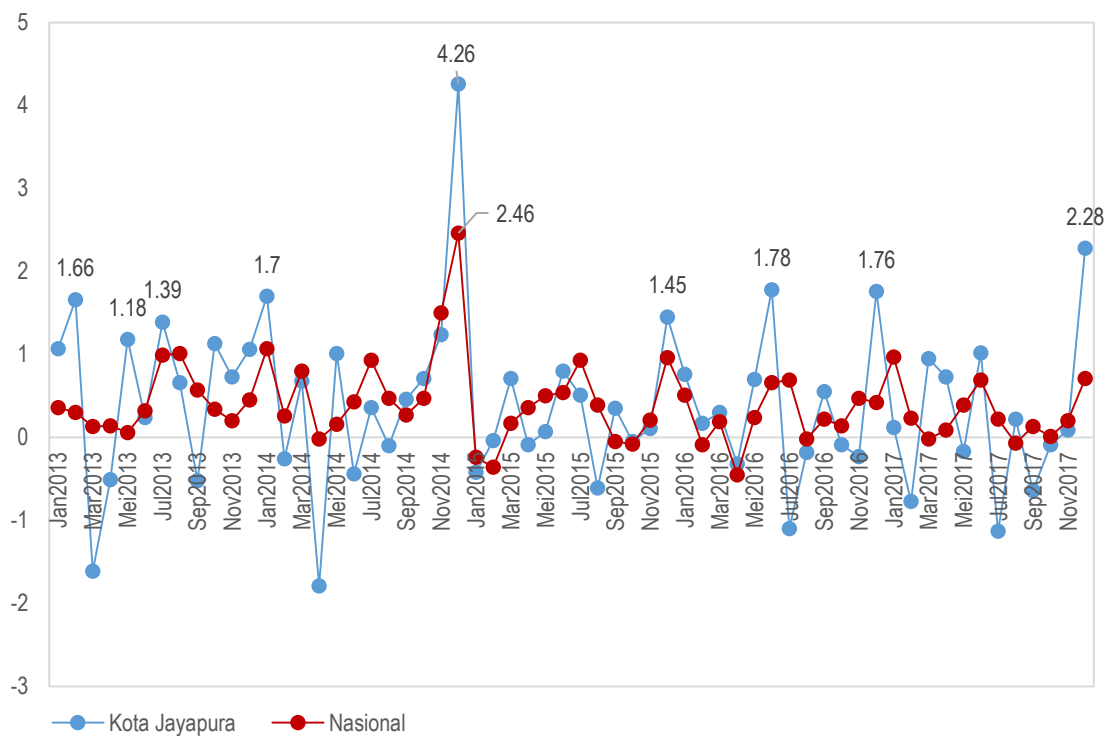


Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

3.1.1.3. Perkembangan Inflasi dan Tingkat Kemahalan Di Provinsi Papua

Berdasarkan perkembangan harga barang dan jasa bulanan di kota Jayapura terlihat pergerakan harga dari paket barang dan jasa di Provinsi Papua dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Lonjakan harga barang dan jasa terlihat meningkat dan menurun tajam pada bulan-bulan tertentu. Tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum terlihat pada bulan Januari 2014, bulan Desember 2014, bulan Desember 2015, bulan Juni 2016 dan bulan Desember 2016. Sedangkan tingkat inflasi terendah, terlihat pada bulan bulan April 2014, Agustus 2015 dan bulan juli 2016.

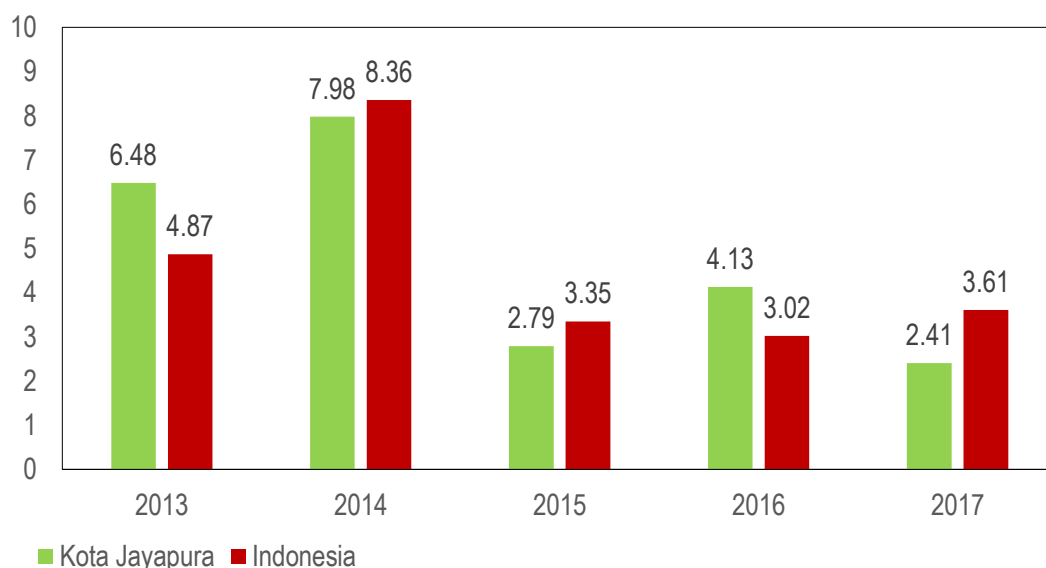
Gambar 3.6.
Tingkat Inflasi Bulanan Kota Jayapura dan Indonesia
Periode Januari 2013 - Desember 2017



Sumber : BPS Papua, 2017 (data diolah)

Secara kumulatif inflasi di Kota Jayapura, yang merepresentasikan kondisi inflasi Provinsi Papua, selama ini selalu terkendali dengan kecenderungan mengalami penurunan dan berada di bawah inflasi Indonesia. Tingkat pergerakan harga paket barang dan jasa secara kumulatif selama tahun 2014-2015 terlihat menurun dari 7,98% di tahun 2014 menjadi 2,79% di tahun 2015 dan masih dengan besaran inflasi dibawah 10%. tetapi ada kecenderungan meningkat dan tidak stabil yang akan berpengaruh kepada pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 3.7.
Tingkat Inflasi Tahunan Kota Jayapura dan Indonesia
Tahun 2014 – 2016



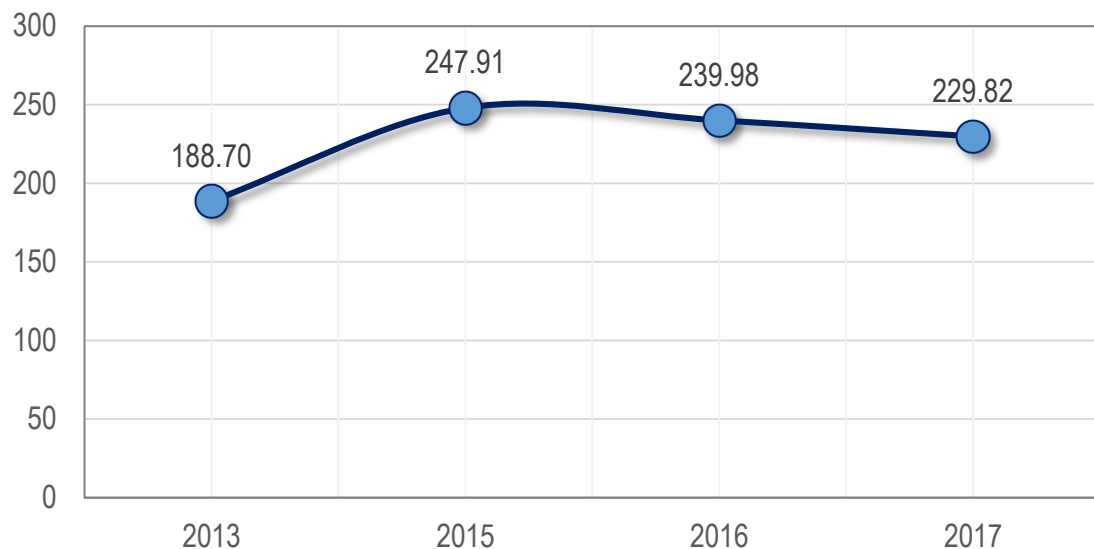
Sumber : BPS Papua, 2017 (data diolah)

Selain inflasi, perkembangan harga yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi adalah tingkat kemahalan harga, yang selama ini menggunakan indikator Indeks Kemahalan Kontruksi atau IKK. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka IKK suatu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota acuan dapat berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2016 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan

up to date yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2015. Berikut ini perkembangan IKK di Provinsi Papua selama tahun 2013-2017.

Gambar 3.8.
Indeks Kemahalan Kontruksi Di Provinsi Papua
Tahun 2010 - 2017



Sumber : BPS Indonesia, 2017 (data diolah)

Sepanjang tahun 2012-2014 cenderung IKK Provinsi Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun tetap dalam posisi teratas di seluruh Indonesia. Adanya perubahan daerah acuan di tahun 2015, yaitu dari Kota Samarinda/Provinsi Kalimantan Timur ke Kota Surabaya/Provinsi Jatim mengakibatkan IKK Provinsi Papua naik hingga menjadi 247,91. Ini berarti kenaikan IKK tersebut bukan terjadi secara struktural, namun lebih kepada teknis. Di tahun 2016 terjadi penurunan IKK dengan angka yang tipis hanya sebesar 7,93 point, sehingga IKK di tahun 2016 menjadi 239,98, yang menandakan harga-harga bahan kontruksi di Provinsi Papua secara rata-rata lebih tinggi 139,88 persen dibandingkan daerah acuan (Kota Surabaya). Selanjutnya menurun kembali di tahun 2017 menjadi 229,82.

3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Wilayah Tahun 2018 dan 2019

3.1.2.1. Eksternalitas Ekonomi

Sebagai suatu wilayah yang menerapkan *open economy* sejak dahulu, Provinsi Papua tidak dapat menghindari dari faktor-faktor eksternal ekonomi yang bersifat global. Terdapat 3 (tiga) negara tujuan ekspor terbesar yang berperan mempengaruhi perekonomian wilayah Papua yaitu Jepang (21,86%), India (28,19%) dan Tiongkok (19,30%). Naik turunnya perekonomian nasional di negara-negara tersebut dipastikan secara simultan akan berpengaruh tidak

langsung terhadap pertumbuhan ekspor Provinsi Papua, yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah. Terlebih lagi karena ekspor Papua yang paling dominan ke negara-negara tersebut adalah konsentrat tembaga, yang mana komoditi tersebut juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga tinggi rendahnya ekspor tembaga yang sangat ditentukan oleh faktor permintaan dari negara Jepang, India dan Tiongkok, akan mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah Papua pada tahun 2019 mendatang.

Dalam laporan terbaru World Economic Outlook yang dibuat IMF, pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 mencapai 3,9%, seiring dengan masih baiknya hubungan antar negara dan kebijakan fiskal yang masih suportif, sebagaimana yang disampaikan oleh AFP. Laju pertumbuhan ekonomi paling kencang masih akan didapati di Asia, dimana negara ekonomi besar seperti China, India dan beberapa negara di Asia Tenggara diperkirakan akan memiliki kinerja yang lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Sejak bulan Januari, IMF tidak mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi China, yang diperkirakan akan tumbuh 6,6% pada 2018 dan 6,4% pada 2019. China memiliki target pertumbuhan tahun 2018 sekitar 6,5%. India dipercaya akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Dimana berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) melalui IMF *Economic Outlook*, pertumbuhan ekonomi India diprediksi mencapai 7,4 persen pada tahun 2018. Kemudian di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi India diprediksi lebih tinggi, yakni 7,8 persen. Menurut IMF, ekonomi India didorong kuatnya konsumsi swasta dan mulai pudarnya dampak transisi mata uang, serta implementasi pajak barang dan jasa. Selanjutnya untuk ekonomi Jepang, Bank sentral Jepang menargetkan inflasi 2% pada tahun fiskal 2019. Namun, target ini bisa tak tercapai bila yen terus menguat. Yen Jepang dilaporkan sudah terapresiasi sejak awal 2018 dan telah diperkirakan analisis akan terus berlanjut. Salah satu penyebabnya adalah pelemahan dolar AS, serta membaiknya perekonomian Jepang. Tingkat inflasi sangat dipengaruhi pergerakan nilai mata uang. Jika Yen menguat, maka harga barang-barang impor akan lebih murah jika dibeli dengan yen, dan penurunan nilai ekspor yang dibeli dengan US dolar.

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi global pada ketiga negara tujuan ekspor terbesar di atas maka cukuplah relevan jika diprediksi akan ada peningkatan ekspor Provinsi Papua di akhir tahun 2018 ini, dan tahun 2019 mendatang. Terutama sekali datang dari negara India dan Tiongkok yang akan

mengalami pertumbuhan terbesar di dunia pada tahun 2018 dan 2019 sebagaimana yang diestimasi oleh IMF. Adapun untuk negara Jepang, seandainya inflasi di negara tersebut dapat terkoreksi mendekati angka 2% di tahun 2019, maka akan berimbas pada semakin menguatnya US dolar terhadap mata uang Yen sehingga nilai ekspor Papua dipastikan akan meningkat. Namun untuk saat ini, bank sentral Jepang masih ragu inflasi menembus angka 2% tersebut karena pada awal Januari 2018 baru mencapai 0,9%. Dengan demikian, kondisi perekonomian Provinsi Papua di tahun 2018 dan 2019 tetap berhadapan dengan tantangan berat, meskipun stimulus ekspor dapat didorong dari negara India dan Tiongkok, namun karena negara Jepang juga dominan mengimpor dari Papua maka pengaruh negara tersebut terhadap perekonomian wilayah Papua tidak dapat diabaikan.

Pada akhirnya, dalam konteks pengaruh global negara Asia, diperkirakan perekonomian Provinsi Papua dapat meningkat di tahun 2018 dan tahun 2019, akan tetapi berhadapan dengan tantangan yang berat. Terlebih jika melihat berlakunya Komunitas perdagangan ASEAN yang telah membentuk konsep pasar tunggal yang digagas oleh 10 Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Kamboja dan Vietnam, yang mengharuskan terwujudnya globalisasi 5 perdagangan bebas yakni arus barang, arus jasa, arus investasi, arus modal dan arus tenaga kerja terampil. Sehingga persaingan bebas akan benar-benar terjadi lintas negara, yang dipastikan akan melintasi juga ke daerah-daerah provinsi dalam satu negara.

3.1.2.2. Perekonomian Domestik

Untuk tantangan domestik, beberapa risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain: (1) dalam jangka menengah, tantangan perekonomian terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga lebih berdaya tahan. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan kelompok ekonomi berpendapatan menengah, (2) tantangan berkaitan dengan upaya memperkuat struktur perekonomian dari sektor riil dan sektor keuangan. Tantangan struktural di sektor riil berhubungan dengan upaya untuk memperluas keragaman komposisi produk ekspor sehingga melengkapi peran ekspor produk sumber daya alam. Tantangan di sektor riil juga berhubungan dengan upaya meningkatkan peran industri pengolahan dalam perekonomian, dan memperkuat struktur pasar dan tata niaga sehingga lebih efisien, dan (3)

tantangan di sektor keuangan berkenaan dengan upaya untuk memperkuat struktur pembiayaan domestik sehingga menjadi lebih beragam, meningkatkan struktur dana perbankan sehingga menjadi lebih seimbang, serta memperdalam pasar keuangan sehingga dapat mendukung pembiayaan ekonomi dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter.

Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen pada tahun ini dan 2019. Hal ini disampaikan dalam laporan Asian Development Outlook (ADO). Manajemen makroekonomi Indonesia yang kuat dan reformasi struktural telah mendorong momentum investasi. Jika Indonesia dapat terus menjaga keberlanjutan upaya reformasi, menurut dia, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif. Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan investasi infrastruktur, pengembangan pendidikan dan keterampilan, serta reformasi iklim investasi. ADB pun menggarisbawahi bahwa penguatan investasi telah meningkatkan mutu pertumbuhan, dengan belanja modal yang lebih tinggi membantu mengatasi kesenjangan infrastruktur. Inflasi tahun ini diperkirakan akan stabil. Sebelum sedikit naik ke 4 persen pada 2019. Hal ini akan mendukung kepercayaan konsumen dan membantu mempertahankan pengeluaran rumah tangga dan pendapatan riil pada tahun ini dan tahun depan.

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa Tahun 2018-2019 yang merupakan tahun politik menjadi peluang cukup besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena, konsumsi khususnya non rumah tangga diprediksi mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya pesta demokrasi. Sisi investasi mengalami sedikit pelemahan karena investor atau pengusaha cenderung menunggu dan mencermati peluang investasi di tahun politik di 2018. Hal itu disebabkan pelaku usaha, khususnya untuk sektor besar masih harus menunggu kepastian dari siapa yang menjadi pemimpin baik di tingkat daerah atau pusat pada 2019. Akan tetapi, melambatnya investasi bisa ditutup dengan kenaikan konsumsi non rumah tangga. Belanja barang seperti kaos, spanduk, stiker dan yang lainnya untuk kebutuhan kampanye meningkat cukup pesat. Hal inilah, yang menjadi dasar bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak akan terlalu terganggu kegiatan politik. Pertumbuhan ekonomi memang baru akan akselerasi cepat 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dimungkinkan akan lebih tinggi dari 5% di tahun di 2019. Namun menurut Asian Development Bank

(ADB), pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 hanya sebesar 5,3%, belum bisa lepas dari angka 5%.

3.1.2.3. Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2019

Formula ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yang digunakan oleh BPS Papua dapat diderivasi berdasarkan algoritma tertentu rumus pertumbuhan ekonomi berbasis investasi yaitu:

$$LPE = k \cdot \frac{1}{COR \cdot ICOR}$$

dimana LPE adalah laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, k adalah $(1 + gl)$ dengan gl merupakan pertumbuhan investasi yang direncanakan, COR dan ICOR masing-masing adalah rata-rata *Capital Output Ratio* dan *Incremental Capital Output Ratio* pada periode sebelumnya.

Dalam pembahasan di awal, berdasarkan data time series PMTB (Pertambahan Modal Tetap Bruto) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) periode 2012-2016 telah diketahui COR rata-rata adalah 3,77, dan ICOR rata-rata (kumulatif) adalah 4,50. Kemudian, dalam dokumen RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, secara makro telah ditargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhir masa pembangunan RPJMD tahun 2018 adalah sebesar 8%. Dengan menggunakan seluruh indikator ini dan rumus derivatif pertumbuhan ekonomi di atas maka dapat ditentukan berapa besar pertumbuhan investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut (8%) dengan asumsi COR dan ICOR konstan, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} LPE \times COR \times ICOR &= (1 + gl) \\ 0,08 \times 3,73 \times 4,50 &= 1 + gl \\ 1,3427 &= 1 + gl \\ gl &= 1,3427 - 1 \\ gl &= 0,3427 \text{ atau } 34,27\% \end{aligned}$$

Ini berarti untuk menciptakan LPE sebesar 8% di tahun 2019 sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJPD 2005-2025 dibutuhkan kenaikan investasi sebesar 34,27%.

Kebutuhan pertambahan investasi sebesar 34,27% ini dapat dikatakan kurang begitu realistis untuk saat ini mengingat kondisi makro ekonomi Provinsi Papua sepanjang periode 2013 - 2017 sangat fluktuatif, serta berhadapan dengan tantangan ekonomi global dan domestik di tahun 2019. Selain itu dari data historis rata-rata pertumbuhan investasi (PMTB) selama tahun 2013 - 2016 hanya sekitar 6,94%. Oleh karena itu diperlukan adanya

koreksi target pertumbuhan di tahun 2019 berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini.

1). Asumsi-asumi yang mendistorsi pertumbuhan ekonomi

- a. Meskipun porsi ekspor Provinsi Papua dalam struktur ekspor luar negeri Indonesia masih sangat kecil, namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian wilayah sendiri, dapat dikatakan perekonomian Papua sudah cukup terbuka karena kontribusi ekspor luar negeri terhadap pembentukan PDRB rata-rata mencapai 19,90% per tahun yang berada di urutan ketiga setelah PMTB dan konsumsi RT. Selama ini ada 3 negara tujuan ekspor yang sangat mendominasi komposisi ekspor luar negeri Provinsi Papua yaitu India, Tiongkok dan Jepang, dengan kisaran kontribusinya terhadap total ekspor Papua selama periode 2014 - 2016 rata-rata mencapai 23,16% per tahun. Tantangan terberat adalah ekspor ke negara Jepang, terutama dengan semakin menguatnya mata uang Yen terhadap US dolar diperkirakan dapat melemahkan nilai ekspor Papua ke Jepang.
- b. Disamping risiko global, permasalahan ketergantungan ekspor Provinsi Papua terhadap satu komoditi yaitu tambang tembaga yang diproduksi oleh PT. Freeport Indonesia juga sangat mengganggu ekspor Papua di tahun 2019 mendatang. Ketergantungan terhadap satu komoditi ini menyebabkan perekonomian Provinsi Papua menjadi penuh ketidakpastian (*uncertainty*).
- c. Walaupun eksistensi pasar tunggal MEA dapat memberi pengaruh yang positif, namun dampak negatifnya perlu diperhatikan juga oleh Provinsi Papua. Dengan adanya MEA, arus barang yang masuk dari negara-negara ASEAN tidak dapat dihindari oleh Provinsi Papua di tahun 2019. Kondisi ini dapat berdampak dengan menurunnya surplus perdagangan luar negeri diakibatkan impor yang akan terus meningkat, ditambah lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar AS yang diperkirakan akan naik di tahun 2019 dengan kisaran pada nilai Rp.13.700 per dolar AS (asumsi kurs dolar AS pada RAPBN 2018) menyebabkan *leakage* (kebocoran) dalam neraca perdagangan akan semakin besar.
- d. Neraca perdagangan antar daerah yang selalu rendah dibawah Rp. 4 triliun per tahun, bahkan untuk beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami defisit, mengindikasikan sangat tergantungnya perekonomian Provinsi Papua terhadap daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama dengan Pulau Jawa dan Sulawesi. Terjadinya

perubahan ekonomi nasional, terutama akibat kenaikan harga BBM yang mengikuti harga pasar akan memicu kenaikan harga-harga barang yang diimpor Provinsi Papua dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Dalam hal ini berdasarkan data *time series* selama periode 2011 - 2016, dan menggunakan *trend analysis* maka diproyeksi harga BBM umum di tahun 2019 rata-rata bisa mencapai Rp. 6.500 - Rp. 6.700 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut akan berimbas pada naiknya harga-harga barang dari luar daerah yang diperkirakan sebesar 4%, yang dimungkinkan dapat mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua.

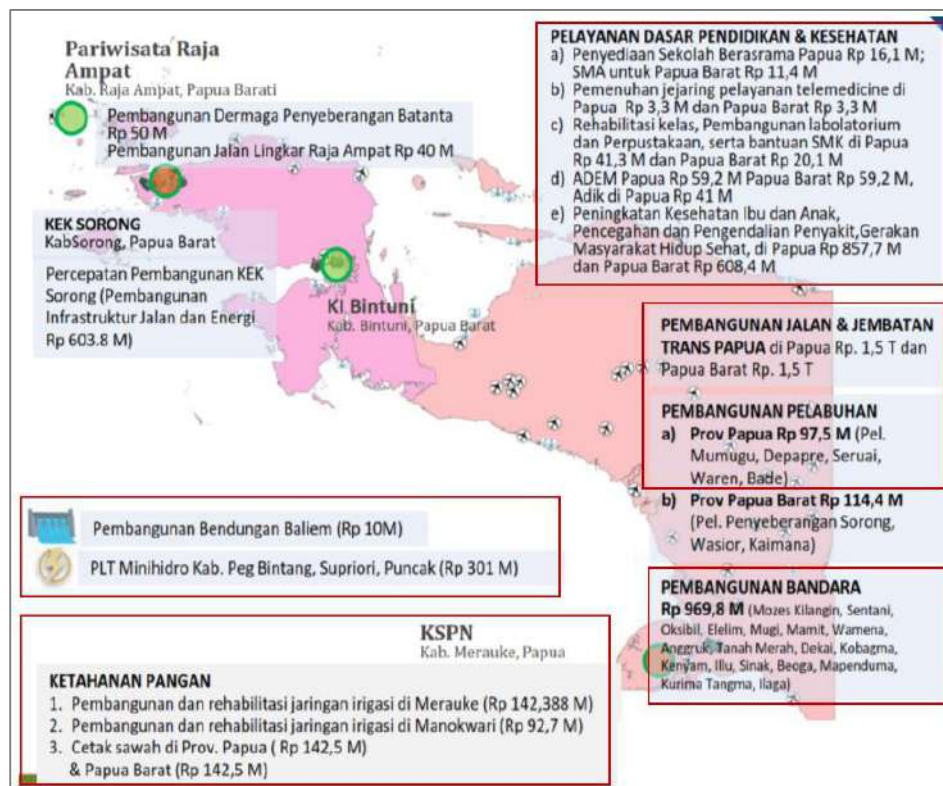
2). Asumsi-asumsi yang menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi

- a. Kontribusi pengeluaran RT masih mendominasi pembentukan PDRB pengeluaran sampai dengan tahun 2019. Sehingga gejolak ekonomi global yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah dapat diminimalisir melalui peningkatan konsumsi RT yang diperkirakan berdasarkan data proyeksi *time series* (2013 - 2018) dapat tumbuh antara 6,40% - 7,40% dengan kontribusinya sebesar 40,85 persen pada tahun 2019. Walaupun ada distorsi akibat inflasi pada harga BBM namun angka proyeksi sebesar itu tidaklah naif, mengingat ekspektasi konsumen rumah tangga terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Papua selama ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dirilis oleh BPS Papua bahwa Indeks Tendensi Konsumen (ITK) sepanjang tahun 2016-2017 rata-rata mencapai 107.99, yang selalu dominan dibentuk oleh optimisme dari konsumen bahwa pendapatan rumah tangga meningkat. Adapun stimulus terbesar berasal dari pengeluaran konsumsi makanan dan minum serta transportasi.
- b. Secara sektoral, meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih dibawah sektor pertambangan, namun kinerja sektor pertanian selama periode 2013 - 2017 menunjukkan arah yang lebih baik dengan rata-rata pertumbuhannya 5,22% per tahun. Selain itu, sektor pertanian yang digerakan oleh 5 sub sektor produktif yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan semuanya juga memperlihatkan kinerja pencapaian yang baik di tahun 2016, rata-rata sekitar 97,6% - 101,30%. Untuk itu sangatlah relevan jika semua sub sektor pertanian tersebut ditempatkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di tahun 2019, yang diperkirakan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian rata-rata 5% pada tahun tersebut. Namun

perkiraan pertumbuhan ini dapat dicapai apabila ada injeksi yang proporsional pada faktor-faktor *final demand* (permintaan akhir) dari sektor pertanian, terutama pada PMTB dan pengeluaran pemerintah.

- c. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah sektor konstruksi dan transportasi, yang terindikasi sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Dalam perekonomian Papua, selama periode 2013-2017 kedua sektor infrastruktur ini tercatat mempunyai pertumbuhan yang paling tinggi diantara semua sektor, masing-masing sebesar 10,77% untuk sektor konstruksi, dan 9,04% untuk sektor transportasi. Sektor infrastruktur mempunyai pengaruh ganda dalam perekonomian wilayah, yaitu *direct effect* (pengaruh langsung) dan *indirect effect* (pengaruh tidak langsung). Pengaruh langsungnya dapat dilihat dalam menyerap lapangan kerja, mendorong produksi di sektor lainnya yang terkait, meningkatkan pendapatan per kapita, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya menyebar sangat luas baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti memacu kenaikan investasi, menggerakkan produksi di sektor-sektor *tradeable*, menurunkan angka kemiskinan, ketimpangan, inflasi, dan lain-lain. Singkatnya, sektor infrastruktur merupakan faktor *enabler* yang paling utama dan strategis dalam perekonomian wilayah, dan menjadi *first order condition* untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Kondisi ini akan semakin nyata di tahun 2019 dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang mengintruksikan kepada seluruh jajaran kementerian, Gubernur Papua dan Papua Barat, serta seluruh bupati/walikota di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengkoordinasikan, menyinergikan penyusunan, menetapkan Rencana Aksi Tahunan, penyusunan dan penajaman program, kegiatan, proyek, lokasi dan (keluaran) Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan Tahun 2019, yang sumber pendanaannya berasal dari belanja kementerian/lembag, belanja non kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa. Percepatan pembangunan Provinsi Papua menjadi *Highlight* Prioritas Nasional melalui pengembangan infrastruktur yang diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Lihat Gambar 3.10 berikut ini.

Gambar 3.9.
Highlight Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah
Percepatan Pembangunan Papua



Sumber : RKP 2018, Bappenas RI.

- d. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga diharapkan bisa menjadi stimulus yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018, sejalan dengan percepatan realisasi anggaran dan kemungkinan tidak adanya skenario fiskal pemerintah pusat terkait penundaan pencairan dana perimbangan. Adanya pencairan dana terkait pilkada serentak, peningkatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur-infrastruktur strategis di Provinsi Papua diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah. Selain itu persiapan PON ke-20 yang sudah *start up* dari tahun 2016 akan semakin terasa pada tahun 2019, karena pembangunan berbagai *venue* PON akan semakin dipercepat, sehingga stimulus fiskal semakin besar dalam perekonomian wilayah yang didorong dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Diperkirakan pengeluaran pemerintah akan meningkat dalam interval 6,40% - 8,40% pada tahun 2019.
- e. Peningkatan produktifitas tenaga kerja regional yang terjadi selama tahun 2012 - 2016, yang bahkan lebih baik dari produktifitas nasional, merupakan indikator bahwa tenaga kerja di Provinsi Papua dapat diandalkan sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi wilayah.

Terlebih lagi dengan adanya *Bonus Demografi* yang akan lebih dirasakan pada tahun 2019 merupakan modal yang potensial untuk meningkatkan produktifitas regional. Dalam hal ini, mengikuti kecenderungan tahun-tahun sebelumnya, maka berdasarkan *trend analysis* produktifitas regional di tahun 2019 diperkirakan akan meningkat menjadi 89.26 juta per tenaga kerja.

- f. Faktor stimulus lainnya adalah terkait dengan ekspektasi lingkungan bisnis. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan masih akan tumbuh positif, sejalan dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan kredit, perbaikan kondisi lingkungan investasi dan perekonomian serta dampak dari relaksasi kebijakan pemerintah melalui implementasi paket-paket kebijakan ekonomi di tahun 2019. Kemudian terkait dengan reformasi fiskal, dan penurunan *moral hazard* juga akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang diindikasikan dengan (1) kinerja belanja yang semakin baik, (2) penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah daerah, (3) strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada keberlanjutan, (4) reformasi struktural yang diarahkan untuk meningkatkan investasi infrastruktur, perbaikan kondisi bisnis, logistik yang lebih baik, perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi, kebijakan pertanahan/reformasi agraria, kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan industri pariwisata, dan deregulasi peraturan/ perijinan di daerah.

Semua faktor pendukung ini dapat memberi harapan yang optimis bahwa pertumbuhan investasi di tahun 2019 bisa mencapai maksimal sebesar 9,49%. Ini berarti, apabila beranjak pada model pertumbuhan berbasis investasi sebelumnya (model ICOR), maka dapat diprediksi LPE di tahun 2019 sebagai berikut :

$$LPE = k \cdot \frac{1}{COR \cdot ICOR} = 6,55\%$$

dimana COR = 3,77, ICOR = 4,50, dan $k = 1 + 0,0949 = 1,0949$

Akan tetapi, dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua bukan hanya ditentukan oleh investasi semata. Sebagaimana yang diformulasikan dalam model ekonomi agregat, yang juga digunakan oleh BPS Papua bahwa pendapatan regional ditentukan oleh 4 indikator makro yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (X). Oleh karena itu jika mengikuti data PDRB pengeluaran (harga

konstan 2010) triwulanan selama periode 2013-2018, maka berdasarkan asumsi-asumsi pertumbuhan sebelumnya, yaitu : (1) pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 sebesar 6,40% - 7,00%, yang telah dijustifikasi dengan tingkat inflasi dan ekspektasi konsumen; (2) pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebesar 6,0% - 7,00%, yang telah dijustifikasi dengan perkiraan penerimaan daerah, reformasi fiskal, pengeluaran untuk percepatan persiapan PON XX, dan pengeluaran untuk percepatan pembangunan Papua berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2018; (3) pertumbuhan investasi sebesar 6.94% - 9.94%, dan pertumbuhan ekspor sebesar 5,38% - 7,38%, yang masing-masing telah dikoreksi dan dijustifikasi berdasarkan tantangan global dan domestik, serta harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan swasta, kemudian adanya ekspektasi bisnis yang positif dan peningkatan investasi di sektor pertanian, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2019 diperkirakan dalam interval 6,25 – 6,89%.

Adapun untuk perkiraan indikator ekonomi lainnya, berdasarkan pertimbangan bahwa : (1) pendapatan per kapita meningkat secara proporsional dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi; (2) terdapat peningkatan lapangan kerja; (3) terjadi kenaikan produktifitas di sektor-sektor pertanian, industri, konstruksi, transportasi, dan jasa-jasa lainnya; (4) adanya *highlight* prioritas nasional untuk melaksanakan percepatan pembangunan Papua yang akan berdampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dan terakhir (5) dengan tetap memperhatikan target RPJPD 2005-2025 serta RKP 2019, maka secara keseluruhan dapat diurai target-target pembangunan ekonomi Provinsi Papua di tahun 2019 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel. 3.7.
Target Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2019

| Indikator Kinerja | Satuan | Nilai |
|---------------------------------------|---------|---------------|
| 1. Pertumbuhan PDRB | % | 6,25 - 6,89 |
| 2. Laju Inflasi | % | 2,50 - 4,00 |
| 3. PDRB per kapita | juta rp | 27,50 - 50,11 |
| 4. Gini Rasio | indeks | 0,32 - 0,38 |
| 5. Rasio penduduk yang Bekerja | % | 0,93 - 0,96 |
| 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 75,10 - 77,25 |
| 7. Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,60 - 4,38 |

Sumber : data diolah.

Dalam rangkaian perencanaan dan penganggaran tahun 2019, secara ekonomi kewilayahan ada empat hal penting yang perlu diantisipasi menghadapi tantangan ekonomi 2019. **Pertama**, konsumsi rumah tangga harus dijaga bertahan dan terus tumbuh, sebab 42,52% ekonomi Papua digerakkan oleh sektor konsumsi rumah tangga (data triwulan 2013-2017). **Kedua**, investasi yang menjadi penggerak kedua ekonomi yang menyumbang sebesar 26,29 persen. Melalui investasi diharapkan menambah penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. **Ketiga** adalah netto antara perdagangan keluar dan ke dalam daerah. Ini penting untuk menciptakan surplus perdagangan. Untuk itu pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi perlu lebih serius berupaya meningkatkan agribisnis pertanian dan perikanan guna memperlambat tekanan dari luar. **Keempat**, yang berkaitan dengan pembahasan Musrenbang yaitu belanja pemerintah daerah. Efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah akan terus ditingkatkan, sehingga kontribusi APBD Provinsi Papua tahun 2019 akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, sebagai provinsi yang memiliki SAKIP dengan nilai baik, Pemerintah Provinsi Papua harus mengubah *mind set* dari bermental membagi-bagi dan menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan berdasarkan program-program prioritas.

3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2019

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi di tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Reformasi prosedur peijinan investasi;
 - b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan
 - c. Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - b. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri;
 - c. Pengendalian laju inflasi.

3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah;
 - b. Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah;
 - c. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
 - d. Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
 - e. Pengembangan sarana promosi hasil produksi;
 - f. Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah;
 - g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
 - b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
 - c. Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah;
 - d. Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah;
 - e. Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta;
 - f. Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir;
 - g. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.
 - h. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.
5. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
 - b. Penyediaan peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
6. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Promosi dan pemasaran obyek pariwisata;
 - b. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
 - c. Promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - d. Pengembangan obyek pariwisata unggulan;

- e. Pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.
7. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
- a. Optimalisasi lahan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - b. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
 - c. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat;
 - d. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - g. Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua.
8. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
- a. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
 - b. Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat;
 - c. Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu;
 - d. Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat;
 - e. Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat;
 - f. Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan
 - g. Mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.
9. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
- a. Perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - b. Pengawasan teknis jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di 5 wilayah adat;
 - c. Pembangunan jaringan air bersih tersebar di 5 wilayah adat; pembangunan pengaman pantai;
 - d. Pembangunan bandara dan pelabuhan yang tersebar di 5 wilayah adat;
 - e. Pembangunan terminal Type B, sarana Angkutan, fasilitas transportasi darat yang tersebar di Seluruh Wilayah Papua:
 - f. Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.

10. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
 - a. Pembangunan dan pengembangan rumah layak huni tersebar di lima wilayah adat;
 - b. Pembangunan dan pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, pembangunan PLTA Urumuka, pembangunan PLTA Mamberamo, pembangunan energi baru terbarukan, pembangunan PLTA Supiori.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan profesional.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dana kemitraan, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Papua yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Papua Tahun 2019 disusun dalam rangka mewujudkan prioritas daerah dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan

tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK, Dana Bagi Hasil, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perhatikan Tabel 3.8.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM, eksptasi binis dan konsumen, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Apabila memperhatikan perkembangan historis data pendapatan daerah selama periode 2013-2016 cenderung setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhannya sekitar 14,61% per tahun. Dimana yang paling tinggi pertumbuhannya secara normal selama ini adalah Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 17,35% per tahun untuk periode yang sama. Sementara itu komposisi pendapatan daerah Provinsi Papua masih dominan pada pendapatan transfer. Seperti yang disajikan dalam Gambar 3.10 rata-rata kontribusi pendapatan transfer bisa mencapai 92,02% per tahun, yang cenderung stabil tanpa fluktuasi yang berarti selama tahun 2013- 2016.

Adapun pendapatan yang berasal dari daerah sendiri yaitu PAD, rata-rata memberi kontribusi 7,96% per tahun yang dimotori oleh pajak daerah terutama dari komponen pajak yang terkait dengan kepemilikan kendaran bermotor yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tabel 3.8.
**Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013 - 2016
(dalam Rp.)**

| URAIAN | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| PENDAPATAN DAERAH | 8.298.239.247.000 | 8.397.158.332.245 | 10.802.461.214.000 | 10.709.818.949.527 | 11.987.595.808.455 | 11.805.767.353.119 | 13.065.980.097.715 | 12.518.967.152.943 |
| Pendapatan Asli Daerah | 512.034.309.000 | 633.726.316.291 | 927.253.691.000 | 944.929.691.841 | 882.299.190.455 | 912.908.312.259 | 1.161.421.531.600 | 970.778.660.407 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 413.950.000.000 | 453.677.291.141 | 592.820.377.000 | 566.062.614.674 | 659.441.989.000 | 633.391.996.120 | 879.023.910.992 | 666.992.321.240 |
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 129.400.000.000 | 152.700.510.202 | 155.799.955.000 | 155.643.543.868 | 178.299.996.000 | 170.983.705.271 | 179.260.000.000 | 179.130.751.751 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 168.000.000.000 | 178.536.448.497 | 175.000.000.000 | 166.049.860.455 | 195.099.995.000 | 151.680.086.700 | 153.750.000.000 | 162.501.031.675 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 115.000.000.000 | 120.697.475.312 | 137.921.829.000 | 144.321.731.196 | 151.699.998.000 | 160.642.187.661 | 164.000.000.000 | 127.362.054.754 |
| Pajak Air Permukaan | 1.550.000.000 | 1.742.857.130 | 1.756.553.000 | 2.199.222.516 | 2.000.000.000 | 2.314.934.370 | 141.350.366.014 | 982.165.357 |
| Pajak Rokok | - | - | 122.342.000.000 | 97.848.256.639 | 132.342.000.000 | 147.771.082.118 | 240.663.544.978 | 197.016.317.703 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 17.639.200.000 | 24.524.171.734 | 53.864.937.000 | 57.091.738.976 | 59.670.440.000 | 49.085.468.698 | 83.188.222.780 | 57.649.876.374 |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | - | 20.392.360.934 | 50.714.398.000 | 387.138.000 | 55.519.000.000 | 44.840.615.133 | 78.328.374.100 | 53.352.724.383 |
| Retribusi Jasa Umum | 14.564.075.000 | 402.584.200 | 2.987.611.000 | 4.123.201.265 | 3.760.940.000 | 3.681.424.645 | 3.586.937.380 | 2.847.390.791 |
| Retribusi Jasa Usaha | 2.975.125.000 | 3.573.806.600 | 182.928.000 | 115.260.000 | 390.500.000 | 562.928.920 | 1.175.484.800 | 1.258.102.690 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | 100.000.000 | 155.420.000 | - | 52.466.139.711 | - | 500.000 | 97.426.500 | 191.658.500 |
| Pendapatan Hsl Pengin Kekayaan Drh yang Dipisahkan | 25.492.803.000 | 25.792.803.380 | 32.916.934.000 | 32.942.178.218 | 15.898.578.172 | 15.932.454.293 | 52.810.182.602 | 53.758.803.378 |
| Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD | 25.492.803.000 | 25.792.803.380 | 32.916.934.000 | 32.916.935.678 | 15.898.578.172 | 15.923.578.172 | 52.810.182.602 | 52.810.182.602 |
| Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN | - | - | - | 25.242.540 | - | 8.876.121 | - | 948.620.776 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 54.952.306.000 | 129.732.050.036 | 247.651.443.000 | 288.833.159.973 | 147.288.183.283 | 214.498.383.148 | 146.399.215.226 | 192.377.659.415 |
| Penerimaan Jasa Giro | 16.867.958.000 | 26.476.204.756 | 16.867.958.000 | 15.200.824.111 | 7.319.344.464 | 13.829.703.744 | 16.508.603.861 | 17.900.130.046 |
| Pendapatan Bunga | - | 32.121.405.874 | 35.000.000.000 | 125.492.647.948 | 75.000.000.000 | 104.388.686.948 | 88.462.235.046 | 88.903.930.951 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 2.576.256.000 | 12.538.701.186 | 45.772.663.000 | 16.732.811.643 | 13.857.980.319 | 21.606.013.271 | 7.513.806.707 | 19.689.465.221 |
| Pendapt Denda atas Keterlambtn Pelaksn Pekerjaan | 25.000.000 | 2.084.416.250 | - | 811.912.474 | - | 110.194.516 | 383.495.286 | 2.500.910.014 |
| Pendapatan Denda Pajak | - | - | - | - | 13.155.182.900 | 17.912.557.835 | 15.600.000.000 | 22.709.796.537 |
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | - | - | - | 1.276.582.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 12.172.500.126 | 12.172.500.126 |
| Pendapatan dari Pengembalian | - | - | - | - | 85.403.000 | 4.872.186.358 | - | 963.442.305 |

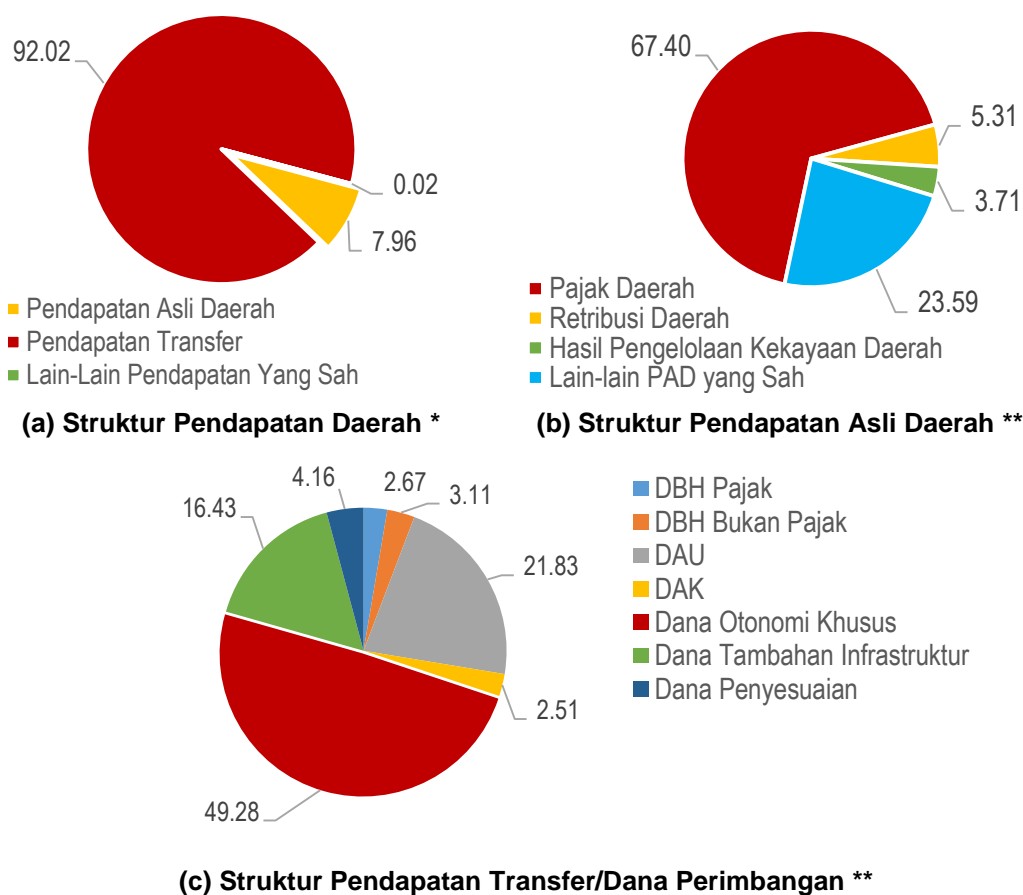
| URAIAN | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan | 2.217.204.000 | 2.940.189.410 | 3.250.000.000 | 3.423.655.919 | 1.506.910.000 | 1.587.081.071 | 503.476.570 | 622.282.252 |
| Pendapatan Tailing PT. Freeport Indonesia | 28.800.000.000 | 35.168.000.000 | 28.800.000.000 | 36.498.000.000 | 28.800.000.000 | 41.088.000.000 | - | 39.912.000.000 |
| Pendapatan dari PT. Jasa Raharja | 365.888.000 | 452.950.000 | 365.888.000 | 40.434.000 | - | 482.500 | - | 590.000 |
| Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 4.100.000.000 | 17.952.182.560 | 117.594.934.000 | 89.356.291.878 | 7.388.362.600 | 8.918.526.905 | 5.255.097.630 | 7.012.611.963 |
| Pendapatan Transfer | 7.770.943.078.000 | 7.762.362.015.954 | 9.875.207.523.000 | 9.764.443.636.886 | 11.104.806.618.000 | 10.892.310.449.860 | 11.897.058.566.115 | 11.542.875.532.914 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 2.506.984.178.000 | 2.511.020.685.954 | 2.753.096.563.000 | 2.643.812.966.686 | 3.457.230.338.000 | 3.256.235.609.860 | 3.949.272.107.115 | 3.595.089.073.914 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 314.280.922.000 | 308.441.262.944 | 313.663.374.000 | 244.216.931.033 | 288.079.783.000 | 196.894.224.513 | 310.889.327.711 | 277.042.211.807 |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam | 169.538.166.000 | 179.414.333.010 | 327.725.208.000 | 287.888.084.553 | 430.914.337.000 | 321.105.167.347 | 610.502.140.404 | 487.428.302.107 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.889.267.850.000 | 1.889.267.850.000 | 1.991.202.341.000 | 1.991.202.341.100 | 2.277.932.698.000 | 2.277.932.698.000 | 2.502.449.137.000 | 2.502.449.137.000 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 133.897.240.000 | 133.897.240.000 | 120.505.640.000 | 120.505.640.000 | 460.303.520.000 | 460.303.520.000 | 525.431.502.000 | 328.169.423.000 |
| Pendapatan Transfer Lainnya | 5.263.958.900.000 | 5.251.341.330.000 | 7.122.110.960.000 | 7.120.630.640.000 | 7.647.576.280.000 | 7.636.074.840.000 | 7.947.786.459.000 | 7.947.786.459.000 |
| Dana Otonomi Khusus | 4.355.950.048.000 | 4.355.950.048.000 | 4.777.070.560.000 | 4.777.070.560.000 | 4.940.429.880.000 | 4.940.429.880.000 | 5.395.051.859.000 | 5.395.051.859.000 |
| Dana Tambahan Infrastruktur | 571.428.572.000 | 571.428.572.000 | 2.000.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | 2.250.000.000.000 | 2.250.000.000.000 | 1.987.500.000.000 | 1.987.500.000.000 |
| Dana Penyesuaian/BOS | 336.580.280.000 | 323.962.710.000 | 345.040.400.000 | 343.560.080.000 | 457.146.400.000 | 445.644.980.000 | 560.234.600.000 | 560.234.600.000 |
| Dana Insentif Daerah | - | - | - | - | - | - | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 15.261.860.000 | 1.070.000.000 | - | 445.621.000 | 490.000.000 | 548.591.000 | 7.500.000.000 | 5.312.959.622 |
| Pendapatan Hibah | 15.261.860.000 | 1.070.000.000 | - | 445.621.000 | 490.000.000 | 548.591.000 | 7.500.000.000 | 5.312.959.622 |
| Pendapatan Dana Danurat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber : LKPJ 2013-2016 (Bappeda Papua)

Keterangan :

1. Data Anggaran bersumber dari Perda APBD
2. Data Realisasi bersumber dari realisasi *unaudited*

Gambar 3.10.
Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Rata-Rata Selama Tahun 2013-2016
(dalam %)



Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2016 (data diolah)

Keterangan :

* Dirasiokan dengan total pendapatan daerah

** Dirasiokan dengan masing-masing total komponen pendapatan daerah

Meskipun kontribusinya masih jauh dibawah pendapatan transfer, akan tetapi kinerja pencapaian PAD terlihat lebih baik dalam komposisi pendapatan daerah Provinsi Papua. Dapat dikatakan setiap tahunnya rasio pencapaian target PAD selalu diatas 100%, dengan rata-ratanya sekitar 103,18% per tahun. Sehingga perkembangan PAD di Provinsi Papua selama ini cenderung lebih efektif dibandingkan komponen pendapatan daerah lainnya. Perhatikan Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.9.
Kinerja Pencapaian Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013-2016
(dalam %)

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata ² |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| PENDAPATAN DAERAH | 101.19 | 99.14 | 98.48 | 95.81 | 98.66 |
| Pendapatan Asli Daerah | 123.77 | 101.91 | 103.47 | 83.59 | 103.18 |
| Pajak Daerah | 109.60 | 95.49 | 96.05 | 75.88 | 94.25 |

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata ² |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| Retribusi Daerah | 139.03 | 105.99 | 82.26 | 69.30 | 99.15 |
| Hasil Pengln Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 101.18 | 100.08 | 100.21 | 101.80 | 100.82 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 236.08 | 116.63 | 145.63 | 131.41 | 157.44 |
| Pendapatan Transfer | 99.89 | 98.88 | 98.09 | 97.02 | 98.47 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 98.14 | 77.86 | 68.35 | 89.11 | 83.37 |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA | 105.83 | 87.84 | 74.52 | 79.84 | 87.01 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 62.46 | 90.61 |
| Dana Otonomi Khusus | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dana Tambahan Infrastruktur | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 7.01 | - | 111.96 | 70.84 | 63.27 |

Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2016 (data diolah)

Keterangan : * Kinerja Pencapaian merupakan rasio antara realisasi dengan target

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya, menyebabkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dalam komponen Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan. Hal ini disebabkan adanya perubahan peralihan pada beberapa urusan pembangunan ke pemerintahan daerah.

Urusan yang mengalami perubahan antara lain Urusan Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan pada DAK terdapat penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru, dana tersebut berasal dari pusat ditempatkan pada posting DAK non Fisik. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan. Dengan tetap mengandalkan PKB sebagai sumber utama penerimaan daerah, maka setiap daerah harus segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (*limitative*).

Berdasarkan berbagai kondisi faktual perekonomian wilayah Papua dan dinamika urusan pembangunan, serta asumsi-asumsi di atas, maka target

pendapatan daerah Provinsi Papua pada kurun waktu Tahun 2018, serta proyeksi pendapatan di Tahun 2019, disajikan pada Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel. 3.10.
Target Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2018 - 2019
(dalam Rp.)

| No | URAIAN | Target | Proyeksi |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1 | PENDAPATAN | 13.548.512.203.846 | 13.827.134.836.000 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 1.008.758.234.846 | 1.035.985.499.000 |
| 1.1.1 | Pendapat Pajak Daerah | 760.896.235.000 | 781.480.659.000 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 118.797.242.530 | 120.247.933.000 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 53.580.182.602 | 54.321.172.000 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 75.484.574.714 | 79.935.735.000 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 4.553.501.562.000 | 4.611.537.250.000 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 761.257.300.000 | 774.594.392.000 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 2.570.118.273.000 | 2.600.164.905.000 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 1.222.125.989.000 | 1.236.777.953.000 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus (Fisik) | - | - |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 7.986.252.407.000 | 8.179.612.087.000 |
| 1.3.1 | Dana Hibah | 6.100.000.000 | 500.000.000 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian/Dana BOS | - | - |
| 1.3.5 | Dana Otonomi Khusus | 5.580.152.407.000 | 5.779.112.087.000 |
| 1.3.7 | Dana Tambahan Infrastruktur | 2.400.000.000.000 | 2.400.000.000.000 |
| 1.3.7 | Dana Insentif Daerah | - | - |

Sumber : BPKAD Provinsi Papua dan BAPPENDA Provinsi Papua (data proyeksi)

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih diproyeksikan dengan proporsi rata-rata masih dibawah 10% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-Lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang,

proporsi DAU dan Dana Otsus secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana pendapatan daerah (target dan proyeksi), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.
 - e. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - f. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antar lain : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;

- g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - h. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/ kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui :
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana PAD dan Transfer

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak

Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Penyusunan anggaran belanja tahun 2019 berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip pengelolaan belanja daerah dari *money follow function* diubah menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2019.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Papua dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Tabel 3.11.
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua
 Tahun 2013 - 2016**
 (dalam Rp.)

| URAIAN | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| BELANJA DAERAH | 5.343.048.524.000 | 4.590.110.853.092 | 6.626.989.749.166 | 5.460.756.791.566 | 8.127.791.894.922 | 7.275.918.304.885 | 8.447.130.395.141 | 7.396.201.733.457 |
| Belanja Operasi | 3.787.491.818.000 | 3.356.809.228.739 | 4.327.147.511.296 | 3.759.858.653.953 | 4.936.059.343.400 | 4.399.478.873.552 | 5.503.586.860.608 | 4.905.818.907.312 |
| Belanja Pegawai | 928.838.763.000 | 833.439.639.685 | 1.116.921.744.360 | 940.659.446.469 | 1.006.628.803.230 | 919.022.324.033 | 1.082.738.604.122 | 986.866.116.876 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.898.047.082.000 | 1.694.118.393.186 | 2.189.513.649.315 | 1.998.521.177.884 | 2.944.379.263.498 | 2.550.797.479.555 | 3.099.442.058.884 | 2.695.574.435.336 |
| Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subsidi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hibah | 685.960.406.000 | 651.084.026.068 | 863.484.845.706 | 732.224.237.800 | 885.016.965.650 | 835.350.289.000 | 1.167.661.004.476 | 1.077.606.950.000 |
| Bantuan Sosial | 274.645.567.000 | 178.167.169.800 | 157.227.271.915 | 88.453.791.800 | 100.034.311.022 | 94.308.760.964 | 153.745.193.126 | 145.771.405.100 |
| Belanja Modal | 1.525.556.706.000 | 1.220.744.851.353 | 2.270.137.537.870 | 1.689.302.792.613 | 3.168.732.551.522 | 2.865.461.762.743 | 2.938.027.534.533 | 2.490.333.441.810 |
| Belanja Tanah | 45.547.679.000 | 28.541.350.000 | 15.586.030.000 | 12.328.862.000 | 91.706.775.000 | 36.806.344.040 | 93.536.850.000 | 39.463.965.000 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 236.183.322.600 | 184.842.082.253 | 190.780.555.530 | 169.940.282.777 | 251.646.089.392 | 205.623.332.233 | 214.290.432.949 | 169.078.497.741 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 354.975.023.900 | 259.183.175.450 | 348.233.149.650 | 237.638.944.963 | 620.224.844.780 | 515.826.977.655 | 641.028.299.670 | 551.902.440.949 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 847.665.019.500 | 718.444.194.015 | 1.639.158.550.000 | 1.208.493.483.673 | 2.192.090.100.350 | 2.094.585.903.985 | 1.987.304.026.914 | 1.728.269.145.480 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 41.185.661.000 | 29.724.049.635 | 76.379.252.680 | 60.901.219.200 | 13.064.742.000 | 12.619.204.830 | 1.867.925.000 | 1.619.392.640 |
| Belanja Aset Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Tak Terduga | 30.000.000.000 | 12.556.773.000 | 29.704.700.000 | 11.595.345.000 | 23.000.000.000 | 10.977.668.590 | 5.516.000.000 | 49.384.335 |
| TRANSFER | 3.598.388.723.000 | 3.581.241.495.385 | 4.893.674.328.834 | 4.843.030.054.815 | 5.140.669.461.782 | 5.120.528.931.379 | 5.154.034.367.678 | 4.572.213.885.371 |
| Transfer/Bagi Hasil Pendpt Ke Kab/Kota | 233.162.194.000 | 232.800.664.735 | 280.831.451.934 | 280.781.136.077 | 297.467.196.982 | 290.677.196.982 | 362.829.186.142 | 313.261.779.818 |
| Transfer Bantuan Keuangan | 3.365.226.529.000 | 3.348.440.830.650 | 4.612.842.876.900 | 4.562.248.918.738 | 4.843.201.264.800 | 4.829.851.734.397 | 4.791.205.181.536 | 4.258.952.105.553 |
| BELANJA DAN TRANSFER | 8.941.437.247.000 | 8.171.352.348.477 | 11.520.664.078.000 | 10.303.786.846.381 | 13.268.460.356.704 | 12.396.447.236.264 | 13.601.164.762.819 | 11.968.415.618.828 |

Sumber : LKPJ 2013-2016 (Bappeda Papua)

Keterangan :

1. Data Anggaran bersumber dari Perda APBD
2. Data Realisasi bersumber dari realisasi *unaudited*

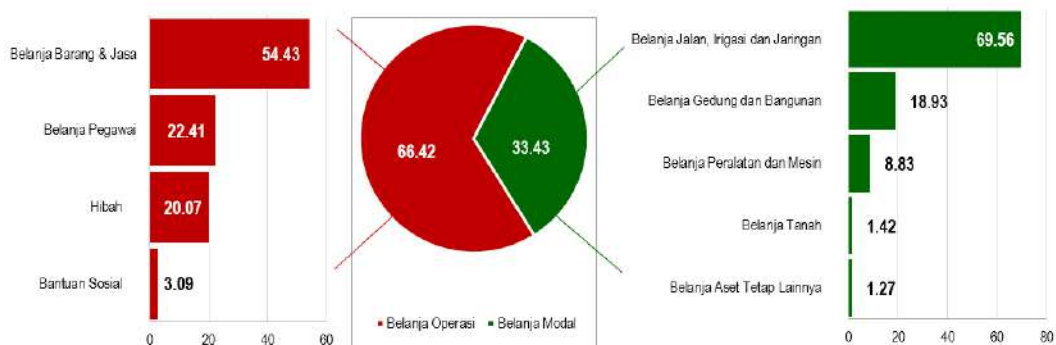
Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Provinsi Papua menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Terlihat dalam Tabel 3.11 di atas realisasi belanja daerah selama tahun 2013- 2016 meningkat cepat dengan rata-rata 17,95% per tahun. Dimana komponen belanja yang memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan belanja daerah selama ini adalah belanja modal yang tumbuh sekitar 31,64% per tahun. Adapun belanja operasi yang mencakup antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi dan bantuan sosial, rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 13,51% per tahun.

Struktur belanja daerah di Provinsi Papua masih dominan pada belanja operasi, kurang lebih proporsinya 66,42% dari total belanja. Sementara proporsi belanja modal sebesar 33,43%, dan hanya 0,14% untuk belanja tak terduga. Porsi belanja terbesar pada belanja operasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan barang dan jasa yaitu sekitar 54,43% per tahun.

Setelah itu untuk pengeluaran belanja pegawai dan hibah, masing-masing sebanyak 22,41% dan 20,07% per tahun. Adapun di belanja modal, yang terbesar porsinya adalah untuk belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringannya yang bisa mencapai 69,59% per tahun. Selengkapnya hal ini dapat lihat pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11.
Struktur Belanja Daerah Provinsi Papua
Rata-Rata Selama Tahun 2013-2016
(dalam %)



Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2016 (data diolah)

Keterangan :

- * Porsi belanja operasi dan modal dirasiokan dengan total belanja daerah
- ** Struktur belanja operasi dirasiokan dengan total belanja operasi
- *** Struktur belanja modal dirasiokan dengan total belanja modal

Daya serap belanja di Provinsi Papua meskipun masih di bawah 100% akan tetapi cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan diantara tahun 2013 - 2016, terutama di tahun 2015 sempat meningkat tajam hingga mencapai 89,52%. Rata-rata daya serap belanja daerah di Provinsi Papua selama periode tersebut adalah 86,35% per tahun, dimana yang paling tinggi adalah daya serap pada belanja transfer yakni 96,70% per tahun.

Tabel 3.12.
Daya Serap Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013-2016
(dalam %)

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata ² |
|--|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| BELANJA DAERAH | 85.91 | 82.40 | 89.52 | 87.56 | 86.35 |
| Belanja Operasi | 88.63 | 86.89 | 89.13 | 89.14 | 88.45 |
| Belanja Pegawai | 89.73 | 84.22 | 91.30 | 91.15 | 89.10 |
| Belanja Barang dan Jasa | 89.26 | 91.28 | 86.63 | 86.97 | 88.53 |
| Hibah | 94.92 | 84.80 | 94.39 | 92.29 | 91.60 |
| Bantuan Sosial | 64.87 | 56.26 | 94.28 | 94.81 | 77.56 |
| Belanja Modal | 80.02 | 74.41 | 90.43 | 84.76 | 82.41 |
| Belanja Tanah | 62.66 | 79.10 | 40.13 | 42.19 | 56.02 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 78.26 | 89.08 | 81.71 | 78.90 | 81.99 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 73.02 | 68.24 | 83.17 | 86.10 | 77.63 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 84.76 | 73.73 | 95.55 | 86.97 | 85.25 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 72.17 | 79.74 | 96.59 | 86.69 | 83.80 |
| Belanja Tak Terduga | 41.86 | 39.04 | 47.73 | 0.90 | 32.38 |
| TRANSFER | 99.52 | 98.97 | 99.61 | 88.71 | 96.70 |
| Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota | 99.84 | 99.98 | 97.72 | 86.34 | 95.97 |
| Transfer Bantuan Keuangan | 99.50 | 98.90 | 99.72 | 88.89 | 96.75 |
| BELANJA DAN TRANSFER | 91.39 | 89.44 | 93.43 | 88.00 | 90.56 |

Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2016 (data diolah)

Daya serap belanja untuk tanah terlihat paling rendah dalam komposisi belanja modal, hanya sekitar 56,02% per tahun. Polemik yang terjadi dalam sengketa tanah seringkali menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan belanja modal untuk tanah, sehingga daya serapnya sangat rendah. Salah satu faktor dominan yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi adalah minimnya kepemilikan sertifikat tanah pada masyarakat, baik itu personal maupun kelompok (tanah adat). Hal ini sudah menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua selama ini. Namun karena belum optimalnya

program-program sertifikasi tanah yang dijalankan mengakibatkan permasalahan ini masih berlarut-larut hingga saat ini.

Rendahnya daya serap belanja daerah, karena masih jauh di bawah 100%, mengindikasikan dua hal penting. **Pertama**, produktivitas anggaran sangat rendah. Anggaran yang tidak terserap seluruhnya selama satu tahun anggaran, mengindikasikan SKPD kurang produktif dalam mengelola dana belanjanya, padahal dalam penyusunan APBD didasarkan atas kinerja, maknanya harus ada korelasi antara belanja atau pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan. Sehingga, jika daya serap anggarannya rendah, otomatis kinerja SKPD juga rendah. **Kedua**, pengelolaan anggaran tidak efisien dan efektif. Dalam konteks penganggaran, efisien dan efektif itu berkaitan dengan penghematan dana (input) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, seyogyanya bisa menghasilkan output yang tinggi. Namun, daya serap belanja yang rendah menjadi paradoks karena dampaknya justru bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan nasional.

Berdasarkan fakta kecenderungan daya serap belanja selama ini, serta pertumbuhan belanja daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat, selanjutnya pada tahun 2018 diperkirakan belanja tidak langsung mengalami kenaikan dikarenakan pada tahun tersebut ada kenaikan pada Belanja Pegawai sebagai konsekuensi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu beralihnya gaji dan tunjangan tenaga kependidikan SMA/SMK seiring dengan beralihnya pengelolaan sekolah menengah dari urusan Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, sehingga besaran belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka dari hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, serta realisasi dan proyeksi pendapatan daerah 2 (dua) tahun kedepan, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel. 3.13.
Target Dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun 2018 - 2019
(dalam Rp.)

| No | URAIAN | Target 2018 | Proyeksi 2019 |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | BELANJA | 14.091.772.203.846 | 14.288.234.821.000 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 8.919.643.442.591 | 8.974.573.049.000 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.509.657.405.744 | 1.543.054.478.000 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 2.195.798.233.373 | 2.208.430.358.000 |

| No | URAIAN | Target 2018 | Proyeksi 2019 |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 184.977.208.904 | 184.811.342.000 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota | 387.434.296.504 | 396.500.573.000 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kampung dan Partai Politik | 4.627.776.298.066 | 4.627.776.298.000 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 5.172.128.761.255 | 5.313.661.772.000 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 215.627.403.815 | 216.331.766.000 |
| 1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.524.178.452.397 | 2.585.587.295.000 |
| 1.2.3 | Belanja Modal | 2.432.322.905.043 | 2.511.742.711.000 |

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (data diolah)

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi Papua untuk pembangunan tahap III (2017 – 2022). Untuk itu kebijakan belanja daerah Tahun 2019 secara umum diupayakan dengan pengaturan pola dan prinsip-prinsip yaitu :

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;
2. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Tolok ukur dan target kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Optimalisasi belanja langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

5. Transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Adapun arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2019 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2015–2019 dan RKP 2019;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Dukungan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020;
9. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
10. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;
11. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 5 bahwa Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah : (a) dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) dana alokasi umum nasional, dan (b) dana tambahan infrastruktur.

Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 di atas akan dikelola dengan melibatkan pemerintah

kabupaten/kota, melalui pembagian 20% untuk pemerintah provinsi, dan 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, setelah dari total penerimaan dana Otonomi Khusus dikeluarkan untuk pembiayaan program strategis lintas kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah diarahkan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di atur dengan terlebih dahulu dikurangi kebutuhan dana untuk program strategis lintas Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2013-2016, program strategis lintas kabupaten/kota yang diamanatkan oleh Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tersebut telah diterjemahkan kedalam program-program strategis Otonomi Khusus yang lazim dikatakan Urusan Bersama (Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota) yang mencakup kebijakan-kebijakan afirmatif yang strategis bagi Orang Asli Papua yaitu Prospek, KPS (Kartu Papua Sehat), Gerbangmas Hasrat Papua, Perumahan Rakyat dan Pendidikan. Serta Bangun Generasi Keluarga Papua (Bangga Papua) yang dimulai pada tahun 2018. Oleh karena itu berdasarkan realisasi penerimaan dana otsus tahun 2017, dan target di tahun 2018, serta merujuk kepada pembagian dana Otonomi Khusus untuk kabupaten/kota yang telah dilakukan selama ini, maka alokasi belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus untuk tahun 2019 selengkapnya dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 3.14.
Proyeksi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus
Provinsi Papua Tahun 2019
(dalam Rp.)

| Uraian | Target 2018 | Proyeksi 2019 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Dana Otsus | 5.580.152.407.000 | 5.779.112.087.000 |
| B. Urusan Bersama | 1.577.872.950.000 | 1.772.872.950.000 |
| 1. Prospek | 565.596.975.000 | 565.596.975.000 |
| 2. KPS | 312.275.975.000 | 312.275.975.000 |
| 3. Gerbangmas | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 |
| 4. Perumahan Rakyat | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| 5. Pendidikan | 350.000.000.000 | 350.000.000.000 |
| 6. Bangga Papua | | 195.000.000.000 |
| C. Bagian Yang Di Bagi (A - B) | 4.002.279.457.000 | 4.006.239.137.000 |
| 1. Porsi Provinsi (20%) | 800.455.891.400 | 801.247.827.400 |
| 2. Porsi Kab/Kota (80%) | 3.201.823.565.600 | 3.204.991.309.600 |

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (data diolah)

Menurut ketentuan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 bahwa pembiayaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya

manusia yang bersumber pada Dana Otonomi Khusus dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul Papua. Sedangkan pembiayaan program perumahan rakyat dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus perumahan layak huni bagi orang asli Papua.

Untuk pengelolaan belanja Dana Otsus yang merupakan pembagian 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, dan 20% untuk pemerintah provinsi telah diarahkan alokasi belanjanya sebagai berikut :

- a. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
- b. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
- c. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
- d. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
- e. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
- f. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan

- g. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

Menurut Perdatus Nomor 13 Tahun 2016, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah diarahkan di atas akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dimana penundaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada target dan proyeksi pengelolaan belanja yang bersumber pada dana Otonomi Khusus di atas, serta kebutuhan belanja dalam rangka mengimplementasi amanat Perdatus Nomor 13 Tahun 2016, berikut ini disampaikan target dan proyeksi alokasi belanja dana Otonomi Khusus pada setiap pemerintah kabupaten/kota untuk tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel. 3.15.
Proyeksi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk Kabupaten/Kota
Di Provinsi Papua Tahun 2018
(dalam Rp.)

| Kabupaten/Kota | Target 2018 | Proyeksi 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Total Dana Otsus Ke Kabupaten/Kota | 3.201.823.565.600 | 3.204.991.309.600 |
| Kabupaten Jayapura | 107.361.086.703 | 107.467.305.060 |
| Kabupaten Kep. Yapen | 98.108.086.673 | 98.205.150.517 |
| Kabupaten Biak Numfor | 103.754.420.892 | 103.857.070.971 |
| Kabupaten Nabire | 104.671.800.078 | 104.775.357.772 |
| Kabupaten Merauke | 106.251.552.818 | 106.356.673.450 |
| Kabupaten Jayawijaya | 121.307.887.031 | 121.427.903.741 |
| Kabupaten Paniai | 119.773.556.531 | 119.892.055.241 |
| Kabupaten Puncak Jaya | 133.247.591.694 | 133.379.421.025 |
| Kabupaten Mimika | 104.637.490.809 | 104.741.014.560 |
| Kota Jayapura | 99.039.397.712 | 99.137.382.954 |
| Kabupaten Asmat | 109.539.916.040 | 109.648.290.035 |
| Kabupaten Boven Digoel | 104.119.620.578 | 104.222.631.970 |
| Kabupaten Mappi | 107.886.904.116 | 107.993.642.694 |
| Kabupaten Sarmi | 102.483.392.096 | 102.584.784.676 |
| Kabupaten Keerom | 98.360.414.170 | 98.457.727.655 |

| Kabupaten/Kota | Target 2018 | Proyeksi 2019 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Kabupaten Tolikara | 125.561.480.039 | 125.685.705.068 |
| Kabupaten Pegunungan Bintang | 118.651.661.794 | 118.769.050.551 |
| Kabupaten Yahukimo | 114.730.889.006 | 114.844.398.723 |
| Kabupaten Waropen | 104.484.524.897 | 104.587.897.309 |
| Kabupaten Supiori | 89.668.094.885 | 89.756.808.570 |
| Kabupaten Mamberamo Raya | 104.272.344.646 | 104.375.507.137 |
| Kabupaten Nduga | 110.477.898.628 | 110.587.200.622 |
| Kabupaten Lanny Jaya | 131.346.096.022 | 131.476.044.096 |
| Kabupaten Mamberamo Tengah | 111.703.161.248 | 111.813.675.463 |
| Kabupaten Yalimo | 110.220.464.635 | 110.329.511.936 |
| Kabupaten Puncak | 124.487.374.451 | 124.610.536.807 |
| Kabupaten Dogiyai | 113.119.353.484 | 113.231.268.818 |
| Kabupaten Intan Jaya | 114.520.530.522 | 114.633.832.119 |
| Kabupaten Deiyai | 108.036.573.405 | 108.143.460.059 |

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (data diolah)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 belum merencanakan SiLPA. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Papua diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup

defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Oleh karena itu, dengan menggunakan asumsi bahwa pada tahun 2018 belum memperkirakan SiLPA, serta dari analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir, maka proyeksi tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.16.
Target Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2018 dan 2019
(dalam Rp.)

| No | URAIAN | Target | Proyeksi |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| | SURPLUS / DEFISIT | -543.260.000.000 | -461.099.985.000 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 593.760.000.000 | 511.599.985.000 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 593.760.000.000 | 511.599.985.000 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - |
| 3.1.3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | - | - |
| 3.1.4 | Penerimaan pinjaman daerah | - | - |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - | - |
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | - | - |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 50.500.000.000 | 50.500.000.000 |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah | 50.500.000.000 | 50.500.000.000 |
| 3.2.3 | Pembayaran pokok utang | | |
| 3.2.4 | Pemberian pinjaman daerah | | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 543.260.000.000 | 461.099.985.000 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN | - | - |

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (data diolah)

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan ketentuan besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur pembiayaan seperti mengatur defisit anggaran dan pinjaman daerah (*sub national deficit, borrowing and debt*) dan mengatur surplus anggaran dan penyertaan modal (*investment*).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2019 dirumuskan dalam rangka kesinambungan dan konsistensi dokumen Perencanaan dalam periode transisi. Oleh sebab itu, rujukan utama dalam RKPD 2019 ialah RPJP Provinsi Papua, selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional di Tahun 2019. Terkait dengan hal itu semua, substansi dokumen RKPD tahun 2019 disusun dengan berlandaskan dan memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) Arah Kebijakan Pemerintah Indonesia yang dijabarkan dalam dokumen Jangka Panjang Nasional, (2) Arah kebijakan RPJP Provinsi Papua Tahun 2005-2025, dan (3) Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua pada penyusunan RKPD Tahun 2019.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2019. Selain itu prioritas pembangunan daerah tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2019. Dan terakhir, penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 ini diarahkan untuk menjamin adanya keselarasan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025.

4.1. Rumusan Dan Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua

Salah satu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ialah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Konsep kemitraan antara DPRP dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tercermin dari partisipasi dewan dalam memberikan arahan prioritas daerah berdasarkan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat yang diperoleh dalam setiap agenda DPRP Provinsi Papua. Sejalan dengan itu, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua sedang menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan RKPD Tahun 2019, dalam kerangka menguatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tersebut, maka DPRP memiliki tanggung jawab dalam memberikan arahan dan masukan dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran Dewan, yang nantinya akan disinkronkan dan disinerjikan oleh Pemerintah

Daerah dalam teknis Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2019. Sehingga menjadi sebuah prinsip bahwa Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua menjadi bahan masukan yang sangat penting didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2019 dengan Tema “Pemantapan Kualitas Hidup Untuk Kemandirian Daerah”. Adapun rumusan dan telaah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, sebagaimana yang telah di input oleh masing-masing Komisi DPRD dalam aplikasi e-planning sebagai berikut.

4.1.1. Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua

4.1.1.1. Urusan Pemerintahan Umum, Hukum, Politik, Pertahanan dan Keamanan

- (1) Upaya untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di seluruh tanah Papua perlu ditingkatkan.
- (2) Sengketa pemilukada di beberapa kabupaten yang belum tuntas hendaknya diselesaikan dengan mengikutsertakan semua stakeholder.
- (3) Konflik tapal batas yang terjadi di beberapa daerah, Komisi I memandang perlu untuk diselesaikan secara bijaksana tanpa menimbulkan masalah baru dikemudian hari.
- (4) Kepemilikan ganda atas tanah, yang diklaim oleh masyarakat sebagai hak ulayat, perlu diatur dalam regulasi hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum positif.
- (5) Rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) maupun TNI/POLRI, hendaknya memperhatikan Putra/Putri Asli Papua dengan porsi 80% dan Non OAP sebesar 20%.
- (6) Permasalahan Hak Asasi manusia (HAM) yang terjadi selama ini terkesan berjalan di tempat. Komisi I memandang perlu untuk diselesaikan secara bijaksana oleh Pemerintah Daerah serta Lembaga terkait termasuk TNI/POLRI.
- (7) Permasalahan yang terkait dengan konflik di DPRD Mimika telah berlangsung lebih dari dua tahun. Belum terlihat tanda-tanda penyelesaian, Komisi I mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menyelesaikan secara baik.

4.1.1.2. Urusan Otonomi Khusus

- (1) Perlu ditata manajemen keuangan bagi para siswa dan mahasiswa Papua yang kuliah di luar Papua dan di luar negeri agar tidak menghambat proses belajar mengajar.

- (2) Perlu dicari system yang lebih efisien agar khusus bahasa inggris dilakukan di provinsi papua dan setelah lulus yang bersangkutan boleh melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
- (3) Bagi mereka yang kuliah diluar papua dan di luar negeri sebaiknya diwakili oleh 5 wilayah adat.

4.1.1.3. Urusan Pendidikan

- (1) Masih banyak status guru yang belum terdaftar dalam proses pelimpahan pada Dinas Pendidikan Provinsi papua, baik guru SMA dan SMK.
- (2) Masih banyak terdapat sekolah-sekolah yang tidak jelas pendiriannya yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan yang status pendiriannya belum diakui pemerintah.
- (3) Belum menentukan pengambilan gaji bagi guru SMA/SMK pada bank yang belum di tunjuk oleh pemerintah daerah provinsi papua dalam hal ini Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Provinsi papua.
- (4) Masih banyak terdapat SMA/ SMK baik negeri maupun swasta yang belum mampu melaksanakan ujian nasional/UNBK hingga sampai saat ini sehingga siswa kelas III dititipkan pada SMK/SMA yang telah diakui Pemerintah I Terakreditasi.
- (5) kurang kontrolnya dinas pendidikan dan pengajaran provinsi papua sehingga masih banyak SMA /SMK tidak memiliki sarana prasarana dan infrastruktur sesuai standar normative yang ditentukan oleh pemerintah.
- (6) masih banyak kepala sekolah yang belum memiliki sertifikasi guru, sehingga tidak mampu melaksanakan manajemen pendidikan di SMA dan SMK.
- (7) Masih terdapat guru - guru yang belum mengikuti sertifikasi bidang studi sesuai dengan kompetensinya.
- (8) Masih terjadi perbedaan yang tinggi antara kualitas pendidikan pada sekolah - sekolah di ibu kota kabupaten dan sekolah - sekolah yang berada di kampung - kampung. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di provinsi papua.

4.1.1.4. Urusan Kesehatan

- (1) Persoalan kesehatan di provinsi papua terutama di era otonomi khusus akan terjadi integrasi antara kartu Papua (KPS) dan badan penyelenggaraan jaminan Kesehatan (BPJS)
- (2) Hal ini sangat berkaitan erat dengan dinas kependudukan dan dinas social untuk mendata seluruh pendudukan papua untuk dilayani BPJS.

Walaupun KPS diintegrasikan ke BPJS tetapi harapan komisi V apa yang dilakukan KPS selama ini tetap dipertahankan. Kondisi manajemen rumah sakit dok 2 segera ditinjau kembali. Hal ini dipertanyakan komisi V karena manajemen rumah sakit dok 2 terkesan buruk alat-alat kesehatan tidak berfungsi dengan baik untuk melayani masyarakat dengan fasilitas yang ada banyak sudah rusak

- (3) Masih terdapat banyak tunggakan dana yang terdapat di berbagai rumah sakit baik swasta maupun pemerintah yang belum dilunasi oleh BPJS.
- (4) Masih banyak terdapat puskesmas di daerah-daerah terpencil tidak memiliki alat kesehatan dan dokter-dokter yang menangani masalah kesehatan di daerah.
- (5) Banyak rumah sakit di Kabupaten/kota yang tidak memiliki dokter spesialis serta alat kesehatan yang memadai. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya rujukan ke rumah dok 2 Jayapura. Hal lain juga perlu disampaikan kepada pemerintah provinsi Papua Barat untuk mendirikan rumah sakit jiwa sehingga tidak menyerap pasien dari pemerintah provinsi Papua.

4.1.1.5. Urusan Sosial

- (1) Dana 10% bagi bantuan keagamaan sebagai perpuhuan kepada sinode dan keuskupan komisi V lima meminta dalam bentuk hibah uang kepada masing-masing sinode tidak dalam bentuk program kegiatan biro kesra.
- (2) Pembangunan gereja induk dibawah sinode-sinode dan keuskupan dapat dibantu dari OTSUS sampai tuntas.
- (3) Fungsi BPN segera membuat sertifikat hak pakai dan hak guna bangunan kepada semua tempat ibadah.

4.1.1.6. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- (1) Sampai saat ini masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan pada daerah pelosok yang belum terkoneksi dengan baik;
- (2) Belum maksimalnya pemeliharaan bangunan fisik penunjang kegiatan masyarakat;
- (3) Program-program pembangunan infrastruktur yang diusulkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang berorientasi pada jalan, jembatan, bangunan-bangunan kantor pelayanan masyarakat, gedung sekolah, terminal-terminal, bandar

udara, dan dermaga-dermaga penghubung yang nantinya akan menghubungkan daerah satu ke daerah yang lain;

- (4) Pembangunan infrastruktur harus dapat dirasakan juga sampai pada pelosok-pelosok daerah terpencil masyarakat dalam Provinsi Papua.

4.1.1.7. Urusan Pemuda dan Olah Raga

- (1) Realisasi pembangunan fisik menyambut PON XX tahun 2020 ternyata belum nampak.
- (2) Masih banyak venue sesuai dengan cabang olah raga (CABOR) yang belum diselesaikan sampai saat ini.
- (3) Partisipasi Kabupaten yang menyelenggarakan PON masih rendah. Pada hal Tahun 2019 adalah tahun finishing (penyelesaian).
- (4) hal ini merupakan pekerjaan besar, Komisi V sebagai wakil Rakyat untuk mendorong pemerintah daerah dalam hal ini (PB PON) dan KONI Provinsi dapat bekerja extra ketat dalam beberapa sisa bulan 2018 ini.
- (5) Gabor - cabor yang akan di pertandingkan belum diketahui berapa banyak cabor dan dimana tempat pertandingannya/pelombaan.

4.1.1.8. Urusan Ketenagakerjaan

Dalam rangka pengolahan hasil pangan lokal maka diperlukan adanya pelatihan Tenaga Kerja Penghasil Pangan Lokal yang dilakukan dengan Balai Latihan Kerja yaitu pengolahan basil sagu dan ubi scrta kerja kegiatan ini fokuskan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Keplauan Yapen, Kabupaten Nabire dan Kota jayapura

4.1.1.9. Urusan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Dalam mendukung pengembangan bidang pertanian dalam rangka mcndukung suksesnya PON XX maka perlu diberikan dukungan modal bagi mama- mama pengrajin, basil kerajinan tangan dan pengrajin kulit kayu dan juga usaha-usaha kecil di bidang Ekonomi Kreatif. Dukungan modal tersebut diberikan kepada mama-mama di wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Lainnya tempat pelaksanaan PON XX.

4.1.1.10. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Diperlukan Pengembangan Pangan Lokal di masing-rnasing keluarga, Kampung dengan cara tiap kampung diwajibkan membangun, budidaya Lumbung Pangan Lokal minimal 5 hektar. Dalam kaitan itu Pemeritah Provinsi Papua harus dapat menetapkan Sentra Pengembangan Pangan Lokal, sesuai dengan Potensi daerah yang ada (yang sedang dikerjakan dan

yang telah ada secara turun temurun atau pernah dikembangkan pada Zaman Belanda). Selain itu, dalam peningkatan potensi daerah di Provinsi Papua terdapat beberapa

(1) Sistem Pemasaran, Pemasaran hasil pangan local haruslah dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui BUMD atau Koperasi Mitra, yang selama ini serius bekerja untuk membantu Petani dan Pedagang Orang asli Papua ataupun koperasi-koperasi binaan, teknis yang diusul adalah hasil Pangan Lokal atau Komoditi Pertanian Masyarakat Papua dibeli Langsung oleh Pemerintah melalui BUMD atau Koperasi-koperasi. Selanjutnya, hasilnya pengolahan tersebut dijual kepada Toko - Toko modern, Perusahaan di Papua dengan mewajibkan kepada ASN di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten untuk mengambil di BUMD/Koperasi. Hal ini dilakukan agar hasil produksi cepat laku di pasaran dan ada peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk kepastian Usaha, Pemerintah perlu menetapkan harga beli dari masyarakat dan juga harga jual agar BUMD/ Koperasi-koperasi memperoleh keuntungan.

(2) Pengembangan Industri Berdasarkan Komoditas Lokal, Setelah dilakukan Penampungan dari pasar lokal maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah Pengembangan Industri Pangan Lokal di Provinsi Papua antara lain :

- 1. Industri Tepung sagu,** Dalam Rangka Pengembangan Pangan Lokal khususnya sagu maka diperlukan adanya sebuah pabrik pengolahan sagu di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Yapen , untuk pengolahan hasil sagu milik masyarakat adat Papua.
- 2. Industri Tepung dari Ubi Jalar,** Pangan Ubi yang dibudidayakan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan kami mendorong menyelesaikan Industri Tepung dari Ubi di Kabupaten Keerom di Tahun 2019 agar kemudian seluruh hasil pertanian dari masyarakat dapat ditampung & dibeli oleh industri ini dan ada peningkatan pendapatan masyarakat serta hasil dari industri ini dapat digunakan juga untuk kepentingan pelaksanaan PON XX.
- 3. Industri Minyak Buah Merah,** Dalam pengembangan pangan lokal buah merah maka buah merah yang telah ditampung dikembangkan melalui Industri minyak buah merah di Kabupaten Jayawijaya.

4. Industri Kopi, Pengembangan Pangan yang ditanam oleh masyarakat maka perlu pengembangan Industri kopi yang telah dikembangkan sejak zaman Belanda hingga sekarang oleh karena itu perlu dibangun Industri kopi di Papua antara lain :

- a) **Kopi Robusta,** Pengembangan Kopi Robusta difokuskan di Kabupaten Yapen khususnya berlokasi Ambai diru
- b) **Kopi Arabika,** Pengembangan Kopi Arabika difokuskan di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya

(3) Bantuan Modal Usaha

Mendorong pengembangan dan peningkatan hasil produksi kakao di Kabupaten Jayapura dengan cara memberikan dukungan modal usaha bagi petani dan peralatan yang memadai.

4.1.1.11. Urusan Pariwisata

Dalam rangka pengembangan pariwisata maka diperlukan adanya program pembukaan daerah tujuan wisata (DTW). Beberapa tempat yang perlu dikembangkan karena terkait dengan adanya event PON XX di Papua serta adanya Pemilihan Putri Indonesia di Kabupaten Jayapura. Untuk itu diperlukan adanya Sarana pendukung dan adanya pemeliharaan aset pariwisata, hal ini dilakukan dengan kegiatan antara lain:

- (1) Festival Teluk Tanah Merah,** Dalam rangka menuju ke DTW Teluk Tanah Merah dan untuk mendukung event Pemilihan Putri Indonesia maka perlu penyelesaian dan pengaspalan ruas jalan, Jayapura-Depapre.
- (2) Hotel dan Homestay,** Untuk Akomodasi maka perlu dilakukan renovasi Hotel-hotel yang merupakan aset Pemerintah Provinsi dan juga perlu disiapkan dana yang memadai untuk pengembangan homestay di daerah tujuan wisata agar dapat digunakan oleh pengunjung/ wisatawan istimewa pengunjung PON XX. Adapun daerah yang dituju adalah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan tempat lain kabupaten dimana akan dilaksanakan PON XX nanti.
- (3) Taman Budaya di Wacana,** Untuk menciptakan Tempat/ Objek wisata di Kota Jayapura maka harus dibangun atau di renovasi Taman Budaya Papua di kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Hal ini akan mendukung Pelaksanaan PON XX.

4.1.1.12. Urusan Perikanan

Dalam rangka Perlindungan dan pengembangan nelayan Masyarakat Adat Papua, belum dilakukan penetapan zona sepanjang 5 mil dari garis

pantai sebagai Zona mencari dari Nelayan Masyarakat Papua, Zona ini tidak boleh dengan alasan apapun di masuki oleh nelayan nusantara. Ini penting agar jangan terjadi konflik seperti yang terjadi di ponakao, Kabupaten Mimika, Nelayan dan pembudidaya ikan di papua juga mengalami permasalahan adalah kurangnya sarana penangkapan ikan serta budidaya ikan serta kelangkaan BBM khusus bagi nelayan OAP. Permasalahan ini perlu di perhatikan dengan program antara lain:

- (1) Kapal Ikan Tonase 10 GT Kapal Pengangkut ikan,** Sarana yang diperlukan oleh nelayan di Papua ini yaitu kapal Ikan / 10 GT yang difokuskan pada wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kota Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
- (2) Motor Tempel,** yang difokuskan pada 9 wilayah di antaranya ialah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai dan Kabupaten Asmat.
- (3) Pemberian bantuan pengembangan usaha nelayan berupa keramba/ tambak ikan dan bibit ikan,** yang tersebar pada Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Yapen.

4.1.1.13. Uruasan Peternakan

Dalam Rangka Peningkatan ketersediaan daging dan sumber Gizi masyarakat dan juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat serta mendukung pelaksanaan PON XX, maka diperlukan adanya penyediaan ternak dan adanya hewan peliharaan. Dalam rangka itu maka diperlukan adanya aktivitas seperti:

- (1) Penyediaan Bibit Sapi,** Penyediaan bibit sapi dan haruslah di sediakan untuk daerah-daerah yang cocok yaitu daerah yang dataran rendah di antaranya Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Nabire.
- (2) Pengadaan Bibit Babi,** Dalam rangka membantu menyediakan bibit babi maka diperlukan adanya bibit yang dibagikan pada kabupaten antara lain Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Lani Jaya
- (3) Penyediaan Bibit Ayam,** Dalam rangka penyediaan Bibit Ayam, Bibit Ayam Broiler dan Ayam Petelur yang difokuskan pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yapen dan Kabupaten Merauke

4.1.2. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua

Telaah rumusan pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian sangat penting dalam upaya mengakomodir berbagai konsep pemikiran yang diajukan oleh pihak legislatif guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Provinsi Papua di tahun 2019. Melalui penelaahan ini, dapat disinkronkan dan disinerjikan rumusan dan usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh pihak legislatif kedalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Umum, Hukum, Politik, Pertahanan dan Keamanan

Sampai dengan saat ini masih terdapat berbagai masalah dalam Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, Otonomi Daerah di Provinsi Papua, diantaranya yang krusial dan perlu segera diatasi adalah : (1) masih rendahnya kualitas aparatur Pemerintah Daerah baik kompetensi maupun spesialisasi sesuai potensi dan tantangan daerah, (2) budaya komunikasi pemerintahan belum mampu mengatasi berbagai kebuntuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, (3) belum optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana belanja bantuan keuangan alokasi dana otonomi khusus dalam sektor pendidikan, kesehatan dan beberapa program yang disepakati, dan (4) restrukturisasi organisasi pemerintahan Provinsi Papua belum didukung dengan acuan standar kinerja/ SPM, *Standart Operating and Procedure* (SOP) dan belum mempertimbangkan semangat pembangunan di era Otsus. Semua ini mengakibatkan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua terlihat belum optimal hingga saat ini, khususnya kepada masyarakat Orang Asli Papua, dan keseluruhan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, saat ini juga *e-Government* merupakan salah satu instrumen perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua yang sangat penting guna memantau dan mengendalikan implementasi dari perencanaan dan penganggaran untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan dapat mewujudkan Visi dan Misi RPJMD 2018-2023, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dan dikeluarkan bisa memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Untuk mengatasi berbagai masalah di atas, sebagaimana yang diindikasikan dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua, maka terdapat beberapa program yang dirancang dalam RKPD 2019 yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD tersebut sebagai berikut :

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
4. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung;
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
6. Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas;
7. Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda;
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum;
9. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
10. Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat;
11. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
12. Program Pengembangan Data/Informasi;
13. Program Pengembangan Kawasan;
14. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh;
15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
17. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya;
18. Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana Dan Lingkungan Hidup;
19. Program Perencanaan Tata Ruang;
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
21. Program Pemanfaatan Ruang;
22. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar;
23. Program Kerjasama Pembangunan;
24. Program Perencanaan Kawasan.
25. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
26. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
27. Program Peningkatan Pendapatan Daerah;

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program di bidang aparatur, hukum, politik, pertahanan dan keamanan ini,

dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.2. Urusan Pendidikan

Pemerataan dalam pendistribusian guru merupakan permasalahan yang fundamental dan struktural di Provinsi Papua. Hingga saat ini masih dirasakan adanya ketidakmerataan dalam pendistribusian guru antara wilayah perkotaan dengan perdesaan, dan antara daerah pesisir mudah akses dengan daerah pegunungan dan pesisir sulit akses. Fenomena yang terjadi sebagian besar guru berada di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah pegunungan yang terisolasi masih banyak kekurangan guru. Permasalahan lainnya terkait eksistensi guru adalah tingkat kemangkiran guru. Faktor-faktor rendahnya kesejahteraan guru, jarak yang jauh, topografi yang ekstrim, minimnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi merupakan faktor penyebab laten yang perlu diatasi segera di tahun 2019, sebagaimana yang disebutkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Kemudian untuk sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk penunjang pengajaran dan pembelajaran murid (misalkan buku pelajaran, peralatan laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya), meskipun setiap tahun telah menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan pendidikan, dan terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya namun sampai saat ini masih terlihat belum optimal, sehingga kualitas lulusan sekolah belum meningkat signifikan. Semua kondisi faktual ini (belum optimalnya guru dan prasarana pendidikan) menjadi salah satu penyebab RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) di Provinsi Papua sangat rendah, sehingga IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sampai dengan tahun 2017 masih yang terendah di Indonesia.

Dalam upaya mengatasi permasalahan guru, pemerintah provinsi telah melaksanakan program nasional yaitu Program SM-3T (Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Melalui Program SM-3T tersebut maka kekurangan guru dan atau ketidakmerataan dalam pendistribusian guru diharapkan dapat teratasi dengan baik, khususnya di daerah-daerah pegunungan dan pesisir sulit akses yang merupakan daerah tertinggal. Sedangkan untuk meningkatkan RLS, melalui salah satu program pendidikan yang strategis yaitu Sekolah Asrama Satu Atap (SATAP) pemerintah provinsi selama ini berupaya untuk memupuk dan meningkatkan kesadaran penduduk usia sekolah mengenai pentingnya program wajib belajar sembilan tahun untuk menciptakan kualitas pendidikan anak-anak Papua yang handal.

Melalui SATAP ini juga pemerintah provinsi melakukan gerakan literasi guna meningkatkan angka melek huruf yang masih belum optimal mencapai 100%.

Untuk tata kelola, khususnya yang terkait dengan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan sekolah di jenjang pendidikan SMA dan SMK, menurut pokok-pokok pikiran DPRD jangan sampai mengorbankan kualitas SMA dan SMK yang sudah terbangun selama ini yang di kelola oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, perlu adanya kepatuhan mengikuti peraturan yang berlaku dalam merubah struktur Dinas Pendidikan berdasarkan tipenya (Tipe A atau Tipe B).

Program ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi) merupakan salah satu program afirmasi bagi Orang Asli Papua yang dilaksanakan pemerintah provinsi selama ini. Tujuannya adalah membidik potensi anak-anak Papua lulusan SMA/SMK/ sederajat yang berprestasi akademik untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTN unggulan baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, dan menyiapkan sumber daya manusia anak-anak Papua yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Transparansi dalam seleksi penerimaan ADIK perlu ditingkatkan, dan harus berlandaskan pada kompetensi yang menjunjung kualitas tinggi. Selain itu perlu didukung dengan pendanaan yang memadai hingga peserta ADIK selesai perkuliahan, dimana pada akhir pelaksanaan program tersebut harus dilaksanakan evaluasi yang menyeluruh dan luas hingga mencapai penilaian *outcome* dan *benefit*.

Berdasarkan seluruh telaah pokok-pokok pikiran DPRD di atas, maka untuk RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah disusun program-program pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah Atas;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
6. Program Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Program Pemberantasan Buta Aksara;
8. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang pendidikan ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.3. Aspek Kesehatan

Pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan terisolir telah menjadi program prioritas yang ditetapkan dalam rencana strategis urusan kesehatan, yakni memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat pada daerah terpencil, terisolir, dan perbatasan. Daerah yang menjadi sasaran kegiatan adalah daerah yang mempunyai kriteria sulit dari segi transportasi, memiliki topografi yang ekstrim, dan masyarakat yang masih tergolong miskin dengan status kesehatan yang masih rendah. Permasalahan penting yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Papua selama ini adalah terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, penduduk daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Selain memberikan rekomendasi untuk peningkatan derajat kesehatan, dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD juga diungkap rekomendasi yang terkait dengan peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan sumber daya kesehatan, yakni : (1) penambahan dana operasional untuk membangun dan mengembangkan Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Papua, (2) memberi perhatian yang lebih serius terhadap pemberian fasilitas kesejahteraan bagi para dokter spesialis, (3) menganggarkan biaya operasional pemantauan distribusi obat yang lebih besar, khususnya untuk pendistribusian obat yang cepat sampai di daerah wilayah pegunungan agar tidak menjadi kadaluarsa, dan (4) pemberian anggaran untuk biaya operasional verifikator dalam melaksanakan memonitoring KOS dan BPJS.

Kemudian secara spesifik, untuk meningkatkan pelayanan pada RSUD (Rumah Sakit Umumk Daerah) dan RSJ (Rumas Sakit Jiwa), patut diperhatikan beberapa hal oleh pemerintah provinsi yaitu : (1) memberikan dana yang lebih banyak pada RSJ untuk melakukan monitoring jumlah pasien dan pelayanan pasien Jiwa diberbagai daerah di Papua dan Papua Barat, (2) menganggarkan pembayaran hak ulayat dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan RSJ dilokasi baru Koya Barat, (3) penambahan dokter spesialis di RSUD Abepura dan RSUD Dok II, serta penambahan anggaran untuk biaya operasioal keperawatan dan kebidanan, (4) meningkatkan porsi belanja untuk pasien rujukan dari kabupaten/kota ke RSUD Dok II, dan ke rumah sakit rujukan di luar Papua khususnya yang sudah ada MOU seperti

RSUD Sarjito, RS Dharmais, dan RS Cikini di Jakarta, rumah sakit di Makassar, RS Dr. Sutomo di Surabaya, (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RSUD Dok II seperti ketel uap, listrik, ruang gizi, ruang bersalin, dan bak penampung air.

Beranjak dari berbagai masalah pembangunan kesehatan di atas, dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah diakomodir beberapa program kesehatan yang strategis sebagai berikut :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
7. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
8. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang kesehatan ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.4. Urusan Sosial Keagamaan

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya ganja, di Provinsi Papua sudah pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Apabila dibiarkan berlarut, dapat merusak generasi muda Papua. Penyalahgunaan narkoba juga mempunyai dampak multidimensi yang sangat luas bagi suatu daerah, mencakup dampak kesehatan, sosial dan ekonomi. Mengingat dampaknya begitu buruk, maka pemerintah provinsi selama ini sudah berupaya untuk menekan dan menghapus peredaran narkoba. Misalkan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom di tahun 2014 telah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayahnya. Kondisi geografis wilayah Keerom yang memiliki garis batas darat dan pintu masuk dengan Papua New Guenia (PNG) merupakan salah satu kerawanan masuknya narkoba gelap. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BNN Propinsi Papua menginisiasi terciptanya kampung siaga narkoba di daerah yang berbatasan dengan NKRI. Masyarakat kampung setempat yang diwakili oleh kepala

kampung, perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut telah menyatakan komitmen bersama untuk menanggulangi peredaran narkoba. Namun demikian, program penanggulangan yang dijalankan pemerintah daerah tersebut tampak belum optimal. Sampai dengan tahun 2017 ternyata masih ditemukan beberapa ladang ganja di daerah perbatasan RI - PNG. Tawaran yang menggiurkan dari bandar narkoba untuk menanam ganja di kebun milik masyarakat kampung tidak dapat ditolak karena tekanan ekonomi. Rumahtangga petani di daerah-daerah tersebut pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah. Sehingga ketika diiming-imingi dengan uang puluhan juta untuk menanam ganja, mereka tergiur untuk melaksanakannya. Untuk itu dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD tersirat bahwa pemerintah provinsi harus memberikan perhatian yang lebih serius terhadap Ketahanan Sosial Keluarga Miskin di daerah-daerah perbatasan. Program-program penanggulangan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) harus lebih dioptimalkan hingga bisa memperkuat daya tahan sosial keluarga miskin mencapai terwujudnya keluarga yang sejahtera baik itu dari sisi ekonomi maupun kehidupan sosial. Jika hal ini terwujud dengan baik maka tidak akan ada lagi keluarga petani di daerah perbatasan yang mau menanam ganja.

Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 ditegaskan bahwa Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa selain gelandangan dan pengemis, anak-anak jalanan juga harus dipelihara dan diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian secara khusus juga ada aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban anak, pada Pasal 4 disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan amanat dari UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut maka sudah seharusnya dan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk selalu memperhatikan, melindungi dan mensejahterakan anak-anak papua, termasuk anak jalanan. Sehubungan dengan hal itu maka menurut pokok-pokok pikiran DPRD diperlukan anggaran dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah provinsi untuk menangani anak jalanan sebagai potensi sumber manusia Papua masa

depan yang sudah harus di inventarisasi untuk di lakukan pembinaan sehingga masa depan anak Papua tidak mengalami kendala sebagai pelaku pembangunan di kemudian hari.

Beranjak dari rumusan pokok-pokok pikiran DPRD di atas, maka terdapat beberapa program kesejahteraan sosial yang telah disusun sebagai program prioritas dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial;
6. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang kesejahteraan sosial ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.5. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berbagai infrastruktur dasar masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua dengan penyediaan yang harus memperhatikan pola sebaran pemukiman penduduk dalam kelompok-kelompok kecil dan tersebar dengan kondisi geografis yang berat. Isu-isu strategis yang mengemuka di tahun 2019 terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar sebagaimana yang tersirat dalam pokok-pokok pikiran DPRD adalah : (1) jaringan jalan dan jembatan belum menjangkau banyak wilayah pemukiman penduduk sehingga pelayanan dasar belum dirasakan oleh sebagian besar penduduk, (2) jalan dalam kondisi yang baik, dan permukaan jalan yang beraspal masih sangat kurang, sehingga mengganggu kelancaran pendistribusian barang dan penumpang yang pada akhirnya berakibat pada *high cost economy* di daerah-daerah pegunungan dan sulit akses di Provinsi Papua, (3) kuantitas dan kualitas jembatan yang masih belum memadai menyebabkan hubungan transportasi darat antara satu daerah dengan daerah lainnya menjadi terhambat dan tidak lancar.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dasar di atas, serta mengakomodir pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD maka

dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah dibuat program-program pekerjaan umum sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan turap/talud/brojong;
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
4. Program pengendalian banjir;
5. Program pembangunan infrastruktur pedesaan;
6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
7. Program Pengembangan Perumahan.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.6. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Selepas PON XIX di Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan PON XX sudah ditetapkan oleh KONI Pusat di Provinsi Papua. PON XX akan diselenggarakan pada tahun 2020 yang rencananya disebar pada 5 kabupaten/ kota yakni Jayapura, Timika, Wamena, Biak dan Merauke. Persiapan menuju PON XX sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi semenjak tahun 2016 lalu, mulai dari pembangunan fisik yang terkait dengan berbagai venue PON XX, termasuk juga sarana dan prasarana pendukung PON XX, hingga koordinasi yang intensif guna mendapatkan dana penyelenggaraan PON XX yang sangat besar, baik itu dengan pemerintah pusat, maupun dengan pihak swasta lokal dan nasional. Hasilnya dapat dilihat sampai dengan tahun 2018 ini, beberapa venue sudah mulai dibangun. Bahkan di Kabupaten Mimika sudah terbangun salah satu venue yang siap 100% untuk pelaksanaan PON XX yaitu *Mimika Sport Complex (MSC)*. Sementara di Kabupaten Merauke, pembangunan infrastruktur Stadion Katalpal telah mencapai 40 persen, yang dipastikan akan rampung di akhir tahun 2019. Begitu juga dengan Stadion Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, sedang dalam taraf pengerjaan sejak tahun 2017.

Lobi dan koordinasi pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat juga membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Dimana dari hasil Ratas Kabinet (Rapat Terbatas) bulan Juli 2017 dengan Presiden Joko Widodo yang antara lain membahas program-program strategis nasional (PSN) yang ada di Provinsi Papua, salah satunya adalah penyelenggaraan PON XX Papua, diperintahkan oleh presiden untuk mengeluarkan INPRES (Intruksi Presiden) PON XX tahun 2020. Dengan Inpres tersebut,

Kementerian PUPR akan membantu pembangunan beberapa venue yang penting antara lain Istana Olah Raga (Stadion Papua Bangkit), stadion akuatik, hockey dan sepeda.

Langkah-langkah kesiapan PON XX yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi di atas menurut pemikiran DPRD masih perlu dimaksimalkan. Pemerintah provinsi harus mendukung 100% pengadaan anggaran penyelesaian venue di berbagai kabupaten penyelenggaraan PON XX, terutama yang belum rampung pekerjaannya. Kemudian promosi PON XX Papua harus gencar dilakukan baik itu di media cetak maupun media elektronik yang berskala lokal dan nasional, terutama juga untuk mempromosikan Papua melalui pariwisata dan ketrampilan Home Industri. Hal terpenting juga terkait dengan kesiapan venue PON XX, maka pada tahun 2019 sangat diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait dengan kemajuan persiapan pelaksanaan PON XX, mengingat waktu yang tersisa 1 tahun lagi dari tahun 2020 sangat pendek.

Dalam hal kesiapan atlet PON, maka perolehan medali emas dan peringkat Papua di PON XIX Jawa Barat dapat dijadikan sebagai indikatornya. Peringkat Papua di PON XIX Jawa Barat naik signifikan jika dibandingkan dengan posisinya di PON XVIII Riau yaitu dari peringkat 15 menjadi peringkat 7, dengan jumlah medali emas yang berhasil diraih mencapai 19 emas, atau bertambah 10 emas dari PON XVIII sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa saat ini atlet-atlet Papua sudah cukup siap menghadapi PON XX. Dengan sisa waktu 3 tahun lagi, maka DPRD merekomendasikan agar dilaksanakan kompetisi bibit muda terbaik Papua menjelang PON XX untuk dapat diprediksi jumlah perolehan sesuai kemampuan prestasi yang diperoleh.

Untuk mengakomodir berbagai konsep pemikiran dari DPRD yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan PON XX di atas, maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah disusun program-program pemuda dan olah raga sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga;
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
4. Pengembangan Prasarana PON;
5. Program Penyelenggaraan Kompetisi/ Pekan Olahraga/ Kejuaraan Olah Raga;

6. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON XX 2020;
7. Program Pembinaan Atlit Muda dan Olahraga Prestasi;
8. Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020;
9. Program Pelaksanaan Penyelenggaraan PON XX 2020.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang pemuda dan olah raga ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran

4.1.2.7. Urusan Ketenagakerjaan

Terjadinya ketimpangan pendapatan yang cukup mencolok di Provinsi Papua selama ini jika diamati dengan seksama berakar pada ketidakmerataan dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Terutama sekali ketimpangan antara peluang kesempatan kerja pada Orang Asli Papua dengan Non Papua. Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua di tahun 2016 dinyatakan yang paling baik di Indonesia, akan tetapi pembagian nilai tambah yang diberikan dalam perekonomian wilayah sangatlah tidak merata jika disoroti pada tenaga kerja Orang Asli dan Non Papua. Fenomena tersebut disebabkan peluang kerja yang terbuka selama ini lebih banyak diserap oleh tenaga kerja Non Papua. Misalkan di sektor jasa perdagangan, perhotelan, restoran, transportasi, komunikasi, perusahaan, perbankan, dan sebagainya, sebagian besar menyerap tenaga kerja Non Papua. Sementara tenaga kerja Orang Asli Papua, dikarenakan kualitas dan produktifitas kerjanya masih rendah, akhirnya kalah bersaing dalam kompetisi pasar kerja. Jumlah tenaga kerja Orang Asli Papua yang bekerja pada sektor-sektor tersebut sangat sedikit. Tidak seperti pada peluang kerja di sektor pemerintahan yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Papua, pada sektor swasta berlaku hukum pasar yang lebih mengedepankan kompetensi tenaga kerja yang tinggi, yang sulit diintervensi langsung oleh pemerintah provinsi.

Kondisi faktual pasar kerja seperti ini sudah terbaca oleh pihak legislatif secara komprehensif dan holistik. Oleh karena itu dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD tersirat bahwa pemerintah provinsi perlu meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja Orang Asli Papua melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dan peningkatan pendidikan vokasional yang mengarah pada tenaga kerja yang siap pakai dan mampu bersaing dalam pasar kerja, misalkan pelatihan tentang kewirausahaan,

pengenalan budaya kerja secara faktor psikologi kerja. Selain itu pemerintah provinsi juga perlu memikirkan kebijakan afirmasi pada Orang Asli Papua, namun dengan tetap mengindahkan persaingan yang sehat, untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja Orang Asli Papua dalam perekonomian wilayah, bukan hanya sebatas pada sektor pertanian, namun juga pada sektor-sektor ekonomi produktif lainnya terutama di sektor industri dan jasa perdagangan. Patut dilakukan kajian yang mendalam dan survey tenaga kerja untuk hal ini.

Telah diatur secara nasional bahwa setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menetapkan Upah Minimum Regional (UMR), yang merupakan standar kelayakan hidup yang minimum bagi tenaga kerja. Setiap pelaku bisnis pada sektor swasta diharuskan mematuhi penetapan UMR yang berlaku. Oleh sebab itu, direkomendasikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD agar Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Tenaga Provinsi Papua melakukan kontrol terhadap berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua, agar konsekwen dan konsisten membayar upah yang minimum sama dengan UMR, sehingga tidak menimbulkan sengketa antara tenaga kerja dengan perusahaan.

Bertitik tolak dari berbagai wacana dan pemikiran konstruktif yang disampaikan oleh DPRD di atas, maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah disusun program-program yang terkait dengan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Produktivitas;
4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
5. Program Peningkatan Kinerja Organisasi;
6. Program Pengembangan Produktivitas Kerja.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang ketenagakerjaan ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.8. Urusan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola

oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Bahan Bakar Gas (BBG);
2. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah;
3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Program Pengembangan Kemitraan;

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang ekonomi ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.9. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Membangun SDM Petani Papua;
2. Program Pembangunan Kawasan Industri Agribisnis;
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
4. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal;
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
9. Program Pengembangan Agribisnis;
10. Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian;
11. Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal;
12. Program Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tani;
13. Program Penggunaan Pupuk Organik;
14. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

15. Program Pengembangan Kemitraan;
16. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
17. Program Penataan Kawasan Hutan;

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang ekonomi ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.10. Urusan Pariwisata

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Kemitraan;
4. Program Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang ekonomi ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.11. Urusan Perikanan

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat;
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
3. Program Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
4. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan;

5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar;
6. Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan Dan Pemasaran;
7. Program Optimalisasi Dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap;
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
9. Program Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Bahan Bakar Gas (BBG);
10. Program Pengembangan Kemitraan;

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang ekonomi ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.1.2.12. Uruasan Peternakan

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Membangun SDM Petani Papua;
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
5. Program Pengembangan Agribisnis;
6. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
8. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah;
9. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
10. Program Pengembangan Kemitraan;

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang ekonomi ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 di Provinsi Papua disusun pada masa transisi, sehingga keterkaitan antar dokumen merujuk pada pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Dokumen RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025. Sehingga RKPD Tahun 2019 merupakan kelanjutan perencanaan dokumen tahunan, dalam kerangka mewujudkan Visi RPJPD Papua bahwa **“Papua Yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi Dan Politik”**. Dari pernyataan visi tersebut, tampak jelas bahwa terdapat 1 (satu) pokok visi tentang “Papua yang Mandiri” dan dijelaskan dalam 4 (empat) elemen atau meliputi: bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Papua. Dengan demikian, visi tersebut menekankan bahwa pada akhir periode RPJPD tahun 2025, ingin diwujudkan kemandirian secara sosial, kemandirian secara budaya, kemandirian secara ekonomi, dan kemandirian secara politik bagi Provinsi Papua dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Papua yang mandiri adalah masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, berbasis aset alam dan kearifan lokal setiap daerah. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah kemandirian yang mengenal adanya hubungan kerjasama, yang saling menguntungkan dengan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua demi kemajuan masyarakat asli Papua berdasarkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai universal. Pencapaian kondisi kemandirian sebagaimana dimaksud sangat memungkinkan karena dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan dan memberikan peluang kepada masyarakat Papua untuk merancang masa depannya berdasarkan nilai adat istiadat dan memberikan kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri yang luas serta keberpihakan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat asli Papua. Oleh karena itu perbaikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kondusif akan memberikan peluang bagi masyarakat Papua dalam mewujudkan kemandiriannya dalam kerangka NKRI.

Kemandirian sosial tercermin pada peningkatan kualitas Manusia Papua serta modal sosial masyarakat asli Papua sehingga mampu berperan dalam pembangunan daerah termasuk meningkatkan kualitas hidup berbasis aset alam lokal yang memperhitungkan aspek-aspek keberlanjutan. Kualitas

Manusia Papua tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kesetaraan gender, meningkatnya kualitas intelektual, dan meningkatnya profesionalisme dan daya inovasi masyarakat Papua yang tinggi. Modal sosial masyarakat tercermin dari rasa saling percaya dan kemampuan untuk memecahkan masalah bersama.

Kemandirian budaya ditujukan untuk mengaktualisasikan jati diri, identitas dan karakter masyarakat asli Papua berdasarkan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan tatanan aturan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dengan tetap memperhatikan tatanan nasional. Kemandirian budaya juga berkaitan dengan pengakuan terhadap berbagai kekayaan adat istiadat serta pemahaman keragamannya sebagai suatu kekayaan untuk dijadikan inspirasi pembangunan untuk menjaga eksistensinya.

Kemandirian ekonomi adalah suatu kondisi tercapainya peningkatan dan pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara simultan dan berkelanjutan serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka, melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggung jawab, penguatan kecukupan pemenuhan kebutuhan lokal, penciptaan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan alternatif; peningkatan akses terhadap kebutuhan hidup; peningkatan kesempatan mengaktualisasikan diri sesuai bakat dan minatnya; pembangunan yang tersebar dan setara melalui keterpaduan antar sektor pembangunan dan investasi berbasis kampung.

Kemandirian politik dicapai melalui terwujudnya sistem dan kelembagaan politik serta hukum yang berkeadilan. Kemandirian politik tercermin melalui lembaga politik dan kemasyarakatan didasarkan oleh aturan hukum dan aturan adat. Kapasitas pendidikan politik tercermin melalui peningkatan partisipasi dan peran masyarakat secara nyata dan efektif dalam sistem pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya masyarakat dengan menganut etika demokrasi, sehingga terjamin hak-hak masyarakat berdasarkan nilai adat dan nilai universal serta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Papua termasuk aspek gender.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, serta melalui rumusan misi yang menggambarkan rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJPD tahun 2005-2025 di Provinsi Papua. Maka secara sinergitas antar strata dokumen Perencanaan

di Provinsi Papua, melalui penetapan tujuan pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran
RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025

| Misi | | Sasaran Pembangunan | |
|---|--------------------------------|---------------------|---|
| Visi: “Papua Yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi Dan Politik” | | | |
| 1 | Mewujudkan Kemandirian Sosial | 1 | Meningkatnya kualitas hidup Manusia Papua ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia mencapai diatas 70 dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) disemua jenjang pendidikan dan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. |
| | | 2 | Meningkatnya derajat kesehatan yang diukur dari Usia Harapan Hidup masyarakat Papua diatas rata-rata 70 tahun yang didukung meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan dalam bentuk peningkatan jumlah kader kesehatan dan untuk meningkatkan kualitas hidup di semua kampung. |
| | | 3 | Terjaminnya kualitas gizi dan pangan di keluarga dan seluruh wilayah yang ditandai dengan rata-rata provinsi terhadap akses konsumsi normatif terhadap ketahanan pangan dibawah 0,50 |
| | | 4 | Pembangunan yang tersebar setara ke seluruh wilayah, terwujudnya kualitas hidup dan kecukupan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di kampung-kampung |
| | | 5 | Terpenuhinya kebutuhan rumah yang sehat sesuai dengan kondisi alam, budaya dan karakteristik fisiologis masyarakat Papua yang beragam serta menggunakan bahanbahan lokal. |
| | | 6 | Meningkatnya kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IPG) dan menurunnya indeks disparitas gender (IDG) serta perlindungan anak |
| | | 7 | Terbangunnya jaringan informasi dan telekomunikasi yang berkualitas serta menjangkau seluruh kampung |
| 2 | Penciptaan Kemandirian Budaya | 1 | Terbentuknya sistem kelembagaan adat, agama, perempuan dan pemuda yang mandiri untuk meningkatkan kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan |
| | | 2 | Terwujudnya masyarakat yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur |
| | | 3 | Terbentuknya jati diri dan kebanggaan sebagai orang Papua melalui penerapan nilai-nilai budaya dalam peningkatan prestasi miltum pengetahuan, seni, dan Olahraga |
| | | 4 | Terwujudnya budaya berprestasi dan inovatif dengan kebebasan beraktivitas, berekspresi dan berkesenian, disertai dengan tingginya keinginan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik |
| 3 | Mewujudkan Kemandirian Ekonomi | 1 | Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh di seluruh wilayah papua yang berbasiskan ekonomi lokal yang mandiri. |
| | | 2 | Terbangunnya ekonomi lokal di tingkat kampung yang memanfaatkan Aset Alam secara berkelanjutan dan |

| Misi | | Sasaran Pembangunan |
|------|--|---|
| | | berbasis peran aktif masyarakat adat. |
| | | 3 Terbangunnya infrastruktur ekonomi dan pasar sektor riil |
| | | 4 Tersedianya infrastruktur skala kampung (termasuk energi, transportasi, komunikasi) secara merata di semua kampung di seluruh Papua, untuk memampukan masyarakat mengakses dan meningkatkan manfaat kebutuhan hidupnya secara efisien dan berwawasan lingkungan |
| | | 5 Meningkatnya sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pertumbuhan wilayahwilayah strategis: kawasan tumbuh cepat, pusat-pusat permukiman masyarakat lokal, kawasan perbatasan dan sekitarnya dalam sistem pengembangan wilayah terpadusebagai kesatuan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi,karakteristik dan daya dukung lingkungan |
| | | 6 Terwujudnya tata ruang wilayah yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan bagi pengembangan wilayah secara terpadu, sinergi dengan melibatkan semua komponen (stake holder) sesuai kondisi dan potensi wilayah |
| | | 7 Berkembangnya investasi dan bertumbuhnya sentra-sentra produksi komoditi unggulan daerah |
| | | 8 Terlaksananya perlindungan sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati,sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, cagar budaya dan keanekaragaman hayati, dengan terbentuknya aturan hukum yangmengatur serta memperhatikan hak-hak masyarakat adat |
| | | 9 Peningkatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan (hutan dan nonhutan) |
| 4 | Mewujudkan Kemandirian Politik | 1 Terwujudnya masyarakat yang demokratis dimana masyarakat Papua mampu menentukan sendiri paradigma, tujuan, strategi dan inovasi pembangunannya sehingga terciptatata pemerintahan yang baik (good governance) yang berlandaskan hukum serta birokrasi yang akuntabel, transparan, dan dapat dipercaya; |
| | | 2 Terwujudnya penerapan UU Nomor 21 tahun 2001 secara nyata dan konsekuen sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat asli Papua; |
| | | 3 Meningkatnya peran masyarakat dalam menegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta peran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketentraman wilayahnya. |
| 5 | Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua | 1 Pengakuan Eksistensi nilai-nilai adat dan budaya asli Papua serta hak-hak masyarakat adat melalui pengakuan hak ulayat adat, masyarakat adat dan hukum adat, sebagai dasar dari seluruh aspek pembangunan |
| | | 2 Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi percepatan peningkatan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat asli Papua dalam mengambil peran dalam pembangunan |

| Misi | Sasaran Pembangunan |
|------|---|
| | 3 Inovasi ilmu pengetahuan berbasis budaya asli Papua dan sumberdaya lokal, berdasarkan prinsip berkelanjutan, berkembang secara progresif sehingga masyarakat kampung secara cepat dapat menerapkannya tanpa menimbulkan gegar budaya. |

Sesuai dengan tahun perencanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2019, maka arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025, sebagai tahun dasar dalam meletakkan pondasi awal prioritas pembangunan RPJPD pada tahap IV ini adalah **“Mewujudkan masyarakat papua yang mandiri disegala bidang dalam tata kehidupan yang harmonis selaras dan aman”**

Gambar 4.1
Fokus Pembangunan Provinsi Papua tahun 2005-2025



Sejalan dengan penetapan Fokus Pembangunan pada tahap ke-IV, maka RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 menetapkan fokus daerah yang merupakan integrasi berdasarkan strata dokumen perencanaan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun 2016-2017 yang telah dilaksanakan. Maka harmonisasi Sasaran Pembangunan Pada RKPD Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut: (1) Terwujudnya Kualitas & Akses Pendidikan Pada Semua Jalur & Jenjang, (2) Terwujudnya Kualitas & Akses Kesehatan & Gizi, (3) Terciptanya Kawasan strategis yang mendukung perekonomian daerah, (4) Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari, (5) Meningkatnya standar pelayanan public, (6) Meningkatnya Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan, (7)

Pemerintahan Eksternal dan Internal, (8) Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni bagi rumahtangga Orang Asli Papua, (9) Meningkatnya gizi balita Orang Asli Papua, (10) Meningkatnya kualitas pendidikan Orang Asli Papua Menguatnya hak-hak adat.

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada level strata dokumen perencanaan pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2019, disusun secara teknis mempedomani Sasaran dan Prioritas RPJMN Tahun 2015-2019, RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025. Untuk menentukan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan 3 (Tiga) hal sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda pembangunan (NAWA CITA) sebagaimana tercantum dalam RKP 2019;
- 2) Arah pembangunan tahap ke-4 RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 dengan prioritas yaitu Mewujudkan Masyarakat Papua yang mandiri di Segala Bidang dalam Tata Kehidupan yang harmonis selaras dengan alam
- 3) Mempedomani Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016, dan target Tahun 2017 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah provinsi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2019.

4.3.1. RKPD Tahun 2019 sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019

Visi yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah "***Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong***". Upaya pencapaian visi dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut "*Nawa Cita*", yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

4.3.2. RKPD Tahun 2019 sebagai Bagian Integral dari RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025

Prioritas pembangunan pada tahun 2019 disesuaikan dengan fokus pembangunan periode IV RPJPD Provinsi Papua, yang menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berdasarkan fokus pembangunan yang dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tahapan pembangunan periode ke-3 RPJPD Provinsi Papua.

Sesuai dengan sesuai dengan pedoman transisi dalam dokumen RPJMD 2013-2018, maka prioritas pembangunan di tahun 2019 ini selain untuk melaksanakan pencapaian-pencapaian pada tahap-tahap sebelumnya dari sasaran yang masih belum tercapai, sehingga pada tahap ini diharapkan keseluruhan sasaran dan indikatornya yang telah ditetapkan dapat tercapai keseluruhannya dan apa yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Papua melalui penjabaran visi dan misi, mewujudkan visi **Papua Yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi Dan Politik**, yang dituangkan dalam misi : **(1) Mewujudkan Kemandirian Sosial , (2) Mewujudkan Kemandirian Budaya, (3) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, (4) Mewujudkan Kemandirian Politik, (5) Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua.**

4.3.3. RKPD Tahun 2019 sebagai Bagian Integral dari RKP Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. mempercepat pengurangan kemiskinan
- b. meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat

- c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak

2. Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan konektivitas
- b. mengembangkan telekomunikasi dan informatika
- c. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa
- d. melaksanakan pembangunan daerah afirmasi
- e. melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional kedua, antara lain:

- a. pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
- b. peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
- c. peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
- d. optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
- f. peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
- g. peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
- h. peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan i. peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.

3. Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
- c. meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
- d. mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
- e. mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional ketiga, antara lain:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
- c. optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
- d. peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.

4. Prioritas Nasional 4: Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan.

Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi energi primer;
- b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. meningkatkan aksesibilitas air;

- d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
- f. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- g. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- h. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
- i. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- j. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- k. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- l. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- m. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
- n. meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional keempat, antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi. Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta Barrel of Equivalent (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.
- b. Pemenuhan kebutuhan pangan. Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat.
- c. Pemantapan ketahanan sumber daya air
- d. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Penguatan langkah untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- e. Perencanaan pembangunan rendah karbon. Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
- b. menjamin kesuksesan pemilu
- c. memperkuat pertahanan wilayah nasional
- d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
- e. memperkuat efektivitas diplomasi

4.3. Prioritas RKPD Tahun 2019

Kedudukan RKPD Tahun 2019 Provinsi Papua, dalam RPJMD Provinsi Papua ialah periode transisi. Oleh Sebab itu sesuai dengan Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018, Maka Penyusunan Program Prioritas Tahun 2019 di Provinsi Papua dilandaskan pada permasalahan yang ada di Provinsi Papua guna memastikan perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka Panjang Daerah.

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui Program Prioritas Daerah Tahun 2019 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang jelas, sederhana, terukur dan dapat tercapai dalam kurun waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Pencapaian sasaran pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahun 2019 orientasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Papua bergeser dari *money follow function* menuju *money follow priority program*, yaitu alokasi anggaran diarahkan pada Program Prioritas Pembangunan Daerah guna memenuhi target sasaran RPJMD dan SPM yang telah ditetapkan, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Oleh karena itu, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran program prioritas daerah disusun berdasarkan aspek holistik, tematik, integratif dan spasial. Hal ini selaras dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran, bahwa penganggaran yang disusun harus berbasis kepada prioritas. Penguatan penganggaran akan diberikan lebih kepada usulan pembangunan yang memiliki keterhubungan dengan prioritas dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Prioritas daerah merupakan bagian dari prioritas nasional, sehingga rencana terhadap pembangunan nasional adalah perwujudan terhadap rencana pembangunan daerah. Selain itu, dalam rangka mengakomodir penegasan urusan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka rangkaian keterhubungan prioritas pembangunan daerah, disinergikan dengan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 harus merujuk kepada tema RKP 2019. Oleh karena itu perlu diketahui Tema Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai acuan penetapan dan

kesinambungan prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema RKP 2019 adalah: **“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”** RKPD tahun 2019 merupakan periode transisi masa perencanaan pada periode 5 Tahunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018. Untuk itu Tema Pembangunan RKPD Tahun 2019 Provinsi Papua **“Pemantapan Kualitas Hidup Untuk Kemandirian Daerah”**. Berdasarkan tema tersebut menjadi acuan dalam penetapan prioritas daerah tahun 2019 di Provinsi Papua.

Prioritas pembangunan Provinsi Papua tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional, yakni:

1. Komitmen-komitmen nasional, seperti program pembangunan yang berkeadilan (penanggulangan kemiskinan dan *Sustainable Development Goals/SDG's*) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004;
2. Sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum RPJMN Tahun 2015-2019;
3. Arah pembangunan tahap ke-4 RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025.
4. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2017, dan target Tahun 2018 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah provinsi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2019.

Adapun penyusunan prioritas program/kegiatan OPD disusun dengan menggunakan beberapa kriteria, antara lain:

1. Kegiatan Unggulan dan Prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang RKPD Tahun 2019;
2. Program/Kegiatan yang mengarah pada pemecahan isu strategis Provinsi Papua Tahun 2019;
3. Program/ Kegiatan yang mengacu pada tema dan fokus pembangunan tahun 2019;
4. Program/ Kegiatan yang mendesak untuk segera ditangani pada tahun 2019;
5. Program/Kegiatan yang mengarah pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
6. Program/Kegiatan yang sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's), yang meliputi 17 tujuan yaitu:

- a. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;
- c. Memastikan hidup sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia;
- d. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua;
- g. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua;
- i. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
- j. Mengurangi ketimpangan di dalam dan diantara negara-negara;
- k. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- l. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya;
- n. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumberdaya untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Merujuk pada berbagai wawasan dan konsep berpikir di atas maka prioritas dan fokus pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Prioritas Dan Fokus Pembangunan Tahun 2019

| No | Prioritas Daerah | Fokus Pembangunan | |
|----|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1 | Peningkatan Pembangunan Manusia | 1 | Pengembangan Kualitas & Akses Pendidikan Pada Semua Jalur & Jenjang |
| | | 2 | Pengembangan Kualitas & Akses Kesehatan & Gizi |
| | | 3 | Perlindungan & Pengembangan Budaya Lokal & Revolusi Mental |
| 2 | Peningkatan Ekonomi Daerah | 1 | Pengembangan kawasan strategis yang mendukung perekonomian daerah |
| | | 2 | Peningkatan produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari |
| | | 3 | Pengembangan perekonomian rakyat, Kepariwisataaan distribusi industri ,pengolahan, perdagangan serta pemasaran |
| | | 4 | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri, pemasaran, distribusi dan penguatan modal usaha |
| | | 5 | Meningkatkan penerimaan daerah, kinerja BUMD/BUMN serta investasi , Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Umum | 1 | Penguatan Sistem Kepegawaian dan Pendayagunaan aparatur |
| | | 2 | Peningkatan sistem administrasi pengelolaan dan koordinasi Otsus |
| | | 3 | Penguatan Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan daerah, Pengendalian dan Evaluasi serta tata kelola Asset |
| | | 4 | Peningkatan standar pelayanan publik |
| | | 5 | Penguatan E-Government |
| | | 6 | Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| | | 7 | Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal |
| | | 8 | Penataan Batas wilayah, kerjasama pembangunan dan kerjasama pembangunan |
| | | 9 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan, Menciptakan kerukunan antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya |
| 4 | Peningkatan Infrastruktur Wilayah | 1 | Percepatan konektivitas transportasi antar moda |
| | | 2 | Pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi, air baku, pengendalian banjir, dan abrasi pantai |
| | | 3 | Penyediaan Perumahan dan Permukiman |
| | | 4 | Pengembangan Kawasan Strategis dan Penataan Ruang |
| | | 5 | Peneelolan Lingkungan dan Penangan Bencana Alam |

| No | Prioritas Daerah | Fokus Pembangunan | |
|----|------------------|-------------------|---|
| | | 6 | Penyediaan Infrastruktur Dasar (Jalan dan Jembatan Kampung, Air bersih, sanitasi, listrik dan telekomunikasi) |
| | | 7 | Penyediaan Infrastruktur PON |

Berdasarkan prioritas nasional, prioritas daerah dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya maka dapat ditargetkan kinerja pembangunan daerah di tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Keterkaitan Sasaran Dengan Prioritas, dan Target Kinerja Pembangunan Tahun 2019

| Prioritas Nasional | Prioritas Daerah | Sasaran 2019 | Indikator Sasaran | |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
| | | | Uraian | Target 2019 |
| Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar | Peningkatan Pembangunan Manusia | Terwujudnya Kualitas & Akses Pendidikan Pada Semua Jalur & Jenjang | Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 6.2 |
| | | Terwujudnya Kualitas & Akses Kesehatan & Gizi | Angka Usia Harapan Hidup (tahun) | 65.8 |
| | | | Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.000 kalori pada keluarga | 100 |
| | | Meningkatnya pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar Orang Asli Papua | Persentase pemenuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ekonomi Orang Asli Papua | 80 |
| Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif | Peningkatan Ekonomi Daerah | Terciptanya kawasan strategis yang mendukung pembangunan daerah | Indeks Gini | 0.34 |
| | | Meningkatnya perekonomian dan pengelolaan SDA secara lestari | Persentase pertumbuhan PDRB | 6,57 |
| Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar | Peningkatan Pelayanan Umum | Meningkatnya standar pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik |
| | | Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal | Opini BPK | WTP |
| Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui penguatan konektivitas dan Kemaritiman | Peningkatan Infrastruktur Wilayah | Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Baik |
| Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan | | | | |

| Prioritas Nasional | Prioritas Daerah | Sasaran 2019 | Indikator Sasaran | |
|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | Uraian | Target 2019 |
| Peningkatan Pelayanan Dasar | | | | |
| Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui penguatan konektivitas dan Kemaritiman | | | | |

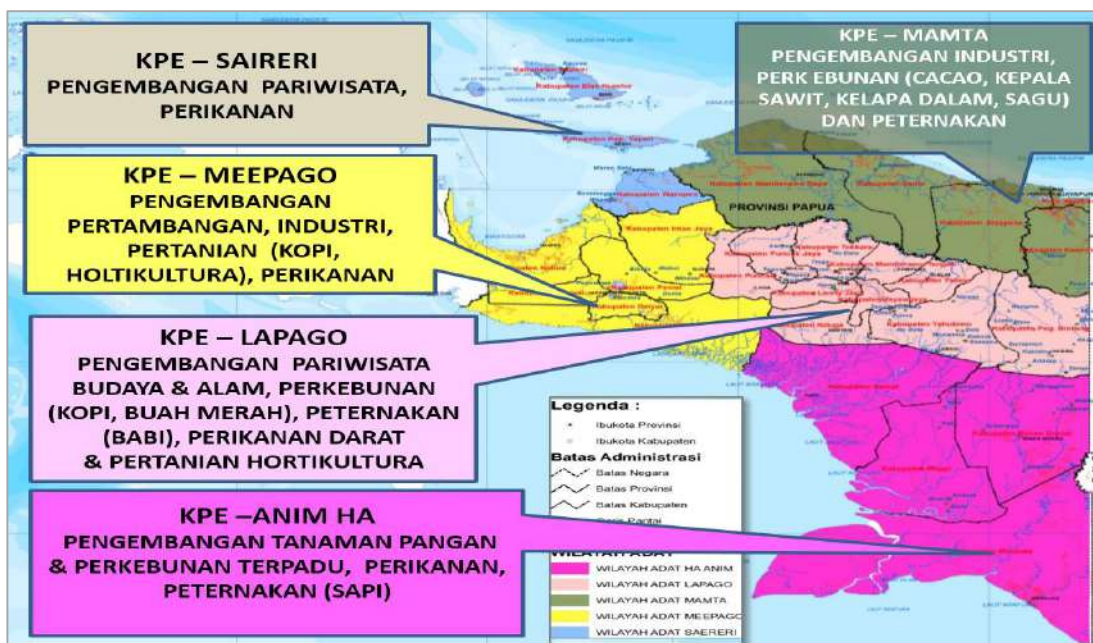
4.4. Arah Pembangunan Wilayah

Kebijakan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting artinya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang masih terbelakanag. Semua ini diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Untuk itu sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi sektoral dan spasial. Lima KPE berbasis wilayah adat yang dimaksud adalah : (1) Wilayah adat Saireri yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen, (2) Wilayah adat Mamta yang terbagi atas kabupaten yang berada disepanjang sungai mamberamo hingga lautan pasifik yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya, (3) Wilayah adat Me Pago yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat terdiri atas Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deyiai, (4) Wilayah adat La Pago yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah sisi timur, terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang, dan terakhir (5) Wilayah adat Anim Ha yang berada di wilayah selatan Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul.

Sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD dan juga dalam penyalarsan dan keberlanjutan Program Strategis yang berbasis kewilayahan, maka dalam periode transisi ini pada tahun perencanaan RKPDP 2019 Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh OPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Selain itu juga merujuk kepada RPJMN Tahun 2014-2019 yang telah mengakomodir lima KPE berbasis adat di Provinsi Papua dengan fokus pengembangannya pada hilirisasi berbasis komoditi unggulan, dimana percepatan pembangunan kawasan strategis di wilayah Papua ini dilakukan dengan strategi : (1) peningkatan potensi ekonomi wilayah, (2) percepatan penguatan konektivitas, (3) pengembangan ekonomi lokal, (4) penguatan kemampuan SDM dan IPTEK.

Gambar 4.2.
Fokus Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Di Provinsi Papua Tahun 2019



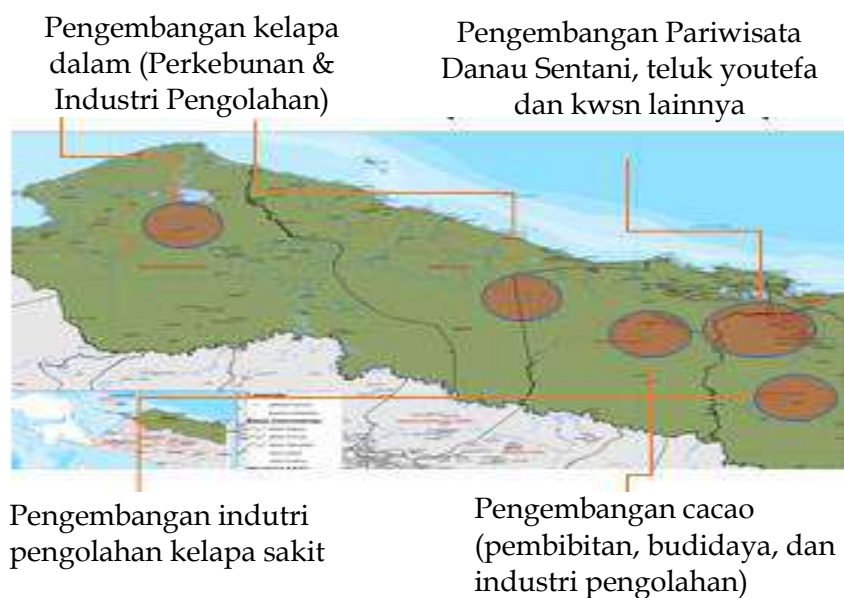
Fokus pembangunan wilayah di Provinsi Papua pada tahun 2019 ini diarahkan pada pemantapan kelima wilayah KPE berbasis adat menjadi wilayah pengembangan dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Provinsi Papua dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agribisnis serta memantapkan kualitas pengembangan KPE dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara singkat hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Sehubungan dengan hal itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mencapai suatu masyarakat dan wilayah Papua yang damai, sejahtera dan aman serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan melanjutkan pengembangan kualitas wilayah pada tahun 2019 sebagai berikut.

4.4.1. Arah Pengembangan Wilayah Adat Mamta/Tabi

Terdapat upaya strategis melalui kebijakan pembangunan kewilayah pada adat Mamta/Tabi. Dengan beberapa fokus kewilayahan antara lain: (1) Pengembangan Ekonomi Wilayah, (2) Infrastruktur Strategis, (3) Perumahan & Infrastruktur Kampung, (4) Infrastruktur PON XX.

Gambar 4.3.
Pengembangan Wilayah Adat Mamta/Tabi
di Provinsi Papua Tahun 2019



4.4.1.1. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan produksi cacao, kelapa dalam
2. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan di Sarmi & Kab. Jayapura
3. Pengembangan kawasan wisata di kab/kota Jayapura
4. Peningkatan SDM pelaku ekonomi lokal.

4.4.1.2. Infrastruktur Strategis

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pengembangan bandara internasional sentani
2. Pembangunan pelabuhan peti kemas depapre
2. Pembangunan terminal type A dan B
3. Pembangunan Dermaga di Danau Sentani
4. Pembangunan Bandara Kustra
5. Pembangunan Dermaga Sungai Bagusa
6. Pembangunan Pelabuhan Wakde
7. Pembangunan dan peningkatan Jalan nasional, provinsi dan Kabupaten/kota
8. Pembangunan Ring Road Jayapura
9. Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre
10. Pembangunan Jalan Burmeso-Danau Bira Sikari
11. Pembangunan JalanUsku-Kesnar
12. Pembangunan Sawia-SP V Kwarja
13. Pembangunan Ta-lereh-Tengon
14. Pembangunan jalan alternative Jayapura-sentani
15. Pembangunan jembatan Hamadi Holtekamp
16. Pengembangan Air Baku/Bersih Danau Sentani
17. Pembangunan transmisi PLTA Genyem & PLTU Holtekamp.
18. Pembangunan sarana prasarana pariwisata

4.4.1.3. Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pembangunan rumah layak huni (pusat, prov, kab/kota)
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat
4. Pembangunan pelabuhan/dermaga rakyat
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH)

4.4.1.4. Infrastruktur PON XX

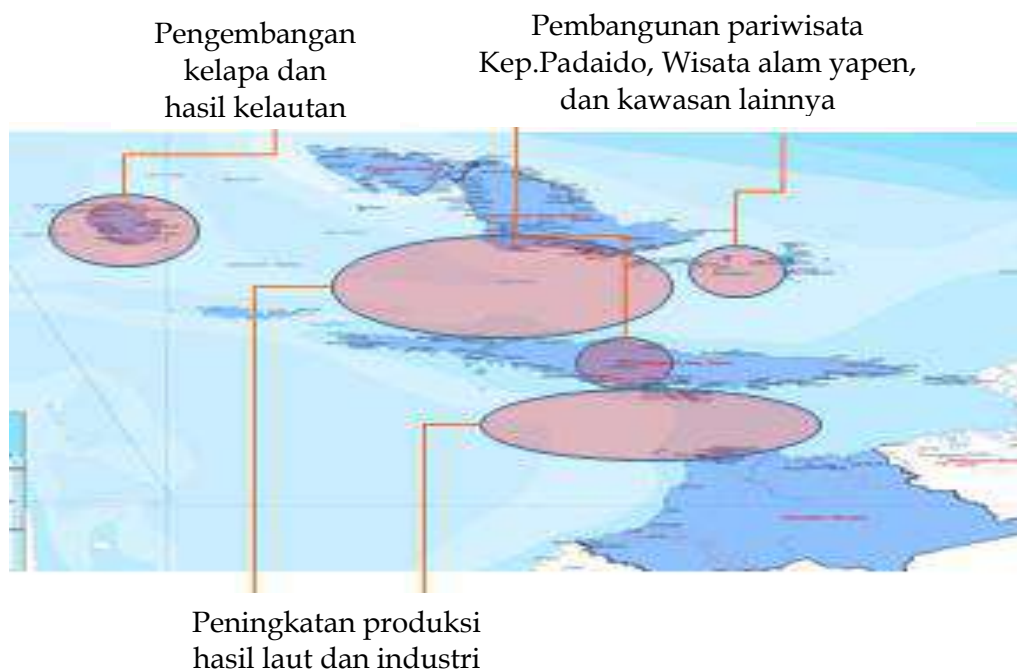
Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pembangunan Kawasan Venue Utama di Kamp Harapan.
2. Pembangunan Venue tersebar di Kab/Kota Jayapura
3. Pengembangan Air Baku Danau Sentani
4. Pembangunan jaringan Air Bersih Menuju PON
5. Pembangunan/Rehab Venue tersebar di Kab/Kota Jayapura

4.4.2. Arah Pengembangan Wilayah Adat Saereri

Terdapat upaya strategis melalui kebijakan pembangunan kewilayah pada adat Saereri. Dengan beberapa fokus kewilayahan antara lain: (1) Pengembangan Ekonomi Wilayah, (2) Infrastruktur Strategis, (3) Perumahan & Infrastruktur Kampung, (4) Infrastruktur PON XX.

Gambar 4.4.
Pengembangan Wilayah Adat Saireri
di Provinsi Papua Tahun 2019



4.4.2.1. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan kapasitas tangkapan hasil laut
2. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan hasil laut di biak, supiori, yapen & waropen
3. Pengembangan kawasan wisata di biak, supiori dan yapen.
4. Peningkatan SDM pelaku ekonomi lokal.

4.4.2.2. Infrastruktur Strategis

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pengembangan bandara internasional Frans Kaisepo
2. Pembangunan bandara Yapen, Numfor, dan waropen
3. Pembangunan pelabuhan kabupaten
 - Pembangunan Pelabuhan Waren
 - Pembangunan Pelabuhan Miosbopondi
 - Pembangunan Pelabuhan Botawa

4. Pembangunan dan peningkatan Jalan nasional, provinsi dan Kabupaten/kota
 - Pembangunan Jalan batas Papua-Papua Barat
 - Pembangunan Jalan Biak-Korem
 - Pembangunan jalan Ansus-Natabui-Woi
 - Pembangunan jalan Waren-Botawa-Sumiangga
 - Pembangunan Jalan dalam Kota Biak
 - Peningkatan Jalan Korem-Dobo-Sorendoweri
5. Pengembangan Air Baku/Bersih
2. Pembangunan PLTA, PLTU, dan PLTS (Waropen, Biak Numfor, Kepulauan Yapen)
3. Pembangunan sarana prasarana pariwisata

4.4.2.3. Pengembangan Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pembangunan rumah layak huni (pusat, prov, kab/kota)
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat
4. Pembangunan pelabuhan/dermaga rakyat
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH)

4.542.4. Infrastruktur PON XX

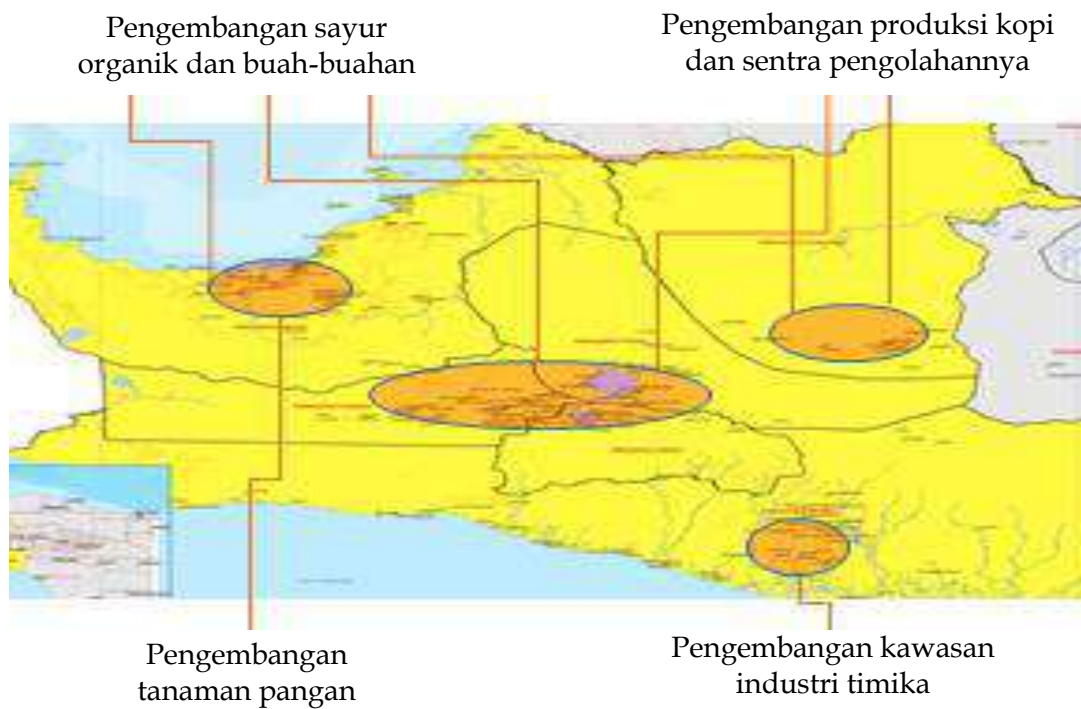
Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pengembangan Air Baku/Bersih di Kota Biak
2. Pembangunan Venue tersebar di Kab Biak Numfor
3. Pembangunan Stadion Hocky di Biak

4.4.3. Arah Pengembangan Wilayah Adat Meepago

Terdapat upaya strategis melalui kebijakan pembangunan kewilayah pada adat Meepago. Dengan beberapa fokus kewilayahan antara lain: (1) Pengembangan Ekonomi Wilayah, (2) Infrastruktur Strategis, (3) Perumahan & Infrastruktur Kampung, (4) Infrastruktur PON XX.

**Gambar 4.5.
Pengembangan Wilayah Adat Meepago
di Provinsi Papua Tahun 2019**



4.4.3.1. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan produksi kopi, sayur organik dan buah buahan.
2. Pengembangan kawasan industri timika (smelter dan semen) berupa masterplan
3. Pembangunan sentra pengolahan kopi di Intanjaya, Dogiai dan Deyai
4. Peningkatan SDM pelaku ekonomi lokal.

4.4.3.2. Pengembangan Infrastruktur Strategis

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pengembangan bandara internasional moses kilangin
2. Pengembangan pelabuhan Pomako
3. Pembangunan Pelabuhan Perintis Wanggar
4. Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-sipu
5. Pengerukan & Rehab Dermaga Samabusa
6. Pembangunan Terminal Type B di Nabire
7. Pengembangan bandara Kabupaten
8. Pembangunan dan peningkatan Jalan nasional, provinsi dan Kabupaten/kota
 - Peningkatan jalan Nabire-Waghete-Enarotali

- Pembangunan jalan Waghete-Timika
- Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali
- Pembangunan jalan Enarotali-Sugapa
- Pembangunan jalan Timika-kapiraya

9. Pembangunan transmisi PLTA, PLTMG, PLTS (Nabire)

4.4.3.3. Pengembangan Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pembangunan rumah layak huni (pusat, prov, kab/kota)
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat
4. Pembangunan pelabuhan/dermaga rakyat
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH)

4.4.3.4. Infrastruktur PON XX

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pembangunan Kawasan Olah Raga di kabupaten Mimika (PT.FI)

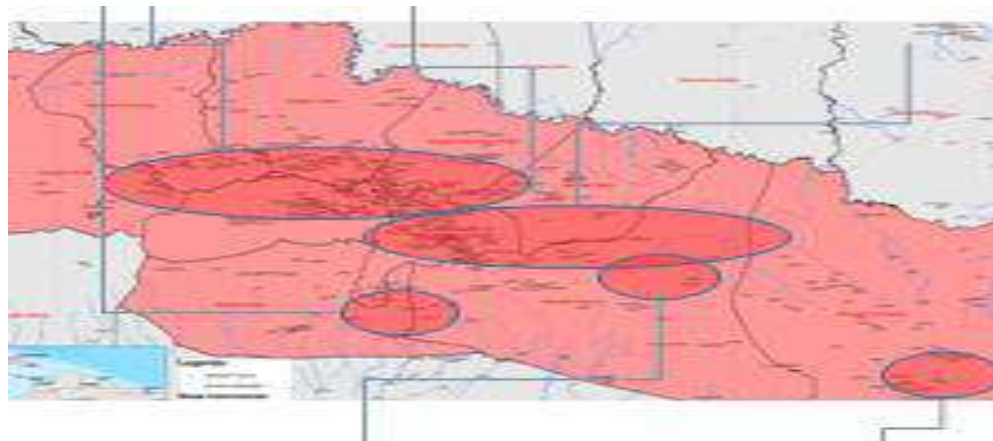
4.4.4. Arah Pengembangan Wilayah Adat Lapago

Terdapat upaya strategis melalui kebijakan pembangunan kewilayah pada adat Lapago. Dengan beberapa fokus kewilayahan antara lain: (1) Pengembangan Ekonomi Wilayah, (2) Infrastruktur Strategis, (3) Perumahan & Infrastruktur Kampung, (4) Infrastruktur PON XX.

Gambar 4.6.
Pengembangan Wilayah Adat Lapago
di Provinsi Papua Tahun 2019

Pengembangan sayur organik dan ubi jalar

Pengembangan Produksi kopi dan sentra pengolahannya



Pengembangan ternak babi

Pengembangan perikanan darat

4.4.4.1. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan produksi kopi, sayur organik dan ubi jalar.
2. Pengembangan ternak babi dan perikanan darat
3. Pembangunan sentra pengolahan kopi
4. Pengembangan pariwisata budaya
5. Peningkatan SDM pelaku ekonomi lokal.

4.4.4.2. Infrastruktur Strategis

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pengembangan bandara Wamena, Tolikara, Puncak Jaya, Yahukimo, Memberamo Tengah, Lanny Jaya
2. Pembangunan Pelabuhan sungai Kenyam & Dekai
3. Pembangunan Dermaga taria
4. Pembangunan Terminal Type B Jayawijaya
5. Pembangunan dan peningkatan Jalan nasional, provinsi dan Kabupaten/kota
 - Pembangunan Jalan Wamena-mulia
 - Pembangunan Jalan Wamena-Habema-Kenyam
 - Pembangunan Jalan Elelim-Wamena
 - Pembangunan Jalan Oksibil-Waropko
 - Pembangunan Jalan Kagime-mamit
 - Pembangunan Jalan Kobakma-Ilugua-Wolo
 - Pembangunan Jalan manda-wolu-kobakma
 - Pembangunan Jalan karubaga-kuari-panaga
 - Pembangunan Jalan kanggime-mamit
 - Pembangunan Jalan nume -tiom
 - Pembangunan Jalan elelim-wilanggo-kobakma
 - Pembangunan Jalan elelim-apalapsili-angguruk
 - Pembangunan Jalan bolakme-kelila-bokondini
6. Pembangunan transmisi PLTA/PLTMH, PLTMG, PLTS (Tolikara, Yalimo, Lanny Jaya, Jayawijaya,)
7. Pembangunan Daerah irigasi nabire
8. Pembangunan daerah irigasi tambak yahukimo
9. Pembangunan sarpras pariwisata budaya

4.4.4.3. Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pembangunan rumah layak huni (pusat, prov, kab/kota)
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat
4. Pembangunan lapangan/ bandara perintis
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH)

4.4.4.4. Infrastruktur PON XX

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pembangunan Venue PON di Jayawijaya

4.4.5. Arah Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha

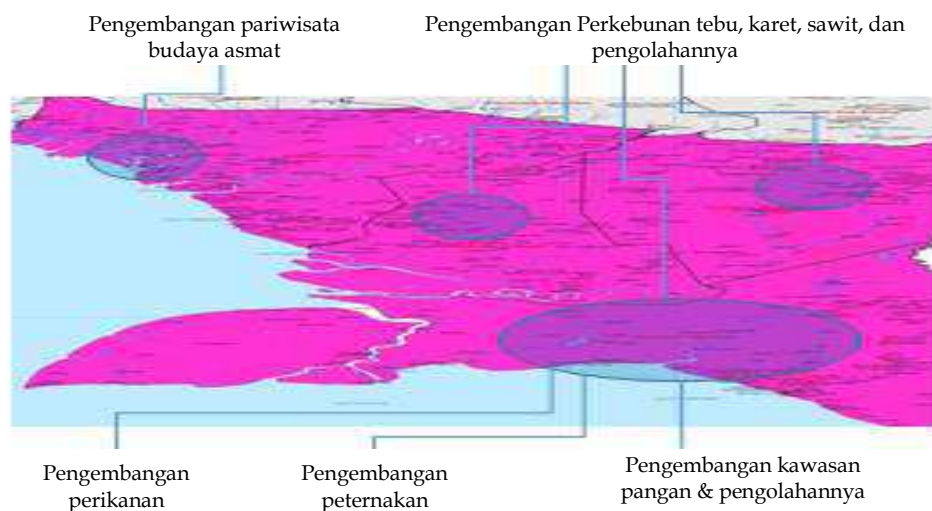
Terdapat upaya strategis melalui kebijakan pembangunan kewilayah pada adat Anim Ha. Dengan beberapa fokus kewilayah antara lain: (1) Pengembangan Ekonomi Wilayah, (2) Infrastruktur Strategis, (3) Perumahan & Infrastruktur Kampung, (4) Infrastruktur PON XX.

4.4.5.1. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pengembangan kawasan pangan Merauke
2. Pengembangan perkebunan (tebu, karet, sawit)
3. Pengembangan perikanan & peternakan
4. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan
5. Pengembangan wisata budaya asmat
6. Peningkatan SDM pelaku ekonomi lokal.

Gambar 4.7.
Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha
di Provinsi Papua Tahun 2019



4.4.5.2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Strategis

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pengembangan bandara mopah, kepi, asmat;
2. Pengembangan pelabuhan merauke, perintis boven digoel, kimam;
2. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan sungai;
3. Pembangunan dan peningkatan Jalan nasional, provinsi dan Kabupaten/kota
 - Peningkatan Jalan Merauke-Tanah Merah
 - Pembangunan Jalan Menuju KTM Salor
 - Pembangunan Jalan Okaba-Bade
 - Pembangunan Jalan Kepi-Bade
 - Pembangunan Jalan Komposit poros asmat
 - Pembangunan jalan kuprik-jagebob-erambu
 - Pembangunan jalan jagebob-bupul
 - Pembangunan jembatan kali bian
 - Pembangunan jembatan timbang
 - pembangunan jalan dalam kota merauke
4. Pengembangan irigasi rawa merauke;
5. Pengembangan Air Baku Sungai Maro;
6. Pembangunan PLTMH, PLTU, PLTS (Mappi);
7. Pembangunan sarana prasarana pariwisata.

4.4.5.3. Melanjutkan Pengembangan Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pembangunan rumah layak huni (pusat, prov, kab/kota);
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi;
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat;
4. Pembangunan pelabuhan/dermaga rakyat;
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH).

4.4.5.4. Melanjutkan Infrastuktur PON XX

Dengan Arah Program Prioritas yaitu:

1. Pembangunan Venue di Kab. Merauke;
2. Pembangunan GOR dan Stadion Merauke;
3. Pengembangan Air Baku Sungai Maro.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran “ *money follow function* kepada *money follow program*”, maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan : (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan

sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.

5.1. Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Anggarannya

Program prioritas Provinsi Papua Tahun 2019 yang telah diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 terdiri atas 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, 25 fokus prioritas, yang melaksanakan 16 (enam belas) Urusan Wajib, 6 (enam) Urusan Pilihan, dan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Satu persatu semua ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Rencana Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

| No | Prioritas Pembangunan | Bobot * | Pagu Anggaran |
|--------------|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | Peningkatan Pembangunan Manusia | 0,0431 | 125.382.510.000 |
| 2 | Peningkatan Ekonomi Daerah | 0,1247 | 362.926.666.146 |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Umum | 0,0028 | 8.285.300.000 |
| 4 | Peningkatan Infrastruktur Wilayah | 0,8294 | 2.414.086.315.104 |
| Total | | 1,0000 | 2.910.680.791.250 |

Keterangan :

* Bobot pagu anggaran dihitung dengan Metode Bayes menggunakan beberapa kriteria tertentu yang diadopsi dari Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Total pagu yang ditetapkan untuk belanja program-program prioritas pada tahun 2019 adalah sebanyak Rp. 2.910.680.791.250 atau 35,49% dari total belanja yang diproyeksikan pada tahun 2019 ini (lihat kembali Tabel 3.14). Penetapan bobot pada prioritas pembangunan dilakukan menggunakan Metode Bayes dan Borda dengan melibatkan beberapa expert yang

berkompeten dibidangnya masing-masing. Terlihat di Tabel 6.1, bobot terbesar adalah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah (82,94%), kemudian Peningkatan Ekonomi Daerah (12,47%), Peningkatan Pembangunan Manusia (4,31%), dan Peningkatan Pelayanan Umum (0,28%). Selanjutnya berdasarkan bobot dan total pagu anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program-program prioritas tersebut, ditetapkan bahwa untuk pembiayaan prioritas Peningkatan Infrastruktur Wilayah dibutuhkan dana sebesar Rp. 2.414.086.315.104, sedangkan untuk prioritas Peningkatan Ekonomi Daerah adalah sebesar Rp. 362.926.666.146, prioritas Peningkatan Pembangunan Manusia sebesar Rp. 125.382.510.000, dan terakhir untuk prioritas Peningkatan Pelayanan Umum adalah Rp. 8.285.300.000.

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan total pagu anggaran untuk pelaksanaan program-program prioritas tersebut kemudian dirinci berdasarkan urusan dan, maka selengkapnya dapat dilihat dalam pengelompokan rencana pembiayaan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2019 berikut ini:

Tabel 5.2.
Rencana Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019
Dirinci Menurut Urusan dan Bidang

| Kode | Urusan/ Bidang | Bobot | Pagu |
|----------|---|--------|-------------------|
| 1 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 0.4000 | 1,232,962,108,000 |
| 1.01 | Pendidikan | 0.1905 | 234,849,925,000 |
| 1.02 | Kesehatan | 0.1429 | 176,137,444,000 |
| 1.03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0.2857 | 352,274,888,000 |
| 1.04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0.2381 | 293,562,407,000 |
| 1.05 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 0.0952 | 117,424,963,000 |
| 1.06 | Sosial | 0.0476 | 58,712,481,000 |
| 2 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 0.3000 | 924,721,582,000 |
| 2.01 | Tenaga Kerja | 0.1273 | 117,691,838,000 |
| 2.02 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0.0727 | 67,252,479,000 |
| 2.03 | Pangan | 0.1091 | 100,878,718,000 |
| 2.04 | Lingkungan Hidup | 0.1455 | 134,504,957,000 |
| 2.05 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0.0909 | 84,065,598,000 |
| 2.06 | Perhubungan | 0.1818 | 168,131,197,000 |
| 2.07 | Komunikasi dan Informatika | 0.0364 | 33,626,239,000 |
| 2.08 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 0.1636 | 151,318,077,000 |
| 2.09 | Kebudayaan | 0.0545 | 50,439,359,000 |
| 2.10 | Kearsipan | 0.0182 | 16,813,120,000 |
| 3 | Urusan Pilihan | 0.2000 | 616,481,054,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang | Bobot | Pagu |
|--------------|---|--------------|--------------------------|
| 3.01 | Kelautan dan Perikanan | 0.1429 | 88,068,722,000 |
| 3.02 | Pariwisata | 0.0952 | 58,712,481,000 |
| 3.03 | Pertanian | 0.2381 | 146,781,203,000 |
| 3.04 | Kehutanan | 0.0476 | 29,356,241,000 |
| 3.05 | Energi dan Sumberdaya Mineral | 0.1905 | 117,424,963,000 |
| 3.06 | Perdagangan | 0.2857 | 176,137,444,000 |
| 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | 0.1000 | 308,240,527,000 |
| 4.01 | Administrasi Pemerintahan | 0.0476 | 14,678,120,000 |
| 4.02 | Pengawasan | 0.1429 | 44,034,361,000 |
| 4.03 | Perencanaan | 0.2857 | 88,068,722,000 |
| 4.04 | Keuangan | 0.2381 | 73,390,602,000 |
| 4.05 | Kepegawaian | 0.0952 | 29,356,241,000 |
| 4.06 | Penelitian dan Pengembangan | 0.1905 | 58,712,481,000 |
| Total | | 1,000 | 3,082,405,271,000 |

Keterangan :

* Bobot pagu anggaran dihitung dengan Metode Bayes menggunakan beberapa kriteria tertentu yang diadopsi dari Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat jelas kelompok urusan yang memperoleh pagu terbesar adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu sebesar Rp.1,232,962,108,000, yang terkonsentrasi untuk pembiayaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.352,274,888,000. Selanjutnya untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp.924,721,582,000, yang lebih banyak dibelanjakan untuk bidang Perhubungan yaitu Rp.168,131,197,000. Berikutnya untuk belanja program-program prioritas di Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang masing-masing adalah sebesar Rp.616,481,054,000 dan Rp.308,240,527,000.

5.2. Program Prioritas Beserta Pagu Anggarannya

Jumlah program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 107 program, dengan jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pelaksana sebanyak 38 OPD. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3.
Rencana Pembiayaan Program-Program Prioritas Tahun 2019
Dirinci Menurut OPD

| Prioritas Pembangunan/Program | Pagu Program | OPD |
|---|------------------------|--|
| PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA | 125.382.510.000 | |
| 1. Program Pendidikan Non Formal | 20.000.000.000 | Dinas Pendidikan |
| 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.000.000.000 | Dinas Pendidikan |
| 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 1.500.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 4. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit | 70.161.750.000 | Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura |
| 5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | 2.000.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 6.500.000.000 | Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 2.150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 8. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak | 750.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 9. Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan | 3.120.760.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 10. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS | 300.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 11. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | 1.000.000.000 | Dinas Olah Raga dan Pemuda |
| 12. Program Pengembangan Nilai Budaya | 400.000.000 | Dinas Kebudayaan |
| PENINGKATAN EKONOMI DAERAH | 362.926.666.146 | |
| 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | 12.060.500.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2. Program Peningkatan Diversifikasi Panganekaragaman dan Keamanan Pangan | 1.500.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 2.460.420.000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 2.287.708.120 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 1.470.960.526 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 2.400.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 668.268.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8. Program pengembangan budidaya perikanan | 2.500.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Prioritas Pembangunan/Program | Pagu Program | OPD |
|--|----------------|---------------------------------------|
| 9. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 275.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 10. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan | 105.850.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 11. Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran | 5.395.900.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 12. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 1.500.000.000 | Dinas Pariwisata |
| 13. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 13.455.000.000 | Dinas Pariwisata |
| 14. Program Pengembangan Kemitraan | 1.400.000.000 | Dinas Pariwisata |
| 15. program pengembangan kapasitas | 1.106.400.000 | Dinas Pariwisata |
| 16. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1.850.000.000 | Dinas Perkebunan |
| 17. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | 34.410.900.000 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 18. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | 5.000.000.000 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 19. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 1.150.000.000 | Dinas Perkebunan |
| 20. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 22.254.000.000 | Dinas Perkebunan |
| 21. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 2.000.000.000 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 22. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 3.600.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 23. Program peningkatan produksi hasil peternakan | 84.210.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 24. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | 950.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 25. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | 1.700.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 26. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan | 5.400.000.000 | Dinas Kehutanan |
| 27. Program rehabilitasi hutan dan lahan | 3.975.000.000 | Dinas Kehutanan |
| 28. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan | 7.550.000.000 | Dinas Kehutanan |
| 29. Program perencanaan dan pengembangan hutan | 9.100.000.000 | Dinas Kehutanan |
| 30. Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat | 500.000.000 | Dinas Kehutanan |
| 31. Program Pencegahan Deforestasi | 200.000.000 | Dinas Kehutanan |
| 32. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 2.350.000.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 33. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri | 5.900.000.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 34. Pengembangan industri kecil dan menengah | 3.500.000.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 35. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 500.000.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 36. Program Penataan Struktur Industri | 1.700.000.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| Prioritas Pembangunan/Program | Pagu Program | OPD |
|---|--------------------------|---|
| 37. Program Pengembangan data/informasi | 9.700.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 38. Program Pengembangan Kawasan | 700.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 39. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | 10.000.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 40. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 28.200.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 41. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 5.250.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 42. Program Perencanaan Sosial dan Budaya | 3.100.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 43. Program Perencanaan Tata Ruang | 300.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 44. Program Peningkatan Kinerja BUMD | 900.000.000 | Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| 45. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 25.051.209.500 | Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah |
| 46. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota | 2.194.200.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah |
| 47. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 2.800.000.000 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 48. Program Peningkatan Pendapatan Daerah | 7.072.550.000 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 49. Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan | 500.000.000 | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| PENINGKATAN PELAYANAN UMUM | 8.285.300.000 | |
| 1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | 7.227.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | 658.300.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 400.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH | 2.414.086.315.104 | |
| 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 633.450.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 28.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 18.934.295.274 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4. Program penyediaan dan pengolahan air baku | 5.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | 22.400.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 6. Program pengendalian banjir | 13.700.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 7. Peningkatan Jalan dan Jembatan | 534.600.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 8. Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 54.225.300.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Prioritas Pembangunan/Program | Pagu Program | OPD |
|--|--------------------------|---|
| 9. Program Pengembangan Perumahan | 93.661.808.875 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 1.100.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 2.400.000.000 | Dinas Pengelola Lingkungan Hidup |
| 12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 200.000.000 | Dinas Pengelola Lingkungan Hidup |
| 13. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 850.000.000 | Dinas Pengelola Lingkungan Hidup |
| 14. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan | 300.000.000 | Dinas Pengelola Lingkungan Hidup |
| 15. Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim | 350.000.000 | Dinas Pengelola Lingkungan Hidup |
| 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 375.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 17. Program peningkatan pelayanan angkutan | 1.500.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 287.362.460.955 | Dinas Perhubungan |
| 19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | 7.050.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | 100.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 700.000.000.000 | Dinas Olah Raga dan Pemuda |
| 22. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan | 150.000.000 | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral |
| 23. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan | 200.000.000 | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral |
| 24. Program Pelayanan Air Bersih | 4.177.450.000 | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral |
| TOTAL | 2.910.680.791.250 | |

5.3. Kegiatan Prioritas Beserta Pagu Anggarannya

Secara keseluruhan dan rinci, kegiatan prioritas beserta pagu anggarannya untuk RKPD tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran prioritas pembangunan.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| No | Sasaran | Indikator | Satuan Indikator | Target 2019 |
|----|--|------------------------------|------------------|-------------|
| 1 | Terwujudnya Kualitas & Akses Pendidikan Pada Semua Jalur & Jenjang | Angka Rata-rata Lama Sekolah | tahun | 6.2 |

| No | Sasaran | Indikator | Satuan Indikator | Target 2019 |
|----|---|---|------------------|-------------|
| 2 | Terwujudnya Kualitas & Akses Kesehatan & Gizi | Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.000 kalori pada keluarga | persen | 100 |
| 3 | Meningkatnya standar pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | predikat | Baik |
| 4 | Meningkatnya Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal | Opini BPK | predikat | WTP |
| 5 | Terciptanya kawasan strategis yang mendukung pembangunan daerah | Indeks Gini | Indeks | 0.34 |
| 6 | Meningkatnya perekonomian dan pengelolaan SDA secara lestari | Pertumbuhan PDRB | persen | 6.57 |
| 7 | Meningkatnya pelayanan infrastruktur | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | predikat | Baik |
| 8 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar Orang Asli Papua | Persentase pemenuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ekonomi Orang Asli Papua | persen | 80 |

6.2. Indikator Kinerja Kunci

6.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman Outcome Level OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. IKK merupakan salah satu bagian yang menjadi rujukan penilaian kinerja OPD dalam merealisasikan setiap target indikator pada masing-masing urusan yang ditargetkan pada tahun 2019 mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Pendidikan Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|--|------------------|---------------------------------|---|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan | Dinas Pendidikan | 1 Program Pendidikan luar biasa | Jumlah Lembaga Pendidikan Luar Biasa Yang Terfasilitasi | persen | 95.20 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|-------------------|---|--|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | 2 | Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan | Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan | persen | 100.00 |
| | | 3 | Program Pendidikan non formal | Meningkatnya Pendidikan Non Formal yang terfasilitasi | persen | 80.67 |
| | | 4 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Cakupan mutu pendidikan yang dikembangkan | persen | 100.00 |
| | | 5 | Program peningkatan ADEM dan ADIK | Cakupan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan | persen | 83.73 |

Melalui Tugas Pokok Dinas Pendidikan dalam kerangka membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Pendidikan, dicirikan melalui 9 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Pendidikan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Pendidikan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian fokus prioritas daerah Kualitas & Akses Pendidikan Pada Semua Jalur & Jenjang di Provinsi Papua. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Pendidikan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Searah dengan Tugas Pokok Dinas Kesehatan dalam kerangka membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Kesehatan, dicirikan melalui 15 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Kesehatan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Kesehatan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian fokus prioritas daerah Kualitas & Akses Kesehatan & Gizi. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.3.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Kesehatan Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|---|--------|-----|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | | |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan | 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | | | |
| | | | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | persen | 95 | | |
| | | | Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. | persen | 80 | | |
| | | | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | persen | 90 | | |
| | | | Cakupan pelayanan Ibu Nifas | Persen | 90 | | |
| | | | Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 80 | | |
| | | | Prioritas daerah | | | | |
| | | | Cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (PF) | persen | 65.02 | | |
| | | 2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | Dinas Kesehatan | 2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | Standar Pelayanan Minimum (SPM) | | |
| | | | | | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 90 |
| | | | | | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). | Persen | 100 |
| | | | | | Cakupan pelayanan anak balita. | Pesen | 90 |
| | | | | | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. | Persen | 100 |
| | | | | | Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan | persen | 100 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|-------------------|--|--|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | | Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat | Persen | 100 |
| | | | Penemuan Penderita Pneumonia Balita | Persen | 100 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Cakupan puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) | persen | 67.90 |
| | | | Cakupan puskesmas yang melaksanakan penjangkauan anak sekolah kelas 7 dan kelas 10 | persen | 67.90 |
| | | | Cakupan puskesmas yang melaksanakan penjangkauan anak sekolah kelas 1 | persen | 67.90 |
| | | 3 | Program upaya kesehatan masyarakat | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | |
| | | | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota | persen | 100 |
| | | | Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | Persen | 100 |
| | | | Penemuan Penderita Diare | Persen | 100 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar | persen | 100.00 |
| | | 4 | Program pengembangan obat asli Indonesia | Prioritas Daerah | |
| | | | Jumlah puskesmas yang membudidayakan tanaman obat tradisional | Lokasi | 29 |
| | | 5 | Program pengembangan lingkungan sehat | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | |
| | | | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan | Persen | 100 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|-------------------|--|--|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | | epidemiologi <24 jam | | |
| | | | Cakupan Desa Siaga Aktif | Persen | 80 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Jumlah kampung Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | Kampung | 355 |
| | | | Jumlah kampung yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Kampung | 255 |
| | | 6 | Program Pencegahan dan pengendalian penyakit menular | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | |
| | | | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit | Persen | 100 |
| | | | Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif | Persen | 100 |
| | | | Penderita DBD yang Ditangani | persen | 100 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Penderita HIV yang mendapat akses ARV | persen | 77.05 |
| | | | Jumlah kabupaten yang mempunyai peraturan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) | Kabupaten | 20 |
| | | | Jumlah kabupaten dengan angka malaria (API) < 1 per 1000 penduduk | Kabupaten | 10 |
| | | | Penemuan kasus baru TB Paru BTA + (CDR) | persen | 82.05 |
| | | 7 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | persen | 100 |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | Persen | 100 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|-------------------|---|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Jumlah Penduduk OAP miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | persen | 100 |

Penetapan beban Outcome Level OPD pada RSUD, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK RSUD pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh RSUD sebagai satu kesatuan upaya pencapaian fokus prioritas daerah Kualitas & Akses Kesehatan & Gizi. Selain itu juga penetapan IKK RSUD Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.4.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | 1 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata | Prioritas Daerah | | |
| | | | Jumlah rumah sakit yang terbangun | Unit | 1 |

Melalui uraian Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Pekerjaan Umum, dicirikan melalui 10 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai satu kesatuan upaya pencapaian fokus prioritas (1) Terciptanya konektivitas transportasi antar moda, (2) Meningkatnya jaringan irigasi, air baku, pengendalian banjir, dan abrasi pantai, (3) Tersedianya Infrastruktur Dasar (Jalan dan Jembatan Kampung, Air bersih, sanitasi, listrik dan telekomunikasi). Selain itu juga penetapan IKK Dinas Pekerjaan Umum, Tahun

2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.5.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---|----------------------|--|--|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum | 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | | Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. | Persen | 100 |
| | | | Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. | Persen | 100 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Panjang jalan yang terbangun | Km | 450 |
| | | | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | 2 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. | Persen | 60 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Persentase jalan yang dapat berfungsi | persen | 70.00 |
| | | | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | 3 Program Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat | Persen | 60 |
| | | | Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana | Persen | 60 |
| Prioritas Daerah | | | | | |
| Peningkatan kinerja Jalan/ Jembatan | persen | | 76.20 | | |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | 4 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | | Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. | Persen | 70 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Peningkatan kinerja Daerah Irigasi (DI) | persen | 75.00 |
| | | 5 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | | Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. | Persen | 100 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Proporsi Ketersedian Air Baku Bagi Masyarakat | persen | 75.00 |
| | | 6 Program Pengendalian banjir | Prioritas Daerah | | |
| | | | Cakupan daerah genangan air yang dikendalikan | persen | 100.00 |
| | | 7 Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | | Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun | Persen | 50 |
| Prioritas Daerah | | | | | |
| Panjang gorong-gorong yang terbangun | Km | | 750.00 | | |
| 8 Program Perencanaan Tata Ruang | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | | | |
| | Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana | Persen | 100 | | |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|-------------------|--|--|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | | rincinya melalui peta analog dan peta digital | | |
| | | | Terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang | Persen | 100 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Tingkat Konsistensi pengembangan kawasan strategis dengan RTRW | persen | 77.05 |
| | | 9 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | |
| | | | Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya | Persen | 100 |
| | | | Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja | Persen | 100 |
| | | | Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah | Persen | 25 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|-------------------|--|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | | kota/kawasan perkotaan. | | |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Cakupan penagwasan terhadap RTRW | persen | 67.9 |
| | | 10 | Prioritas Daerah | | |
| | | | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | persen | 71.09 |
| | | | Cakupan desa/kampung memiliki infrastruktur yang berkualitas | | |

Adanya Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Perumahan dan Permukiman, dicirikan melalui 4 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai satu kesatuan upaya pencapaian fokus prioritas (1) Terwujudnya Perumahan dan Permukiman, (2) Penyediaan Infrastruktur PON. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Perumahan dan Permukiman, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.6.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---|----------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan dan Permukiman | 1 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | | Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari | kategori | Baik |
| | | | Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai | Persen | 60 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|-------------------|---|--|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | | Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota | Persen | 50 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Proporsi Rumah Tangga yang mengakses air minum | persen | 65.20 |
| | | 2 | Program Pembangunan Gedung | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | |
| | | | Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. | persen | 100 |
| | | | Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ kota | Persen | 100 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Persentase Cabang Olahraga PON yang telah memiliki Venue | persen | 32.40 |
| | | 3 | Program Pengembangan perumahan | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | |
| | | | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. | Persen | 10 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Persentase penduduk miskin yang memperoleh Rumah Layak Huni | persen | 85.00 |
| | | 4 | Program Pemberdayaan komunitas perumahan | persen | 89.60 |

Melalui uraian Tugas Pokok melakukan pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai satu kesatuan upaya pencapaian kondisi yang aman dan damai. Selain itu juga penetapan IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.7.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|--|---|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan | Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | persen | 85.00 |

Melalui uraian Tugas Pokok menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Satuan Polisi Pamong Praja, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satu kesatuan upaya pencapaian kondisi yang aman dan damai. Selain itu juga penetapan IKK Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.8.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|----------------------------|-------------------|---|------------------------|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum | Penurunan Jumlah Kasus | persen | Menurun |

Berlandaskan Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat terisolir. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Sosial, dicirikan melalui 3 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Sosial pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Sosial sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan, (1) Menciptakan kerukunan antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya, (2) Terwujudnya Perumahan dan Permukiman. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Sosial, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.9.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Sosial Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|--|--------------|---|---|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial | Dinas Sosial | 1 Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | | Persentase (%) PMKS skala kab/ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Persen | 80 |
| | | | Persentase (%) PMKS skala kab/ kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. | Persen | 80 |
| | | | Persentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. | Persen | 80 |
| | | | Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan | Persen | 60 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|-------------------|--|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | | kesejahteraan sosial | | |
| | | | Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Persen | 40 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Menurunnya Prosentase Kemiskinan di Provinsi Papua | persen | 27.09 |
| | | 2 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | persen | 65.70 |
| | | 3 | Program Pengembangan Komunitas Adat Terpencil | persen | 78.80 |

6.2.2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Melalui uraian Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Tenaga Kerja, dicirikan melalui 2 Indikator Kunci Kegiatan.

Tabel 6.10.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---|--------------------|-------------------|---|--|-------------|---------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | 1 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Tingkat Kesempatan Kerja | persen | 100.00 |
| | | 2 | Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja | Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | persen | 7281.50 |

Penetapan IKK Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan, (1) Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan,

peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari, (2) Berkembangnya industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri, pemasaran, distribusi dan penguatan modal usaha. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Tenaga Kerja, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.11.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---|--|--|--|--------|--|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 1 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | | Cakupan peserta KB Aktif | Persen | 70 |
| | | Prioritas Daerah | | | Meningkatnya kehidupan aman, damai dan sejahtera bagi perempuan dan anak |
| | | 2 Program peningkatan penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS | Cakupan Penanggulangan Penderita Penyakit Narkoba, HMS, dan HIV/AIDS | persen | 80.00 |

Tugas Pokok melakukan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dicirikan melalui 2 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan, (1) Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari, (2) Berkembangnya industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri, pemasaran, distribusi dan penguatan modal usaha. Selain itu juga penetapan IKK Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.12.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup | Badan Pengelola Lingkungan Hidup | 1 | Program Perlindungan dan konservasi SDA | Cakupan wilayah konservasi yang dilindungi | persen | 95.20 |
| | | 2 | Program Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan SDA | Luas wilayah yang mendapatkan rehabilitasi | persen | 8373.00 |
| | | 3 | Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | | | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. | Persen | 20 |
| | | | | Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. | Persen | 70 |
| | | | | Prioritas Daerah | | |
| Cakupan masyarakat yang memperoleh pelayanan PPID SDA/LH | persen | 90.78 | | | | |

Dengan adanya uraian Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup, dicirikan melalui 3 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Badan Pengelola Lingkungan Hidup pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Pengelolaan Lingkungan dan Penangan Bencana Alam. Selain itu juga penetapan IKK Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja

pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.13.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Badan Pengelola Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|--|--------------------------------|--|---|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup | Badan Pengelola Bencana Daerah | 1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | |
| | | | Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persen | 80 |
| | | | Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Persen | 80 |
| | | | Prioritas Daerah | | |
| | | | Cakupan wilayah siaga yang dikembangkan | persen | 42.00% |

Berdasarkan Tugas Pokok menyelenggarakan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Badan Pengelola Bencana Daerah, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Badan Pengelola Bencana Daerah pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Badan Pengelola Bencana Daerah sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Pengelolaan Lingkungan dan Penangan Bencana Alam. Selain itu juga penetapan IKK Badan Pengelola Bencana Daerah, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.14.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua
Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|---|-------------------|---|----------------------------------|---------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 1 | Program peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan | Persentase Desa/ Kampung mandiri | Kampung | 176.00 |

Sesuai Dengan Tugas Pokok menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kampung, kesejahteraan keluarg. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan, Menciptakan kerukunan antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.15.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|---|-------------------|-------------------|---|--|---------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan | Dinas Perhubungan | 1 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya regulasi dan fasilitas yang mendorong pembangunan yang tepat sasaran | Dokumen | 10.00 |
| | | | | Terbangunnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Unit | 1 |
| | | 2 | Program Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ | Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi/ dipelihara | Unit | 17 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|--|--|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | 3 Program Pembangunan Sarpas Perhubungan | Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan | Unit | 29 |

Berdasarkan Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Perhubungan, dicirikan melalui 4 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Perhubungan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Perhubungan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Terciptanya konektivitas transportasi antar moda. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Perhubungan, Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.16
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Papua
Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|--|--|--|--|----------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi Dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 1 Program Pengembangan Teknologi Informasi | Tingkat pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi | persen | 60.00 |
| | | 2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi | Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami IT | Kelompok | 85 |
| | | | Persentase SDM Aparatur yang memahami IT | persen | 60 |

Sesuai dengan Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dicirikan melalui 3 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya standar pelayanan publik. Selain itu juga penetapan IKK Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.17.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua
Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---|--|-------------------|--|--|-------------|-------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 | Program industri kecil dan menengah dan pengembangan kewirausahaan | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru | persen | 7.89 |
| | | 2 | Program penciptaan usaha kecil menengah yang kondusif | Pertumbuhan UMKM | persen | 12.89 |
| | | 3 | Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komparatif dan UKM | Cakupan UMKM yang dikembangkan | persen | 100 |
| | | 4 | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT) | persen | 31 |

Berdasarkan Tugas Pokok menyelenggarakan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dicirikan melalui 4 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas (1) Berkembangnya perekonomian rakyat, Kepariwisata distribusi industri, pengolahan, perdagangan serta pemasaran, (2) Berkembangnya industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, pemasaran, distribusi dan penguatan modal usaha. Selain itu penetapan IKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.18.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|---|--|-------------------|---|---|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | Program peningkatan iklim investasi dan relasi investasi daerah | Persentase meningkatnya rencana nilai investasi Perusahaan PMA dan PMDN | persen | 3.00 |

Melalui Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya penerimaan daerah, kinerja BUMD/BUMN serta investasi, KEBIJAKAN Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.19.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan | Dinas Kebudayaan | 1 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah Pengelolaan Kekayaan Budaya yang dilakukan | persen | 100 |
| | | 2 | Program Pengembangan Nilai Budaya | jumlah nilai-nilai budaya yang dikembangkan | persen | 100 |

Dengan ditetapkannya Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Kebudayaan, dicirikan melalui 2 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Kebudayaan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Kebudayaan sebagai

satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan, Menciptakan kerukunan antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Kebudayaan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.20.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---|----------------------------|-------------------|---|--|-------------|-------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemuda & Olahraga | Dinas Olah Raga dan Pemuda | 1 | Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga | Persentase Fasilitas Olahraga yang berfungsi | persen | 90.78 |
| | | | | Proporsi Venue yang telah dikembangkan | persen | 32.00 |
| | | 2 | Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi | persen | 100 |

Merujuk pada Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Olah Raga dan Pemuda, dicirikan melalui 3 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Olah Raga dan Pemuda pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Olah Raga dan Pemuda sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Penyediaan Infrastruktur PON. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Olah Raga dan Pemuda Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.21.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 1 | Program Pendidikan non formal | Menurunnya jumlah buta aksara | persen | 34.15 |

Dengan adanya Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mampu mendukung upaya pencapaian Fokus Prioritas Terwujudnya Kualitas & Akses Pendidikan Pada Semua Jalur & Jenjang. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

6.2.3. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pilihan

Dengan adanya Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Kelautan dan Perikanan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Perikanan, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan.

Tabel 6.22
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|-----------------|-------------------|---|---|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan | 1 | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | Tingkat produktifitas bidang perikanan dan kelautan | persen | 64.69 |

Penetapan IKK Dinas Perikanan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Perikanan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Perikanan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.23
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pilihan Bidang Pariwisata | Dinas Pariwisata & | 1 | Program penataan struktur industri | Tertatanya struktur industri | persen | 85 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--|--|-------------|-----|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| | Ekonomi Kreatif | 2 | Program pengembangan sentra-sentra potensial | Jumlah kawasan potensial yang dikembangkan | Kawasan | 15 |
| | | 3 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata | Kali | 1.8 |
| | | 4 | Program pengembangan destinasi pariwisata | Terlaksanannya Pengembangan Destinasi Pariwisata | Destinasi | 5 |
| | | 5 | Program pengembangan kemitraan | Terlaksanannya pengembangan kemitraan | Mitra | 6 |

Merujuk pada uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Kelautan dan Perikanan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, dicirikan melalui 5 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Perikanan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.24
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|---|--|-------------|-------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Pilihan Bidang Kehutanan | Dinas Kehutanan | 1 | Program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan pengelolaan SDA secara lestari | Tingkat produktifitas bidang kehutanan | persen | 83.22 |

Dengan memperhatikan pada uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kehutanan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Kehutanan, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Kehutanan pada tahun 2019 merupakan sebuah

pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Kehutanan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Kehutanan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.25
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------------------------|------------------|---|---|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pilihan Bidang Pertanian | Dinas Perkebunan | 1 Program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan pengelolaan SDA secara lestari | Tingkat produktifitas bidang perkebunan | persen | 78.80 |

Dengan memperhatikan pada uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pertanian. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Perkebunan, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Perkebunan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Perkebunan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Perkebunan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.26
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pilihan Bidang Pertanian | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1 Program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan pengelolaan SDA secara lestari | Tingkat produktifitas bidang peternakan | persen | 60.61 |

Dengan memperhatikan pada uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Bidang Pertanian. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.27
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|--|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pilihan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral | 1 | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan | Jumlah energi terbarukan yang dimanfaatkan | Unit | 30 |

Dengan memperhatikan pada uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Terciptanya produksi pertanian kehutanan, perikanan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengelolaan SDA secara lestari. Selain itu juga penetapan IKK Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Penetapan beban Outcome Level OPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dicirikan melalui 7 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas (1)

Berkembangnya perekonomian rakyat, Kepariwisata distribusi industri, pengolahan, perdagangan serta pemasaran, (2) Berkembangnya industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, pemasaran, distribusi dan penguatan modal usaha.

Tabel 6.28
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|---|---|---|--|---|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pilihan Bidang Perdagangan & Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1 | Program Peningkatan dan pengembangan ekspor | Prosentase Peningkatan Pengembangan Ekspor | persen | 80.20 |
| | | 2 | Program peningkatan efisiensi ekspor | Pertumbuhan Nilai Ekspor | persen | 4.89 |
| | | 3 | Program pembinaan pedagang kakilima | Cakupan pembinaan pedagang kakilima | persen | 77.05 |
| | | 4 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Tingkat produktifitas kualitas hasil produk industri kecil dan menengah | persen | 7.89 |
| | | | | persentase IKM yang berkualitas | persen | 100 |
| | | 5 | Program peningkatan kemampuan teknologi industry | Persentase komoditas unggulan yang menggunakan teknologi | persen | 70.00 |
| 6 | Program pengembangan system pendukung bagi usaha kecil menengah | Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | persen | 35.00 | | |

Selain itu juga penetapan IKK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

6.2.4. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan kegiatan administrasi, program, pengembangan, mutasi, dan penatausahaan aparatur Daerah. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Badan Kepegawaian Daerah, dicirikan melalui 5 Indikator Kunci Kegiatan.

Tabel 6.29
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|---|-------------|--------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian | Badan Kepegawaian Daerah | 1 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Orang | 120.00 |
| | | 2 | Program Pengembangan Data dan Informasi | Kabupaten yang melaporkan rutin melalui SIKNAS/Komdat | Kabupaten | 22 |
| | | 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persen | 100 |
| | | 4 | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persen | 100 |
| | | 5 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Orang | 250 |

Penetapan IKK Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Terwujudnya Sistem Kepegawaian dan Pendayagunaan aparatur. Selain itu juga penetapan IKK Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.30
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|--|--|-------------|-------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan | Badan Penelitian dan Pengembangan | 1 | Program peningkatan mutu penelitian dan pengembangan | Rasio Mutu Penelitian dan Pengembangan | persen | 90.00 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Badan Penelitian dan Pengembangan, dicirikan melalui 1

Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Terciptanya Kawasan strategis yang mendukung perekonomian daerah. Selain itu juga penetapan IKK Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.31
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 | Program peningkatan pendapatan daerah | Meningkatnya Pendapatan Daerah | Rupiah | 1.732.270.783.936 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya penerimaan daerah, kinerja BUMD/BUMN serta investasi, KEBIJAKAN Pengelolan Keuangan Daerah. Selain itu juga penetapan IKK Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.32
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|---|-------------------|--|---|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan | Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah | 1 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | persen | 98.00 |
| | | 2 | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan | Persentase meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan | persen | 90.00 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|--|--|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | keuangan kabupaten/kota | keuangan kabupaten/kota | | |
| | | | Persentase meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota | persen | 90.00 |
| | | | Persentase meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota | persen | 90.00 |
| | | 3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | persen | 95.00 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, dicirikan melalui 5 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Badan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas (1) Meningkatnya penerimaan daerah, kinerja BUMD/BUMN serta investasi, KEBIJAKAN Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) Menguatnya Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan daerah, Pengendalian dan Evaluasi serta tata kelola Asset. Selain itu juga penetapan IKK Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.33
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Jumlah wilayah stategis dan cepat tumbuh di kembangkan | Kabupaten | 15 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|-----------------------|-----|--|---|----------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Bidang Perencanaan | | 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan | Dokumen | 3 |
| | | | Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan | Kegiatan | 2 |
| | | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan | Dokumen | 3 |
| | | | Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan | Kegiatan | 3 |
| | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | Dokumen | 10 |
| | | | Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan | Kegiatan | 3 |
| | | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan | Dokumen | 3 |
| | | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan | Dokumen | 3 |

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|---------------|-----|-------------------|---|---|----------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| | | | | Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan | Kegiatan | 2 |
| | | 3 | Program Pengembangan wilayah cepat tumbuh | Cakupan wilayah strategis yang dikembangkan | persen | 79.45% |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dicirikan melalui 11 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas (1) Terciptanya Kawasan strategis yang mendukung perekonomian daerah, (2) Menguatnya Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan daerah, Pengendalian dan Evaluasi serta tata kelola Asset, (3) Pengembangan Kawasan Strategis dan Penataan Ruang. Selain itu juga penetapan IKK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.34.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|--|-------------|-------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan | Inspektorat | 1 | Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan | Jumlah tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan | Rekomendasi | 4 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Inspektorat, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Inspektorat pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang

sepatutnya dipatuhi oleh Inspektorat sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas (1) Menguatnya Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan daerah, Pengendalian dan Evaluasi serta tata kelola Asset, (2) Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal. Selain itu juga penetapan IKK Inspektorat Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.35.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---|-------------------------|-------------------|--|--|-------------|-------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum | Biro Humas dan Protokol | 1 | Program Peningkatan kapasitas SDM pelayan publik | Persentase ASN yang mampu menciptakan Inovasi Pelayanan Publik | persen | 70.20 |
| | | 2 | Program Transparansi sistem pelayanan publik | Tingkat Transparansi Pelayanan Publik | persen | 73.99 |
| | | 3 | Program Peningkatan sarana dan prasarana sistem pelayanan publik | Cakupan Pelayanan Publik yang berkualitas | persen | 100 |
| | | 4 | Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | Meningkatnya Komunikasi dan Informasi melalui Media Massa | Media | 31 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Biro Humas dan Protokol, dicirikan melalui 4 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Biro Humas dan Protokol pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Biro Humas dan Protokol sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatkan standar pelayanan publik. Selain itu juga penetapan IKK Biro Humas dan Protokol Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.36.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Biro Organisasi Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---|-----------------|--|---|-----------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum | Biro Organisasi | 1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Cakupan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Kegiatan | 1 |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Otonomi Khusus yang terdata | Kabupaten | 29 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Biro Organisasi, dicirikan melalui 2 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Biro Organisasi pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Biro Organisasi sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya standar pelayanan publik. Selain itu juga penetapan IKK Biro Organisasi Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.37.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | |
|---|--|---|----------------------|--------|-------------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum | Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah | Jumlah MoU Kerjasama | Mou | 10 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya standar pelayanan publik.

Tabel 6.38.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---|------------------------|-------------------|--|--|-------------|-----|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum | Biro Tata Pemerintahan | 1 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Cakupan Penataan dan pembinaan bagi daerah otonom baru | persen | 100 |
| | | 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen | Dokumen | 6 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Biro Tata Pemerintahan, dicirikan melalui 2 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Biro Tata Pemerintahan pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Biro Tata Pemerintahan sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya standar pelayanan publik. Selain itu juga penetapan IKK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.39.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri
Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | Indikator Kinerja | | | |
|---|--|-------------------|--|--|-------------|-------|
| | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 | |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum | Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1 | Program Pengembangan wilayah perbatasan | Cakupan wilayah perbatasan yang dikembangkan | persen | 65.02 |
| | | 2 | Program Kerjasama Pembangunan | Jumlah jalinan kerjasama (MoU) | MoU | 10 |
| | | 3 | Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas | Cakupan Penataan Pembangunan di wilayah perbatasan | persen | 100 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, dicirikan melalui 3

Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya standar pelayanan publik. Selain itu juga penetapan IKK Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.40.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Biro Hukum Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|---|------------|-------------------|---|--|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum | Biro Hukum | 1 | Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda | Prosentase Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda | persen | 100.00 |
| | | 2 | Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan | Organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif | SKPD | 51 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Biro Hukum, dicirikan melalui 2 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Biro Hukum pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Biro Hukum sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya standar pelayanan publik. Selain itu juga penetapan IKK Biro Hukum Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.41.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|---|--------------------|-------------------|---|--|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum | Sekretariat Daerah | 1 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | Meningkatnya peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah | persen | 100 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Biro Hukum, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Sekretariat Daerah pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Sekretariat Daerah sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya standar pelayanan publik. Selain itu juga penetapan IKK Sekretariat Daerah Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.42.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|---|---|-------------------|--|---|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua | 1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna | persen | 100 |

Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan. Penetapan IKK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya standar pelayanan publik. Selain itu juga penetapan IKK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang. Dengan uraian Tugas Pokok menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum. Maka Penetapan beban Outcome Level OPD pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua, dicirikan melalui 1 Indikator Kunci Kegiatan.

Penetapan IKK Sekretariat Majelis Rakyat Papua pada tahun 2019 merupakan sebuah pedoman/acuan yang sepatutnya dipatuhi oleh Sekretariat Majelis Rakyat Papua sebagai satu kesatuan upaya pencapaian Fokus Prioritas Meningkatnya standar pelayanan publik. Selain itu juga penetapan

IKK Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tahun 2019 merupakan dasar manajemen penilaian kinerja pelaksanaan setiap urusan pembangunan yang di bebaskan dimasa yang akan datang.

Tabel 6.43.
Indikator Kinerja Kunci Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat Majelis Rakyat Papua
Provinsi Papua Tahun 2019

| Urusan/Bidang | OPD | Program Prioritas | | Indikator Kinerja | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---|--|--------|-------------|
| | | | | Deskripsi | Satuan | Target 2019 |
| Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan Umum | Sekretariat Majelis Rakyat Papua | 1 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP | Persentase Rancangan Perdasi dan Perdasus yang ditindaklanjuti | persen | 100 |

BAB VII

P E N U T U P

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2019. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2019, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD Provinsi Papua dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2019, RKPD Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Papua ;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA-SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2019;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum SKPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;

5. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Papua, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2019 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2019, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPEDA Provinsi Papua ;
7. RKPD Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 ini dengan sebaik-baiknya.

Jayapura, 2018

Plt. Gubernur Papua
